LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2022

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2022

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

Kabupaten Bantul

Provinsi D.I. Yogyakarta

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Nomor: B/100.1.6/00001

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Bantul, 27 Maret 2023

INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL,

HERMAWAN SETIAJI, S IP,MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2022 dengan baik dan lancar serta menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Nomor 100.2.2.7/ 9136/ OTDA tanggal 19 Desember 2022, serta Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kami harapkan masukan atau saran serta koreksi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan yang terkait, demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 serta menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul supaya memacu kinerja ke depan untuk lebih optimal..

Bantul, 28 Maret 2023

BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL V
DAFTAR GAMBAR XIII
DAFTAR GRAFIK XV
1 BAB I 1
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1. Penjelasan Umum 1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 30
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 148
2 BAB II 177
2.1. Capaian Kinerja Makro 177
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia 177
2.1.2. Angka Kemiskinan 182
2.1.3. Angka Pengangguran 184
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi 186
2.1.5. Pendapatan Per Kapita 189
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio 191
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 194
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran 194
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil 317
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 354
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 361
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 361
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja 363
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 365
2.3.4. Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 369
2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional 372
2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan. 373

2.3.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 497
2.3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai 512
3 BAB III 521
4 BAB IV 523
4.1. Urusan Pendidikan 523
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar 523
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 524
4.1.3. Realisasi 526
4.1.4. Alokasi Anggaran 528
4.1.5. Dukungan Personil 532
4.1.6. Permasalahan dan Solusi 533
4.2. Urusan Kesehatan 536
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar 536
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 539
4.2.3. Realisasi 546
4.2.4. Alokasi Anggaran 559
4.2.5. Dukungan Personil 563
4.2.6. Permasalahan dan Solusi 564
4.3. Urusan Pekerjaan Umum 567
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar 567
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 568
4.3.3. Realisasi 568
4.3.4. Alokasi Anggaran 572
4.3.5. Dukungan Personil 575
4.3.6. Permasalahan dan Solusi 576
4.4. Urusan Perumahan Rakyat 578
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar 578
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 578
4.4.3. Realisasi 579
4.4.4. Alokasi Anggaran 581
4.4.5. Dukungan Personil 583
4.4.6. Permasalahan dan Solusi 584

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat 586
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar 586
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 588
4.5.3. Realisasi 590
4.5.4. Alokasi Anggaran 595
4.5.5. Dukungan Personil 601
4.5.6. Permasalahan dan Solusi 603
4.6. Urusan Sosial 605
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar 605
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 608
4.6.3. Realisasi 612
4.6.4. Alokasi Anggaran 618
4.6.5. Dukungan Personil 622
4.6.6. Permasalahan dan Solusi 625
4.7. Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 627
4.7.1. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pendidikan 627
4.7.2. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Kesehatan 628
4.7.3. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum 630
4.7.4. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat 632
4.7.5. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 633
4.7.6. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Sosial 638
5 BAB V 643
6 LAMPIRAN 645

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Luas daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul tahun 2022 5

Tabel 1.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 7

Tabel 1.1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 9

Tabel 1.1.4 Daftar Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul 10

Tabel 1.1.5 Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah per Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 14

Tabel 1.1.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (sebelum dilakukan audit BPK) 233

Tabel 1.1.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (sebelum dilakukan audit BPK RI) 25

Tabel 1.1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (sebelum dilakukan audit BPK RI) 29

Tabel 1.1.9 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Bantul..... 37

Tabel 1.1.10 Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 39

Tabel 1.1.11 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 RPJMD Tahun 2021–2026 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 41

Tabel 1.1.12 Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2022 berdasarkan RKPD Perubahan tahun 2022 Peraturan Bupati Bantul No 66 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 94

Tabel 1.1.13 Program Pelayanan Dasar RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 dalam Pemenuhan SPM 152

Tabel 1.1.14 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022..... 171

Tabel 1.1.15 Arah Kebijakan Kabupaten Bantul Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Untuk Tahun 2022 dalam Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun 2022 173

Tabel 1.1.16 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022..... 176

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Makro 177

Tabel 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bantul menurut Komponen, 2018-2022 . 181

Tabel 2.1.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2017 - 2021 183

Tabel 2.1.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2018- 2021 186

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022 188

Tabel 2.1.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2022 190

Tabel 2.2.1 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2022 194

Tabel 2.2.2 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Bantul Tahun 2022 317

Tabel 2.2.3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan Tahun 2022 354

Tabel 2.3.1 Matriks Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2022 berdasarkan RKPD Kabupaten Bantul Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Bantul Tahun Anggaran 2022 tanggal 7 Januari 2022 362

Tabel 2.3.2 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2022 363

Tabel 2.3.3 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 365

Tabel 2.3.4 Matriks Capaian Kinerja Indikator Utama tahun 2022 dibandingkan dengan Target RPJMD 2021-2026 3699

Tabel 2.3.5 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 terhadap Capaian pada tingkat Nasional 3722

Tabel 2.3.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 3733

Tabel 2.3.7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 3744

Tabel 2.3.8 Matriks Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel 3766

Tabel 2.3.9 Perkembangangan Opini Pemeriksaan BPKatas Laporan Keuangan Tahun 2012 – Tahun 2022 3833

Tabel 2.3.10 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota Se-DIY 3833

Tabel 2.3.11 Tabel Permasalahan dan Solusi pada sasaran 1 3855

Tabel 2.3.12 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 3977
Tabel 2.3.13 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 3988
Tabel 2.3.14 Matriks Data Responden tanggal 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022 4055
Tabel 2.3.15 Matriks Rekapitulasi IKM Kabupaten Bantul per Unsur periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 4077
Tabel 2.3.16 Matriks Rekapitulasi Data Pembanding IKM Kabupaten Bantul Per Unsur pada periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 410
Tabel 2.3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi 4111
Tabel 2.3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerataan Dan Daya Saing Pendidikan 421
Tabel 2.3.19 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 423
Tabel 2.3.20 Tabel Jumlah dan Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 426
Tabel 2.3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah 428
Tabel 2.3.22 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis 433
Tabel 2.3.23 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul 437
Tabel 2.3.24 Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi D.I.Y, dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I.Y Tahun 2021 - 2022 440
Tabel 2.3.25 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas 448
Tabel 2.3.26 Data Kualitas Infrastruktur Tahun 2021 449
Tabel 2.3.27 Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2022 451
Tabel 2.3.28 Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 453
Tabel 2.3.29 Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022 453
Tabel 2.3.30 Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2022 4555
Tabel 2.3.31 Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2022 456
Tabel 2.3.32 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul 461
Tabel 2.3.33 Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 462

Tabel 2.3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas....467

Tabel 2.3.35 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2019 - 2022....469

Tabel 2.3.36 Titik lokasi pemantauan udara untuk penghitungan IKU (Indeks Kualitas Udara) ...470

Tabel 2.3.37 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2019 - 2022....471

Tabel 2.3.38 Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2019 - 2022....472

Tabel 2.3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana ..475

Tabel 2.3.40 Permasalahan, Solusi dan Strategi dalam pencapaian Sasaran Daerah Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tahun 2022 477

Tabel 2.3.41 Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)....478

Tabel 2.3.42 Jumlah Pemerlu Pelayana Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 - 2022....479

Tabel 2.3.43 Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 482

Tabel 2.3.44 Rekapitulasi Data Penduduk Miskin Ekstrim per Kapanewon pada Tahun 2022 di Kabupaten Bantul....483

Tabel 2.3.45 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak ..486

Tabel 2.3.46 Target dan Capaian KLA Kabupaten Bantul Tahun 2022 490

Tabel 2.3.47 Target dan Capaian Kategori KLA Kabupaten/ Kota se D.I.Yogyakarta Tahun 2021/ 2022....490

Tabel 2.3.48 Jumlah Program per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul yang didukung. 498

Tabel 2.3.49 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....500

Tabel 2.3.50 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 512

Tabel 2.3.51 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 513

Tabel 2.3.52 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2022 514

Tabel 2.3.53 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2022.....5177

Tabel 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pendidikan....523

Tabel 4.1.2. Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 524

Tabel 4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 526

Tabel 4.1.4 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 529

Tabel 4.1.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 530

Tabel 4.1.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 532

Tabel 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Kesehatan 536

Tabel 4.2.2 Rumus perhitungan proyeksi target sasaran per jenis layanan dasar 539

Tabel 4.2.3 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 Berdasarkan Hasil Proyeksi 540

Tabel 4.2.4 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 546

Tabel 4.2.5 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 560

Tabel 4.2.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022Sasaran/Penerima Layanan Per Jenis Layanan Kesehatan yang Dilaksanakan Oleh Puskesmas) 560

Tabel 4.2.7 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 563

Tabel 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum 567

Tabel 4.3.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 568

Tabel 4.3.3 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 572

Tabel 4.3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 573

Tabel 4.3.5 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2022 575

Tabel 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat 578

Tabel 4.4.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 578

Tabel 4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 579

Tabel 4.4.4 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 582

Tabel 4.4.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 583

Tabel 4.4.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2022 584

Tabel 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar Per Sub Urusan dan Mutu Pelayanan Dasar Per Sub Urusan Pada SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 586

Tabel 4.5.2 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 588

Tabel 4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 590

Tabel 4.5.4 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 596

Tabel 4.5.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 597

Tabel 4.5.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum Pada Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2022 602

Tabel 4.5.7 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan dan Pemadam Kebakaran Pada BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2022 602

Tabel 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Sosial 605

Tabel 4.6.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 608

Tabel 4.6.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 612

Tabel 4.6.4 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 619

Tabel 4.6.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 619

Tabel 4.6.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 6233

Tabel 4.6.7 Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 625

Tabel 4.7.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 627

Tabel 4.7.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 628

Tabel 4.7.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 630

Tabel 4.7.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 632

Tabel 4.7.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 633

Tabel 4.7.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 638

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (*Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010 – 2030, Bappeda*) 3

Gambar 1.1.2 Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul. *(Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; BPS; data diolah)* 4

Gambar 2.3.1 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2021 dari BPK , Tanggal 21 April 2022 3811

Gambar 2.3.2 Penyerahan Penghargaan kategori Penghargaan WTP minimal 10 kali Berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Bantul 3822

Gambar 2.3.3 QR CODE layanan untuk E-survei IKM terintegrasi 4033

Gambar 2.3.4 Tangkapan Layar E-Survei IKM di official website 4033

Gambar 2.3.5 Proses Bisnis Portal E-Survey IKM Terintegrasi 4044

Gambar 2.3.6 Dash Board Portal www.skm.bantulkab.go.id 4044

Gambar 2.3.7 Gambar Dokumentasi Kegiatan Survey secara langsung/ wawancara sebagai data pembanding periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 41010

Gambar 2.3.8 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, 2022 4211

Gambar 2.3.9 Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Desa Pamor Budaya di Kalurahan Gilangharjo (*Sumber : Dinas Kebudayaan, 2023*) 4311

Gambar 2.3.10 Dokumentasi Kegiatan SatpolPP Kab. Bantul dalam mencapai Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis 4355

Gambar 2.3.11 Dokumentasi Peresmian Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Belik dan Peningkatan Ruas Jalan Jejeran – Sudimoro di Kapanewon Pleret oleh Bupati Bantul 45050

Gambar 2.3.12 Peresmian Rumah Dinas Wakil Bupati Bantul oleh Bupati Bantul 4522

Gambar 2.3.13 Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022 4544

Gambar 2.3.14 Salah satu rusunawa di Kabupaten Bantul 4588

Gambar 2.3.15 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2022 4733

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 *(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, 2023. Data diolah)* 6

Grafik 1.1.2 Persentase Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 dalam Dokumen KUA Tahun 2022 *(Sumber : Dokumen KUA 2022, BPKPAD; Data Diolah)* 172

Grafik 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : BPS : Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; (data diolah)*) 179

Grafik 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023l (data diolah))* 180

Grafik 2.1.3 Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/ Kota dalam provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS DIY: Provinsi D.I.Y dalam Angka 2023; Data Diolah).* 184

Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 *(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; Data Diolah)* 185

Grafik 2.1.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2022 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta *(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; Data diolah)*..... 187

Grafik 2.1.6 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS Kabupaten Bantul; Surat BPS Bantul No. B-105/ 34021/ KA.100/ 02/ 2023 tanggal 22 Februari 2023,; Data diolah)* 192

Grafik 2.3.1 Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 365

Grafik 2.3.2 Persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 367

Grafik 2.3.3 Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2022 terhadap Target Akhir Tahun RPJMD 2021 - 2026 3711

Grafik 2.3.4 Piagam Penghargaaan Atas Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3788

Grafik 2.3.5 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2018 - 2022*(Sumber : BPS 2023)* 4122

Grafik 2.3.6 Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS D.I.Yogyakarta; 2023)* 4133

Grafik 2.3.7 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta dan 4 Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi Tahun 2018 – 2022.....4222

Grafik 2.3.8 Target Desa Pamor Budaya periode RPJMD 2021 – 2026 dan Realisasi pada Tahun 2022. (*Sumber Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, 2023*).....430

Grafik 2.3.9 Grafik Indeks Gini Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakartapada periode 5 tahun terakhir dari tahun 2018 – 2022.(*Sumber : BPS Kab. Bantul, 2023)*.....438

Grafik 2.3.10 Distribusi Penggunaan Lahan Permukimani Kabupaten Bantul Tahun 2022 (*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023*).....463

Grafik 2.3.11 Distribusi Penggunaaan Lahan Sawah Irigasi di Kabupaten Bantul.....463

Grafik 2.3.12 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022.....464

Grafik 2.3.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup,2023*).....468

Grafik 2.3.14 Grafik Perkembangan dan Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2023*).....476

Grafik 2.3.15 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : BPS, 2023-https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html)*.487

Grafik 2.3.16 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2017 – 2021 (*Sumber : BPS Yogyakarta, 2023-)*.....488

Grafik 4.1.1 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022.....528

Grafik 4.2.1 Perbandingan Realisasi Sasaran dan Sasaran Riil Indikator Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021.....555

Grafik 4.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022.....571

Grafik 4.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022.....581

Grafik 4.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022.....594

Grafik 4.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Sosial Tahun 2022.....618

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah, bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunungkidul. Kontrak Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif

1.1.1. Penjelasan Umum

Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal penetapan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bantul (20 Juli) diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Selain itu, tanggal 20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul, mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan Stadsgemente Ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi : Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (**Gambar 1.1.1**) dengan batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Perbatasan wilayah administrastif dengan kabupaten lain telah terpasang pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah. Berikut peraturan perundangan tentang penetapan batas wilayah administratif Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah

Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

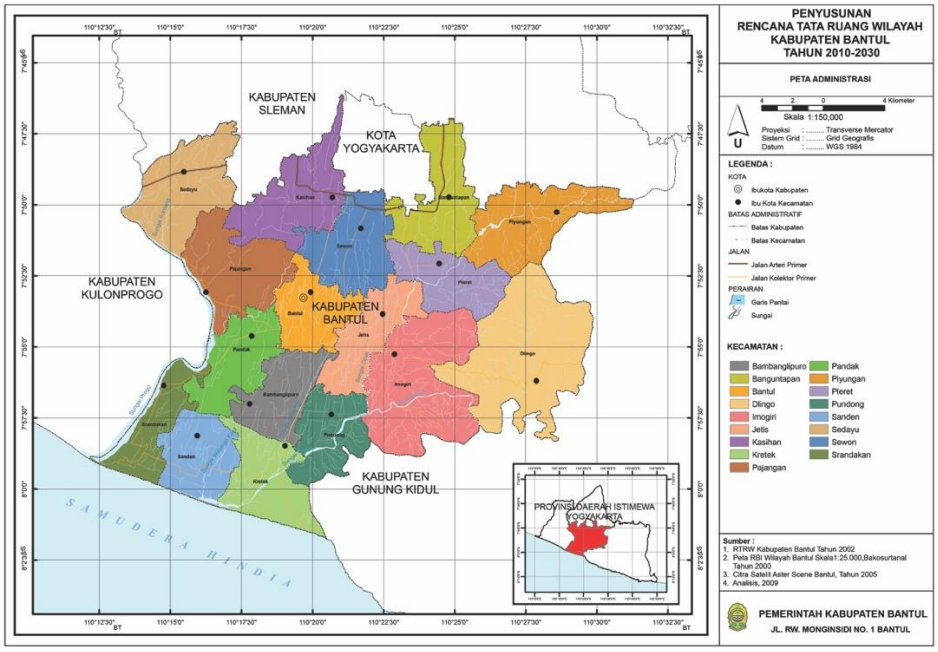

Gambar 1.1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (*Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010 – 2030, Bappeda*)

Permendagri penetapan batas tersebut masih perlu untuk diperbaharui. Pilar yang telah terpasang sebagai rangkaian tahap penegasan batas yang telah ditetapkan dalam permendagri masih relatif jauh jarak antar pilarnya sehingga belum mewakili untuk dilakukan penarikan garis batas. Kabupaten Bantul bersama dengan Kabupaten/Kota di DIY yang berbatasan telah melaksanakan kegiatan perapatan pilar batas dalam upaya untuk pemutakhiran batas administrasi.

Wilayah Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan. Kabupaten Bantul apabila dilihat dari bentang alamnya terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan

sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah Kabupaten Bantul antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan sungai kecil yang melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kecil lintas kabupaten antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Code, S. Gadjahwong, S. Gawe, S. Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S. Mruwe, S. Timoho, dan S. Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S. Plilan, S. urang, dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1.1 adalah 506,85 km^2 (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 Kapanewon (Kecamatan). Kapanewon Dlingo merupakan Kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km^2 (11,02%), sedangkan Kapanewon dengan wilayah paling sempit adalah Kapanewon Srandakan yaitu 18,32 km^2 (3,61%). Persentase luas wilayah menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 1.1.1 dan Gambar 1.1.2

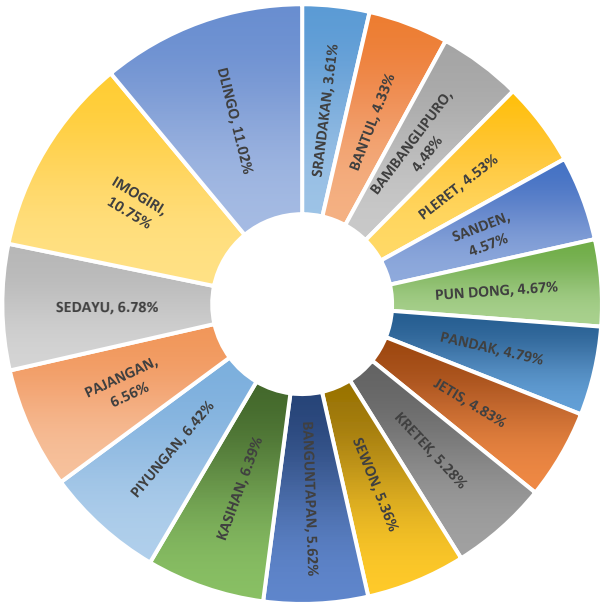

Gambar 1.1.2 Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul.
(Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; BPS; data diolah)

Tabel 1.1.1 Luas daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul tahun 2022

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km2)	% terhadap Luas Kabupaten
1	SRANDAKAN	Trimurti	18,32	3,61%
2	BANTUL	Bantul	21,95	4,33%
3	BAMBANGLIPURO	Sidomulyo	22,70	4,48%
4	PLERET	Pleret	22,97	4,53%
5	SANDEN	Murtigading	23,16	4,57%
6	PUN DONG	Srihardono	23,68	4,67%
7	PANDAK	Wijirejo	24,30	4,79%
8	JETIS	Sumberagung	24,47	4,83%
9	KRETEK	Donotirto	26,77	5,28%
10	SEWON	Panggungharjo	27,16	5,36%
11	BANGUNTAPAN	Baturetno	28,48	5,62%
12	KASIHAN	Tirtonirmolo	32,38	6,39%
13	PIYUNGAN	Srimulyo	32,54	6,42%
14	PAJANGAN	Sendangsari	33,25	6,56%
15	SEDAYU	Argorejo	34,36	6,78%
16	IMOGIRI	lmogiri	54,49	10,75%
17	DLINGO	Dlingo	55,87	11,02%
TOTAL			**506,85**	**100,00**

(Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023, BPS, 2023)

Topografi Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran rendah, daerah perbukitan serta daerah pantai. Topografi sebagai dataran rendah sebesar 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah Bagian Barat merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km^2 (17,73% dari keseluruhan wilayah). Bagian Tengah, berupa daerah datar dan landai seluas 210,94 km^2 adalah daerah pertanian yang subur. Bagian Selatan, merupakan bagian dari daerah Bagian Tengah dengan keadaan alam yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek.

Satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari;

a) Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;
b) Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi;
c) Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

c. Jumlah Penduduk

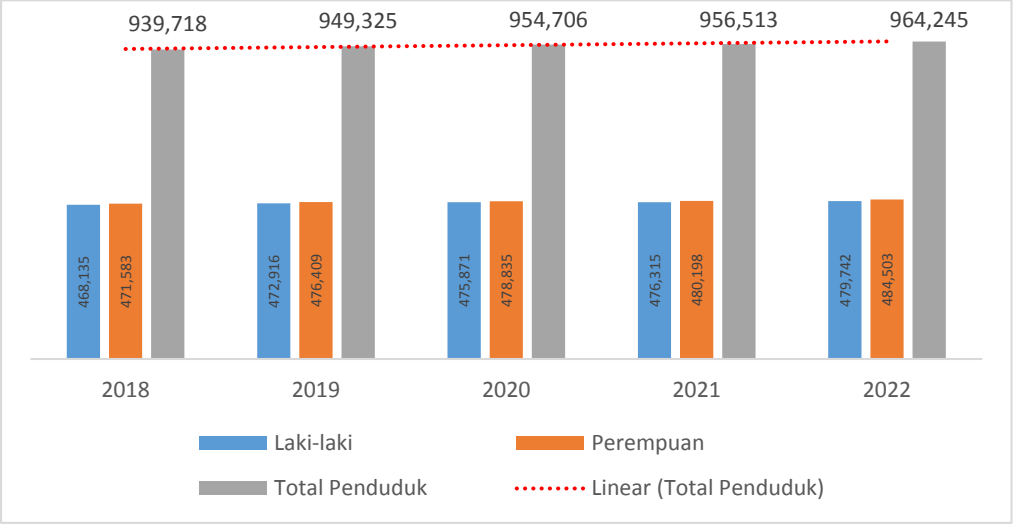

Grafik 1.1.1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 *(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul, 2023. Data diolah)*

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan pada Data Kependudukan Semester II tahun 2022 (**Tabel 1.1.2**) yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melalui surat Nomor 470/ 00494 tanggal 13 Februari 2023 perihal Data Kependudukan sebanyak 964.245 jiwa, dengan

komposisi penduduk laki-laki sebanyak 479.742 jiwa atau 49,75% dan penduduk Perempuan sebanyak 484.503 jiwa atau 50,25%. Dominasi jumlah Perempuan yang lebih banyak dibanding Laki-laki terjadi di Kabupaten Bantul meskipun selisihnya tidak begitu banyak. Kondisi ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada **Grafik 1.1.1**, dimana jumlah penduduk perempuan memiliki komposisi lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki setiap tahunnya serta jumlah penduduk Perempuan juga meningkat sejak tahun 2018.

Tabel 1.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kapanewon	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Persentase Terhadap Total Penduduk Kab. Bantul (%)
1	SRANDAKAN	15.447	15.622	31.069	3,22%
2	SANDEN	15.738	16.106	31.844	3,30%
3	KRETEK	15.039	15.681	30.720	3,19%
4	PUNDONG	17.731	18.165	35.896	3,72%
5	BAMBANGLIPURO	20.654	21.207	41.861	4,34%
6	PANDAK	26.203	26.015	52.218	5,42%
7	PAJANGAN	18.640	18.641	37.281	3,87%
8	BANTUL	32.468	32.983	65.451	6,79%
9	JETIS	29.528	29.671	59.199	6,14%
10	IMOGIRI	31.902	32.379	64.281	6,67%
11	DLINGO	19.944	20.313	40.257	4,17%
12	BANGUNTAPAN	57.115	58.012	115.127	11,94%
13	PLERET	24.694	24.358	49.052	5,09%
14	PIYUNGAN	26.533	26.924	53.457	5,54%
15	SEWON	50.760	50.671	101.431	10,52%
16	KASIHAN	52.922	53.280	106.202	11,01%
17	SEDAYU	24.424	24.475	48.899	5,07%
JUMLAH		**479.742**	**484.503**	**964.245**	
Persentase		**49,75%**	**50,25%**		
Sex Ratio		**99,02%**			

Sumber : Data Kependudukan Semester II tahun 2022 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/00494 tanggal 13 Februari 2023; Disdukcapil Kab. Bantul; data diolah

Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Perhitungan rasio jenis kelamin dilakukan dengan

cara membagi jumlah laki-laki dengan perempuan dikalikan konstanta 100. Hal tersebut akan menggambarkan jumlah laki-laki terhadap 100 perempuan. Angka Sex Ratio Kabupaten Bantul pada tahun 2022 (**Tabel 1.1.2**) diketahui sebesar 99,02 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 99 orang penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk menurut pendidikan akan menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Bantul pada tahun 2022. Kondisi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 (Tabel 1.1.3) dengan persentase terbesar merupakan tamatan SMA/ Sederajat dengan jumlah 279.556 jiwa atau sebesar 28,99% dari total penduduk di Kabupaten Bantul. Penduduk dengan tingkat pendidikan belum/ tidak bersekolah dan tamatan SD/ Sederajat merupakan proporsi penduduk terbesar selanjutnya dengan persentase sebesar 19,23% dan 18,26% dari total penduduk. Sementara itu proporsi penduduk paling rendah merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan Strata III dengan persentase sebesar 0,05%.

Tabel 1.1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KAPANEWON	TINGKAT PENDIDIKAN										TOTAL
		TDK/ BLM SEKOLAH	BLM TMT SD/ Sederajat	TMT SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D.I/ D.II	D.III/ S. Muda	D.IV/ S. I	S.II	S.III	
1	SRANDAKAN	5.398	2.942	5.090	4.418	10.342	284	672	1.800	116	7	31.069
2	SANDEN	4.928	2.145	5.889	4.979	10.377	293	763	2.347	121	2	31.844
3	KRETEK	4.757	2.349	5.304	4.722	10.351	272	715	2.116	124	10	30.720
4	PUNDONG	6.738	2.582	8.139	5.534	10.406	209	579	1.621	84	4	35.896
5	BAMBANGLIPURO	8.158	2.728	7.374	5.893	13.556	357	983	2.615	191	6	41.861
6	PANDAK	10.263	3.468	11.934	7.856	14.663	305	969	2.581	171	8	52.218
7	PAJANGAN	6.870	3.879	7.840	6.674	9.585	191	561	1.553	122	6	37.281
8	BANTUL	12.799	4.790	10.172	8.565	20.650	550	1.885	5.533	479	28	65.451
9	JETIS	11.497	4.722	10.974	8.925	17.578	366	1.239	3.634	246	18	59.199
10	IMOGIRI	14.408	3.537	17.540	10.334	14.504	276	909	2.631	128	14	64.281
11	DLINGO	8.157	2.875	10.387	9.251	8.465	131	236	725	30	0	40.257
12	BANGUNTAPAN	22.040	9.535	15.756	15.763	32.110	949	3.827	13.347	1.630	170	115.127
13	PLERET	10.663	4.338	10.385	7.398	12.255	258	665	2.836	241	13	49.052
14	PIYUNGAN	10.850	4.148	8.297	7.393	17.524	373	1.118	3.436	300	18	53.457
15	SEWON	19.422	7.424	16.951	14.262	29.475	826	2.926	9.124	941	80	101.431
16	KASIHAN	19.187	8.270	15.598	16.347	32.048	722	2.840	10.014	1.087	89	106.202
17	SEDAYU	9.327	3.450	8.447	6.971	15.667	342	1.084	3.318	265	28	48.899
	JUMLAH	**185.462**	**73.182**	**176.077**	**145.285**	**279.556**	**6.704**	**21.971**	**69.231**	**6.276**	**501**	**964.245**
	PERSENTASE	**19,23%**	**7,59%**	**18,26%**	**15,07%**	**28,99%**	**0,70%**	**2,28%**	**7,18%**	**0,65%**	**0,05%**	**100,00%**

Sumber : Data Kependudukan Semester II tahun 2022 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/00494 tanggal 13 Februari 2023; Disdukcapil Kab. Bantul; data diolah

d. Jumlah Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa) Kabupaten Bantul

Kapanewon dan kemantren adalah pembagian wilayah administratif di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon setara dengan kecamatan tingkat kabupaten sementara kemantren setara dengan kecamatan tingkat kota. Kapanewon dipimpin oleh panewu sedangkan kemantren yang dipimpin oleh mantri pamong praja. Penyebutan tersebut diberlakukan pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.25 tahun 2019. Terdapat 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul, dengan daftar sebagai berikut :

Tabel 1.1.4 Daftar Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

No	Kode Kemendagri	Kapanewon	Daftar Kalurahan
1.	34.02.01	Srandakan	Poncosari, Trimurti
2.	34.02.02	Sanden	Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading, Srigading
3.	34.02.03	Kretek	Donotirto, Parangtritis, Tirtohargo, Tirtomulyo, Tirtosari
4.	34,02.04	Pundong	Panjangrejo, Bangunharjo, Srihardono
5.	34.02.05	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo
6.	34.02.06	Pandak	Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo
7.	34.02.07	Pajangan	Guwosari, Sendangsari, Triwidadi
8.	34.02.08	Bantul	Bantul, Palbapang, Ringinharjo, Sabdodadi, Trirenggo
9.	34.02.09	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo
10.	34.02.10	Imogiri	Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo, Wukirsari
11.	34.02.11	Dlingo	Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Terong
12.	34.02.12	Banguntapan	Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan, Potorono, Singosaren, Tamanan, Wirokerten
13.	34.02.13	Pleret	Bawuran, Pleret, Segoroyoso, Wonokromo, Wonolelo
14.	34.02.14	Piyungan	Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani
15.	34.02.15	Sewon	Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo
16.	34.02.16	Kasihan	Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo
17.	34.02.17	Sedayu	Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

1) Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, telah menetapkan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- Dinas Daerah, sebanyak 20 (dua puluh) Dinas Daerah
- Badan Daerah, sebanyak 5 (lima) Badan Daerah
- Kapanewon, sebanyak 17 (tujuh belas) Kapanewon

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 berjumlah 45 berkurang 9 dari sebelumnya di tahun 2019 berjumlah 54 Perangkat Daerah.

2) Unit Kerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul, tidak semuanya melaksanakan urusan wajib. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib, beberapa diantaranya ada yang melaksanakan 2 (dua) jenis urusan wajib dan ada yang hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib serta ada juga Perangkat Daerah yang melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik; urusan persandian). Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan wajib sebanyak 5 (lima) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga);
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman);
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (urusan penataan ruang dan urusan pertanahan);
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana); dan
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (urusan perpustakaan; urusan kearsipan).

Perangkat Daerah yang hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib sebanyak 13 (tiga belas) Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Kesehatan (Urusan Kesehatan);
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat);
4. Satuan Polisi Pamong Praja (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat);
5. Dinas Sosial (urusan sosial);
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (urusan tenaga kerja);
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (urusan pangan);
8. Dinas Lingkungan Hidup (urusan lingkungan hidup);
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa)
10. Dinas Perhubungan (urusan perhubungan);
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagagan (urusan koperasi dan usaha kecil menengah);
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (urusan penanaman

modal); dan

13. Dinas Kebudayaan (urusan kebudayaan).

3) Pegawai Pemerintah

Salah satu aspek mendasar dalam reformasi birokasi adalah Sumber Daya Aparatur. Terbitnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pembaharuan dalam manajemen sumber daya aparatur. Tujuannya adalah untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan adanya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai, maka pencapaian terhadap target-target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan akan mampu untuk dicapai. Jumlah Pegawai PNS Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (**Tabel 1.1.5**) sebanyak 5.956 pegawai atau 84,18% memiliki tingkat pendidikan tinggi (pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi ke atas), sedangkan 15,82% atau 1.119 pegawai dengan tingkat pendidikan Menengah/ Dasar kebawah.

Tabel 1.1.5 Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah per Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PENDIDIKAN									GOLONGAN				JUMLAH JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL									
															ESELON						JABATAN			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	PELAK SANA	FUNGSI ONAL	PERANG KAT DESA	CPNS
1	**SEKRETARIAT DAERAH**																							
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Administrasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	2	0	0	2	4	2	0	0	1	7	2	0	0	1	0	0	0	5	3	0	1
6	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1	0	1	0	0	2	7	1	0	1	1	9	1	0	0	1	0	0	0	6	3	0	2
7	Bagian Tata Pemerintahan	0	1	2	0	0	2	6	3	0	1	2	10	1	0	0	0	0	0	0	10	3	0	1
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	3	0	0	1	5	2	0	0	2	7	2	0	0	1	0	1	0	5	4	0	0
9	Bagian Hukum	0	0	4	0	1	1	7	2	0	0	4	10	1	0	0	1	0	0	0	9	3	0	2
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	0	0	3	12	4	0	0	2	16	2	0	0	1	0	0	0	5	9	0	5
11	Bagian Organisasi	0	0	3	0	0	1	7	1	0	0	3	8	1	0	0	1	0	1	0	7	2	0	1

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PENDIDIKAN									GOLONGAN				JUMLAH JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL									
															ESELON						JABATAN			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	PELAK SANA	FUNGSI ONAL	PERANG KAT DESA	CPNS
12	Bagian Umum dan Protokol	2	6	33	1	0	5	9	1	0	3	29	24	1	0	0	1	0	3	0	49	1	0	3
13	Staf Ahli	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	BADAN																							
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3	7	0	0	2	10	9	0	1	6	17	8	0	1	1	3	2	0	13	9	0	3
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1	0	15	0	0	9	17	9	0	1	9	35	6	0	1	1	3	2	0	22	17	0	5
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	6	0	0	0	9	2	0	0	3	10	4	0	1	1	2	2	0	8	3	0	0
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asel Daerah	0	2	30	0	0	18	40	10	0	0	20	73	7	0	1	1	6	14	0	68	10	0	0
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	5	1	0	6	20	18	0	0	6	30	15	0	1	1	5	2	0	19	20	0	3
	DINAS/ LAINNYA																							
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1	19	269	5	114	46	2904	211	3	1	116	2021	1434	0	1	1	5	10	0	310	2779	0	466
8	Dinas Kesehatan	0	9	101	9	0	618	287	127	1	2	308	722	120	0	1	1	5	15	27	141	761	0	201
9	RSUD Panernbahan Senopati	2	7	54	1	1	261	90	79	0	5	99	319	72	0	1	2	6	3	0	69	369	0	45
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	4	5	47	0	0	3	20	15	0	5	34	45	10	0	1	1	5	4	0	64	17	0	2

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PENDIDIKAN									GOLONGAN				JUMLAH JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL									
															ESELON						JABATAN			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	PELAK SANA	FUNGSI ONAL	PERANG KAT DESA	CPNS
	Kawasan Permukiman																							
11	Saluan Polisi Parnong Praja	1	1	14	0	0	5	19	2	0	1	10	28	3	0	0	1	3	8	0	16	5	0	9
12	Dinas Sosial	0	0	9	1	0	5	16	7	0	0	5	27	6	0	1	1	3	8	0	17	0	0	8
13	Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi	0	1	11	0	0	12	27	4	0	0	12	39	4	0	1	0	3	2	0	19	17	0	13
14	Dinas Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	5	0	0	7	17	6	0	0	4	24	7	0	1	1	3	3	1	14	9	0	3
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	2	46	0	0	18	68	22	0	1	42	88	25	0	1	1	4	6	3	63	67	0	11
16	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	1	11	0	0	6	10	11	0	0	11	22	7	0	1	1	3	12	0	19	1	0	3
17	Dinas Lingkungan Hidup	2	10	43	0	0	5	27	10	0	6	50	32	9	0	1	1	3	4	2	71	11	0	4
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	21	0	0	6	20	7	0	0	7	41	6	0	1	1	4	2	0	29	10	0	7
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	0	0	8	0	0	5	10	7	0	0	2	24	4	0	1	1	2	2	0	15	8	0	1
20	Dinas Perhubungan	1	0	23	0	4	5	9	6	0	1	20	21	6	0	1	0	3	8	0	26	5	0	5
21	Dinas Komunikasi dan lnformatika	0	0	6	0	0	8	26	6	0	0	10	31	5	0	1	1	3	2	0	19	12	0	8

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PENDIDIKAN									GOLONGAN				JUMLAH JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL									
															ESELON						JABATAN			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	PELAK SANA	FUNGSI ONAL	PERANG KAT DESA	CPNS
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	8	65	0	0	9	24	14	0	7	54	51	10	0	1	1	5	3	1	81	21	0	9
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	4	0	0	3	16	7	0	0	2	20	8	0	1	1	0	1	0	9	18	0	0
24	Dinas Kebudayaan	0	1	5	0	0	7	12	7	0	0	7	18	7	0	1	1	3	10	0	13	2	0	2
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	5	0	2	16	11	3	0	0	8	27	2	0	1	1	2	2	0	6	19	0	6
26	Dinas Pariwisata	2	6	26	0	0	8	15	3	0	5	26	23	6	0	1	1	3	2	0	43	7	0	3
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	3	0	0	1	6	9	0	0	1	13	5	0	1	0	2	3	1	8	4	0	0
28	lnspektorat	0	1	7	0	0	5	26	14	0	0	10	23	20	0	1	5	0	3	0	8	30	0	6
29	Sekretariat DPRD	0	2	14	0	0	2	15	5	0	2	9	21	6	0	1	4	0	4	0	22	6	0	1
	KECAMATAN (KAPANEWON)																							
30	Barnbanglipuro	0	0	6	0	0	2	8	2	0	0	4	12	2	0	0	1	1	5	2	8	0	0	1
31	Banguntapan	0	0	6	0	0	1	14	2	0	0	4	17	2	0	0	1	1	5	2	10	0	3	1
32	Bantul	0	0	5	1	0	1	9	2	0	0	3	13	2	0	0	1	0	4	2	9	1	1	0
33	Dlingo	0	1	7	0	0	1	10	2	0	0	8	11	2	0	0	1	1	5	2	11	0	0	1
34	lrnogiri	0	1	5	0	0	3	9	1	0	0	7	10	2	0	0	1	1	5	2	6	0	2	2
35	Jetis	0	1	4	0	0	1	8	2	0	0	5	9	2	0	0	1	1	4	2	7	0	0	1
36	Kasihan	0	1	5	0	0	3	10	3	0	1	5	14	2	0	0	1	1	5	2	12	0	0	1
37	Kretek	0	0	8	0	0	1	9	3	0	0	5	13	3	0	0	1	1	5	2	10	0	1	1
38	Pajangan	0	0	4	0	0	1	11	1	0	0	2	14	1	0	0	1	1	4	2	8	0	0	1
39	Pandak	0	2	5	0	0	2	10	0	0	0	6	12	1	0	0	1	0	5	2	9	0	1	1

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PENDIDIKAN									GOLONGAN				JUMLAH JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL									
															ESELON						JABATAN			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	PELAK SANA	FUNGSI ONAL	PERANG KAT DESA	CPNS
40	Piyungan	0	1	3	0	0	1	10	3	0	0	4	11	3	0	0	1	1	5	2	8	0	0	1
41	Pleret	0	0	6	0	0	1	7	3	0	0	5	9	3	0	0	1	1	4	2	7	0	1	1
42	Pundong	0	1	5	0	0	1	9	2	0	0	5	10	3	0	0	1	1	5	2	7	0	1	1
43	Sanden	0	0	4	0	0	3	5	4	0	0	3	9	4	0	0	1	1	5	2	6	0	0	1
44	Sedayu	0	0	9	0	0	1	8	2	0	0	4	14	2	0	0	1	1	5	2	8	0	2	1
45	Sewon	0	1	6	0	0	1	10	1	0	1	3	14	1	0	0	1	1	4	2	9	0	1	1
46	Srandakan	0	1	5	0	0	1	9	3	0	0	5	11	3	0	0	1	1	5	2	8	0	1	1
JUMLAH		**21**	**96**	**1002**	**19**	**122**	**1138**	**3985**	**688**	**4**	**45**	**1013**	**4139**	**1878**	**1**	**33**	**57**	**104**	**224**	**69**	**1451**	**4266**	**14**	**856**
		7075									**7075**				**7075**									

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bantul, 2023

Jumlah pegawai yang tergolong kedalam jenjang pendidikan Menengah/ Dasar kebawah sebagian besar merupakan lulusan SMA/ Sederajat yakni sebanyak 1.002 pegawai. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul pada kelompok Golongan, persentase terbesar terdapat pada pegawai dengan Golongan III sebesar 58,50% (4.139 pegawai) diikuti golongan IV sebesar 26,54% (1.878 pegawai) kemudian berturut turut golongan II sebesar 14,32% (1.013 pegawai) dan golongan I sebesar 0,64% (45 pegawai).

Pegawai pada kelompok Pejabat Struktural dan Fungsional, persentase terbesar terdapat pada Pejabat Fungsional dengan persentase sebesar 60,30% atau sebanyak 4.266 pegawai (Pegawai PNS termasuk Guru, dan Tenaga Kesehatan), sedangkan Pegawai Eselon IV.A merupakan pejabat struktural dengan jumlah pegawai terbanyak dibandingkan dengan Eselon yang lain yaitu sebesar 3,17% (224 pegawai) dari total pegawai PNS di Kabupaten Bantul.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan telah ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2022 telah disusun pada Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan II Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam RKPD Tahun 2022, yang dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan penetapan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik dimaksud. RK DAK Fisik ditetapkan setelah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rincian TKDD Tahun 2022 disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Daerah pada tanggal 01 Oktober 2021 melalui Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 perihal

Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, sehingga RKPD Tahun 2022 belum mencantumkan kegiatan bersumber dari DAK Fisik Tahun 2022.

2. Adanya perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain disebabkan oleh:
   a. Terbitnya PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
   b. Adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
   c. Berita Acara Redesain Dana Keistimewaan Tahap I Tahun 2022.
   d. Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan mendesak, dan pemenuhan usulan revisi DPA dari Perangkat Daerah.

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut, harus dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengacu pada dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 903/ 03812; Nomor : 903/ 658 tanggal 31 Agustus tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, Belanja Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar 5,27%, yaitu pada APBD 2022 sebesar Rp2.247.414.065.054,00 menjadi Rp2.365.749.709.159,00. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022 difokuskan pada program prioritas dan optimalisasi belanja rutin perangkat daerah. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut:

1. Menjamin terlaksananya program prioritas
2. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus

(Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

3. Penganggaran kembali sisa anggaran BLUD pada RSUD dan puskesmas;
4. Penganggaran kembali Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan;
6. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
7. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
8. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
9. Pergeseran antar rekening, kegiatan, dan program.

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan asli daerah yang optimal dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari pendapatan asli daerah yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar Rp 2.229.822.923.773,00. Realisasi pendapatan daerah sampai

dengan akhir tahun 2022 (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI, per transaksi pada tanggal 25 Januari 2022) sebesar Rp 2.234.584.500.583,54, terdapat selisih lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.761.576.810,54atau realisasi tercapai 100,21%. Kontribusi capaian Realisasi Pendapatan Daerah terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 75,45%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dengan kontribusi sebesar 24,19%, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 0,36%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target pagu anggaran sebesar Rp 520.854.008.396,00 terealisasi sebesar 103,79% atau terealisasi Rp 540.572.423.372,80. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp 1.686.044.795.991,00, dari pagu anggaran sebesar Rp 1.702.968.915.377,00, atau tercapai 99,01%. Lain-lain Pendapatan yang sah tercapai melebihi dari nilai yang direncanakan, dari target Pagu Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,00 tersealisasi sebesar Rp 7.967.281.219,74 atau tecapai sebesar 132,79%.

Tabel 1.1.6 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target Pendapatan Daerah telah tercapai, bahkan capaian Pendapatan Daerah secara keseluruhan melebihi dari nilai yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (sebelum dilakukan audit BPK)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp) *)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	% Realisasi thd Jumlah Pendapatan LRA
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**520.854.008.396,00**	**540.572.423.372,80**	**103,79%**	**24,19%**
	Pajak Daerah	234.088.495.863,00	252.857.438.493,70	108,02%	11,32%
	Retribusi Daerah	49.689.640.820,00	42.178.624.886,07	84,88%	1,89%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00	20.839.915.416,20	87,91%	0,93%
	Lain-lain PAD yang Sah	213.368.704.758,00	224.696.444.576,83	105,31%	10,06%
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.702.968.915.377,00**	**1.686.044.795.991,00**	**99,01%**	**75,45%**

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp) *)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	% Realisasi thd Jumlah Pendapatan LRA
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.485.868.861.490,00	1.443.258.704.169,00	97,13%	64,59%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	217.100.053.887,00	242.786.091.822,00	111,83%	10,86%
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**6.000.000.000,00**	**7.967.281.219,74**	**132,79%**	**0,36%**
	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.725.000.000,00	112,08%	0,30%
	Dana Darurat	0,00	0,00	-	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	22.148.900,00	-	0,00%
	Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan	0,00	1.220.132.319,74	-	0,05%
JUMLAH PENDAPATAN-LRA		**2.229.822.923.773,00**	**2.234.584.500.583,54**	**100,21%**	**100,00%**

*Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022; data Unaudited BPK RI; *) Pagu Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati. Bantul No.116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022*

2) Realisasi Belanja Daerah

Pagu Anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.453.501.989.507,00. Realisasi Belanja sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp 2.246.681.667.585,13 atau 91,57%. Rincian terhadap realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1.7

Tabel 1.1.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA DAERAH				
1	**BELANJA OPERASI**	**1.833.255.482.255,00**	**1.715.784.368.318,32**	**93,59%**
	Belanja Pegawai	933.917.754.140,00	853.342.373.348,00	91,37%
	Belanja Barang dan Jasa	820.7 44.294.402,00	788.495.409.619,24	96,07%
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
	Belanja Hibah	70.258.891.858,00	65.836.185.351,08	93,71%
	Belanja Bantuan Sosial	8.334.541.855,00	8.110.400.000,00	97,31%
2	**BELANJA MODAL**	**273.235.158.029,00**	**221.698.419.757,81**	**81,14%**
	Belanja Modal Tanah	18.905.634.040,00	8.247.988.540,00	43,63%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.125.955.338,00	70.206.003.149,45	98,71%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.709.358.999,00	37.780.797.101,00	66,62%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.504.484.127,00	98.155.322.270,36	86,48%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.989.725.525,00	7.308.308.697,00	56,26%
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	-
3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**36.672.164.883,00**	**19.683.697.169,00**	**53,67%**
	Belanja Tak Terduga	36.672.164.883,00	19.683.697.169,00	53,67%
4	**BELANJA TRANSFER**	**310.339.184.340,00**	**289.515.182.340,00**	**93,29%**
	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	26.103.396.250,00	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	284.235.786.090,00	263.411.786.090,00	92,67%
JUMLAH BELANJA DAERAH		**2.453.501.989.507,00**	**2.246.681.667.585,13**	**91,57%**

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022, Data Unaudited BPK RI, Pagu Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati. Bantul No.116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang Jasa (iii) Belanja Hibah, dan (iv) Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.833.255.482.255,00, realisasi sebesar Rp 1.715.784.368.318,32 atau 92,23%.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp 933.917.754.140,00, realisasi sebesar Rp 853.342.373.348,00 atau 91,37%.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, meliputi belanja barang berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi. Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang

dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp 820.744.294.402,00, realisasi sebesar Rp 788.495.409.619,24atau 96,07%.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang. Belanja hibah uang diberikan kepada Pemerintah Pusat. BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 70.258.891.858,00 dengan realisasi sebesar Rp 65.836.185.351,08 atau 93,71%.

Belanja bantuan Sosial merupakan Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 8.334.541.855,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.110.400.000,00 atau 97,31%.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 273.235.158.029,00 dengan realisasi Rp 221.698.419.757,81 atau 81,14%. Rincian terhadap realisasi Belanja Modal ditampilkan pada Tabel 1.1.7.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 36.672.164.883,00 dengan realisasi Rp 19.683.697.169,00 atau 53,67%.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 310.339.184.340,00 dengan realisasi sebesar Rp 289.515.182.340,00 atau 93,29%, dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja Bagi Hasil dengan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 26.103.398.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 26.103.398.250,00 atau 100%; b) Belanja Bantuan Keuangan dengan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 284.235.786.090,00 dan realisasi sebesar Rp 263.411.786.090,00 atau 92,67%.

3) Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berbentuk angsuran hutang, bantuan modal dan/atau transfer ke dana cadangan. Kebijakan pembiayaan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan

modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal

Tabel 1.1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**266.179.065.734,00**	**259.029.014.734,00**	**97,31%**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	240.503.861.658,00	240.503.861.658,00	100,00%
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.675.204.076,00	18.362.654.076,00	125,13%
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	162.499.000,00	1,48%
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**42.500.000.000,00**	**31.500.000.000,00**	**74,12%**
	Penyertaan Modal Daerah	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00	100,00%
	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	0,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	**223.679.065.734,00**	**227.529.014.734,33**	**101,72%**

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022, Data Unaudited BPK RI, Pagu Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati. Bantul No.116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 266.179.065.734,00 dengan realisasi Rp 259.029.014.734,00 atau 97,31%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 240.503.861.658,00, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 18.362.654.076,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 162.499.000,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 42.500.000.000,00 dengan realisasi Rp 31.500.000.000,00 atau 74,12% dengan peruntukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp Rp 31.500.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman daerah sebesar Rp 0,00..

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sisitem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPKD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses peyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo yang dilantik pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Sedangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 angka 3 (tiga) menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-

2026.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan Musrenbang, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan RPJMD

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025, dijabarkan sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2026 karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2021 - 2026. Berdasarkan telaah permasalahan pembangunan daerah, dokumen perencanaan kabupaten/ kota sekitar dan isu-isu strategis internasional, nasional dan provinsi DIY, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

   Pertumbuhan Jasmani :

   Pertumbuhan jasmani dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kematian ibu masih terjadi. Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kematian bayi masih terjadi. Angka Kematian Bayi mencapai 6,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020. Balita dengan kasus gizi buruk sebanyak 57 kasus pada tahun 2020. Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

Kemampuan Intelektual :

Kemampuan intelektual seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh pencapaian akreditasi yang dikeluarkan oleh BANSN, dengan hasil SD:84,06%, MI: 72,72%, SMP: 68,82% dan MTS: 72,00%. Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari banyaknya guru bersertifikat. Guru bersertifikat pada jenjang PAUD: 58%, SD: 50,71%, MI: 43,7%, SMP: 64,42% dan MTS: 50,07%.

Kualitas SDM yang baik menentukan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan. Pada Tahun 2020 proporsi usia kerja sebesar 69,35%, sedangkan proporsi bukan usia kerja 30,65% sehingga rasio ketergantungannya 44,20.

Kemampuan Mental Spiritual :

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kenakalan remaja berupa kasus “Klithih” yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

2. Masih Tingginya Ketimpangan.

Ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari (i) Ketimpangan Pendapatan, merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata yang ditunjukkan dengan indeks Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2020 dengan angka 0,418 dengan kategori “moderat”; dan (ii) Ketimpangan Wilayah, merupakan perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah, dimana kegiatan ekonomi masih terpusat pada kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul.

3. Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup.

Degradasi Lingkungan :

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. capaian nilai Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 yaitu cukup baik (60<IKLH⩽70), IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis. seluas 477,75 ha. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH.

Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir cukup tinggi, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m3/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m3/th atau 74,28%. Perlu peningkatan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan desa.

Bencana :

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkaan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi sekali, yaitu 187,2. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat. Target manageman bencana dalam hal ini Respon Time 15 menit telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 76,43 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interprestasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerjameningkat adalah dengan memastikan

bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi Kabupaten Bantul Tahun 2021 -2026 adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis**, yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

   Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) periode RPJMD ke depan (RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026).

Dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul beserta Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar Hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Uraian prioritas pembangunan daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Berpijak dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target Tahunan dalam 1 (satu) periode RPJMD tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 1.1.9 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika													KONDISI AKHIR (2026)
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET					
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)
				Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
					Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	80,02	80,63	81,09	81,54	81,99	82,44	82,44
				Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39	74,39
				Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32
				Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	3	4	6	8	10	12	12
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Rasa Aman			Indeks	n/a	2,7	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81
				Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika													KONDISI AKHIR (2026)
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET					
								2022	2023	2024	2025	2026	
					perlindungan masyarakat								
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Laju Pertumbuhan ekonomi			Persen	3,12	3,8	3,97	4,48	4,83	5,12	5,12
				Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06	3,9	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2
					Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	Persen	n/a	80	90	100	100	100	100
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur			Indeks	n/a	66,12	67,26	67,8825	69,495	70,61	70,61
				Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08
					Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	80,00	75,03	75,05	75,07	75,10	75,20	75,20
				Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,02	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07
				Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan			Persen	13,50	13,77	12,90	12,50	12,05	11,50	11,50
				Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS	Orang	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668
		Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	95,18	95,50	96,00	96,50	96,75	96,90	96,90
				Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96
					Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA

Sumber : Tabel 5.3 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 -2026, Bappeda

d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perjanjian Kineja Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1.10 Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1315
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,1
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,22
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2022
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100
6	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,360
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,9
		Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	Persen	80
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75,13
		Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,03
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,75
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	175,51
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72,296
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,36
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2022

e. Program Pembangunan Pemerintah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 sebagaimana disampaikan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan dalam **Tabel 1.1.11** sebagai berikut :

Tabel 1.1.11 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 RPJMD Tahun 2021–2026 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Misi 1 :Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima									
Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	78,00	80		83,75		
Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EPPD)		4,0815	4,1315		4,3315		SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	83	10.378.679.400,00	83	54.139.744.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100	100		100		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100		100		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N- 1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	92	92	1.043.927.600,00	92	5.357.125.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100	100	442.575.000,00	100	2.271.161.000,00	SEKRET ARIAT DAERAH
		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	7.686.962.700,00	100	39.447.196.700,00	SEKRET ARIAT DAERAH
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	339.850.000,00	80	1.744.008.000,00	SEKRET ARIAT DAERAH
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80	80	1.095.088.900,00	80	5.619.670.900,00	SEKRET ARIAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Persen	0	87,5	261.050.000,00	89,5	1.305.250.000,00	SEKRET ARIAT DAERAH
		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	6,67	88	500.000.000,00	90	2.500.000.000,00	SEKRET ARIAT DAERAH

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	87,5	88	200.000.000,00	90	1.800.000.000,00	SEKRET ARIAT DAERAH
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80,5	81	150.000.000,00	85	1.075.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	84	28.007.830.550,00	85	171.682.969.982,00	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80	82	14.943.253.450,00	90	57.289.551.018,00	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	90	95	330.502.000,00	100	2.452.741.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	10	10	-	90	920.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	85,5	1.595.755.060,00	87,5	8.465.480.593,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	100	2.351.135.980,00	100	17.938.226.189,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	95	95		97		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	1.572.022.220,00	100	8.339.577.877,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	7	20	381.726.000,00	90	3.346.064.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	82,43	98.789.110.760,00	82,65	510.290. 740.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	30	8.953.282.240,00	32	34.814.116.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	6		18		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	100		100		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Persen	n/a	100	230.343.740,00	100	1.221.973.541,00	BADAN PERENC ANAAN PEMBAN GUNAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	Persen	59	60	215.832.480,00	64	1.865.832.480,00	DINAS PERPUS TAKAAN DAN KEARSIP AN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	68	69	19.236.000,00	73	1.522.854.000,00	DINAS PERPUS TAKAAN DAN KEARSIP AN
Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		**Opini Laporan Keuangan**	**WTP**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,**

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
									PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	80	80	299.595.500,00	90	2.620.095.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84,14	84,5	684.094.393.140,00	85,5	3.576.080.447.140,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	342.169.016.830,00	Tepat Waktu	1.634.009.549.220,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Penyampaian raperda pertanggungja waban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	87,84	89		91		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	100	1.262.739.710,00	100	8.080.739.710,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	100	10.302.989.220,00	100	62.836.032.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Rata- Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK		82,00	82,50		84,50		INSPEKTORAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	0	0	-	55,56	1.020.355.670,00	INSPEKTORAT DAERAH

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,93	83	2.141.908.600,00	83	18.130.253.801,00	INSPEKTORAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	n/a	12	194.072.500,00	16	2.593.534.663,00	INSPEKTORAT DAERAH
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	n/a	20	1.293.514.900,00	40	9.506.181.867,00	INSPEKTORAT DAERAH
Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,25		3,45		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	86	1.684.961.498,00	92	11.123.725.617,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	50	70	1.309.327.700,00	74	8.187.592.098,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	42,86	500.000.000,00	100	8.298.504.350,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,67	2,75	9.684.574.802,00	2,95	51.559.100.995,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100		100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	176.400.000,00	100	1.035.441.562,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60	65	844.457.000,00	81	7.360.468.378,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,10		89,50		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	100	604.839.580,00	100	2.324.310.580,00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100	100	102.785.120,00	100	540.321.120,00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	83	3.270.576.670,00	84	19.749.411.245,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99,81	626.137.394,00	99,85	3.701.752.264,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96	96	431.856.669,00	96,4	2.524.526.542,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99	99,5	376.741.530,00	99,9	2.719.000.285,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	99	100	89.968.737,00	100	531.447.664,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON BANTUL
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	86	537.101.000,00	90	5.011.267.560,00	KAPANEWON BANTUL
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	98	90	31.520.000,00	94	163.424.000,00	KAPANEWON BANTUL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	100	84.800.000,00	100	352.600.000,00	KAPANEWON BANTUL
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100	19.600.000,00	100	98.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	143.690.000,00	100	844.753.440,00	KAPANEWON BANTUL

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	79,59	80	556.197.000,00	84	4.194.825.500,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	95	41.187.500,00	95	482.437.500,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	90	125.436.000,00	94	857.886.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100%	100	91.653.500,00	100	734.307.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	5.000.000,00	100	131.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON DLINGO
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON DLINGO

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	85	564.587.500,00	89	4.605.984.500,00	KAPANEWON DLINGO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	100	31.995.000,00	100	421.995.000,00	KAPANEWON DLINGO
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	100	138.447.500,00	100	1.003.447.500,00	KAPANEWON DLINGO
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100	104.587.000,00	100	694.587.000,00	KAPANEWON DLINGO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	10.980.000,00	100	139.690.000,00	KAPANEWON DLINGO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	80	586.982.500,00	82	4.184.086.500,00	KAPANEWON IMOGIRI

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	95	37.200.000,00	100	452.200.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	95	188.122.500,00	100	1.409.122.500,00	KAPANEWON IMOGIRI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	95	49.750.000,00	100	724.750.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	18.600.000,00	100	371.600.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON JETIS
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	80	577.192.500,00	82	5.011.212.500,00	KAPANEWON JETIS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	91	25.475.000,00	94	138.225.000,00	KAPANEWON JETIS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	92	130.585.000,00	95	775.651.000,00	KAPANEWON JETIS

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100	119.087.500,00	100	651.137.500,00	KAPANEWON JETIS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	5.250.000,00	100	36.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON KRETEK
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,16	80	623.496.000,00	84	3.605.245.000,00	KAPANEWON KRETEK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	90	56.700.000,00	92	618.700.000,00	KAPANEWON KRETEK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	80	135.000.000,00	87	1.095.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	87	73.000.000,00	92	926.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	4.000.000,00	100	98.000.000,00	KAPANEWON KRETEK

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON KASIHAN
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	85	624.412.800,00	89	4.573.725.005,00	KAPANEWON KASIHAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	100	60.147.000,00	100	565.786.997,00	KAPANEWON KASIHAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	90	98.440.367,00	93	813.482.875,00	KAPANEWON KASIHAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	90	40.146.000,00	93	416.759.471,00	KAPANEWON KASIHAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	46.777.833,00	100	616.570.652,00	KAPANEWON KASIHAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON PANDAK
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000	KAPANEWON PANDAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	90	503.750.000,00	94	4.370.922.000,00	KAPANEWON PANDAK

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	89	90	32.650.000,00	94	264.900.000,00	KAPANEWON PANDAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	82	82	179.895.000,00	88	1.213.390.000,00	KAPANEWON PANDAK
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	82	82	94.850.000,00	88	698.400.000,00	KAPANEWON PANDAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	6.310.000,00	100	82.360.000,00	KAPANEWON PANDAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	95	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON PUNDONG
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	95	200.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	85	399.541.000,00	90	4.086.263.925,00	KAPANEWON PUNDONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	90	32.012.500,00	95	161.207.957,00	KAPANEWON PUNDONG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	80	210.794.000,00	86	1.140.223.492,00	KAPANEWON PUNDONG

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	87	169.492.500,00	91	901.852.778,00	KAPANEWON PUNDONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	4.790.000,00	100	79.121.848,00	KAPANEWON PUNDONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON PLERET
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	80	549.024.000,00	82	4.234.800.000,00	KAPANEWON PLERET
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	90	38.992.500,00	100	391.992.500,00	KAPANEWON PLERET
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	90	126.387.500,00	100	929.887.500,00	KAPANEWON PLERET
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	90	115.475.000,00	100	785.475.000,00	KAPANEWON PLERET
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	8.015.000,00	100	178.015.000,00	KAPANEWON PLERET

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100 Persen	309.460.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85 Persen	200.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	82	525.235.000,00	86 Angka	4.226.741.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	92	42.072.500,00	96 Persen	522.072.500,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	100	124.932.500,00	100 Persen	830.032.500,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100	135.000.000,00	100 Persen	880.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	8.015.000,00	100 Persen	145.515.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100 Persen	309.460.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85 Persen	200.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	80	626.138.500,00	82	4.153.126.500,00	KAPANEWON PAJANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	88	36.387.500,00	92	592.351.500,00	KAPANEWON PAJANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	88	74.797.000,00	92	753.508.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	88	10.210.000,00	92	413.210.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	97.249.000,00	100	672.747.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON SANDEN
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	100	80	505.086.000,00	85	4.295.945.600,00	KAPANEWON SANDEN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	100	90	55.797.500,00	94	353.797.500,00	KAPANEWON SANDEN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	80	147.554.500,00	84	818.384.900,00	KAPANEWON SANDEN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	87	98.000.000,00	91	548.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	13.000.000,00	100	283.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANE WON SRANDA KAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	85	481.662.000,00	89	4.408.891.000,00	KAPANE WON SRANDA KAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	90	44.500.000,00	94	245.750.000,00	KAPANE WON SRANDA KAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	95	146.875.000,00	98	815.625.000,00	KAPANE WON SRANDA KAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	95	132.125.000,00	98	728.125.000,00	KAPANE WON SRANDA KAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	9.622.000,00	100	52.672.000,00	KAPANE WON SRANDA KAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON SEWON
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	90	90	661.307.388,00	92	4.494.349.580,00	KAPANEWON SEWON
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	88	58.215.000,00	92	305.347.000,00	KAPANEWON SEWON
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	88	57.620.112,00	92	759.389.152,00	KAPANEWON SEWON
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100	88.357.500,00	100	943.016.268,00	KAPANEWON SEWON
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	10.350.000,00	100	403.328.000,00	KAPANEWON SEWON
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON SEDAYU

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	85	200.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	85	598.889.000,00	89	4.868.439.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	90	25.050.000,00	94	188.650.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	100	65.400.000,00	100	369.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100	145.850.000,00	100	343.850.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	6.000.000,00	100	768.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100	45.300.000,00	100	309.460.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	0	-	5	200.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	85	605.041.500,00	89	4.885.863.200,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	91	39.500.000	95	344.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	92	114.962.500,00	96	762.806.500,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	95	129.225.000,00	98	846.600.400,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100	10.600.000,00	100	73.473.900,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
Jumlah Misi 1						**1.256.1 08.874.180**		**6.491.037.278.180,00**	
Misi 2: Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa									
Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,02	80,63		82,44		DINAS KESEHATAN; RSUD PANEMBAHAN SENOPATI; UPTD PUSKESMAS; DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sasaran Daerah: Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,90	74,01		74,39		DINAS KESEHATAN; RSUD PANEMBAHAN SENOPATI; UPTD PUSKESMAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	82,15	140.000.000.000,00	83,5	704.582.786.000,00	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
		Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	77,50	80		82		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	57,29	-	-	73	248.975.000,00	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Turn Over Interval (TOI)	Hari	2,69	-		2		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
		Bed Turn Over (BTO)	Kali	46,29	-		50		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.733.836.320,00	84,5	13.822.736.320,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	1	1	21.022.955.117,00	1	117.253.005.969,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	1	1	352.754.220,00	1	1.780.754.220,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Indeks	1	1	826.883.000,00	1	4.188.733.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kalurahan	36	40	943.664.600,00	60	4.752.164.600,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	25,93	33	600.000.000,00	62	10.749.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	180.645.120,00	84,5	948.145.120,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100	100	37.128.755.263,00	100	185.650.755.263,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	176.881.680,00	100	929.531.680,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	100	100	500.000.000,00	100	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.325.448.000,00	84,5	9.405.448.000,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	645.000.000,00	1	3.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.461.858.400,00	84,5	12.196.858.400,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	645.000.000,00	1	3.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.405.268.800,00	84,5	13.295.268.800,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	725.000.000,00	1	3.771.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.920.358.400,00	84,5	15.570.358.400,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	645.000.000,00	1	3.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.850.678.294,00	84,5	13.828.012.294,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	706.720.400,00	1	5.837.137.464,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.949.358.400,00	84,5	10.172.628.656,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	635.000.000,00	1	3.325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (AKIP)	Angka	83,95	84	1.588.749.800,00	84,5	8.211.531.396,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	635.000.000,00	1	3.325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.216.541.116,00	84,5	11.687.289.115,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	635.000.000,00	1	3.325.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.466.089.600,00	84,5	4.306.089.600,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	645.000.000,00	1	3.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.075.268.800,00	84,5	10.937.925.831,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	845.000.000,00	1	4.328.00 0.000	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.360.179.200,00	84,5	7.068.379.200,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	705.832.000,00	1	3.678.832.000,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.272.316.420,00	84,5	9.019.884.235,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	825.000.000,00	1	4.245.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.974.931.725,00	84,5	10.728.853.829,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	745.000.000,00	1	3.835.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.705.952.000,00	84,5	6.938.36 4.000	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	84	650.000.000,00	1	3.362.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.280.789.600,00	84,5	6.654.111.600,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	825.000.000,00	1	4.245.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.860.862.400,00	84,5	14.952.878.400,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	675.000.000,00	1	3.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.988.358.400,00	84,5	12.850.158.400,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	877.000.000,00	1	4.297.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.384.037.982,00	84,5	5.350.037.982,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	665.000.000,00	1	3.481.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.626.068.800,00	84,5	8.246.068.800,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	665.000.000,00	1	3.481.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	777.179.200,00	84,5	4.040.179.200,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	725.000.000,00	1	3.738.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.903.940.063,00	84,5	13.975.620.063,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	803.844.080,00	1	4.073.844.080,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.005.768.800,00	84,5	10.625.953.052,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	825.000.000,00	1	4.246.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.930.448.000,00	84,5	14.750.448.000,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	695.000.000,00	1	3.585.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.800.979.200,00	84,5	8.511.379.200,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	825.000.000,00	1	4.247.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	2.651.878.200,00	84,5	13.315.878.200,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	645.000.000,00	1	3.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.818.858.400,00	84,5	8.414.858.400,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	645.000.000,00	1	3.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84	1.455.179.200,00	84,5	7.539.114.231,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100		100		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	635.000.000,00	1	3.325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		**Angka Harapan Lama Sekolah**	**Angka**	**15,19**	**15,22**		**15,32**		**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA; DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	82	5.009.338.342,00	82	28.530.943.710,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	100	91.970.069.372,00	100	470.047. 983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	n/a	66	217.410.642.120,00	83	1.092.25 3.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	3,88	4,18	800.000.000,00	5,37	13.345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	80	831.968.820,00	80	4.531.968.820,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen	7,61	10,08	416.798.700,00	19,95	4.594.602.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	Medali	n/a	55	8.350.0 81.966	130	46.900.409.830,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	80	1.445.340.480,00	84	12.376.702.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	n/a	18	643.010.720,00	18	3.215.053.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sasaran Daerah: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah		Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Desa	3	4		12		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
									PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	80,98	1.036.350.000,00	81,6	6.151.113.605,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	54	61,03	1.425.000.000,00	90,44	24.034.114.515,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	18	3.300.000.000,00	132	32.883.946.050,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	219	10.125.000.000,00	1215	89.125.781.830,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	2,70		2,81		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
Sasaran Daerah:Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	78	79	2.952.127.000,00	83	16.604.333.956,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	2.384.412.000,00	100	15.729.943.044,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	27,22	29,37	600.000.000,00	100	9.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	37,33	57,33	2.229.6 78.400	100	43.579.614.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	85	522.514.010,00	89	4.263.996.030,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95	95	341.009.000,00	100	1.998.009.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	10,36	18	61.000.000,00	37	706.049.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100	100	360.293.590,00	100	1.960.293.590,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	100	222.267.000,00	100	2.076.247.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	Persen	n/a	-	-	100	2.377.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jumlah Misi 2						633.154.020.520,00		3.348.667.345.520,00	
Misi 3: **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif**									
Tujuan: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**3,12**	**3,8**		**5,12**		**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS KUKMP PERDAGANGAN**
Sasaran Daerah:Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini		0,370	0,360		0,310		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS KUKMPPERDAGANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67	37,33	235.000.000,00	58,67	1.815.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	n/a	14,28	2.900.000,00	100	92.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	147,57	149	525.935.120,00	157	5.875.935.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	24	22,67	80.687.000,00	17,33	1.038.687.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100	100	31.000.000,00	100	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	-	100	2.833.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	84	1.845.737.082,00	85	11.577.032.290,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	100	1.585.571.950,00	100	15.120.752.830,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100	100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	100	1.699.075.000,00	100	6.357.575.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100	100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	1.941.072.488,00	100	8.962.648.960,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Produksi Daging	Ton	15.222	15.326		15.961		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulang an bencana	Persen	100	100	70.000.000,00	100	2.375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100	2.700.000,00	100	100.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Ha	6,3 ton/ha	6,31	792.243.360,00	6,33	5.090.536.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	0	-	100	625.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	84	700.000.000,00	85	3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 ton	829	187.675.000,00	837	1.866.990.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740	12.740	1.459.882.000,00	13.046	10.292.884.640,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	5	3.900.000,00	5	195.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	2	42.900.000,00	5	797.550.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	Persen	32	33,33	1.000.000.000,00	93	8.139.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	-	100	1.635.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	80	4.278.552.000,00	84	25.670.697.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	2,71	2.902.000.000,00	3,13	28.710.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	2	966.800.000,00	2	4.834.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	50	51	160.000.000,00	55	920.284.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	1	2	6.070.923.713,00	6	35.112.321.713,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	8	7	179.957.500,00	5	1.037.007.175,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US$	83	80	654.020.000,00	500	4.169.296.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapann ya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	25	27	349.223.100,00	40	2.087.671.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	0	-	-	25	1.925.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,34	81	2.775.856.027,00	83	17.515.586.235,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	2,5	2,5	24.835.120,00	2,5	145.335.120,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	66,88	70,23	121.110.120,00	78,59	798.297.620,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	56,54	59,52	26.835.120,00	68,45	231.835.120,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60	60	554.286.350,00	60	1.309.259.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,st andarisasi,dan kemitraan	Persen	5	5	108.497.240,00	5	1.373.819.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84,99	85	1.167.283.800,00	85	7.818.677.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	100	149.330.000,00	100	1.158.715.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	7,85	8,3	278.587.500,00	17,79	1.978.354.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	100	379.462.000,00	100	2.078.710.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan		Tingkat Pengangguran Terbuka		4,06	3,90		3,20		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	80	80	3.000.000.000,00	84	15.250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,5	18,5	3.400.000.000,00	22,5	15.150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	54	54	7.595.276.000,00	62	40.355.278.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	35	35	1.350.000.000,00	39	5.050.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	72	74	575.000.000,00	100	3.150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai (2021) Angka (2022 - 2026)	85	82	824.075.615,00	86	4.553.535.708,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	100	140.000.000,00	100	700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	100	30.000.000,00	100	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100	100	3.458.543.215,00	100	20.374.141.135,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an dan Kalurahan	Persen	n/a	100	2.488.565.670,00	100	21.186.137.657,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	16	600.000.000,00	100	3.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	25	33	1.057.984.500,00	66,67	6.258.352.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif		n/a	80		100		DINAS PARIWISATA, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	n/a	-	100	2.388.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CBT	n/a	2	171.000.000,00	2	1.317.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	45	50	599.342.940,00	70	3.044.170.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55	60	410.733.440,00	80	1.933.878.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	9,33	10,67	400.000.000,00	17,33	2.620.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0	14	400.000.000,00	70	9.449.073.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	81,50	85,97	1.684.041.210,00	100	11.617.434.927,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	25.735.120,00	100	228.235.120,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0	0	-	0,22	240.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jumlah Misi 3						61.564.136.300,00		396.032.324.300,00	
Misi 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana									
Tujuan : Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur		n/a	66,1175		70,61		DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD
Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Indeks kualitas infrastruktur		n/a	73,71		79,08		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	80,62	81,03	22.050.532.539,00	82,67	114.060.198.983,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	75,42	75,83	39.940.351.125,00	77,47	205.039.657.257,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	n/a	0	-	100	110.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,83	83	6.231.608.230,00	84	32.010.694.857,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	n/a	10	11.093.340.360,00	50	190.972.237.491,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tekni si/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,34	72,84	790.328.980,00	78,84	4.721.245.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	29,93	30	12.435.566.438,00	50	66.211.906.707,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	81,5	82,4		86		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36	83,56	1.684.064.441,00	86,76	38.799.095.108,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	Persen	21,33	22,67	824.650.000,00	33,33	5.124.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83	87,86	4.896.417.653,00	95,98	26.836.236.222,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	n/a	3,97	3.635.314.000,00	6,49	24.156.174.807,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	3.788.800.826,00	100	22.870.863.429,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PersentaseKawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	0	10,59	4.266.816.699,00	52,95	27.206.085.054,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	Persen	98,75	99,18	421.652.609,00	100	10.084.832.515,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	406.039.100,00	100	2.499.130.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuaiperatura n perundang-undangan	Persen	n/a	100	500.000.000,00	100	75.374.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	0	-	100	9.580.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,00	80,50	965.187.000,00	81,5	5.444.616.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Rasio Konektivitas Kabupaten		30,43	30,43	13.012.540.000,00	30,43	59.364.024.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	Angka	0,30	0,30		0,3		
Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Kesesuaian pemanfataan ruang		80,00	75,03		75,20		DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDH A NITI MANDAL A SARTA TATA SASANA)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	n/a	n/a	-	100	600.000.000,00	DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	n/a	70	1.397.829.950,00	70,4	7.182.829.950,00	DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan danKadipaten	Persen	n/a	90	500.000.000,00	90	2.860.000.000,00	DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81,71	82	941.654.430,00	86	6.697.808.930,00	DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	n/a	100	20.000.000,00	100	60.000.000,00	DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasik an)	Persen	n/a	90	386.090.620,00	90	35.986.090.620,00	DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	20,73	33,03	4.220.3 82.000	64,89	41.947.133.500,00	DINAS PERTAN AHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Sasaran Daerah: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		63,02	62,75		66,07		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	0	-	100	1.100.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	83	3.278.515.080,00	84	20.825.353.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	n/a	70	4.895.237.000,00	90	11.735.237.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	n/a	30	3.782.201.120,00	38	27.222.737.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakat an dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	5	82.820.500,00	5	574.820.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	n/a	1	16.310.000,00	5	205.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	n/a	14,29	382.795.740,00	100	3.337.795.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	31,35	14.675.000,00	38,32	95.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	n/a	16,67	31.900.000,00	33,33	301.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	n/a	100	14.950.000,00	100	124.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36	42,42	8.290.292.560,00	50,07	52.802.563.840,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Sasaran Daerah : Terwujudnya penurunan risiko bencana		Indeks Risiko Bencana		181,26	175,51		154,27		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	0	-	100	5.700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	80,5	81,00	5.564.133.000,00	83	38.210.852.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20	25	3.190.686.000,00	45	15.308.727.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		100		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100		100		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Indeks Pemulihan Pascabencana	Persen	n/a	n/a		65		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	Menit	14,48	< 15	393.930.000,00	< 15	2.977.530.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jumlah Misi 4						164.347.613.000,00		1.306.212.763.000,00	
Misi 5: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel									

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**		**13,50**	**13,37**		**11,50**		**DINAS SOSIAL**
Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**		**72.101**	**72.296**		**70.668**		**DINAS SOSIAL**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	82	1.442.465.488,00	83	7.741.612.152,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	57	60	673.959.448,00	85	2.769.797.240,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80	75	8.938.751.920,00	80	47.993.931.784,00	DINAS SOSIAL
		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	n/a	70		80		DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	50	55	4.074.365.740,00	80	21.702.243.794,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	57	100	250.582.500,00	100	2.456.990.878,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan , dan kesetiakawana n sosial	Persen	75	75	159.334.904,00	80	1.414.492.152,00	DINAS SOSIAL

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		95,18	95,5		96,9		DINAS PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK, PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		n/a	69,36		75,96		DINAS PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK, PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaia n Desa Prima	Persen	37,33	37,33	550.000.000,00	42,67	3.635.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57	62	63.875.000,00	75	1.754.447.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan		0,0004	0,00035	434.963.300,00	0,00026	3.639.672.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6	7	34.460.120,00	11	950.920.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
									KELUARGA BERENCANA
Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak		Kategori Kabupaten Layak Anak		Madya	Nindya		KLA		DINAS PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK, PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	n/a	15	55.799.245,00	75	2.811.598.490,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	70	100	629.728.475,00	100	3.917.457.175,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	83	1.938.485.000,00	83	8.070.985.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	Angka	1,67	1,66	150.544.950,00	1,62	841.744.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCAME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Persen	n/a	77,2	5.548.497.130,00	77,2	16.815.166.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82,5	83	970.477.780,00	85,5	5.791.941.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jumlah Misi 5						25.916.291.000,00		132.308. 001.000	
Jumlah Total						2.141.090.935.000,00		11.674.2 57.712.000	

f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Tabel 1.1.12 Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2022 berdasarkan RKPD Perubahan tahun 2022 Peraturan Bupati Bantul No 66 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	728.204.515.077,00	665.717.588.052,30	91,42%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	728.204.515.077,00	665.717.588.052,30	91,42%
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	728.204.515.077,00	665.717.588.052,30	91,42%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	322.921.950.075,00	298.308.026.548,00	92,38%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.085.114.500,00	945.200.500,00	87,11%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	316.551.795.473,00	292.664.935.406,00	92,45%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.190.396.900,00	1.098.301.910,00	92,26%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.940.000,00	110.550.750,00	87,09%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.907.576.349,00	2.676.242.870,00	92,04%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.060.126.853,00	812.795.112,00	76,67%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	182.883.327.188,00	173.579.010.255,30	94,91%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	94.119.818.441,00	91.145.321.314,00	96,84%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.837.126.922,00	55.493.667.574,18	94,32%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.776.656.825,00	23.026.825.969,12	89,33%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.149.725.000,00	3.913.195.398,00	94,30%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.699.005.120,00	1.516.640.603,00	89,27%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.276.060.000,00	1.195.729.603,00	93,70%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	422.945.120,00	320.911.000,00	75,88%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	220.700.232.694,00	192.313.910.646,00	87,14%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	220.700.232.694,00	192.313.910.646,00	87,14%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	468.328.401.354,00	440.434.010.952,55	94,04%
DINAS KESEHATAN	252.448.863.779,00	228.869.622.594,55	90,66%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.336.260.803,00	131.656.428.743,10	88,16%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.612.112,00	491.901.264,00	99,25%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.271.519.824,00	76.905.104.013,00	91,26%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.917.320,00	688.438.171,00	99,35%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.762.310.048,00	3.707.156.510,00	98,53%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.064.790.540,00	1.054.384.367,00	99,02%
Peningkatan Pelayanan BLUD	59.049.110.959,00	48.809.444.418,10	82,66%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	99.535.220.706,00	94.126.408.727,45	94,57%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.908.739.664,00	16.464.275.683,45	91,93%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.396.361.978,00	77.433.312.398,00	95,13%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	103.000.000,00	103.000.000,00	100,00%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.119.064,00	125.820.646,00	98,98%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.370.973.374,00	1.110.756.228,00	81,02%
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	150.571.798,00	147.256.520,00	97,80%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	970.401.576,00	715.950.958,00	73,78%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	247.548.750,00	99,02%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	717.874.500,00	608.226.650,00	84,73%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.218.000,00	70.318.000,00	81,56%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	197.890.000,00	193.090.000,00	97,57%
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	291.114.500,00	234.029.500,00	80,39%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	137.652.000,00	105.789.150,00	76,85%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.488.534.396,00	1.367.802.246,00	91,89%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	453.084.496,00	432.016.846,00	95,35%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	361.347.200,00	360.409.700,00	99,74%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.102.700,00	575.375.700,00	85,35%
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	215.879.537.575,00	211.564.388.358,00	98,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215.879.537.575,00	211.564.388.358,00	98,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.183.323.887,00	32.639.113.259,00	95,48%
Peningkatan Pelayanan BLUD	181.696.213.688,00	178.925.275.099,00	98,47%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.359.746.852,00	138.786.132.968,00	83,93%
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	163.311.751.313,00	136.792.082.704,00	83,76%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.844.284.729,00	17.099.285.828,00	90,74%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	808.004.803,00	755.374.930,00	93,49%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.679.103.460,00	10.555.069.567,00	90,38%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.737.887.934,00	1.533.754.054,00	88,25%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.427.700.000,00	2.187.484.700,00	90,11%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.201.988,00	809.621.246,00	93,58%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.326.386.544,00	1.257.981.331,00	94,84%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.639.466.273,00	12.535.478.684,00	71,06%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.012.429.657,00	4.746.280.700,00	67,68%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.627.036.616,00	7.789.197.984,00	73,30%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.337.513.032,00	8.725.318.382,00	93,44%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.337.513.032,00	8.725.318.382,00	93,44%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	771.899.850,00	629.467.000,00	81,55%
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	771.899.850,00	629.467.000,00	81,55%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.122.014.644,00	8.753.676.692,00	95,96%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.122.014.644,00	8.753.676.692,00	95,96%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.619.167.631,00	3.760.912.800,00	81,42%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.619.167.631,00	3.760.912.800,00	81,42%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.561.781.329,00	21.357.759.816,00	83,55%
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.561.781.329,00	21.357.759.816,00	83,55%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.619.685.668,00	13.781.107.398,00	94,26%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.619.685.668,00	13.781.107.398,00	94,26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.989.618.993,00	49.466.257.456,00	79,80%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.989.618.993,00	49.466.257.456,00	79,80%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	806.319.164,00	682.818.648,00	84,68%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	291.234.916,00	223.272.916,00	76,66%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	297.704.248,00	244.307.432,00	82,06%
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	217.380.000,00	215.238.300,00	99,01%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	98.095.150,00	98.095.150,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	98.095.150,00	98.095.150,00	100,00%
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	98.095.150,00	98.095.150,00	100,00%
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	1.949.900.389,00	1.895.955.114,00	97,23%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.641.348.889,00	1.587.403.614,00	96,71%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	846.413.250,00	804.141.850,00	95,01%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	94.698.875,00	94.648.750,00	99,95%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	700.236.764,00	688.613.014,00	98,34%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	308.551.500,00	308.551.500,00	100,00%
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	308.551.500,00	308.551.500,00	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.629.013.832,00	12.682.256.836,00	93,05%
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	13.629.013.832,00	12.682.256.836,00	93,05%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.902.370.374,00	3.169.696.086,00	81,22%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	328.300.000,00	190.723.000,00	58,09%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.221.098.342,00	2.678.194.254,00	83,15%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	352.972.032,00	300.778.832,00	85,21%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.196.818.458,00	8.990.795.750,00	97,76%
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	929.610.000,00	906.269.250,00	97,49%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.267.208.458,00	8.084.526.500,00	97,79%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	340.000.000,00	340.000.000,00	100,00%
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000,00	340.000.000,00	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	189.825.000,00	181.765.000,00	95,75%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	189.825.000,00	181.765.000,00	95,75%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.059.243.992,00	24.052.424.706,00	92,30%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.333.645.331,00	11.103.550.144,00	90,03%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.228.818.542,00	8.047.916.951,00	87,20%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.402.500,00	25.130.000,00	98,93%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.776.424.715,00	6.627.218.906,00	85,22%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.815.000,00	190.907.200,00	97,49%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.308.523,00	403.259.550,00	98,76%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.165.184,00	354.982.494,00	98,29%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.702.620,00	446.418.801,00	96,69%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.104.826.789,00	3.055.633.193,00	98,42%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.272.595.030,00	2.232.778.205,00	98,25%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	832.231.759,00	822.854.988,00	98,87%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.725.598.661,00	12.948.874.562,00	94,34%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.208.155.991,00	9.644.659.548,00	94,48%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.625.000,00	13.935.000,00	95,28%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.545.313.477,00	4.061.790.016,00	89,36%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	301.130.001,00	295.411.700,00	98,10%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.575.756,00	282.900.550,00	99,06%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.475.000,00	200.550.750,00	98,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.905.922.432,00	3.873.475.135,00	99,17%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	951.114.325,00	916.596.397,00	96,37%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.943.512.670,00	2.738.568.095,00	93,04%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	828.565.000,00	802.768.000,00	96,89%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.699.254.000,00	1.557.203.000,00	91,64%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	236.189.170,00	208.202.595,00	88,15%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	179.504.500,00	170.394.500,00	94,92%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	573.930.000,00	565.646.919,00	98,56%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	403.930.000,00	397.531.919,00	98,42%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	23.575.000,00	94,30%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	125.000.000,00	124.910.000,00	99,93%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	20.000.000,00	19.630.000,00	98,15%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.127.367.621,00	24.214.136.908,00	96,37%
DINAS SOSIAL	25.127.367.621,00	24.214.136.908,00	96,37%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.961.850.401,00	7.182.899.738,00	90,22%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.132.020,00	329.104.373,00	99,99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.794.087.540,00	4.351.591.075,00	90,77%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.130.000,00	12.130.000,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.725.743.587,00	1.426.617.440,00	82,67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.040.366,00	349.816.875,00	97,43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.716.888,00	713.639.975,00	96,21%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	874.024.259,00	873.920.398,00	99,99%
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.450.000,00	12.450.000,00	100,00%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	861.574.259,00	861.470.398,00	99,99%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.466.370.445,00	8.401.423.098,00	99,23%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	8.311.015.365,00	8.248.088.722,00	99,24%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	155.355.080,00	153.334.376,00	98,70%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.985.614.091,00	6.943.201.818,00	99,39%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.985.614.091,00	6.943.201.818,00	99,39%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	667.507.095,00	640.690.730,00	95,98%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	324.391.500,00	304.711.500,00	93,93%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	343.115.595,00	335.979.230,00	97,92%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	172.001.330,00	172.001.126,00	100,00%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	172.001.330,00	172.001.126,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.418.781.824,00	48.638.792.927,00	96,47%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	50.418.781.824,00	48.638.792.927,00	96,47%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50.418.781.824,00	48.638.792.927,00	96,47%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.690.179.632,00	8.718.017.601,00	89,97%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.331.940,00	61.161.940,00	99,72%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.568.442.891,00	6.624.432.423,00	87,53%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.543.157,00	1.102.597.115,00	99,37%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.075.000,00	26.100.000,00	89,77%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.401.192,00	362.139.423,00	96,21%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.385.452,00	541.586.700,00	99,30%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.503.440.410,00	2.483.668.310,00	99,21%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.880.324.410,00	1.864.367.750,00	99,15%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	319.108.000,00	315.794.350,00	98,96%
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.008.000,00	273.506.210,00	99,82%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	37.759.909.622,00	36.973.092.956,00	97,92%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	37.420.978.090,00	36.644.330.516,00	97,92%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	291.749.032,00	289.675.340,00	99,29%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	47.182.500,00	39.087.100,00	82,84%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	465.252.160,00	464.014.060,00	99,73%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.637.500,00	115.367.500,00	99,77%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	349.614.660,00	348.646.560,00	99,72%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.292.046.020,00	2.203.846.314,00	96,15%
DINAS SOSIAL	0,00	0,00	-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	-
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	0,00	-
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	-
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	0,00	-
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	0,00	-
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.292.046.020,00	2.203.846.314,00	96,15%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	259.737.500,00	257.277.500,00	99,05%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.625.000,00	10.625.000,00	100,00%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.575.000,00	16.575.000,00	100,00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	232.537.500,00	230.077.500,00	98,94%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	670.656.800,00	641.660.408,00	95,68%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.450.000,00	146.950.000,00	97,67%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	497.681.800,00	472.185.408,00	94,88%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.525.000,00	22.525.000,00	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	483.833.745,00	477.497.325,00	98,69%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	127.050.000,00	124.550.000,00	98,03%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	356.783.745,00	352.947.325,00	98,92%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	869.967.975,00	819.561.081,00	94,21%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767.661.975,00	717.255.081,00	93,43%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000,00	102.306.000,00	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.282.548.016,00	1.274.890.516,00	99,40%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.282.548.016,00	1.274.890.516,00	99,40%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00%
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	946.711.016,00	941.091.016,00	99,41%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	231.491.016,00	231.481.016,00	100,00%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	114.125.000,00	112.625.000,00	98,69%
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	300.000,00	300.000,00	100,00%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	600.795.000,00	596.685.000,00	99,32%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	304.762.000,00	304.762.000,00	100,00%
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	27.987.000,00	27.987.000,00	100,00%
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	276.775.000,00	276.775.000,00	100,00%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	28.175.000,00	26.137.500,00	92,77%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	28.175.000,00	26.137.500,00	92,77%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	12.664.878.002,00	10.649.459.819,00	84,09%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	0,00	0,00	-
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0,00	0,00	-
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	12.138.628.002,00	10.127.556.169,00	83,43%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.109.708.086,00	5.588.501.179,00	91,47%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.328.384.575,00	4.923.750.527,00	92,41%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.464.416,00	30.464.416,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.035.976,00	231.373.990,00	68,65%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.600.000,00	39.741.600,00	97,89%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.786.496,00	155.411.696,00	94,89%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.836.623,00	200.158.950,00	99,17%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	313.500.000,00	313.480.000,00	99,99%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	313.500.000,00	313.480.000,00	99,99%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	473.786.916,00	274.122.890,00	57,86%
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	473.786.916,00	274.122.890,00	57,86%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	5.241.633.000,00	3.951.452.100,00	75,39%
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.241.633.000,00	3.951.452.100,00	75,39%
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	526.250.000,00	521.903.650,00	99,17%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	526.250.000,00	521.903.650,00	99,17%
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	526.250.000,00	521.903.650,00	99,17%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	38.104.834.366,00	36.036.712.344,00	94,57%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.104.834.366,00	36.036.712.344,00	94,57%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.174.058.554,00	13.179.155.104,00	92,98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.712.500,00	10.712.500,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.997.363.596,00	10.049.206.046,00	91,38%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.977.733,00	507.799.500,00	99,96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.881.355,00	60.531.000,00	99,42%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.590.288,00	534.198.130,00	92,33%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.018.533.082,00	2.016.707.928,00	99,91%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	383.287.932,00	380.910.706,00	99,38%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	383.287.932,00	380.910.706,00	99,38%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.598.864.059,00	4.087.211.887,00	88,87%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4.493.864.059,00	3.982.956.288,00	88,63%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.255.599,00	99,26%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.262.146.405,00	3.941.555.831,00	92,48%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.262.146.405,00	3.941.555.831,00	92,48%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.675.000,00	14.675.000,00	100,00%
Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.675.000,00	14.675.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	31.900.000,00	31.765.000,00	99,58%
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.900.000,00	31.765.000,00	99,58%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	125.720.500,00	123.900.500,00	98,55%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.720.500,00	123.900.500,00	98,55%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.185.000,00	20.157.500,00	99,86%
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.185.000,00	20.157.500,00	99,86%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	193.700.000,00	193.682.500,00	99,99%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	193.700.000,00	193.682.500,00	99,99%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.300.296.916,00	14.063.698.316,00	98,35%
Pengelolaan Sampah	14.300.296.916,00	14.063.698.316,00	98,35%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.412.590.895,00	11.369.172.298,00	91,59%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.412.590.895,00	11.369.172.298,00	91,59%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.639.707.519,00	9.603.416.422,00	90,26%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	490.045.504,00	489.918.400,00	99,97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.402.190.610,00	6.428.838.842,00	86,85%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.857.500,00	53.857.500,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.855.352.736,00	1.799.830.187,00	97,01%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.209.000,00	116.354.000,00	98,43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.517.048,00	231.549.070,00	98,32%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.535.121,00	483.068.423,00	99,70%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	682.176.602,00	679.143.518,00	99,56%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	682.176.602,00	679.143.518,00	99,56%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	374.975.317,00	373.474.728,00	99,60%
Pelayanan Pencatatan Sipil	318.311.405,00	317.311.046,00	99,69%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	56.663.912,00	56.163.682,00	99,12%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	651.859.048,00	651.108.548,00	99,88%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	399.376.542,00	399.276.382,00	99,97%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	252.482.506,00	251.832.166,00	99,74%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	63.872.409,00	62.029.082,00	97,11%
Penyusunan Profil Kependudukan	63.872.409,00	62.029.082,00	97,11%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.733.597.864,00	12.689.954.688,00	92,40%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	-
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0,00	0,00	-
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	0,00	0,00	-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	0,00	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	0,00	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	13.733.597.864,00	12.689.954.688,00	92,40%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.282.890.346,00	5.281.931.032,00	84,07%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.347.032,00	68.321.780,00	99,96%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.635.573.819,00	3.647.159.506,00	78,68%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.665.525,00	639.824.857,00	98,64%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.074.880,00	25.971.250,00	99,60%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.804.560,00	293.166.788,00	99,78%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.424.530,00	607.486.851,00	99,52%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENATAAN DESA	15.115.000,00	15.115.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Penataan Desa	15.115.000,00	15.115.000,00	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	22.451.000,00	22.201.000,00	98,89%
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	22.451.000,00	22.201.000,00	98,89%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.875.570.046,00	4.834.081.350,00	99,15%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.875.570.046,00	4.834.081.350,00	99,15%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.537.571.472,00	2.536.626.306,00	99,96%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.537.571.472,00	2.536.626.306,00	99,96%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.259.301.629,00	16.006.000.158,00	87,66%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.259.301.629,00	16.006.000.158,00	87,66%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.013.055.545,00	5.132.816.884,00	85,36%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.100.548,00	86.071.044,00	98,82%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.943.788.478,00	4.117.322.774,00	83,28%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.677.444,00	283.764.660,00	93,14%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.941.048,00	276.777.338,00	97,48%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.548.027,00	368.881.068,00	93,73%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	335.634.950,00	302.651.350,00	90,17%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.307.500,00	19.307.500,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	316.327.450,00	283.343.850,00	89,57%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.344.291.134,00	6.539.876.924,00	89,05%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.047.192.384,00	2.004.438.774,00	97,91%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	897.038.000,00	888.755.500,00	99,08%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.482.785.750,00	2.729.557.650,00	78,37%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	917.275.000,00	917.125.000,00	99,98%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.566.320.000,00	4.030.655.000,00	88,27%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.552.097.500,00	4.016.432.500,00	88,23%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.222.500,00	14.222.500,00	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	28.201.771.569,00	27.269.570.374,36	96,69%
DINAS PERHUBUNGAN	28.201.771.569,00	27.269.570.374,36	96,69%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.058.320.847,00	7.293.638.746,00	90,51%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.080.000,00	51.942.500,00	99,74%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.179.780.144,00	5.435.524.630,00	87,96%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.575.000,00	117.575.000,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.222.813,00	423.869.736,00	98,52%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.991.700,00	774.513.164,00	98,41%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.671.190,00	490.213.716,00	99,70%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.143.450.722,00	19.975.931.628,36	99,17%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.501.135.000,00	15.394.359.600,00	99,31%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	942.480.000,00	934.859.131,36	99,19%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	917.827.597,00	911.361.775,00	99,30%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.195.285.000,00	2.152.404.122,00	98,05%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.580.000,00	47.580.000,00	100,00%
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	529.143.125,00	525.369.500,00	99,29%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.997.500,00	99,98%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.986.145.246,00	19.904.641.077,00	94,85%
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.986.145.246,00	19.904.641.077,00	94,85%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.302.204.496,00	6.443.868.438,00	88,25%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.351.500,00	106.152.500,00	99,81%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.785.817.729,00	4.948.344.655,00	85,53%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	644.060.250,00	625.920.865,00	97,18%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.437.975,00	342.236.175,00	99,65%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.537.042,00	421.214.243,00	99,69%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.395.423.550,00	1.388.978.140,00	99,54%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.395.423.550,00	1.388.978.140,00	99,54%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	12.288.517.200,00	12.071.794.499,00	98,24%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.402.820.700,00	10.360.216.996,00	99,59%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.885.696.500,00	1.711.577.503,00	90,77%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.536.325.215,00	18.528.287.278,00	86,03%
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.536.325.215,00	18.528.287.278,00	86,03%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.852.194.171,00	15.878.532.706,00	84,23%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.498.516,00	33.541.548,00	97,23%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.583.097.935,00	12.673.657.218,00	81,33%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.722.339,00	456.212.560,00	94,12%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.599.000,00	180.898.000,00	99,61%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.616.805.523,00	1.594.972.876,00	98,65%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	951.470.858,00	939.250.504,00	98,72%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.086.016,00	24.438.148,00	97,42%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.086.016,00	24.438.148,00	97,42%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	73.361.016,00	73.350.648,00	99,99%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	73.361.016,00	73.350.648,00	99,99%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	27.086.016,00	27.075.648,00	99,96%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.086.016,00	27.075.648,00	99,96%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	854.150.000,00	849.912.240,00	99,50%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	687.070.000,00	683.621.120,00	99,50%
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	167.080.000,00	166.291.120,00	99,53%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	102.109.532,00	101.167.196,00	99,08%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	102.109.532,00	101.167.196,00	99,08%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	873.564.832,00	852.332.846,00	97,57%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	873.564.832,00	852.332.846,00	97,57%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	728.773.632,00	721.477.846,00	99,00%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	728.773.632,00	721.477.846,00	99,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.882.369.572,00	7.091.511.829,00	89,97%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.882.369.572,00	7.091.511.829,00	89,97%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.387.636.812,00	5.660.354.889,00	88,61%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.452.500,00	99,55%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.727.555.858,00	4.037.271.016,00	85,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.800.000,00	29.050.000,00	97,48%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.941.200,00	637.343.381,00	96,28%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.657.600,00	362.420.214,00	98,04%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.057.154,00	505.717.778,00	99,15%
Penataan Organisasi	78.125.000,00	78.100.000,00	99,97%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	321.130.000,00	317.910.800,00	99,00%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	221.200.000,00	220.412.500,00	99,64%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	99.930.000,00	97.498.300,00	97,57%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	152.010.000,00	134.935.000,00	88,77%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	152.010.000,00	134.935.000,00	88,77%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	499.752.144,00	497.848.694,00	99,62%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	499.752.144,00	497.848.694,00	99,62%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	422.704.600,00	382.074.930,00	90,39%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	422.704.600,00	382.074.930,00	90,39%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.136.016,00	98.387.516,00	99,24%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.136.016,00	98.387.516,00	99,24%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.130.715.556,00	12.140.938.494,00	92,46%
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.130.715.556,00	12.140.938.494,00	92,46%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.734.157.000,00	1.499.606.700,00	86,47%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.534.157.000,00	1.299.606.700,00	84,71%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.896.558.556,00	10.141.331.794,00	93,07%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	972.641.256,00	448.567.960,00	46,12%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.647.474.500,00	1.522.842.950,00	92,43%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	7.120.000.000,00	7.065.971.384,00	99,24%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	406.442.800,00	353.949.500,00	87,08%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	149.080.000,00	148.480.000,00	99,60%
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	149.080.000,00	148.480.000,00	99,60%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	149.080.000,00	148.480.000,00	99,60%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.080.000,00	148.480.000,00	99,60%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	804.643.700,00	792.715.797,00	98,52%
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	804.643.700,00	792.715.797,00	98,52%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	804.643.700,00	792.715.797,00	98,52%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	514.656.200,00	510.249.932,00	99,14%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	289.987.500,00	282.465.865,00	97,41%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	25.215.761.048,00	24.229.744.340,00	96,09%
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	688.727.000,00	670.932.600,00	97,42%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	688.727.000,00	670.932.600,00	97,42%
Pendidikan Berbasis Budaya	688.727.000,00	670.932.600,00	97,42%
DINAS KESEHATAN	580.000.000,00	579.549.830,00	99,92%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	580.000.000,00	579.549.830,00	99,92%
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	580.000.000,00	579.549.830,00	99,92%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	561.550.000,00	554.666.750,00	98,77%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	561.550.000,00	554.666.750,00	98,77%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	561.550.000,00	554.666.750,00	98,77%
DINAS SOSIAL	0,00	0,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	-
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0,00	0,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	502.650.000,00	477.885.000,00	95,07%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	502.650.000,00	477.885.000,00	95,07%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	502.650.000,00	477.885.000,00	95,07%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	235.000.000,00	233.841.035,00	99,51%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	235.000.000,00	233.841.035,00	99,51%
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	235.000.000,00	233.841.035,00	99,51%
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	471.000.000,00	458.296.950,00	97,30%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	471.000.000,00	458.296.950,00	97,30%
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	471.000.000,00	458.296.950,00	97,30%
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	773.115.000,00	670.461.000,00	86,72%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	773.115.000,00	670.461.000,00	86,72%
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	400.000.000,00	300.921.000,00	75,23%
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	373.115.000,00	369.540.000,00	99,04%
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	20.135.969.048,00	19.318.941.325,00	95,94%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.072.459.048,00	4.890.928.641,00	96,42%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.972.600,00	87.907.500,00	99,93%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.132.075.048,00	3.964.863.608,00	95,95%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.867.500,00	2.867.500,00	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.170.000,00	49.065.000,00	99,79%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.396.876,00	131.602.250,00	97,20%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.900.000,00	46.873.450,00	97,86%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.108.960,00	416.056.019,00	98,10%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.968.064,00	191.693.314,00	99,34%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.063.510.000,00	14.428.012.684,00	95,78%
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.300.000.000,00	3.244.355.824,00	98,31%
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.425.000.000,00	1.404.356.828,00	98,55%
Pengelolaan Taman Budaya	685.000.000,00	539.765.050,00	78,80%
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	2.776.610.000,00	2.755.480.000,00	99,24%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6.876.900.000,00	6.484.054.982,00	94,29%
DINAS PARIWISATA	980.000.000,00	977.419.850,00	99,74%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	980.000.000,00	977.419.850,00	99,74%
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	980.000.000,00	977.419.850,00	99,74%
KAPANEWON PIYUNGAN	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00%
KAPANEWON DLINGO	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
KAPANEWON IMOGIRI	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%
KAPANEWON PANDAK	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00%
KAPANEWON BANTUL	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00%
KAPANEWON KRETEK	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00%
KAPANEWON JETIS	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00%
KAPANEWON KASIHAN	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%
KAPANEWON PLERET	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00%
KAPANEWON PAJANGAN	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%
KAPANEWON SANDEN	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
KAPANEWON SEDAYU	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%
KAPANEWON SEWON	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00%
KAPANEWON SRANDAKAN	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00%
KAPANEWON BANGUNTAPAN	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00%
KAPANEWON PUNDONG	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00%
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	-
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.039.710.040,00	6.358.379.149,64	90,32%
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.039.710.040,00	6.358.379.149,64	90,32%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.122.256.204,00	5.448.742.781,64	89,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.355.006.490,00	4.688.579.846,00	87,56%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.547.152,00	144.074.427,00	98,31%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.464.128,00	231.423.090,00	99,13%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.038.434,00	383.465.418,64	99,33%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	917.453.836,00	909.636.368,00	99,15%
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	917.453.836,00	909.636.368,00	99,15%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	371.542.814,00	370.913.964,00	99,83%
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	371.542.814,00	370.913.964,00	99,83%
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	357.916.814,00	357.290.464,00	99,83%
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	292.178.814,00	291.936.964,00	99,92%
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	65.738.000,00	65.353.500,00	99,42%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	13.626.000,00	13.623.500,00	99,98%
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	13.626.000,00	13.623.500,00	99,98%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.888.725.649,00	7.590.772.869,00	96,22%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.888.725.649,00	7.590.772.869,00	96,22%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.888.725.649,00	7.590.772.869,00	96,22%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.066.220.195,00	3.797.515.783,00	93,39%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.666.000,00	25.627.250,00	99,85%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.801.272.981,00	2.550.983.967,00	91,07%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.829.088,00	250.592.451,00	97,19%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.035.000,00	171.298.731,00	97,31%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.596.820,00	353.641.234,00	99,45%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.820.306,00	441.372.150,00	99,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	348.584.370,00	347.242.870,00	99,62%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	167.609.250,00	167.466.750,00	99,91%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	179.975.120,00	178.776.120,00	99,33%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.183.757.068,00	2.167.997.850,00	99,28%
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.145.110.500,00	1.139.137.650,00	99,48%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.036.596.568,00	1.026.810.200,00	99,06%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	271.816.343,00	271.266.750,00	99,80%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	271.816.343,00	271.266.750,00	99,80%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.018.347.673,00	1.006.749.616,00	98,86%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	28.081.016,00	27.159.416,00	96,72%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	989.316.657,00	978.640.200,00	98,92%
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	950.000,00	950.000,00	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	33.368.829.898,00	18.242.439.409,00	54,67%
DINAS PARIWISATA	33.368.829.898,00	18.242.439.409,00	54,67%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.341.869.345,00	8.553.503.846,00	91,56%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.593.032,00	53.592.780,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.899.931.724,00	6.282.694.147,00	91,05%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.983.266,00	25.983.140,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.086.095.100,00	962.493.148,00	88,62%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	493.685.000,00	479.216.300,00	97,07%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.872.112,00	250.203.771,00	98,17%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.709.111,00	499.320.560,00	94,62%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	20.724.850.391,00	6.427.624.465,00	31,01%
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.226.191.108,00	2.173.363.184,00	97,63%
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.035.325.493,00	2.987.293.146,00	98,42%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	14.542.465.470,00	347.361.141,00	2,39%
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	920.868.320,00	919.606.994,00	99,86%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.970.365.380,00	1.929.664.298,00	97,93%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.970.365.380,00	1.929.664.298,00	97,93%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.331.744.782,00	1.331.646.800,00	99,99%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.331.744.782,00	1.331.646.800,00	99,99%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	43.077.998.597,00	37.775.076.428,78	87,69%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	43.077.998.597,00	37.775.076.428,78	87,69%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.117.565.808,00	23.490.885.861,00	86,63%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.916.250,00	90.624.500,00	98,59%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.443.409.879,00	20.965.820.986,00	85,77%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.933.993,00	487.702.210,00	89,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	546.482.000,00	515.178.000,00	94,27%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.314.600,00	603.747.693,00	92,84%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.509.086,00	827.812.472,00	98,14%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.537.871.553,00	3.351.012.077,00	94,72%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.977.431.841,00	1.831.485.885,00	92,62%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	785.836.664,00	784.216.344,00	99,79%
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	774.603.048,00	735.309.848,00	94,93%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.573.900.000,00	4.538.398.838,78	81,42%
Pengembangan Prasarana Pertanian	115.375.000,00	115.049.500,00	99,72%
Pembangunan Prasarana Pertanian	5.450.825.000,00	4.415.649.338,78	81,01%
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.323.625.756,00	3.224.085.818,00	97,01%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.741.462.266,00	1.684.167.434,00	96,71%
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	404.777.224,00	400.212.096,00	98,87%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	727.034.500,00	698.230.108,00	96,04%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	447.851.766,00	438.976.180,00	98,02%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	298.730.000,00	297.088.000,00	99,45%
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	298.730.000,00	297.088.000,00	99,45%
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	700.000,00	700.000,00	100,00%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.223.605.480,00	2.870.905.834,00	89,06%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.223.605.480,00	2.870.905.834,00	89,06%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	11.823.217.679,00	10.748.366.586,00	90,91%
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.823.217.679,00	10.748.366.586,00	90,91%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	306.658.048,00	302.598.444,00	98,68%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	306.658.048,00	302.598.444,00	98,68%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	9.948.810.549,00	8.915.196.586,00	89,61%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.615.184.101,00	7.597.842.888,00	88,19%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.333.626.448,00	1.317.353.698,00	98,78%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	275.586.664,00	270.890.492,00	98,30%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	239.513.148,00	235.773.944,00	98,44%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.073.516,00	35.116.548,00	97,35%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	786.658.358,00	768.068.859,00	97,64%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	786.658.358,00	768.068.859,00	97,64%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	505.504.060,00	491.612.205,00	97,25%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	505.504.060,00	491.612.205,00	97,25%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.422.200.690,00	4.940.225.385,00	91,11%
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.422.200.690,00	4.940.225.385,00	91,11%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.142.964.674,00	4.662.521.337,00	90,66%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.142.964.674,00	4.662.521.337,00	90,66%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	279.236.016,00	277.704.048,00	99,45%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	279.236.016,00	277.704.048,00	99,45%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	584.328.740,00	584.121.365,00	99,96%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	584.328.740,00	584.121.365,00	99,96%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	584.328.740,00	584.121.365,00	99,96%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	584.328.740,00	584.121.365,00	99,96%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	47.073.589.157,00	45.157.315.907,00	95,93%
SEKRETARIAT DAERAH	47.073.589.157,00	45.157.315.907,00	95,93%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	-

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	0,00	0,00	-
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	0,00	0,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	1.176.354.500,00	1.107.520.500,00	94,15%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.176.354.500,00	1.107.520.500,00	94,15%
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1.176.354.500,00	1.107.520.500,00	94,15%
SEKRETARIAT DAERAH	44.098.520.157,00	42.308.791.257,00	95,94%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.063.333.976,00	30.406.942.501,00	94,83%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.875.700,00	90.245.000,00	87,72%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.310.816.955,00	17.976.240.168,00	93,09%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.605.000,00	63.405.000,00	99,69%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.971.895.113,00	4.873.974.912,00	98,03%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.469.224.864,00	3.376.559.958,00	97,33%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.429.299.118,00	2.338.260.075,00	96,25%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	885.837.260,00	868.028.996,00	97,99%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	75.000.000,00	74.400.000,00	99,20%
Penataan Organisasi	336.385.652,00	333.055.906,00	99,01%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	418.394.314,00	412.772.486,00	98,66%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.756.451.243,00	9.647.004.578,00	98,88%
Administrasi Tata Pemerintahan	1.070.892.620,00	1.065.190.300,00	99,47%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.808.579.623,00	7.716.133.278,00	98,82%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	785.904.000,00	776.281.500,00	98,78%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	91.075.000,00	89.399.500,00	98,16%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.110.804.938,00	1.094.763.332,00	98,56%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	483.051.000,00	481.349.500,00	99,65%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	579.978.938,00	565.688.832,00	97,54%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	37.775.000,00	37.725.000,00	99,87%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.167.930.000,00	1.160.080.846,00	99,33%
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	829.030.000,00	821.362.550,00	99,08%
Peningkatan Budaya Pemerintahan	115.360.000,00	115.178.296,00	99,84%
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	223.540.000,00	223.540.000,00	100,00%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	536.250.000,00	532.100.000,00	99,23%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	536.250.000,00	532.100.000,00	99,23%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	536.250.000,00	532.100.000,00	99,23%
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	137.496.500,00	83.988.650,00	61,08%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	137.496.500,00	83.988.650,00	61,08%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	137.496.500,00	83.988.650,00	61,08%
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	354.868.000,00	354.845.500,00	99,99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	354.868.000,00	354.845.500,00	99,99%
Peningkatan Budaya Pemerintahan	354.868.000,00	354.845.500,00	99,99%
KAPANEWON PIYUNGAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON DLINGO	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
KAPANEWON IMOGIRI	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON PANDAK	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON BANTUL	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	0,00	0,00	-
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON KRETEK	45.300.000,00	45.270.000,00	99,93%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.270.000,00	99,93%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.270.000,00	99,93%
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON JETIS	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON KASIHAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
KAPANEWON PLERET	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON PAJANGAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON SANDEN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON SEDAYU	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON SEWON	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON SRANDAKAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON BANGUNTAPAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
KAPANEWON PUNDONG	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	0,00	0,00	-
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00%
SEKRETARIAT DPRD	49.867.449.493,00	42.682.114.278,00	85,59%
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	49.867.449.493,00	42.682.114.278,00	85,59%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.129.865.343,00	32.086.627.117,00	94,01%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.977.500,00	182.070.000,00	98,43%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.385.190.287,00	5.024.399.177,00	93,30%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.595.000,00	288.620.000,00	90,59%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.583.106.699,00	1.976.266.041,00	76,51%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.903.480,00	737.275.612,00	96,64%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.216.299.325,00	640.007.440,00	52,62%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	23.405.692.092,00	23.016.438.083,00	98,34%
Layanan Administrasi DPRD	273.100.960,00	221.550.764,00	81,12%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.737.584.150,00	10.595.487.161,00	67,33%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.970.512.750,00	2.522.952.400,00	63,54%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.919.619.000,00	982.723.510,00	51,19%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.513.497.000,00	1.488.416.700,00	59,22%
Peningkatan Kapasitas DPRD	3.447.195.000,00	2.981.287.160,00	86,48%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.085.632.800,00	998.954.600,00	92,02%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	176.650.000,00	76.667.000,00	43,40%
Fasilitasi Tugas DPRD	2.624.477.600,00	1.544.485.791,00	58,85%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.115.565.642,00	11.570.371.408,50	95,50%
PERENCANAAN	12.115.565.642,00	11.570.371.408,50	95,50%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.115.565.642,00	11.570.371.408,50	95,50%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.241.544.482,00	7.824.644.479,40	94,94%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.300.000,00	26.292.400,00	99,97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.062.323.684,00	6.747.924.565,00	95,55%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.305.000,00	109.055.000,00	99,77%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.150.935,00	475.216.106,00	93,15%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.278.000,00	87.489.000,00	77,92%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.937.600,00	155.658.699,40	95,53%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.249.263,00	223.008.709,00	86,35%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.041.623.564,00	1.977.976.318,00	96,88%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.203.858.048,00	1.150.503.420,00	95,57%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	249.558.516,00	246.404.048,00	98,74%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	588.207.000,00	581.068.850,00	98,79%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.832.397.596,00	1.767.750.611,10	96,47%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	360.336.564,00	332.756.807,10	92,35%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	861.522.516,00	841.843.000,00	97,72%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	610.538.516,00	593.150.804,00	97,15%
KEUANGAN	449.260.338.398,00	419.604.467.319,00	93,40%
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	449.260.338.398,00	419.604.467.319,00	93,40%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.582.231.511,00	70.191.165.806,00	91,65%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.700.000,00	75.065.000,00	97,87%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.946.126.365,00	20.730.331.618,00	94,46%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	543.660.000,00	395.825.000,00	72,81%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.729.206.450,00	1.362.175.409,00	78,77%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.099.590.000,00	11.841.058.793,00	97,86%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.212.766.096,00	34.959.105.594,00	89,15%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	974.182.600,00	827.604.392,00	84,95%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	348.447.096.005,00	330.413.156.591,00	94,82%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	528.660.000,00	417.223.000,00	78,92%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	437.026.016,00	343.883.116,00	78,69%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	440.413.516,00	423.596.716,00	96,18%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	347.040.996.473,00	329.228.453.759,00	94,87%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	13.438.569.532,00	9.283.651.662,00	69,08%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	13.438.569.532,00	9.283.651.662,00	69,08%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.792.441.350,00	9.716.493.260,00	90,03%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	10.792.441.350,00	9.716.493.260,00	90,03%
KEPEGAWAIAN	16.610.041.495,00	14.693.971.124,00	88,46%
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	16.610.041.495,00	14.693.971.124,00	88,46%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.786.411.363,00	7.554.313.887,00	85,98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.091.000,00	10.072.000,00	99,81%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.039.870.790,00	5.891.822.038,00	83,69%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.967.591,00	679.039.092,00	98,42%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.482.000,00	315.136.572,00	98,03%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.152.032,00	370.014.829,00	92,47%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.847.950,00	288.229.356,00	88,73%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.823.630.132,00	7.139.657.237,00	91,26%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	756.955.132,00	413.832.816,00	54,67%
Mutasi dan Promosi ASN	713.225.000,00	642.447.000,00	90,08%
Pengembangan Kompetensi ASN	5.491.562.500,00	5.284.089.921,00	96,22%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	861.887.500,00	799.287.500,00	92,74%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	280.871.532,00	275.605.414,00	98,13%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	280.871.532,00	275.605.414,00	98,13%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	280.871.532,00	275.605.414,00	98,13%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	110.145.516,00	108.846.018,00	98,82%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	170.726.016,00	166.759.396,00	97,68%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.222.935.841,00	11.651.753.397,00	88,12%
INSPEKTORAT DAERAH	13.222.935.841,00	11.651.753.397,00	88,12%
INSPEKTORAT DAERAH	13.222.935.841,00	11.651.753.397,00	88,12%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.442.922.241,00	9.000.932.097,00	86,19%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.938.750,00	98,98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.614.194.736,00	7.239.031.662,00	84,04%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.873.266,00	221.097.760,00	94,54%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.734.950,00	816.940.168,00	96,37%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.000.000,00	64.350.000,00	99,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.685.840,00	293.541.873,00	95,09%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.433.449,00	360.031.884,00	97,99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.137.546.000,00	1.040.046.700,00	91,43%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	977.426.500,00	908.877.200,00	92,99%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.119.500,00	131.169.500,00	81,92%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.642.467.600,00	1.610.774.600,00	98,07%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	65.299.000,00	63.824.000,00	97,74%
Pendampingan dan Asistensi	1.577.168.600,00	1.546.950.600,00	98,08%
UNSUR KEWILAYAHAN	54.784.883.921,00	52.525.663.849,00	95,88%
KECAMATAN	54.784.883.921,00	52.525.663.849,00	95,88%
KAPANEWON PIYUNGAN	3.302.736.913,00	3.068.635.450,00	92,91%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.076.649.413,00	2.842.547.950,00	92,39%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.496.630.866,00	2.269.193.906,00	90,89%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.150.602,00	185.622.300,00	99,72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.997.000,00	47.997.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.084.064,00	148.207.444,00	96,19%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.286.881,00	185.027.300,00	99,86%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.132.500,00	57.132.500,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.047.500,00	45.047.500,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.085.000,00	12.085.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.090.000,00	120.090.000,00	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80.915.000,00	80.915.000,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	39.175.000,00	39.175.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.850.000,00	40.850.000,00	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.850.000,00	40.850.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.015.000,00	8.015.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.015.000,00	8.015.000,00	100,00%
KAPANEWON DLINGO	3.070.843.697,00	2.954.405.160,00	96,21%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.816.873.697,00	2.705.350.160,00	96,04%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.310.402.761,00	2.202.815.346,00	95,34%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.452.902,00	149.952.802,00	99,67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.700.000,00	34.699.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.708.480,00	157.634.658,00	98,70%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.359.554,00	155.998.354,00	99,13%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.970.000,00	57.955.000,00	99,97%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.975.000,00	49.960.000,00	99,97%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.995.000,00	7.995.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.150.000,00	81.020.000,00	95,15%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.650.000,00	52.630.000,00	99,96%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.500.000,00	28.390.000,00	87,35%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.825.000,00	95.055.000,00	99,20%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.825.000,00	95.055.000,00	99,20%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.025.000,00	15.025.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.025.000,00	15.025.000,00	100,00%
KAPANEWON IMOGIRI	3.196.189.095,00	2.987.252.268,00	93,46%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.905.104.095,00	2.696.317.268,00	92,81%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.311.034,00	2.160.473.906,00	91,38%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.027.932,00	170.548.400,00	99,14%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.603.280,00	127.879.168,00	97,91%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.561.849,00	228.815.794,00	99,68%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.360.000,00	57.360.000,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.560.000,00	50.560.000,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	177.825.000,00	177.675.000,00	99,92%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	111.415.000,00	111.415.000,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	66.410.000,00	66.260.000,00	99,77%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00%
KAPANEWON PANDAK	3.270.095.655,00	3.148.488.336,00	96,28%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.971.178.155,00	2.849.750.336,00	95,91%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.725.000,00	5.725.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.494.127.125,00	2.375.164.872,00	95,23%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.791.647,00	124.356.800,00	99,65%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.500.000,00	49.045.700,00	99,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.576.552,00	161.087.564,00	99,70%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.457.831,00	134.370.400,00	99,20%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.872.500,00	73.872.500,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.922.500,00	58.922.500,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.950.000,00	14.950.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	142.160.000,00	141.980.500,00	99,87%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.350.000,00	69.170.500,00	99,74%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	72.810.000,00	72.810.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76.575.000,00	76.575.000,00	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.575.000,00	76.575.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.310.000,00	6.310.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.310.000,00	6.310.000,00	100,00%
KAPANEWON BANTUL	3.059.385.856,00	2.942.733.690,00	96,19%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.782.411.856,00	2.673.334.690,00	96,08%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.351.634.693,00	2.249.887.678,00	95,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.429.064,00	102.518.864,00	97,24%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.492.000,00	26.127.098,00	98,62%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.730.080,00	154.702.250,00	98,08%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.126.019,00	137.098.800,00	99,26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.849.000,00	71.349.000,00	97,94%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.029.000,00	59.529.000,00	97,54%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.820.000,00	11.820.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80.200.000,00	76.500.000,00	95,39%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	57.500.000,00	53.800.000,00	93,57%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	22.700.000,00	22.700.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.600.000,00	18.700.000,00	95,41%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.600.000,00	18.700.000,00	95,41%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	104.325.000,00	102.850.000,00	98,59%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	104.325.000,00	102.850.000,00	98,59%
KAPANEWON KRETEK	3.275.658.967,00	3.226.386.567,00	98,50%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.964.958.967,00	2.915.723.067,00	98,34%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.503.870.091,00	2.458.017.365,00	98,17%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.032.500,00	185.961.000,00	99,43%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000,00	750.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.314.396,00	138.845.570,00	98,95%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.991.980,00	122.149.132,00	99,31%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	96.950.000,00	96.937.500,00	99,99%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78.500.000,00	78.487.500,00	99,98%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.450.000,00	18.450.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.750.000,00	136.735.000,00	99,99%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.000.000,00	89.985.000,00	99,98%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46.750.000,00	46.750.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.000.000,00	72.991.000,00	99,99%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.000.000,00	72.991.000,00	99,99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	3.146.216.203,00	3.028.885.622,00	96,27%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.867.171.453,00	2.749.840.872,00	95,91%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	825.000,00	825.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.373.735.783,00	2.258.870.544,00	95,16%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.831.580,00	151.406.580,00	99,72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.010.000,00	11.010.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.375.864,00	143.908.722,00	99,68%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.393.226,00	183.820.026,00	99,15%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.632.500,00	41.632.500,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.342.500,00	38.342.500,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.733.750,00	136.733.750,00	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.361.000,00	65.361.000,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	71.372.750,00	71.372.750,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.678.500,00	95.678.500,00	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.678.500,00	95.678.500,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
KAPANEWON JETIS	3.062.561.673,00	2.895.457.463,00	94,54%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.743.814.173,00	2.576.709.963,00	93,91%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.225.000,00	7.225.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.502.459,00	2.094.520.532,00	92,74%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.693.610,00	145.327.450,00	98,40%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.847.664,00	142.598.181,00	99,83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.445.440,00	161.938.800,00	99,69%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.475.000,00	25.475.000,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.350.000,00	11.350.000,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.125.000,00	14.125.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	163.435.000,00	163.435.000,00	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	129.415.000,00	129.415.000,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	124.587.500,00	124.587.500,00	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	124.587.500,00	124.587.500,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00%
KAPANEWON KASIHAN	3.371.357.632,00	3.271.834.851,00	97,05%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.181.916.132,00	3.082.763.351,00	96,88%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.529.142.196,00	2.439.775.732,00	96,47%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.431.854,00	137.342.466,00	99,93%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.451.000,00	91.441.000,00	99,99%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.125.600,00	173.138.047,00	95,07%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.765.482,00	232.066.106,00	99,70%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.500.000,00	88.460.000,00	99,95%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72.500.000,00	72.500.000,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.000.000,00	15.960.000,00	99,75%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.591.500,00	57.591.500,00	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.516.500,00	35.516.500,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	22.075.000,00	22.075.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.850.000,00	32.520.000,00	99,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.850.000,00	32.520.000,00	99,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00%
KAPANEWON PLERET	3.059.365.467,00	2.984.323.136,00	97,55%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.764.035.467,00	2.691.493.136,00	97,38%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.248.271.487,00	2.177.588.494,00	96,86%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.634.116,00	154.995.000,00	99,59%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.521.000,00	30.500.000,00	99,93%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.650.864,00	132.042.342,00	99,54%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.458.000,00	188.867.300,00	99,69%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.850.000,00	37.850.000,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.175.000,00	23.175.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.675.000,00	14.675.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	149.925.000,00	147.425.000,00	98,33%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.312.500,00	90.312.500,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.612.500,00	57.112.500,00	95,81%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.255.000,00	99.255.000,00	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.255.000,00	99.255.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00%
KAPANEWON PAJANGAN	3.285.742.973,00	3.102.664.067,00	94,43%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.043.346.973,00	2.861.370.067,00	94,02%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.375.000,00	9.375.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.521.782.219,00	2.353.085.217,00	93,31%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.942.056,00	181.007.450,00	99,49%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.909.000,00	36.567.500,00	99,07%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.570.080,00	158.273.600,00	96,76%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.768.618,00	123.061.300,00	94,83%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.850.000,00	53.845.500,00	98,17%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.075.000,00	45.070.500,00	97,82%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.775.000,00	8.775.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.587.000,00	71.529.500,00	99,92%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.862.000,00	40.804.500,00	99,86%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.725.000,00	30.725.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.710.000,00	18.672.500,00	99,80%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.710.000,00	18.672.500,00	99,80%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97.249.000,00	97.246.500,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	97.249.000,00	97.246.500,00	100,00%
KAPANEWON SANDEN	3.021.523.597,00	2.941.515.397,00	97,35%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.740.723.837,00	2.661.540.647,00	97,11%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.280.000,00	3.279.500,00	99,98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.215.185.379,00	2.138.091.891,00	96,52%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.185.599,00	164.719.000,00	99,72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.738.000,00	20.738.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.840.080,00	165.657.677,00	99,29%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.494.779,00	169.054.579,00	99,74%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.975.000,00	70.975.000,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.900.000,00	61.900.000,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.075.000,00	9.075.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	118.883.760,00	118.883.750,00	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.070.000,00	55.070.000,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	63.813.760,00	63.813.750,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	69.441.000,00	68.641.000,00	98,85%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69.441.000,00	68.641.000,00	98,85%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.500.000,00	21.475.000,00	99,88%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.500.000,00	21.475.000,00	99,88%
KAPANEWON SEDAYU	3.247.387.074,00	3.141.744.775,00	96,75%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.925.014.074,00	2.822.017.275,00	96,48%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.567.500,00	6.567.500,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.434.812.497,00	2.343.027.083,00	96,23%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.004.975,00	149.661.598,00	99,11%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.900.000,00	34.900.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.035.824,00	114.691.014,00	93,22%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.693.278,00	173.170.080,00	99,13%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.170.500,00	67.150.000,00	99,97%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.770.500,00	58.750.000,00	99,97%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	113.512.500,00	113.512.500,00	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.450.000,00	54.450.000,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.062.500,00	59.062.500,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	136.490.000,00	133.865.000,00	98,08%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	136.490.000,00	133.865.000,00	98,08%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%
KAPANEWON SEWON	3.439.640.369,00	3.307.574.118,00	96,16%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.155.240.369,00	3.025.724.118,00	95,90%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.472.500,00	5.472.500,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.590.862.539,00	2.472.191.148,00	95,42%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.213.750,00	179.868.950,00	99,81%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.900.000,00	33.800.000,00	91,60%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.575.600,00	180.622.230,00	98,39%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.215.980,00	153.769.290,00	97,19%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.025.000,00	87.025.000,00	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78.325.000,00	78.325.000,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.225.000,00	79.225.000,00	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.115.000,00	52.115.000,00	100,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	27.110.000,00	27.110.000,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	108.300.000,00	105.750.000,00	97,65%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	108.300.000,00	105.750.000,00	97,65%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.850.000,00	9.850.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.850.000,00	9.850.000,00	100,00%
KAPANEWON SRANDAKAN	3.052.654.748,00	2.998.426.441,00	98,22%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.685.048.998,00	2.631.692.691,00	98,01%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.266.058.387,00	2.221.487.755,00	98,03%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.526.571,00	110.910.200,00	99,45%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.700.000,00	16.594.500,00	99,37%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.914.436,00	144.632.936,00	95,84%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.449.604,00	130.667.300,00	98,65%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.512.500,00	75.262.500,00	99,67%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	67.512.500,00	67.262.500,00	99,63%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	154.101.250,00	153.851.250,00	99,84%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	94.783.750,00	94.533.750,00	99,74%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.317.500,00	59.317.500,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	128.750.000,00	128.378.000,00	99,71%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	128.750.000,00	128.378.000,00	99,71%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.242.000,00	9.242.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.242.000,00	9.242.000,00	100,00%
KAPANEWON BANGUNTAPAN	3.628.101.498,00	3.505.547.673,00	96,62%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.282.098.348,00	3.162.080.173,00	96,34%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.743.197.508,00	2.632.901.979,00	95,98%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.589.920,00	151.670.975,00	98,11%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.155.080,00	154.671.189,00	97,18%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.355.840,00	206.036.030,00	98,89%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.750.000,00	57.662.500,00	99,85%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.350.000,00	45.350.000,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.400.000,00	12.312.500,00	99,29%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	141.528.150,00	141.480.000,00	99,97%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76.015.650,00	75.992.500,00	99,97%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	65.512.500,00	65.487.500,00	99,96%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	137.725.000,00	135.325.000,00	98,26%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	137.725.000,00	135.325.000,00	98,26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
KAPANEWON PUNDONG	3.295.422.504,00	3.019.788.835,00	91,64%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.917.821.504,00	2.647.705.335,00	90,74%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.445.000,00	1.445.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.472.108.024,00	2.206.282.202,00	89,25%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.826.988,00	84.611.988,00	99,75%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.409.000,00	26.409.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.961.280,00	150.959.815,00	98,69%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.071.212,00	177.997.330,00	98,85%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.442.500,00	50.272.500,00	99,66%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.720.000,00	37.550.000,00	99,55%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.722.500,00	12.722.500,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.401.000,00	178.308.500,00	99,95%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	114.304.500,00	114.212.000,00	99,92%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	64.096.500,00	64.096.500,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.967.500,00	138.712.500,00	96,35%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.967.500,00	138.712.500,00	96,35%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.926.080.671,00	6.848.823.056,00	98,88%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.926.080.671,00	6.848.823.056,00	98,88%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.926.080.671,00	6.848.823.056,00	98,88%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.041.008.039,00	3.008.522.656,00	98,93%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.552.538.890,00	2.521.787.407,00	98,80%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.119.564,00	149.102.000,00	99,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%

URAIAN (URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.586.240,00	121.173.349,00	99,66%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.063.345,00	193.759.900,00	99,33%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	526.282.000,00	510.176.750,00	96,94%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	526.282.000,00	510.176.750,00	96,94%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.395.378.400,00	2.395.378.400,00	100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.395.378.400,00	2.395.378.400,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	604.754.232,00	583.402.750,00	96,47%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	604.754.232,00	583.402.750,00	96,47%
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	297.658.000,00	290.342.500,00	97,54%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	297.658.000,00	290.342.500,00	97,54%
TOTAL	**2.453.501.989.507,00**	**2.246.481.649.585,13**	**91,56%**

Sumber : RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Bappeda; BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022.;

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pasal 11 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar; dan pasal 18 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi 6 urusan wajib yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan SPM berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan penerapan SPM. Bahwa hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka pemenuhan SPM dan capaiannya menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

b. Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penerapan SPM di Kabupaten Bantul berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan

Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimaldi Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026; dan
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 348 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul.

c. Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan SPM 6 (enam) urusan pelayanan dasar telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 1.1.13 Program Pelayanan Dasar RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 dalam Pemenuhan SPM

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidika n (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp768.000.000	1 indeks	Rp785.000.000	1 indeks	Rp3.771.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.720.400	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp761.000.000	1 indeks	Rp2.901.417.064	1 indeks	Rp5.837.137.464	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp870.000.000	1 indeks	Rp872.000.000	1 indeks	Rp875.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.832.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp770.000.000	1 indeks	Rp775.000.000	1 indeks	Rp780.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp687.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp710.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.844.080	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp815.000.000	1 indeks	Rp820.000.000	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp861.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp730.000.000	1 indeks	Rp3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.000	69 Persen	59.950.000	71 Persen	64.746.000	73 Persen	69.279.000	73 Persen	248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	100 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				limbah domestik yang layak														
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	05		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA															

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771,20	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527,02	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamata n	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen	(6)	70 Persen	(8)	70 Persen	(10)	80 Persen	(12)	80 Persen	(14)	80 Persen	(16)	DINAS SOSIAL

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL

Sumbe : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 - 2026

d. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2022 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2022 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatannya dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung, 4 (empat) Unsur Penunjang, 1 (satu) Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kecamatan), dan Urusan Pemerintahan Umum (kesatuan bangsa dan politik).

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggarn 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 903/02816 dan Nomor 903/646, tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2022, tanggal 25 Agustus 2021, menyebutkan bahwa alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan earmarked. Orientasi dan komitmen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM secara umum dituangkan dalam dokumen KUA pada kebijakan belanja daerah tahun 2022, yaitu belanja wajib pelayanan dasar. Disebutkan dalam dokumen KUA bahwa belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, setelah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar juga dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai prioritas daerah dalam KUA ditunjukkan melalui kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2022 dalam **Tabel 1.1.14** berikut.

Tabel 1.1.14 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022

Kode	Bidang Urusan	Pagu 2022 (Rp)
01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.232.203.159.353
0101	Pendidikan	666.277.728.950
0102	Kesehatan	403.899.525.946
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.655.353.716
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.816.656.625
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.624.768.409
0106	Sosial	18.929.125.707
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.139.675.989
03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	69.399.580.975

Kode	Bidang Urusan	Pagu 2022 (Rp)
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	89.063.600.973
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	524.152.925.800
06	UNSUR PENGAWASAN	8.382.770.812
07	UNSUR KEWILAYAHAN	41.879.851.435
08	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.369.372.046
JUMLAH		**2.141.590.937.383**

Sumber : Dokumen KUA Kabupaten Bantul tahun 2022

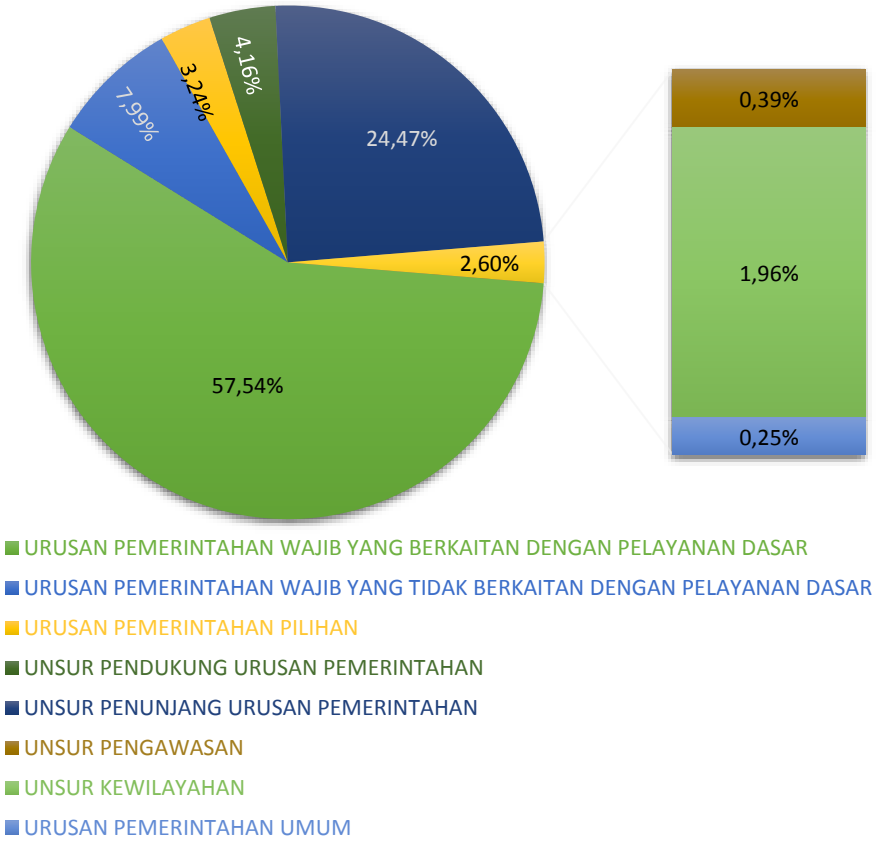

Grafik 1.1.2 Persentase Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 dalam Dokumen KUA Tahun 2022 *(Sumber : Dokumen KUA 2022, BPKPAD; Data Diolah)*

Grafik 1.1.2 menunjukkan bahwa pagu anggaran belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memperoleh alokasi terbesar yaitu 57,54% dalam kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2022.

Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 juga telah mencantumkan arah kebijakan Kabupaten Bantul secara umum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk Tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 1.1.15.**

Tabel 1.1.15 Arah Kebijakan Kabupaten Bantul Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Untuk Tahun 2022 dalam Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	BIDANG	TARGET SPM TAHUN 2022	PROGRAM	OPD
1.	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Dikpora
2.	Kesehatan	Pemenuhan SPM tercapai 100% (12 jenis layanan)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	1. Kebutuhan Pokok Air Minum 2. Pengolahan Air Limbah Domestik	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPKP
4.	Perumahan Rakyat	1. Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terelokasi	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PUPKP
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		1. Informasi Rawan Bencana 2. Mitigasi Bencana 3. Penyelamatan dan Evakuasi Bencana 4. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
6.	Sosial	1. Pembangunan Shelter PMKS 2. Jaminan Sosial Pasca Bencana	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial P3A

Sumber : Dokumen KUA Kabupaten Bantul tahun 2022

Hasil evaluasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang dikarenakan adanya perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang disebabkan oleh :

1. Terbitnya PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau.;
2. Adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
3. Berita Acara Redesain Dana Keistimewaan Tahap I Tahun 2022.
4. Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan mendesak dan pemenuhan usulan revisi DPA dari Perangkat Daerah.

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut harus dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2022 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 903/03812 dan Nomor 903/658, tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022 difokuskan pada program prioritas dan optimalisasi belanja rutin perangkat daerah. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut:

1. Menjamin terlaksananya program prioritas.
2. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Penganggaran kembali sisa anggaran BLUD pada RSUD dan puskesmas.
4. Penganggaran kembali Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan
5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan.
6. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan disukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
7. Meningkatkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil.
8. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik.
9. Pergeseran antar rekening, kegiatan, program.

Berdasarkan rincian perubahan belanja daerah Tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM secara umum ditunjukkan pada angka 1 (menjamin terlaksananya program prioritas), angka 8 (meningkatkan kualitas pelayanan publik), angka 3 (mendukung SPM bidang urusan kesehatan), angka 4 (mendukung SPM bidang urusan pendidikan), dan angka 5 (mendukung SPM bidang urusan pekerjaan umum, pendidikan, dan kesehatan).

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan meningkat sebesar Rp 118.335.644.105,00 dari semula sebesar Rp 2.247.414.065.054,00 menjadi Rp 2.365.749.709.159,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,72%. Kebijakan belanja berdasarkan perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar disajikan pada Tabel 1.1.6.

Tabel 1.1.16 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

No	Perangkat Daerah	APBD 2022 (Rp)	P-APBD 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	675.237.944.797	671.489.264.851	(3.748.679.946)	-0,56%
2.	Dinas Kesehatan	244.814.826.947	252.945.168.779	8.130.341.832	3,32%
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	174.973.780.613	177.726.323.545	2.752.542.932	1,57%
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	12.186.432.380	12.940.695.331	754.262.951	6,19%
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.293.578.661	13.500.878.661	207.300.000	1,56%
6.	Dinas Sosial	20.749.018.266	22.495.797.621	1.746.779.355	8,42%

Sumber : Dokumen KUA Kabupaten Bantul tahun 2022

Tabel 1.1.6 menunjukkan bahwa rata-rata terdapat peningkatan belanja pada perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar kecuali pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga karena adanya pengurangan anggaran pada belanja gaji dan tunjangan PNS

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,28	80,69	0,51
2.	Angka Kemiskinan	14.06 %	12,27 %	112,73
3.	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)	4.04 %	3,97 %	101,73
4.	Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB ADHK)	4.97 %	5,20 %	4,21
5.	Pendapatan per Kapita (PDRB per Kapita ADHB*)	28,16	30.790	9,34
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio**)	0,441%	0,410%	107,03

*Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023; **) Surat BPS Bantul No. B-105/ 34021/ KA.100/ 02/ 2023 tanggal 22 Februari 2023; *) Pendapatan per Kapita satuan dalam Juta rupiah; data diolah.*

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

United Nations Development Programme dalam terbitan laporan tahunannya

(Human Development Index – HDI) menegaskan bahwa “manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat Gross National Income - GNI per kapita yang sama dapat menghasilkan hitungan pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah (Human Development Reports, 2019).

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (growth oriented), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (people need oriented).

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan

dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Capaian Nilai IPM Kabupaten Bantul (**Grafik 2.1.1**dan **Grafik 2.1.2)** selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 79,45 pada tahun 2018 hingga mencapai 80,69 atau berada pada capaian "sangat tinggi" (IPM>80; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2022. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan nilai 80,28. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi D.I.Y yang pada tahun 2022 tercapai sebesar 80,64, nilai IPM Kabupaten Bantul tercapai lebih tinggi 0,05.

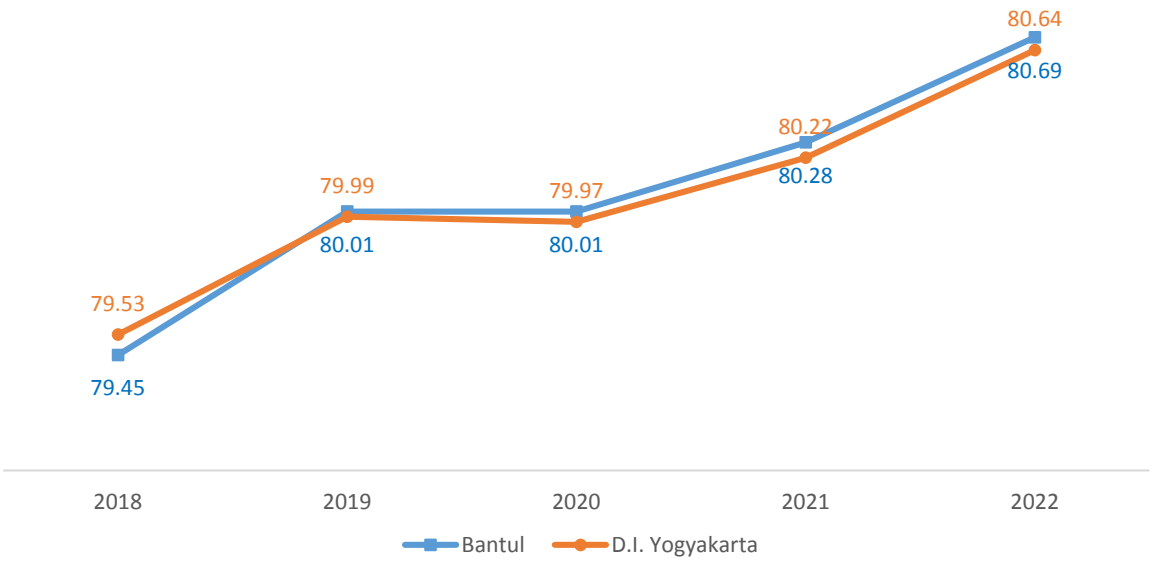

Grafik 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : BPS : Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; (data diolah)*)

Capaian IPM Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan capaian 4 kabupaten/ kota lain dalam 1 Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di peringkat ke tiga selama lima tahun terakhir sejak tahun 2018, dibawah nilai capaian IPM pada Kabupaten Sleman dengan nilai IPM 84,31 pada tahun 2022 sebagai peringkat ke dua dan Kota Yogyakarta dengan nilai IPM 87,69 pada tahun 2022 sebagai peringkat pertama (**Grafik 2.1.2**).

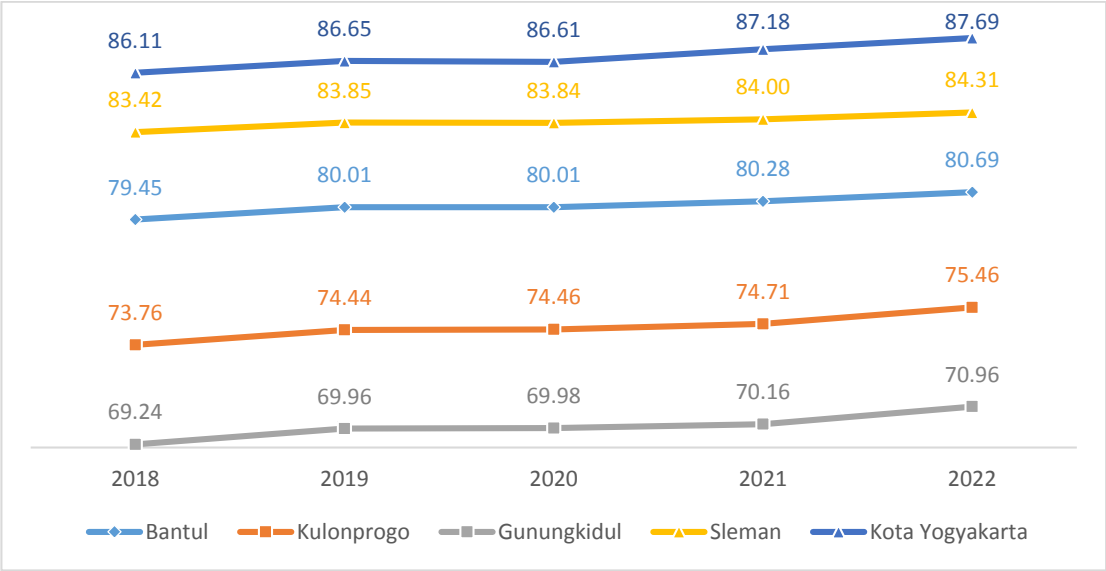

Grafik 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023l (data diolah))*

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator (**Tabel 2.1.2**) yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang secara rata-rata semakin membaik dari tahun ke tahun , meskipun pada capaian pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat terdampak pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 berangsur-angsur kembali meningkat seiring dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan pandemi

dan pemulihan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bantul menurut Komponen, 2018-2022

Komponen	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,66	73,77	73,86	73,89	73,90
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,03	15,15	15,17	15,38	15,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,35	9,54	9,55	9,57	9,59
Pengeluaran Riil per Kapita	Rp*1000/ orang/ tahun	15.386	15.636	15.517	15.545	16.002
IPM		**79,45**	**80,01**	**80,01**	**80,28**	**80,69**
Pertumbuhan IPM	**%**	**0,99**	**0,70**	**0,00**	**0,34**	**0,51**

(Sumber : BPS Kabupaten Bantul,2023; akses melalui website https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/320/1/ pada tanggal 9 Maret 2023 (data diolah))

Perkembangan IPM ditinjau dari komponen penyusunnya (**Tabel 2.1.2**) dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami perkembangan yang positif pada semua komponen penyusun IPM. Pada tahun 2022 dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan (UHH) sebesar 73,90 tahun, meningkat 0,01 tahun bila dibandingkan tahun 2021 yang tercapai sebesar 73,89. Pada dimensi pengetahuan, capaian pada tahun 2022 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar 15,48 tahun dan 9,59 tahun, meningkat sebesar 0,10 tahun pada indikator HLS dan 0,02 tahun pada indikator RLS bila dibandingkan dengan tahun 2021. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita juga mengalami kenaikan sebesar Rp 457.000,-/orang/tahun bila dibandingkan dengan tahun 2021 atau tercapai sebesar Rp 16.002.000,-/orang/tahun. Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 0,51% pada tahun 2022 dari tahun 2021.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul. Dimensi persoalan kemiskinan sangat terkait dengan berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, dan permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan selalu menjadi primadona yang mewarnai proses pembangunan di semua wilayah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau kesuksesan kepemimpinan di suatu wilayah sering dikaitkan dan diukur dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. **Pertama**, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. **Kedua**, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. **Ketiga**, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah

kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P1 dan P2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Tabel 2.1.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2017 - 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ bulan)	Jumlah penduduk miskin (*1000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Laju Angka Kemiskinan (%)
2018	Rp369.480,00	134,84	13,43	-4,55%
2019	Rp381.538,00	131,15	12,92	-3,80%
2020	Rp405.613,00	138,66	13,5	4,49%
2021	Rp418.265,00	146,98	14,04	4,00%
2022	Rp455.511,00	130,13	12,27	-12,61%

(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023 (data diolah))

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan *trendline* yang cenderung menurun pada tahun 2018 – 2022 (**Tabel 2.1.3** dan **Grafik 2.1.3**). Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 tingkat kemisikinan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 12,92% pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,04% di Tahun 2021, kondisi ini juga dialami oleh wilayah Kabupaten/ Kota lain di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai akibat dari dampak Pandemi. Sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul terus meningkat dari 131,5 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat menjadi 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 146,98 ribu jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 4% dimana laju pertumbuhan yang bernilai positif pada angka kemiskinan ini dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berdampak negatif bagi laju pembangunan daerah. Tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga pada tingkat yang terendah bila dibandingkan dengan capaian pada lima tahun terakhir dengan capaian 12,27%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul bila dibandingkan dengan Kabupaten/

Kota lain dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing masing memiliki capaian 7,74% dan 6,62%.

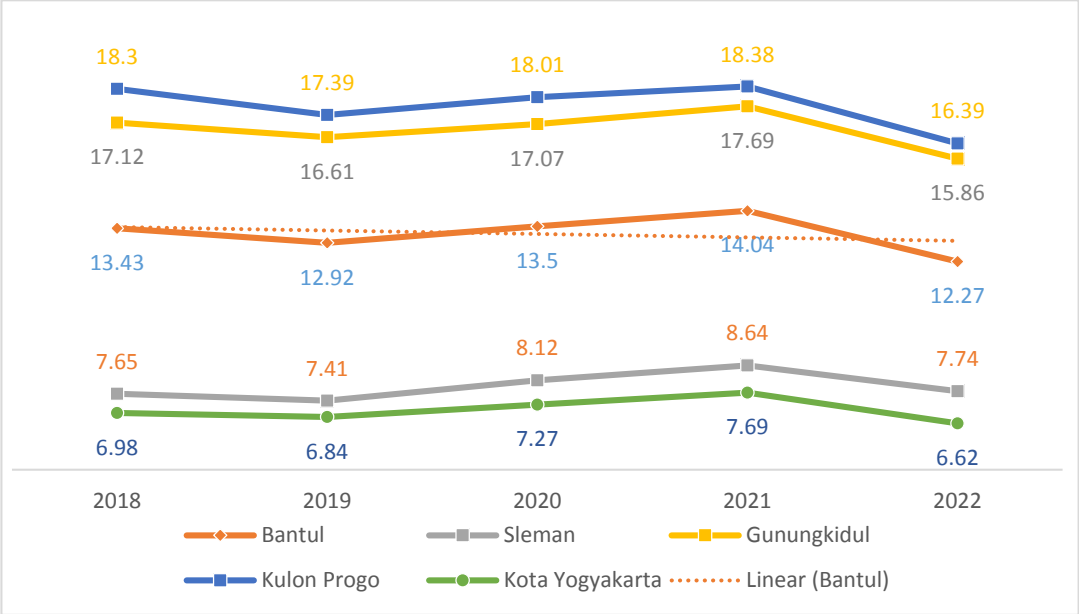

Grafik 2.1.3 Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/ Kota dalam provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS DIY: Provinsi D.I.Y dalam Angka 2023; Data Diolah).*

2.1.3. Angka Pengangguran

Konsep dan definisi ketenagakerjaan dan pengggangguran Badan Pusat Statistik merujuk pada konsepsi The Labour Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial.

Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan, dan bahkan lebih luas merambah chaos politik bagi pemerintahan.

Setiap manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan hidup. Manusia juga butuh biaya untuk interaksi sosial dengan lingkungannya agar diterima di masyarakat. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup bila tidak bekerja, karena Tuhan juga mewajibkan manusia untuk mencari nafkah untuk kehidupan dirinya. Demikian pula berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar semua penduduknya bekerja. Melalui bekerja berarti seseorang memiliki produksi. Oleh karena itu seberapa pun hasil yang didapat dari bekerja akan lebih baik dari pada tidak memiliki produksi sama sekali.

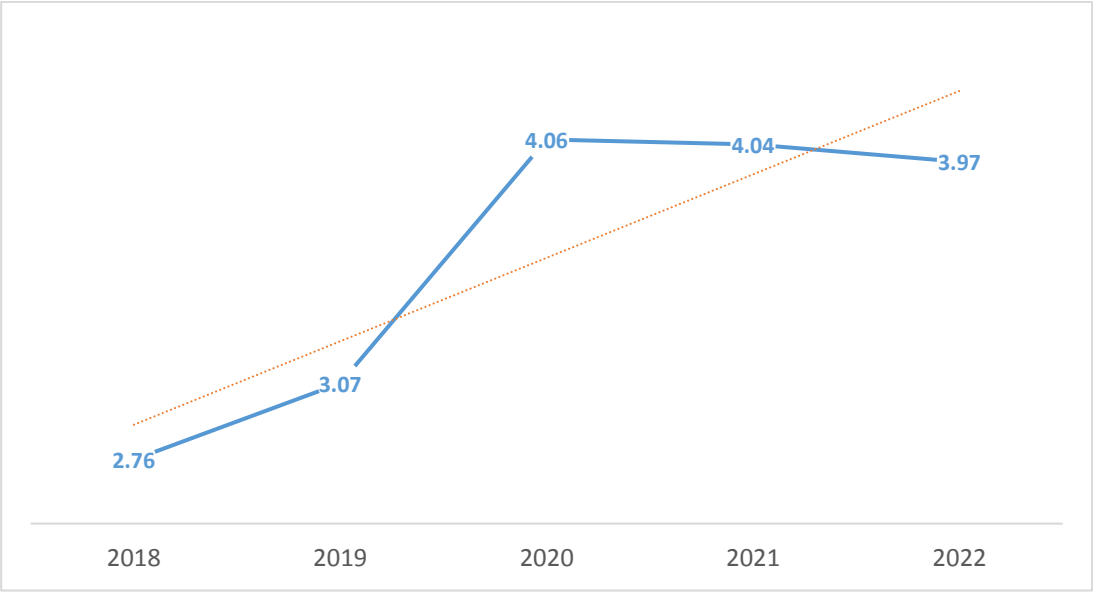

Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 *(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; Data Diolah)*

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul semenjak tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki trendline yang terus meningkat (**Grafik 2.1.4**). Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 sebesar 2,76% terus mengalami peningkatan yang tajam setiap tahunnya hingga puncak pada tahun 2020 sebesar 4,06%, kemudian mengalami penurunan secara lambat pada tahun 2021 sebesar 4,04% dan pada tahun 2022 sebesar

3,97%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga keberhasilan menekan pertambahan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif terhadap TPT.

Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja sebesar 1,93% atau meningkat dari 95,96% penduduk yang bekerja pada tahun 2021 menjadi 96,03% penduduk yang bekerja pada tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja ini berakibat pada persentase penduduk yang menganggur berkurang sebesar 0,07% atau turun dari 4,04% di tahun 2021 menjadi 3,97% pada tahun 2022.

Tabel 2.1.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2018- 2021

Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2021
I. Angkatan Kerja	**73,66**	**73,01**	**74,45**	**71,64**	**74,39**
1. Bekerja	97,24	96,93	95,94	95,96	96,03
2. Pengangguran	2,76	3,07	4,06	4,04	3,97
II. Bukan Angkatan Kerja	**26,34**	**26,99**	**25,55**	**28,36**	**25,61**
1. Sekolah	27,51	30,96	31,97	28,93	29,38
2. Mengurus Rumah Tangga	59,71	57,58	57,41	57,08	59,13
3. Lainnya	12,78	11,46	10,62	14	11,49
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**73,66**	**73,01**	**74,45**	**71,64**	**74,39**
Tingkat Pengangguran	**2,76**	**3,07**	**4,06**	**4,04**	**3,97**

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2023;

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau *Economic Growth* bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output suatu wilayah dengan pengukuran tertentu. Biasanya, teknik pengukuran yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Para ahli memberikan definisi yang bervariasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Misalnya, menurut Prof. Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kenaikan kapasitas jangka

panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang keperluan ekonomi untuk penduduknya. Sedangkan, Harrod-Domar menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi modern saat ini sangat berkaitan dengan pembentukan investasi. Semakin tinggi investasi yang terjadi di suatu wilayah maka akan semakin baik perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut. Konsep lainnya yaitu mengharuskan input agar menghasilkan output yang lebih banyak. Konsep ini yang menjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umum. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan penggantian kelembagaan dalam menghasilkan output.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan dalam perubahan output nasional. Dalam praktiknya, perubahan output dalam pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai bahan analisis ekonomi jangka pendek suatu negara. Jadi, bahan analisa ekonomi ini akan sangat penting untuk menggagas prinsip ekonomi satu negara.

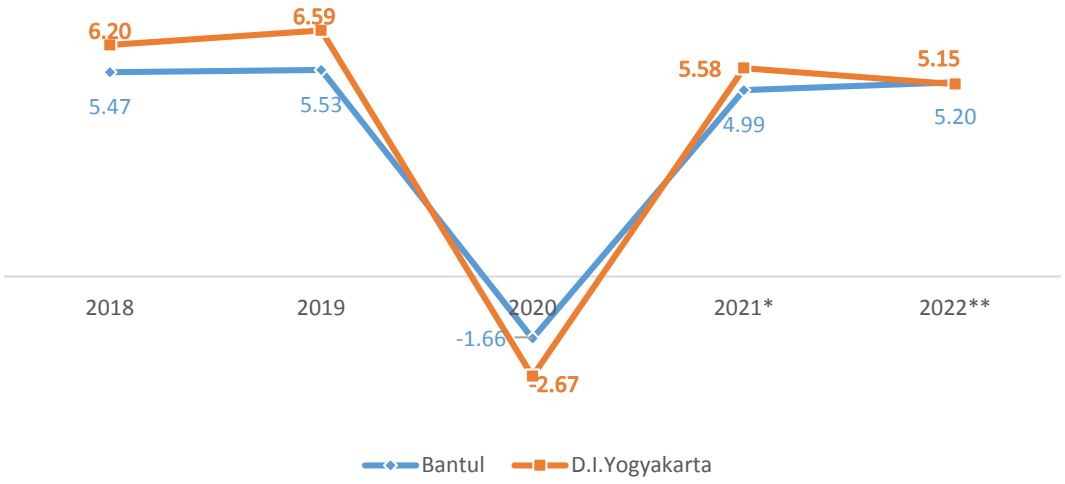

Grafik 2.1.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2022 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta
(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; Data diolah)

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi, indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis PDB/ PDRB yaitu : a) PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi; dan b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul terus mengalami pertumbuhan ke arah positif sejak tahun 2018 hingga mencapai puncaknya sebesar 5,53% pada tahun 2019 (**Grafik 2.1.5**). Selanjutnya Perekonomian di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -1,66%, kemudian mengalami rebound di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,97%, dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 sebesar 5,99% (**.** Pada tahun 2022 seluru sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ke arah positif dengan persentase tertinggi pada jenis lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 15,99%, diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 13,82% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Sektor Pariwisata) sebesar 11,97%.

Tabel 2.1.5 dan **Grafik 2.1.5**). Pada tahun 2020 perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul disumbang oleh 10 sektor lapangan usaha (sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdangangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya-**Tabel 2.1.5)**, pada tahun 2021 hanya sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian saja yang mengalami tumbuh negatif dengan capaian sebesar -5,14%. Pada tahun 2022 seluru sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ke arah positif dengan persentase tertinggi pada jenis lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 15,99%, diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 13,82% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Sektor Pariwisata) sebesar 11,97%.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	2,00	0,13	4,80	1,60	4,28
B	Pertambangan dan Penggalian	1,57	-0,27	-11,32	-5,14	1,58
C	Industri Pengolahan	5,53	5,48	-4,76	0,82	3,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,85	4,83	-1,77	2,48	7,10
E	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	4,80	8,62	0,61	6,62	5,34
F	Konstruksi	7,39	5,08	-13,78	10,68	4,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,59	5,11	-4,20	1,23	4,78
H	Transportasi dan Pergudangan	5,51	6,45	-12,58	3,71	15,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,69	8,77	-11,55	7,04	11,97
J	Informasi dan Komunikasi	6,20	7,27	19,89	16,21	3,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,59	10,00	-2,41	2,03	5,49
L	Real Estat	5,41	6,51	0,23	0,27	2,97
M, N	Jasa Perusahaan	5,37	7,38	-14,40	6,69	6,91
O	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,44	3,21	-1,96	-0,42	2,43
P	Jasa Pendidikan	6,08	6,65	3,79	3,92	1,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,74	7,18	18,86	4,17	4,08
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7,14	6,09	-11,21	11,95	13,82
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**5,47**	**5,53**	**-1,66**	**4,99**	**5,20**

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2023.) Angka Sementara; **)Angka Sangat Sementara*

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya. Salah satu data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk,

dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengukuran indikator makro sesuai dengan Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2022 menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dimana PDRB perkapita ADHB merupakan nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Capaian laju kinerja Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (**Tabel 2.1.6**) yang dihitung atas dasar PDRB ADHB pada tahun 2022 sebesar 9,34% atau Pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Bantul meningkat sebesar Rp 2.631.023,27 /tahun dari Pendapatan perkapita Rp 28.161.272,20/tahun pada tahun 2021 menjadi Rp 30.792.295,47/tahun pada tahun 2022. Peningkatan laju kinerja Pendapatan per Kapita ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada seluruh sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke arah positif. Sektor lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki andil tertinggi dalam pencapaian peningkatan PDRB ADHB per kapita yaitu sebesar 14,16% atau Rp 4.418,91 miliar rupiah, disusul oleh sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan sebesar 13,78%, dan sektor lapangan usaha sebesar 11,97%.

Tabel 2.1.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2022

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHB pada Tahun (miliar rupiah)	
		2021	2022
A	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	3.825,32	4.297,74
B	Pertambangan dan Penggalian	118,64	127,74
C	Industri Pengolahan	4.078,22	4.418,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38,00	41,91
E	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	22,64	24,49
F	Konstruksi	2.530,20	2.750,36

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHB pada Tahun (miliar rupiah)	
		2021	2022
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.299,36	2.587,30
H	Transportasi dan Pergudangan	1.248,67	1.525,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.127,01	3.735,56
J	Informasi dan Komunikasi	2.716,77	2.892,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	810,42	939,89
L	Real Estat	1.847,61	1.966,87
M, N	Jasa Perusahaan	121,94	135,76
O	Administrasi Pemerintah,Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.083,92	2.222,91
P	Jasa Pendidikan	2.059,64	2.170,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	640,19	694,25
R, S, T, U	Jasa Lainnya	554,60	665,58
Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)		**28.123,17**	**28.090,84**
Jumlah Penduduk (jiwa)		**985.770**	**998.647**
PDRB ADHB per Kpita (Rp/ jiwa/ tahun)		**28.161.272,20**	**30.792.295,47**
Laju Kinerja Tahun 2022		**9,34%**	

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2023; Data Diolah

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 merencanakan pencapaian pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat pembangunan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat pendapatan. Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*).

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan

ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk..

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2018 namun memiliki kecenderungan yang terus turun berdasarkan trendline (**Grafik 2.1.6**). Angka Gini Ratio pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,448, kemudian turun hingga titik terendah sebesar 0,418 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk naik menjadi sebesar 0,44, dan kembali mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2022.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi". Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada tingkatan Moderat sejak tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan meskipun berdasarkan data 5 tahun terakhir (Tahun 2018 – 2022) memiliki kecenderungan turun.

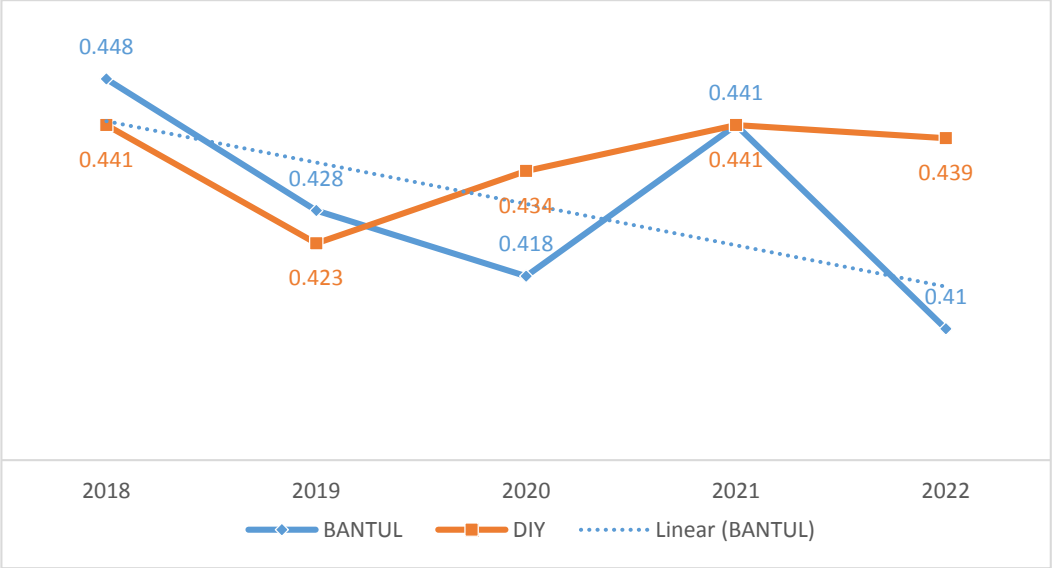

Grafik 2.1.6 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS Kabupaten Bantul; Surat BPS Bantul No. B-105/ 34021/ KA.100/ 02/ 2023 tanggal 22 Februari 2023,; Data diolah)*

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2.1 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2022

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	**Pendidikan**					
1.a.1	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi			560	Data Laporan lndividu Sekolah Dapodik Dinas Dikoora Kabuoaten Bantul
	2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			20.949	
	3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan			394	
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD			1.689	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Jumlah pendidik pada PAUD			2.257	
	6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			1.840	
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem			505	
1.a.2, 1.a.3	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi			520	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			71.237	
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			31.360	
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan			47.537	
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			22.612	
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar			3.526	
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			1.407	
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar			5.784	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			3.138	
	10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			407	
	11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			123	
	12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			286	
	13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			103	
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			5.418	
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			2.991	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			395	
	17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			120	
	18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat			801	
	19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat			655	
1.a.4	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi			23	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
1.a.4	2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			2.382	Data Dapodik Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
1.a.4	3	Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan			251	
1.a.4	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			225	
1.a.4	5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			416	
1.a.4	6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			342	
1.a.4	7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat			395	Data Laporan lndividu Sekolah Dapodik Dinas Dikoora Kabuoaten Bantul

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				
1.a.4	8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			17	
2	**Kesehatan**					
1.b.1	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			16	
1.b.2	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya			16	
1.b.3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			10.894	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal			957	
1.b.4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			10.894	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar			957	
1.b.5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			10.868	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar			957	
1.b.6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			57.211	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			957	
1.b.7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			122.027	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			957	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
1.b.8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			27	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			957	
1.b.9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			135.226	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			957	
1.b.10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			27	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			957	
1.b.11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			15.727	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			957	
1.b.12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			27	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			957	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
1.b.13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			27	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			957	
1.b.14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			16.008	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			957	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1.c.1, 1.c.2	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			1	TDI (Tidak mempunyai kewenangan Wilayah Sungai), Berdasarkan surat keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul Nomor 610/ 00201yang ditandatangani secara digital pada tanggal 17
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			1	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)			1	Januari 2023 menerangkan bahwa Kabupaten Bantul tidak memiliki kewenangan dalam : 1. Pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman rawan banjir; 2. Pembangunan infrastuktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)			1	
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota			1	
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota			1	
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota			1	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
1.c.3	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	79625,9	82,32%	Sumber Data Berasal dari Data Inventarisasi Jaringan Irigasi Kwenangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 No : 610/00203 Dasar Kewenangan Berdasar SK Menteri PU No. : 14/KPTS/M/2015
			Panjang jaringan irigasi primer (m)	96.724		
	2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	114710,7	81,43%	
			Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	140877		
	3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	185804	14,90%	Rekapitulasi Hasil Penelusuran Jaringan Irigasi Tersier No : 610/00209
			Panjang jaringan irigasi tersier (m)	1246900		
1.c.4	1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota	(Ada /Tidak)		Ada	Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengambangan Sistem Air Minum (RI-

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						SPAM) Kabupaten Bantul
	2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	(Ada /Tidak)		Tidak	Berdasarkan Surat keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul Nomor 690/00316 tanggal 20 Januari 2023 menerangkan bahwa Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum mempunyai Peraturan Bupati Bantul tentang Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM
	3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	(Ada /Tidak)		Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Minum Tirta Projotamansari
	4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	(Ada /Tidak)		Tidak	Berdasarkan Surat keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul Nomor 690/ 00317 tanggal 20 Januari 2023 menerangkan bahwa Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum pernah menerbitkan izin terkait dengan badan usaha yang melaksanakan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.			1	Perjanjian Kerjasama SPAM Regional Kartamantul
1.c.5	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			322130	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2022; NO : B/400.7.11.1/00001
	2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			15883	
	3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			338013	
	4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja			129	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja			129	
	6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik			3448	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2022; NO : B/400.7.11.1/00001
	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	322130	100%	
			Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah erbangun<25 jiwa/ha	322130		
	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	129	100%	
			Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk	129		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			pada wilayah terbangun> 25 jiwa/ha			
	9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	3448	5,85%	
			Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD- T	58931		
	10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	322130	100%	
			jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	322130		
	11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	2	67%	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Nomor 443.35/00306, tanggal 20 Januari 2023 menerangkan bahwa :

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	3		1. Jumlah armada truk tinja dalam rangka pelayanan sedot tinja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul adalah 2 unit; 2. kebutuhan ideal adalah 3 unit. 3. Jumlah sarana yang ada dan kebutuhan tersebut didasarkan atas jumlah rumah yang menerima layanan sedot tinja oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
	12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasits pengolahan lumpur tinja yang tersedia	60	7%	Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Nomor 443.35/00308 tanggal 20 Januari 2023
			jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	870		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	15883	100%	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2022; NO : B/400.7.11.1/00001
			Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	15883		
	14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	129	0%	DATA RUMAH YANG TELAH MENERIMA LAYANAN SEDOT DAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA SERTA AIR LIMBAH DOMESTIK Nomor B/600.1.17.2/00005
			Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S	322130		Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2022; NO : B/400.7.11.1/00001
1.c.6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret	247	1,7%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			sederhana yang laik fungsi yang berlaku)			
			Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	14948		
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting			362	Sumber data berdasarkan Laporan Data Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pinti. DPMPTSP mengirimkan Laporan Penerbitan PBG dan SLF Tiap Bulan
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)			Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun2022, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul No. 133 Tahun 2022

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)			Ada	JDIH Kabupaten Bantul
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			62	62 Bangunan Gedung Cagar Budaya (sumber JDIH)
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			Tidak Ada	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039 1. Makam Raja-raja Mataram di Imogiri 2. Panggung Krapyak 3. Masjid Pathok Nagoro (2)
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			63	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			63	
1.c.7	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota			624,47 km	SK Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 Tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul
	2	Panjang jalan yang dibangun			0	
	3	Panjang jembatan yang dibangun			0	
	4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)			0	
	5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan			51 m	
	6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi			27,095 km	
	7	Panjang jembatan yang direhabilitasi			0	
	8	Panjang jalan yang dipelihara			112,11 Km	
	9	Panjang jembatan yang dipelihara			0	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
1.c.8	1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota			0	
	2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota			1376	DATA TENAGA KERJA KONSTRUKSI TERLATIH BERDASARKAN ASOSIASI NO.Nomor: 414.15/0040
	3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota			1279	DATA TENAGA KERJA KONSTRUKSI TERLATIH BERDASARKAN ASOSIASI NO.Nomor: 414.15/0040
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	ADA/ TIDAK		ADA	SCREENSHOOT SIPJAKI Nomor: 414.15/00414

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	ADA/ TIDAK		ADA	http://lpse.bantulkab.go.id DATA DAN INFORMASI PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI KEWENANGANNYA YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERMUTAKHIR SECARA BERKALA Nomor: 414.15/00413

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	ADA/ TIDAK		ADA	Srceenshoot https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang?kategoriId=&tahun=2022&instansiId=&rekanan= Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi yang Bersumber dari APBN Nomor: 414.15/00409
	7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	ADA/ TIDAK		ADA	DAFTAR CSR UNTUK WILAYAH BANTUL TAHUN 2022 Nomor: 414.15/00410

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	ADA/ TIDAK		ADA	http://lpse.bantulkab.go.id DATA DAN INFORMASI PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI KEWENANGANNYA YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERMUTAKHIR SECARA BERKALA Nomor: 414.15/00413
	9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ADA/ TIDAK		ADA	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	ADA/ TIDAK		ADA	DATA PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI Nomor: 414.15/00412
	11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	ADA/ TIDAK		ADA	
	12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	ADA/ TIDAK		ADA	
	13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	ADA/ TIDAK		ADA	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ADA/ TIDAK		ADA	
	15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA/ TIDAK		ADA	DATA PENGAWASAN TERHADAP USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANTUL Nomor: 414.15/00411
	16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA/ TIDAK		ADA	
	17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang	ADA/ TIDAK		ADA	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		menjadi kewenangan pengawasannya				
	18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota			167	
	19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			2474	
	20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota			167	
	21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota			167	
	22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			2545	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			167	DATA PENGAWASAN TERHADAP USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANTUL Nomor: 414.15/00411
	24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	1. DATA PENGAWASAN TERHADAP USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANTUL Nomor: 414.15/00411 2. SCREENSHOOT SIPJAKI Nomor: 414.15/00414
	25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			167	DATA PENGAWASAN TERHADAP USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANTUL Nomor: 414.15/00411

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					
1.d.1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			TDI	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul No. No : 414.15/00373 yang di tandatangani secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa pada tahun 2022 DPUPKP sudah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebanyak 3 unit, akan tetapi tidak direalisasikan karena tidak terdapat kejadian bencana pada Kabupaten Bantul
	2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam			TDI	
	3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			TDI	
	4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			TDI	
	5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			TDI	
	6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			TDI	
	7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			TDI	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			TDI	
	9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			TDI	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul No. No : 414.15/00373 yang di tandatangani secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa untuk penerapan SPM Sub Urusan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota baru dilaksanakan sampai dengan tahap pendataan/ identifikasi perumahan rawan bencana dan identifikasi lahan potensial untuk
1.d.2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			TDI	
	2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			TDI	
	3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			TDI	
	4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak			TDI	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM				relokasi. Sehingga fasilitasi rumah layak huni juga belum dapat dilaksanakan.
	5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			TDI	
	6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			TDI	
1.d.3	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			196,19	1. Keputusan Bupati Bantul No. 193 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh 2. Data Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha dan Penanganan Nomor: 414.15/00371
	2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			388	1. Keputusan Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No. 056/PERKIM-648/2020 Tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul 2. Rekapitulasi

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Penanganan RTLH No. 414.15/00372
	3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			97,89	1. Data Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha dan Penanganan Nomor: 414.15/00371
1.d.4	1	Jumlah rumah di kab/kota			373.893	Rekapitulasi Rasio Jumlah BG yang laik fungsi dengan Jumlah Bangunan Gedung di Kab. Bantul No. Nomor:425.1/00310
	2	Jumlah unit PK RTLH			388	Rekapitulasi Penanganan RTLH No. 414.15/00372
	3	Jumlah rumah tidak layak huni			2.741	
	4	Jumlah rumah yang tidak dihuni			0	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP No : 414.15/ 00399 yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa Berdasarkan hasil survey dalam rangka penyusunan Surat Keputusan Kepala

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020, terdapat 6.381 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan keseluruhan RTLH tersebut dihuni. Data by name by address pemilik/ penghuni RTLH dicantumkan dalam SK tersebut
	5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	338.013	0,8970	Data berdasarkan Jumlah KK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 Semester 2
			Jumlah total unit rumah	373.893		Rekapitulasi Rasio Jumlah BG yang laik fungsi dengan Jumlah Bangunan Gedung di Kab. Bantul No. Nomor:425.1/00310

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	6	Jumlah rumah pembangunan baru			221	Rekapitulasi Penanganan RTLH No. 414.15/00372
1.d.5	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			192	Data Rumah yang Sudah Terfasilitasi PSU Nomor 414.15/00374
	2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum			20.777	
	3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan			20.777	
	4	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)			20.777	
	5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			192	Surat DPUPKP no 130.3/00290 Perihal Laporan kegiatan rekomendasi siteplan
	6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			20.777	Data Rumah yang Sudah Terfasilitasi PSU Nomor 414.15/00374
	7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			0	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No: 414.15/00375 menerangkan bahwa

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						bahwa belum ada pengembang yang tersertifikasi di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021
	8	Jumlah pengembang yang terregistrasi			21	Data Pengembang yang teregistrasi REI No. 414.15/00397
	9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			60 pengembang	Surat DPUPKP no 130.3/00290 Perihal Laporan kegiatan rekomendasi siteplan
5.a	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**					
1.e.1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani			165 aduan	
	2	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan			6575 Satlinmas	
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			19 Perda	
	4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			2 Orang	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			Tersedia 18 SOP	
	6	Tersedianya sarana prasarana minimal			Tersedia 18 macam Sarana dan Prasarana	
5.b	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran**					
1.e.3	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0,00%	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pelaksana BPBD Nomor: 360/ 00210 tanggal 14 Februari 2023 menerangkan bahwa Kabupaten Bantul belum memiliki Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah
			Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	1		
1.e.3	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh		**70,14%**	Capaian rerata terhadap seluruh ancaman bencana

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	(Pembilang) informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
			- Gempabumi	2.850	3,00%	kolom Nilai disamping menunjukkan Capaian pada masing-masing jenis ancaman Bencana.
			- Tsunami	22.733	92,57%	
			- Banjir	36.065	103,83%	
			- Longsor	93.681	100,29%	
			- Cuaca ekstrem	50.975	80,44%	
			- Gelombang Ekstrem/ Abrasi	40.593	43,43%	
			- Kekeringan	100	0,01%	
			- Kebakaran	7.571	107,68%	
			- Epidemi dan Wabah Penyakit	837.734	100,00%	
			Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Penyebut)			
			- Gempabumi	94.878		
			- Tsunami	24.558		
			- Banjir	34.735		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			- Longsor	93.414		
			- Cuaca ekstrem	63.369		
			- Gelombang Ekstrem/ Abrasi	93.460		
			- Kekeringan	692.936		
			- Kebakaran	7.031		
			- Epidemi dan Wabah Penyakit	837.734		
1.e.4	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0,00%	
			Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	1		
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	1	11,11%	
			Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	9		
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	8.775	1,57%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana	559.933		
	4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	8.695	1,55%	
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	559.933		
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	964.245	100,00%	
			Jumlah warga negara yang beradadi kawasan rawan bencana	964.245		
	6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	62.050	50,59%	
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	122.662		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
1.e.5	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	n/a	-	Pada tahun 2022 tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Kabupaten Bantul.
			Jumlah seluruh penetapan status KLB	n/a		
	2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	8	100,00%	
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	8		
	3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	1.534	93,94%	
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	1.633		
	4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi	1.852	100,00%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	1.852		
1.e.6	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			822	
	2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			6	
	3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			Tersedia 24 jam 7 Hari secara shift	
	4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana			n/a	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa				
	5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			36 Jenis; 361 Unit	
	6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			101 orang	(Kualifikasi Pemadam 1: 97 orang; Kualifikasi Pemadam 2: 4 orang)
	7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			94 Orang	
	8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			2 kali	Jumlah peserta 95 orang

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
6	**Sosial**					
1.f.1	1	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki			4	
	2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM			10.491	
	3	JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk			1	
	4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			14.525	
	5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki			12	
	6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket			4.154	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		permakanan sesuai standar gizi				
	7	Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			1	
	8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			2.531	
	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			140	
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			42	
	11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia			82	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			2.531	
	13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			8	
	14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			1.293	
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia			4.464	
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			739	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			12.051	
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			46	
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			46	
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			86	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			10.767	
1.f.2	1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan			750	
	2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			89	
	3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			76	
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			5.145	
	5	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	ADA / TIDAK		ADA (64 Orang)	
	6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			117	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
7	**Tenaga Kerja**					
2.a.1	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi /membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku		Sesuai	
	2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	Target Indikator	6	-50,00%	
			Realisasi Indikator	4		
	3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Jumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan		41	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
2.a.2	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n	10	100,00%	
			keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	10		
	2	Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n	6	100,00%	
			Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	6		
	3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n	43	0,069	
			jumlah peserta pelatihan pada tahun n	622		
	4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	20	42,55%	
			jumlah seluruh LPK pada tahun n	47		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	47	100,00%	
			jumlah LPK yang terdata pada tahun n	47		
	6	Jumlah penganggur yang dilatih				
	7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n	622	100,00%	
			Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	622		
	8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	372	59,81%	
			jumlah lulusan pada tahun n	622		
	9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	224	36,01%	
			jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	622		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	∑ (CPMI dilatih)	0	0%	Pelatihan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesi belum diakomodir dalam RKPD Tahun 2022
			∑ (CPMI terdaftar)	46		
	11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	
2.a.3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	28	8,48%	
			jumlah perusahaan pada tahun n	330		
	2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan Ekonomi	5,20%	-28,49%	
			Pertumbuhan Modal	28,49%		
			Pertumbuhan Tenaga Kerja	5,20%		
2.a.4	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	54	16,36%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	330		
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	9	18,37%	
			Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	49		
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			14	9 Federasi; 6 Konfederasi
	4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	203	95,75%	
			jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	212		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	515	23,05%	
			jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	2234		
	6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	26	1,16%	
			Jumlah perusahaan pada tahun n	2234		
	7	Jumlah mogok kerja			3	
	8	Jumlah penutupan perusahaan			4	
	9	Jumlah perselisihan kepentingan			2	
	10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan			0	
	11	Jumlah perselisihan PHK			4	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			366	
	13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			16	
	14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ADA / TIDAK		ADA	
	15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	23	88,46%	
			Jumlah kasus perselisihan	26		
2.a.5	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			3681	
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota			6762	
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota			41	
	4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			140	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			2	
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.			350	
	8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			3681	
	9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi	∑ CPM⁄CTKI yang mendapatkan sosialisasi	46	100,00%	
			∑ CPM⁄CTKI	46		
	10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata			46	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	∑ fasilitasi PMI yang dipulangkan	2	4,35%	
			∑ PMI yang pulang	46		
	12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	∑ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	-	belum diakomodir dalam RKPD 2022
			∑ PMI /TKI	0		
	13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	ΣPMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	40	86,96%	
			Σ PMI/TKI purna dan keluarganya	46		
	14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	ΣLTSA yang terbentuk	0	-	
			Jumlah daerah kantong PMI/TKI	0		
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
2.g.1	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			34	
	2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			27	26 Program, 27 kegiatan
2.g.2	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			28	
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			32	
	3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	72	100,00%	
			jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten	72		
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			32	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			0	
2.g.3	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			39	
	2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih			42	
	3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			0	
	4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			0	
	5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada			3	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		perangkat daerah yang sudah dievaluasi				
	6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi			3	
	7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	88	100,00%	
			jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	88		
9	**Pangan**					
	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan		Tidak Ada	Tidak terdapat cadangan pangan pemerintah, dititipkan pada PT Tarumartani; Terdapat Cadangan Pangan Masyarakat

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya		Ada	
	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah		Tidak Ada	
	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat		Ada	
	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan		Ada	
	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan		Ada	
	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Tidak Ada	
	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar		Ada	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
10	**Pertanahan**					
2.i.1, 2.i.2, 2.i.3, 2.i.4, 2.i.5, 2.i.6	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	1109	60,77%	
			Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	1825		
	2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	0	TDI	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan dari BPN, No. B/NT.02/41-43.02/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, tidak terdapat kegiatan penetapan Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Bantul Tahun 2022
			Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	0		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absente	0	TDI	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas. Pertanahan dan Tataruang No.130/00330/Program/2023 tanggal 24 Jan 2023, bahwa di DIY Kepemilikan tanah sudah jelas sehingga tidak ada membuka ijin tanah yang di terbitkan
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0		
	4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak	0	TDI	
			Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	0		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	0	TDI	
			Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	0		
11	**Lingkungan Hidup**					
2.j.1	1a	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	$Nilai\ Relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat $IKU = 100 - \left[\frac{50}{0{,}9}\ x\ (leu - 0.1)\right]$		36,67	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	1b	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKTL = 100 - \left[\left(84{,}3 - (THx100)\right)x\frac{50}{54{,}3}\right]$		86,34	
	1c	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)			64,34	
2.j.2	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	128.480,00	19,92%	Kapasitas volume angkutan sampah
				644.819,13		Volume timbulan sampah
			2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	1.058.289,32	104,50%	Total Volume sampah ke TPA
				1.012.683,31		Total Kapasitas TPA
			3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	219	26,57%	Jumlah TPST di wilayah Perkotaan
				824,11		Volume Timbulan sampah wilayah perkotaan per hari

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
2.j.3	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	34	100,00%	12 Persetujuan Teknis dan 22 Rincian Teknis Limbah B3
			jumlah usulan permohonan yang teregestras	34		
	2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada	4	0,33%	Dinas Lingkungan Hidup Memiliki 4 Pejabat Pengawas LH Daerah (PPLHD) terdiri dari 3 Pejabat Pengawas LH Daerah (PPLHD) dan 1 Calon Pejabat Pengawas LH (PPLD)
			jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.203		
	3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	Jmlh MHA yg diakui	0	-	Kab.Bantul tidak memiliki MHA (Masyarakat Hukum Adat)
			jmlh usulan MHA	0		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan	0	-	
			jmlh MHA yg ada	0		
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga masyarakat yang diberi diklat/ rencana	375	100,00%	Lembaga Kemasyarakat meliputi kelompok pengelola sampah, sekolah adiwiyata, , JPSM. Diklat disini adalah pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
			Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberi diklat	375		
	6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	Pengaduan masyarakat yg ditangani	39	100,00%	
			total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi	39		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2.k.1, 2.k.2	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	112	100,00%	
			Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	112		
	2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	21	100,00%	
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan	21		
	3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	6287	100,00%	
			Peristiwa kematian yang dilaporkan	6287		
	4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun	2	100,00%	
			2 tahun	2		
13	**Pemberdayaan masyarakat dan desa**					

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
2.l.1,2.l.2	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			1	TDI, Berdasarkan BA Penetapan Status Kelurahan Tgl 20-04-2022, E-book Peringkat Nilai Rata2 IDM, dan Surat Pernyataan Kepala Dinas PMKal Kab.Bantul No.410/00063 tgl 13-01-2023, Kab. Bantul tidak memiliki desa Sangat tertinggal, tertinggal, dan Berkembang
2.l.1,2.l.2	2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			1	
2.l.1,2.l.2	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			1	
2.l.1,2.l.2	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			1	
14	**Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**					

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
2.m.1	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ADA/ TIDAK		ADA	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga
	2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.		83,84	
	3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR\ i = \frac{b_i}{p_i^f}\ X\ k$		5,23	
	4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	78.081	16,72%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	466.921		
	5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			7.326	
2.m.2	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	181	38,03%	
			Jumlah Faskes	476		
	2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	102.014	73,50%	
			Jumlah PUS	138.790		
	3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		1.427	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	1.742	98,98%	
			jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	1.760		
2.m.3	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah		37 Kalurahan	
	2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	46.935	5,03%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			jumlah Keluarga PBI	932.300		
15	**Perhubungan**					
2.n.1, 2.n.2	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	4	200%	
			Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan yang sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan	2		
	2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	12.210	73,32%	
			Jumlah kendaraan wajib uji	16.654		
	3	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	10	38,46%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten/ kota	26		
	4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/ kota	16.309	14,56%	
			Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/ Kota	111.974		
16	**Komunikasi dan Informatika**					
2.o.1	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	45	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	45		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Akses internet berkualitas: -Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% -Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) -Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	45	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	45		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	(Ya atau Tidak) Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		YA	
2.o.2	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	107	100,00%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			Jumlah Kegiatan (*event*),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	107		
	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	45	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	45		
	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	45	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	45		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	14	100,00%	
			Jumlah layanan	14		
	5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	14	100,00%	
			Jumlah layanan	14		
	6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	90	100,00%	
			Jumlah sistem elektronik	90		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	13	92,86%	
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	14		
	8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	45	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	45		
	9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	45	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	45		
	10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui	45	100,00%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	datanya sesuai siklus jenis datanya			
			Jumlah perangkat daerah	45		
	11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	3.638	100,00%	
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	3.638		
	12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	45	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	45		
	13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	64	100,00%	
			Jumlah ASN Pengelola TIK	64		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada atau Tidak ada : 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		1. ADA 2. ADA	Master SC, Arsitektur SPBE, Perbup tentang TIK

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
2.o.3	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	52	100,00%	
			Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten	52		
	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	6.582	100,00%	
			Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	6.582		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	31	100,00%	
			Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik	31		
17	**Koperasi, usaha kecil dan menengah**					
2.p.1	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	2	5,71%	
			Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	35		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0	TDI	Tidak terdapat izin pengajuan kantor cabang pada tahun 2022
			Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0		
	3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	202	56,42%	Penyebut merupakan jumlah seluruh koperasi, baik yang aktif maupun tidak
			Jumlah koperasi yang ada	358		
	4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	180	55,38%	Penyebut merupakan jumlah seluruh koperasi simpan pinjam
			Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	325		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	143	51,81%	angka penyebut 276 merupakan jumlah koperasi yang aktif
			Jumlah koperasi yang ada	276		
	6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	195	0,13%	
			Jumlah koperasi yang ada	155.566		
	7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	13	4,71%	
			Jumlah koperasi yang ada	276		
	8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan				Tidak Perlu Diisi
	9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	269	97,46%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang ada	276		
	10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	0	0,00%	
			Jumlah Koperasi yang ada	276		
	11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	0	0,00%	
			Jumlah koperasi yang ada	276		
	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	272	75,98%	
			Jumlah koperasi yang ada	358		
	13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	30	10,87%	
			Jumlah koperasi yang ada	276		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
2.p.2	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	3.098	15,73%	
			Jumlah wirausaha yang ada	19.699		
	2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	0	0,00%	
			Jumlah usaha mikro yang ada	86.833		
	3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	130	0,15%	NYIA : 104 UM; Indomaret : 14 UM; Dharma Wanita Kejari : 2 UM; Alfamart : 10 UM
			Jumlah usaha mikro yang ada	86.833		
	4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	44	0,06%	Sertifikasi Hallal dan HKI

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	68.988		
	5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1.175	2,33%	Bazar UKM:50; Pelapak BOS:90; Pengisi Galeri YIA:104;Indomaret:14 UM; Dharma Wanita Kajari:2; Alfamart : 10 UM; Pelatihan Bisnis Online UM: 100; Pojok Konsultasi : 275; PP: JIFFINA: 6; BCE:23; Pelatihan Packaging : 25; Pelatihan Ekspor :25; Pelatihan Pemasaran:170 Industri Showroom Dekranasda:81; Pelatihan Labeling Packaging:20; Pelatihan Pemasaran Online : 40; Pelatihan Bisnis Online : 140
			Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	50.362		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.795	2,07%	
			Jumlah usaha mikro yang ada	86.833		
	7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	356	0,41%	
			Jumlah usaha mikro yang ada	86.833		
18	**Penanaman Modal**					

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
2.q.1	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor		1	Capaian kinerja "Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor" di tahun 2022 yakni fasilitasi pemberian Nomor Induk Berusaha/NIB kepada UMKM sejumlah 10293 NIB. Sedangkan insentif yang diberikan kepada pemohon fasilitasi/ insentif, belum ada dikarenakan sosialisasi kebijakan penetapan mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota baru terbatas sebanyak 35 kali.

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal		1	SOP Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal (PM). Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul Nomor 051 Tahun 2022
	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun		1	Capaian kinerja "Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun" di tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat koordinasi Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Bantul. Draft Surat Keputusan

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Bantul
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting		1	Terselenggaranya kegiatan seminar pada tanggal 19 Mei 2022
	5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal		1	Kegiatan Pameran pada APKASI OTONOMI EXPO 2022
	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal		1	Capaian kinerja “Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal” pada tahun 2022 diawali dengan kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Kabupaten Bantul serta penyusunan dan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2021
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal		100	2214/2214
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan		16.996	Melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online terdiri dari Nomor Induk Berusaha/NIB terbit sejumlah 10.293 dan dokumen legalitas terbit sejumlah 13.342. Sementara melalui izinonline.bantulkab.g

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						o.id selama tahun 2022 telah terbit sejumlah 3.654 legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan noperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
	9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota		486.378.805.000	
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal		405	173 peserta pada Bimtek aparatur, dan 232 peserta pada kegiatan bimtek/ sosialisasi/ pembinaan bagi penanam modal/ pelaku usaha
	11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal		55	55 Perusahaan
	12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/		100	2214/2214

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima			
19	**Kepemudaan dan Olahraga**					
2.r.1	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan			620	Rekap Peserta Kegiatan Kelompok Substantif Kepemudaan Tahun 2022
	2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			150	
2.r.2	1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda			2.293	DPD KNPI Kab. Bantu!
	2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			6.198	
2.r.3	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan			549	Si Gadis Pentul. Bidang PTK Dinas Dik ora Kab. Bantu!

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			4	Dokumentasi Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Dikpora Kab. Bantu!
20	**Statistik**					
2.s.1,2.s.2	1	Tersedianya buku profil daerah	(Ada/ Tidak)		ADA	Buku Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022
	2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan			33	
	3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			18	
	4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			7	
	5	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			5	
	6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	76	92,68%	
			jumlah kegiatan statistik sektoral	82		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	76	92,68%	
			jumlah indikator statistik sektoral	82		
21	**Persandian**					
2.t.1	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	2	100,00%	Hari Jadi Bantul, Pelantikan Lurah
			Jumlah kegiatan strategis yang ada	2		Hari Jadi Bantul, Upacara 17 Agustus
	2	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik ataua aplikasi penyandian	204	79,07%	
			Jumlah SE yang ada	258		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	223	86,43%	
			Jumlah SE yang ada	258		
	4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	105	98,13%	
			Jumlah titik pada PHKS	107		
22	**Kebudayaan**					
2.u.1	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)		**272**	
				Jumlah objek PK yang diinventaris	103	
				Jumlah objek PK yang diamankan	59	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
				Jumlah objek PK yang dipelihara	24	
				Jumlah objek PK yang diselamatkan	86	
				Jumlah objek PK yang dipublikasikan	0	
	2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)		**2**	Studi Teknis Perencanaan Rehab Cagak Aniem; Rehabilitasi Pasar Gatak
				Jumlah objek PK disebarluaskan	0	
				Jumlah objek PK dikaji	2	
				Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya	0	
	3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan	Jumlah objek dimanfaatkan		46	Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan dan WBTB yang telah dikaji

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		meningkatkan kesejahteraan masyarakat)				
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola		6 Orang	SK Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2022
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan		169 Cagar Budaya	
	6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)		169	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
				Jumlah CB diselamatkan	86	
				Jumlah CB diamankan	35	
				Jumlah CB dizonasi	3	
				Jumlah CB dipelihara	24	
				Jumlah CB dipugar	21	
	7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota		0	
	8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)		0	
	9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan		0	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)		15.043	1.5043 koleksi
	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pengunjung museum		43.389	
	12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		3 kegiatan	3 kegiatan Fasllitasi Komunitas Museum Promosi Musseum, Wajib Kunjung Museum
	13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk		6 orang	SK Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2022
	14	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB		6 orang	
	15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi		6 orang	Sertifikat Tim Ahli Cagar Budaya
	16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum		1 Orang	Keterisian Formasi Analis Cagar Budaya dan Koleksi Museum pada Seksi Warisan Budaya Benda

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)		0	
	18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)		6 orang	SK Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2022
	19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		3 kegiatan	Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Propinsi, Wajib Kunjung Museum, Promosi Museum Bantul
23	**Perpustakaan**					
2.v.1	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	5.101.443	532,87%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	957.352		
	2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	1.075.333	112,32%	
			Jumlah penduduk di wilayahnya	957.352		
	3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	1.522	0,16%	
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	957.352		
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	146	30,04%	
			Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	486		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat			532	
2.v.2	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya			0	Kabupaten Bantul belum Memiliki Naskah Kuno yang dialih mediakan
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa			0	Kabupaten Bantul belum Memiliki Naskah Kuno yang ditransliterasikan
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			6	
24	**Kearsipan**					
2.w.1	1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	134.779	69,96%	
			Jumlah seluruh arsip aktif	192.642		
	2	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	61.718	90,09%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			Jumlah seluruh arsip inaktif	68.504		
	3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	1.827	81,67%	
			Jumlah seluruh arsip statis	2.237		
	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	310	72,09%	
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	430		
2.w.2	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK			100%	Jumlah arsip yang dimusnahkan dilengkapi dengan Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Bupati Bantul dengan nomor: 045/04189/DPK tanggal 23 September 2022 sejumlah 762 berkas

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			100%	
	3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			100%	Penyelamatan arsip dari pembubaran DPKBPMD menjadi DP3APPKB, perubahan dari Bagian Humas dan Protokol menjadi Diskominfo
	4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK			100%	
	5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			100%	
	6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			100%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
Urusan Pilihan						
25	**Kelautan dan Perikanan**					
3.a.1	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			118	
	2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	5	100,00%	
			Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota	5		
	3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan			155	
	4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			785	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			81.419.561	
26	**Pariwisata**					
3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4, 3.b.5	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			4 kawasan obyek wisata yang dikelola oleh pemda (Dinas Pariwisata)	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai depok, Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo Perda nomor 8 tahun 2021, Perbup nomor 106 tahun 2022 dan Perbup nomor 6 tahun 2019
	2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			7 Fasilitas Pariwisata	Pendopo /Joglo Parangtritis, Parangkusumo, Goa Cemara, Pantai Pandansimo, Goa Selarong, Panggung

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Kesenian Goa Cemara, Tempat Peristirahatan di Goa Cerme
	3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota			1.707	1.707 UJP; Penyediaan akomodasi, usaha daya tarik wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi
	4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			242	Wisman berkebangsaan Singapura, Malaysia, Belanda, Thailand, Spanyol, Perancis, Switzerland,
	5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			16 Kegiatan	Njlajah Bantul Milangkori, Festival Kuliner Mataraman, Keroncong Pesisiran, Symphoni Gumuk Pasir, Festival Lampion, Pameran Pariwisata, Video Klip

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Pariwisata, Baliho, Buku Bantul Harmony, Goodiebag Pariwisata, Signboot, Media Sosial, Fasilitasi Pariwisata (Sepeda Bantu, CRV, Merci), Pentas Bandara, Table Top, Travel Dialog
	6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi			0	
	7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			0	
	8	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	49	89,09%	Jumlah tenaga pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2021 dan masih berlaku
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	55		Jumlah tenaga pariwisata yang ikut sertifikasi pada tahun 2021

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	280	100,00%	
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	280		
	10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			65 kali	
27	**Pertanian**					
3.c.1	1	Sarana pertanian yang diberikan			54	
	2	Prasarana pertanian yang digunakan			58	
	3	Penerbitan izin usaha pertanian			48	
	4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	58	100,00%	
			Jumlah prasarana yang dibangun	58		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	48	100,00%	
			Jumlah usulan usaha pertanian	48		
3.c.2	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	1.460,80	100,00%	Bencana pertanian = 954
			Luas area terkena bencana	1.460,80		Bencana penyakit hewan menular = 506.8
28	**Kehutanan**					
3.d.1	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			TDI	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah No.061/ 0559/ TAPEM tanggal 30
	2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			TDI	
	3	Pemulihan ekosistem pada Tahura			TDI	
	4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			TDI	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
						Januari 2023, bahwa Kabupaten Bantul tidak melaksanakan urusan Kehutanan
29	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					
3.e.1	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			TDI	Berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah No.061/ 0559/ TAPEM tanggal 30 Januari 2023, bahwa Kabupaten Bantul tidak melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
30	**Perdagangan**					
3.f.1	1a	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	0	TDI	Tidak ada pengajuan izin pusat perbelanjaan
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	0		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	1b	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	168	100,00%	zin toko swalayan termasuk risiko rendah sehingga terbit otomatis di OSS
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	168		
	2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	15	100,00%	
			Jumlah permohonan penerbitan TDG	15		
	3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	79	52,67%	Gudang dengan izin yang masih berlaku
			Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota	150		Jumlah Gudang di Kab Bantul
	4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			-	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	TDI	baru akan diterapkan mulai tahun 2023
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0		
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	TDI	baru akan diterapkan mulai tahun 2023
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	TDI	baru akan diterapkan mulai tahun 2023
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		
	5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota	0	TDI	Tahun 2022 masih dilaksanakan di tingkat provinsi
			Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer	0		tidak mengeluarkan SIUP

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
	1	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)	0	TDI	SKA merupakan kewenangan provinsi
			Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0		
	2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya K=(a+b) x 100%	a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	0,5	100,00%	22 pasar
			b = Sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	0,5		
	3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	11,08%	11,08%	Fluktuasi harga berbagai komoditas yang tinggi
3.f.2	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	a = Jumlah pupuk yang disalurkan	14.683,36	29,48%	

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
		X=a/(b x c) x 100% X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan	b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)	90%		Data realisasi penyaluran pupuk
			c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	55.336,55		Alokasi pupuk dari Pusat ke Kah Bantul
3.f.3	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	9.168	39,42%	
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota	23.257		
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	483	85,34%	Data sampel BDKT yang sesuai
			Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	566		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
31	**Perindustrian**					
3.g.1	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi Izin yang diterbitkan	0	TDI	Tidak ada pemohon Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0		
3.g.2	1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	a) Tersusunnya naskah akademik (30%)	30%	50,00%	
			b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)	20%		
			c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)	0%		
			d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	0%		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
			e) Penetapan Perda RPIK (10%)	0%		
3.g.3	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi Izin yang diterbitkan	1	100,00%	BA vertek untuk industri dengan risiko usaha menengah tinggi dan tinggi
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	1		
	2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi Izin yang diterbitkan	0	TDI	Tidak ada Pemohon IPUI
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0		
3.g.6	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan menengahdan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas	181	0,698%	
			Total populasi industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota	25.934		

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	RUMUS	Capaian		Keterangan
				PEMBILANG / PENYEBUT	Nilai	
32	**Transmigrasi**					
2.h.1	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			TDI	Kabupaten Bantul merupakan Daerah Pengirim/ Asal Transmigrasi bukan sebagai daerah penempatan.
2.h.1	2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			TDI	
2.h.1	3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina			TDI	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2.2 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Bantul Tahun 2022

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	**Pendidikan**				
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD.	27.288	105,63%	Data berdasarkan laporan Individu Sekolah Dapodik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul. Rekap Data Siswa untuk warga Kabupaten Bantul termasuk yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di luar Kabupaten Bantul dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) tahun 2022
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	25.834		Data Penyebut berasal dari Data Kependudukan tahun 2022 Semester 2 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ 00605 tanggal 16 Februari 2023

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	85.283	101,18%	Data berdasarkan laporan Individu Sekolah Dapodik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul. Rekap Data Siswa untuk warga Kabupaten Bantul termasuk yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di luar Kabupaten Bantul dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) tahun 2022
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	84.291		Data Penyebut berasal dari Data Kependudukan tahun 2022 Semester 2 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ 00605 tanggal 16 Februari 2023
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama.	44.354	99,15%	Data berdasarkan laporan Individu Sekolah Dapodik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul. Rekap Data Siswa untuk warga Kabupaten Bantul termasuk yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di luar Kabupaten Bantul dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) tahun 2022

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	44.732		Data Penyebut berasal dari Data Kependudukan tahun 2022 Semester 2 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ 00605 tanggal 16 Februari 2023
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan.	2.382	13,51%	Data berdasarkan laporan Individu Sekolah Dapodik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul. Rekap Data Siswa untuk warga Kabupaten Bantul termasuk yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di luar Kabupaten Bantul dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) tahun 2022
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan	17.634		Data Penyebut berasal dari Data Kependudukan tahun 2022 Semester 2 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ 00605 tanggal 16 Februari 2023
2	**Kesehatan**				

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	1.351	0,0014	Data Penyebut berasal dari Data Kependudukan tahun 2022 Semester 2 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ 00605 tanggal 16 Februari 2023
		Jumlah Penduduk di kabupaten/ kota	964.245		
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi.	12	75,00%	
		Jumlah RS di kabupaten/kota	16		
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	10.514	96,51%	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1066 tanggal 6 Februari 2023 Sasaran yang disajikan pada data dukung pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita adalah jumlah sasaran riil yang dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Data Pemantauan Wilayah setempat (PWS) KIA yang dilaksanakan oleh Puskesmas melalui bidan koordinator dan melibatkan
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	10.894		
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan.	10.885	99,92%	
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	10.894		
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	8.990	83,02%	

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	10.829		kader. Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengentrian ke dalam aplikasi web-Kesga oleh puskesmas. Setelah data tersebut di validasi oleh Dinas Kesehatan,data tersebut yang menjadi data sasaran untuk lbu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita.
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	49.818	87,08%	
		Jumlah balita di kabupaten/kota	57.211		
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	117.696	96,45%	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	122.027		
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	234.862	44,04%	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1066 tanggal 6 Februari 2023, Sasaran yang disajikan pada data dukung Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah jumlah sasaran riil berdasarkan data

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	533.295		Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK). Dalam Pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit tidak menular (POSBINDU PTM). Posbindu PTM dilaksanakan oleh puskesmas secara rutin dan periodik dengan melibatkan kader-kader yang ada di setiap dusun.
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77.422	53,53%	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1066 tanggal 6 Februari 2023, Sasaran yang disajikan pada data dukung Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan sknning kesehatan sesuai standar adalah sasaran riil jumlah lansia berdasarkan data puskesmas di wilayah kerja masing-masing melalui Pemantauan wilayah Setempat {PWS) yang dilaksanakan oleh puskesmas.
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	144.640		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	4.393	11,25%	
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	39.053		
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	4.754	30,23%	
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	15.727		
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	2.344	84,20%	
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	2.784		
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	10.244	98,51%	
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	10.399		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	18.008	100,00%	
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	18.008		
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha).	1	100,00%	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 610/ 00201 tanggal 17 Januari 2023 serta berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman rawan banjir dan pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten.
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	1		
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m).	1	100,00%	

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
	Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	1		
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting.	6.946,82	80,46%	
		luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	8.634		
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota..	338.013	100,41%	Penyebut merupakan data target Rumah Tangga Penerima Layanan SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari berdasarkan Proyeksi kenaikan rumah tangga setiap tahun sebesar 3.515 yang didasarkan pada rata - rata kenaikan jumlah rumah tangga dari tahun 2016 - 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	336.646		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD.	338.013	100,41%	Penyebut merupakan data target Rumah Tangga Penerima Layanan SPM Penyediaan Pelayanan limbah rumah tangga domestik berdasarkan Proyeksi kenaikan rumah tangga setiap tahun sebesar 3.515 yang didasarkan pada rata - rata kenaikan jumlah rumah tangga dari tahun 2016 - 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021
		Jumlah rumah di Kabupaten/ Kota	336.646		
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya.	130.188	100,00%	
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	130.188		
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap.	473,566	75,83%	
		Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	624,47		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis.	1.279	84,98%	
		Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota	1.505		
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi.	167	100,00%	
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	167		
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima**				

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n.	0	0,00%	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Nomor 414.15/ 00373 tanggal 30 Januari 2023 DPUPKP sudah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebanyak 3 unit, akan tetapi tidak direalisasikan karena tidak terdapat kejadian bencana pada Kabupaten Bantul, serta penerapan SPM Sub Urusan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota baru dilaksanakan sampai dengan tahap pendataan/ identifikasi perumahan rawan bencana dan identifikasi lahan potensial untuk relokasi. Sehingga fasilitasi rumah layak huni juga belum dapat dilaksanakan.
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	3		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni.	0	-	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Nomor 414.15/ 00373 tanggal 30 Januari 2023 DPUPKP sudah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebanyak 3 unit, akan tetapi tidak direalisasikan karena tidak terdapat kejadian bencana pada Kabupaten Bantul, serta penerapan SPM Sub Urusan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota baru dilaksanakan sampai dengan tahap pendataan/ identifikasi perumahan rawan bencana dan identifikasi lahan potensial untuk relokasi. Sehingga fasilitasi rumah layak huni juga belum dapat dilaksanakan.
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0		
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha).	97,89	49,90%	

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
	dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	196,19		
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni.	2.741	0,73%	
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	373.893		
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU.	25	13,02%	
		Jumlah unit rumah kab/kota	192		
5.a	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyaraka Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani.	165	100,00%	
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	165		
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan.	19	76,00%	
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	25		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
5.b	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Kebakaran**				
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	8.500	100,00%	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	8.500		
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana .	964.245	100,00%	
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	964.245		
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	1	100,00%	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pelaksana BPBD Nomor 360/ 00209 tanggal 14 Februari 2023 menerangkan bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Bantul
		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten /kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	126	100,00%	
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	126		
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	8,20	8,20	Satuan dalam Menit
6	**Sosial**				

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	14.525	100,00%	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	14.525		
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran.	700	100,00%	
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	700		
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
7	**Tenaga Kerja**				
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD.	9	100,00%	
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	9		
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi.	8.784	36,859%	Jumlah tenaga kerja sektor swasta dan Pemerintahan (ASN dan Non ASN)
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	23.374		
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan).	20.808.830.000.000	3.459.604.641,88	Jumlah tenaga kerja berdasarkan data Publikasi BPS Keadaan Angkatan Kerja DIY Agustus 2022
		Jumlah tenaga kerja	601.480		
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.	203	66,997%	
		Jumlah Perusahaan	303		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan.	3.681	54,437%	
		Jumlah pencaker yang terdaftar	6.762		
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD.	191.836.967.873	10,01%	
		Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	1.917.282.768.076		
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi.	72	100,00%	
		Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	72		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan.	88	18,294	
		Jumlah penduduk perempuan	481.044		
9	**Pangan**				
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.	15,036	150,36%	Satuan Pembilang dan Penyebut dalam Ton
		Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	10		
10	**Pertanahan**				
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	485.620,45	98,836%	Satuan dalam meter persegi
		seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	491.339,45		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	391	100%	
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	391		
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	7.952	26,43%	
		Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	30.087		
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;.	0	-	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan dari BPN, No. B/NT.02/41-43.02/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, tidak terdapat kegiatan penetapan Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Bantul Tahun 2022
		Jumlah penerima tanah obyek landreform	0		
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah.	0	-	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanahan dan Tataruang No.130/00330/ Program/2023

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0		tanggal 24 Jan 2023, bahwa di DIY Kepemilikan tanah sudah jelas sehingga tidak ada membuka ijin tanah yang di terbitkan
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani.	20	100%	
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	20		
11	**Lingkungan Hidup**				
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKA (Indeks Kualitas Air)	36,67	62,846	
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	86,34		
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	64,34		
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani.	409.826,99	63,56%	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani dan Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota dalam satuan m3/tahun
		Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota	644.819,13		
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota.	20	83,33%	

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
	oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	24		
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman.	739.629	98,65%	
		Jumlah penduduk wajib KTP-el	749.759		
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA.	189.707	88,45%	
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	214.483		
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir.	227.539	99,58%	
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	228.500		
2.k.1.4	Jumlah Peramgkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.	24	53,33%	
		Jumlah PD	45		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
13	**Pemberdayaan masyarakat dan desa**				
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun.	1	100,00%	TDI, Berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Nomor 140/ 00564/ Tapem tanggal 30 Januari 2023 Menerangkan bahwa Kabupaten Bantul tidak memiliki Desa/ Kelurahan dengan kategori sangat tertinggal, tertinggal, atau berkembang. Dari 75 Kalurahan di Kab. Bantul, sebanyak 10 Kalurahan berkategori Maju, dan sisanya sebanyak 65 Kalurahan memiliki kategori Mandiri
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	1		
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun.	1	100,00%	
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	1		
14	**Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**				
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,657877	1,657877	
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern.	102.014	73,50%	
		Jumlah Pasangan Usia Subur	138.790		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani.	12.971	9,35%	
		Jumlah Pasangan Usia Subur	138.790		
15	**Perhubungan**				
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota		38,46	38,46	IK1: Jumlah trayek yang dilayani = 10; bobot trayek =1; bobot angkutan jalan = 100; Jumlah trayek yang dibutuhkan = 26 IK2 : 0; Rasio konektivitas kabupaten/kota = (((10 X 1)/26) x 100) = 38,46
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota (V/C Ratio di Jalan Kabupaten/ Kota)		1,68	1,68	VCR Jl. Jend. Sudirman = 0,45; VCR Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo = 0,42; Jl. KH. Wahid Hasyim = 0,39; Jl. Prof. Dr. Supomo, SH = 0,42 VCR = 0,45 + 0,42 + 0,39 + 0,42 = 1,68
16	**Komunikasi dan Informatika**				

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	45	100,00%	
		Jumlah PD	45		
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	18	94,74%	
		Jumlah Layanan Publik	19		
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.	955.567	99,10%	
		Jumlah penduduk	964.245		
17	**Koperasi, usaha kecil dan menengah**				
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset.	107	38,77%	
		Jumlah seluruh koperasi	276		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha.	19.669	22,65%	
		Jumlah usaha mikro keseluruhan	86.833		
18	**Penanaman Modal**				
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Jumlah investasi tahun n di kabupaten/kota.	2.193.856.422.696,05	28,49%	
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	1.707.477.617.696,05		
19	**Kepemudaan dan Olahraga**				
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota.	8.249	4,07%	
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	202.528		
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota.	9.815	4,85%	

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
		jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	202.528		
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	31	31	
20	**Statistik**				
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	45	100%	
		jumlah Perangkat Daerah	45		
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	45	100%	
		jumlah Perangkat Daerah	45		
21	**Persandian**				
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi.	4,16	83,20%	

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
		Jumlah area penilaian	5		
22	**Kebudayaan**				
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan.	169	62,13%	
		Jumlah cagar budaya yang terdata	272		
23	**Perpustakaan**				
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei /kajian kegemaran membaca masyarakat		58,26	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		65,71	
24	**Kearsipan**				

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan T = (a + i + s + j)/4	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	69,96	78,435	
		i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	90,09		
		s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	81,6		
		j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	72,09		
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100	100	
		b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	100		
		g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	100		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
	T = (m + b + g + a + c + i)/6	a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	100		
		c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100		
		i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100		
Urusan Pilihan					
25	**Kelautan dan Perikanan**				
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota.	13.966,25	102,93%	Target ditetapkan dalam dokumen Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2022 tentang Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026
		Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	13.569		
26	**Pariwisata**				

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n	258	352,63%	
		Jumlah wisatawan tahun n-1	57		
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n	5.687.414	101,70%	
		Jumlah wisatawan tahun n-1	2.819.691		
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	50.909	47,93%	
		Jumlah kamar yang tersedia	106.215		
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	3.735.560.000.000	11,97%	
		Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	31.197.830.000.000		
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	57.267.511.559,30	26,56%	
		Total realisasi PAD	215.631.865.732,74		
27	**Pertanian**				
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	218.715,39	709,54%	
		luas panen	30.825,16		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)	3.856	0	Tidak terjadi kasus pada tahun t -1 (tahun 2021)
		jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	0		
28	**Kehutanan**				
3.c.1	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah No.061/ 0559/ TAPEM tanggal 30 Januari 2023, bahwa Kabupaten Bantul tidak melaksanakan urusan Kehutanan				
29	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
3.c.1	Berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah No.061/ 0559/ TAPEM tanggal 30 Januari 2023, bahwa Kabupaten Bantul tidak melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				
30	**Perdagangan**				
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	303	68,40%	
		Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab-Kota	443		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
	IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	14.681,36	26,53%	
		RDKK	55.336,55		
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	9.272	39,87%	
		jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	23.257		
31	**Perindustrian**				
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n	25.934	1,93%	
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	25.442		

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	- Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% - Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% - Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	0	0,00%	TDI, Dokumen RPIK belum ditetapkan. Sampai Tahun 2022 berakhir, dokumen RPIK masih dalam bentuk DRAFT dan belum ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Bantul
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100,00%	
		Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	-	TDI, Pada tahun 2022 tidak terdapat Industri Kecil dan Industri Menengah yang mengajukan izin perluasan

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
	(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	0		industri (IPUI), dan oleh karenanya tidak ada izin perluasan industri yang dikeluarkan
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	-	TDI, PT. YIP merupakan satu-satunya perusahaan di Kabupaten Bantul yang memiliki IUKI tahun 2018, sampai dengan tahun 2022 belum ada permohonan IUKI dan IPKI baru
		Jumlah izin yang dikeluarkan	0		
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	50%	90%	Seluruh komponen informasi industri tersedia setiap Semester (0-6 bulan) kecuali Informasi Bahan Bakar/ Energi. Tidak terdapat informasi mengenai bahan bakar/ energi

No. IKK	IKK Outcome (Hasil)	Rumus (Komponen Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Pembilang/ Penyebut	Kinerja	
		2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	40%		
32	**Transmigrasi**				
3.g.1	Tidak Terdapat Indikator Outcome untuk Urusan Transmigrasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020				

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2.3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan Tahun 2022

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Penyebut/ Pembilang	Kinerja	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
1	**Perencanaan dan Keuangan**				
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	272.683.559.752,00	12,14%	
		Jumlah APBD	2.246.481.649.585,13		
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD	540.572.423.372,80	24,19%	
		Jumlah Pendapatan pada APBD	2.234.584.500.583,50		
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3	Level 3, Penilaian Baseline Maturitas SPIP Terintegrasi Pada pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 antara Tim Validasi BPKP DIY, ST Nomor ST-716/PW12/3/2021 tanggal 16 November 2021

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Penyebut/ Pembilang	Kinerja	
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3	Level 3, Hasil Evaluasi Jenjang Pertama atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-419/PW12/6/2022 tanggal 30 November 2022
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan	2.024.783.229.827,32	72,19%	
		transfer expenditures	402.945.446.860,08		
		jumlah belanja APBD	2.246.481.649.585,13		
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.		8 WTP	
2	**Pengadaan**				
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0	0,00%	Surat Pernyataan No 027/ 00470/ PBJ tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak ada kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang pembangunannya

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Penyebut/ Pembilang	Kinerja	
		jumlah kontrak keseluruhan tahun n	1.857		memerlukan waktu 3 kuartal dan ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1.857	70,37%	
		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	2.639		
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan.	1.063.940.394.728,13	55,49%	Jumlah nilai belanja operasional dan modal diperoleh dari realisasi belanja barang dan jasa (768.495.409.619,24), belanja hibah (65.636.165.351,08), belanja bantuan sosial (8.110.400.000,00), beserta belanja modal (221.698.419.757,81)

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Penyebut/ Pembilang	Kinerja	
		total belanja operasional dan modal	1.917.282.768.076,13		Jumlah nilai belanja operasional dan modal diperoleh dari nilai realisasi belanja operasional (1.695.584.348.318,32) dan belanja modal (221.698.419.757,81)
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)	1.031.153.045.779,13	244,39%	Jumlah Nilai Realisasi PBJ dengan menggunakan Sumber Data LRA Unaudited 25 Januari 2023 Rp 1.031.153.045.779,13 dikurangi jumlah nilai PBJ impor dengan sumber data dari aplikasi SIERA dengan akses pada tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp 32.787.348.949,00
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	299.415.004.831,00		
3	**Kepegawaian**				
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas.	1.300	53,74%	1. Penyebut merupakan Jumlah Seluruh PNS diluar Guru dan Nakes; 2. Berdasarkan Keterangan

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Penyebut/ Pembilang	Kinerja	
		Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	2.419		dari Bp Moch Panji Utama (Pengelola LPPD Wil. IA Subdit Evaluasi Kinerja Wil. I Dit. EKPPD, Ditjen OTDA), data yang digunakan merupakan data PNS saja, PPPK dan Non ASN tidak dihitung.
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	438	18,11%	
		seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.419		
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi.	92	21,00%	
		seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	438		
4	**Manajemen Keuangan**				

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Penyebut/ Pembilang	Kinerja	
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD {[(Realisasi Belanja / Total Belanja APBD)-1]*100%}	Realisasi Belanja	2.246.481.649.585,13	0,041488%	
		Total Belanja APBD	2.247.414.065.054,00		
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD {[(Total PAD dalam realisasi / Total PAD dalam APBD)-1]*100%	Total PAD dalam realisasi	540.572.423.372,80	6,2437%	
		Total PAD dalam APBD	508.804.008.396,00		
4.d.3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap?(Ya/Tidak)		Ya	Rekap saldo awal aset tetap tahun 2022
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?(Ya/Tidak)		Ya	SOP evaluasi dan rekonsiliasi BMD
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?(Ya/Tidak)		Ya	Rekap mutasi aset tetap
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?(Ya/Tidak)		Ya	Neraca tahun 2021

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022		
			Capaian		Keterangan
			Penyebut/ Pembilang	Kinerja	
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	215.631.865.732,74	9,684%	Total belanja anggaran merupakan Jumlah Belanja dan Transfer berdasarkan Perbup Bantul No.62 Tahuun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021
		total belanja anggaran tahun sebelumnya	2.226.588.267.594,90		
5	**Transparansi dan Partisipasi Publik**				
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	45	100,00%	
		Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	45		
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	12	100,00%	
		total jumlah dokumen yang telah dirinci	12		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Uraian prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam BAB I Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022.

Tabel 2.3.1 Matriks Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2022 berdasarkan RKPD Kabupaten Bantul Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Bantul Tahun Anggaran 2022 tanggal 7 Januari 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1315
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,1
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,22
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	4
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100
6	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,360
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,9
		Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	Persen	80
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75,13
		Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,03
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,75
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	175,51
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72,296
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,36
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2022

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Keberhasilan Visi dan Misi Pembangunan di Kabuppaten Bantul selama lima tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2021 – 2026 diukur dengan menggunakan tolok ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Potret kinerja daerah tercermin dari capaian lima belas sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3.2 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target PK	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1315	3,7840*)	91,59
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82,5	94,00	113,94
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25	3,62	111,38
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,1	88,25	100,17
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01	73,90	99,85
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,22	15,48	101,71
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	4	7	175,00
9	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100,00	100,00
10	**Rasio Gini**	**Angka**	**0,360**	**0,410**	**86,11**
11	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**3,90**	**3,97**	**98,21**
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	80,00	83,33	104,16
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75,13	73,84	98,28
14	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,03	75,20	100,23
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,75	62,84	100,14
16	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**175,51**	**167,27**	**104,69**
17	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**Orang**	**72.296**	**73.689**	**98,07**
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,36	66,14	95,36
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	NINDYA	NINDYA	100,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2022; Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul Bappeda Kab. Bantul, 2023; data diolah

Dari

Tabel 2.3.2 diatas terlihat capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2022 terdapat 9 (sembilan) indikator atau sebesar 47,37% dengan capaian > 100%, terdapat 3 indikator atau sebesar 15,79% dengan capaian tepat 100%, dan 7 indikator atau sebesar 36,84% tidak tercapai, dengan capaian < 100% dari total 19 IKU Bupati.

Adapun 7 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 yaitu, Rasio Gini (Pemerataan Pendapatan), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Infrastruktur, Usia Harapan Hidup, dan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Indikator yang memiliki capaian tepat 100% dengan target pada Perjanjian Kinerja yaitu Opini Laporan Keuangan, Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Kategori Kabupaten Layak Anak. Indikator dengan capaian > 100% yaitu : Indek Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Angka Harapan Lama Sekolah, Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif, Indeks Resiko Bencana, Indeks Sistem Pemerintahan Bernbasis Elektronik (SPBE), Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK dan Desa/ Kalurahan Pamor Budaya.

Informasi lebih lengkap terhadap ketercapaian masing-masing indikator akan diuraikan secara lebih lanjut dalam sub bab 2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan

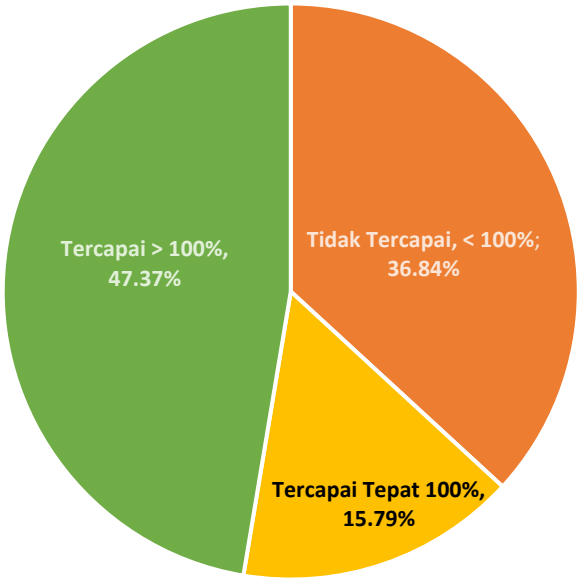

Grafik 2.3.1 Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026. Indikator Kinerja Utama Sasaran Daerah yang akan dicapai pada periode Pembangunan Daerah ini ada yang berkelanjutan dengan periode sebelumnya dan ada yang merupakan Indikator Baru sebagai bentuk perwujudan adanya peningkatan Pembangunan Daerah yang lebih maju yang akan digapai guna terwujudnya masyarakat Bantul yang Harmonis dan Sejahtera.

Tabel 2.3.3 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Selisih Kinerja	% Selisih (Peningkatan/ Penurunan Kinerja)
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,0815	3,7840	-0,2975	-7,29%
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	0	0
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre	Nilai	82	94,00	12,00	114,63

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Selisih Kinerja	% Selisih (Peningkatan/ Penurunan Kinerja)
	for Prevention (MCP) KPK					
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,62	0,38	111,73
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,03	88,25	0,22	100,25
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,90	0,04	100,05
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,48	0,31	102,04
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	3	7	4,00	233,33
9	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	100,00	n/a	n/a
10	**Rasio Gini**	**Angka**	**0,441**	**0,410**	**0,03**	**107,03**
11	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**4,09**	**3,97**	**0,12**	**102,93**
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	83,33	n/a	n/a
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	n/a	73,84	n/a	n/a
14	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75	75,20	0,20	100,27
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,02	62,84	-0,18	99,71
16	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**181,26**	**167,27**	**13,99**	**107,72**
17	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**Orang**	**72.101**	**73.689**	**-1.588,00**	**97,80**
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	n/a	66,14	n/a	n/a
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	NINDYA	NINDYA	n/a	0

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2022; Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul Bappeda Kab. Bantul, 2023; data diolah

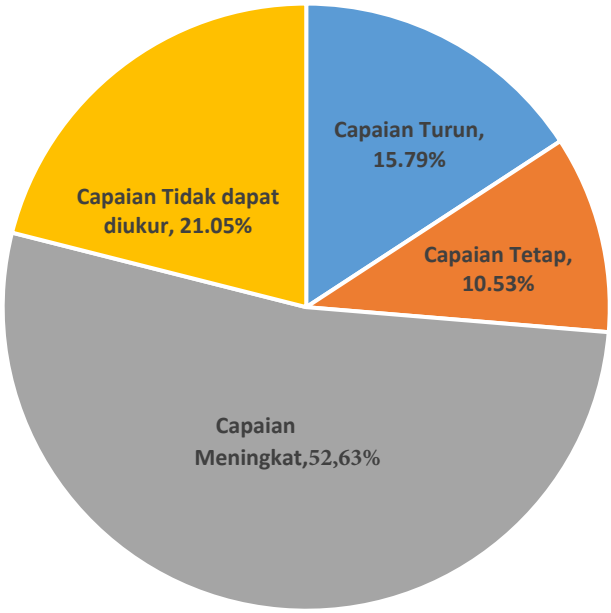

Grafik 2.3.2 Persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 *(Sumber : Bagian Organisasi, 2023)*

Dari Tabel 2.3.3 dan **Grafik 2.3.2** diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator atau sebesar 15,79% dari seluruh IKU yang mengalami penurunan capaian bila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2021, indikator tersebut adalah : Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Dua indikator (10,53%) memiliki capaian tetap atau tidak mengalami perubahan kinerja bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu Opini Laporan Keuangan dan Kategori Kabupaten layak Anak.

Sepuluh indikator atau sebesar 52,63% dari 19 IKU memiliki capaian kinerja yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu : Rasio Gini, Usia Harapan Hidup, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kepuasan Masyarakat, Angka Harapan Lama Sekolah, Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa/ Kelurahan Pamor Budaya, Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK, Indeks Resiko Bencana. Sedangan 4 indikator pada tahun 2022 tidak dapat dilakukan penyandingan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan tergolong indikator baru, yang belum pernaah dilakukan pengukurann pada periode pembangunan daerah sebelumnya. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

2.3.4. Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026 telah mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini berupa indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 (Sasaran Daerah) yang telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Capaian indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 ditampilkan dalam Tabel 2.3.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3.4 Matriks Capaian Kinerja Indikator Utama tahun 2022 dibandingkan dengan Target RPJMD 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
			Target RPJMD	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1315	3,7840	91,59	4,3315	87,36
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	100
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82,5	94,00	113,94	84,50	111,24
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25	3,62	111,38	3,45	104,93
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,1	88,25	100,17	89,50	98,60

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
			Target RPJMD	Realisasi	% Realisasi		
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01	73,90	99,85	74,39	99,34
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,22	15,48	101,71	15,32	101,04
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	4	7	175,00	12	58,33
9	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Rasio Gini**	**Angka**	**0,360**	**0,410**	**86,11**	**0,310**	**67,74**
11	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**3,90**	**3,97**	**98,21**	**3,20**	**75,94**
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	80,00	83,33	104,16	100,00	83,33
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75,13	73,84	98,28	79,08	93,37
14	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,03	75,20	100,23	75,20	100,00
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,75	62,84	100,14	66,07	95,11
16	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**175,51**	**167,27**	**104,69**	**154,27**	**91,57**
17	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**Orang**	**72.296**	**73.689**	**98,07**	**70.668**	**95,73**
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,36	66,14	95,36	75,96	87,07
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	NINDYA	NINDYA	100,00	KLA	50

Sumber : Peraturan Daerah Kab. Bantul No.6/ 2021,Bappeda; Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, 7 Januari 2021, Bag. Organisasi; BPS Kabupaten Bantul 2023; data diolah.

Dari **Tabel 2.3.4** diatas dan **Grafik 2.3.3** dibawah, capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022 terhadap target IKU pada akhir periode RPJMD 2021-2026 terdapat 13 indikator atau sebesar 68,42% target yang ditetapkan pada tahun 2022 belum tercapai realisasinya. Selanjutnya, capaian pada tahun 2022 terdapat 3 indikator kinerja (15,79%) dengan capaian tepat 100% dan 3 indikator (15,79%) memiliki capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD 2016-2021.

Adapun 13 IKU yang tidak tercapai realisasinya pada akhir periode RPJMD 2021-2022, yaitu : Kategori Kabupaten Layak Anak, Desa/ Kelurahan Pamor Budaya, Rasio Gini, Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD), Indeks Risiko Bencana, Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup, Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Usia Harapan Hidup.

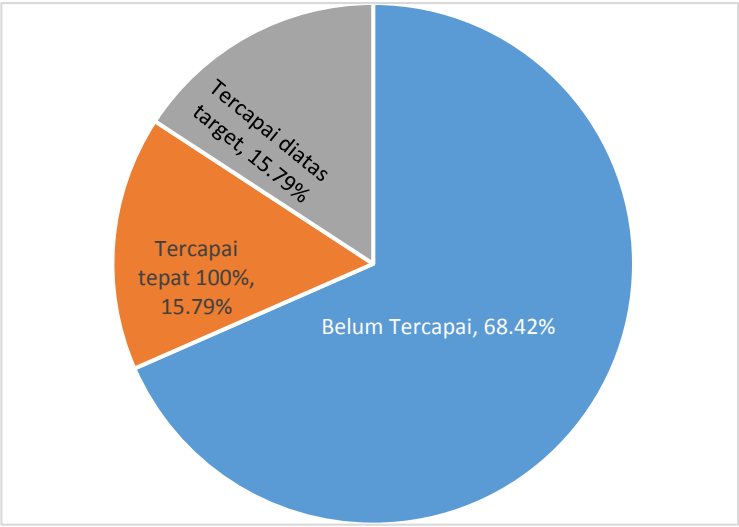

Grafik 2.3.3 Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2022 terhadap Target Akhir Tahun RPJMD 2021 - 2026 *(Sumber : Bagian Organisasi, 2023)*

Target Indikator Kinerja Utama pada akhir periode RPJMD 2021-2026 yang telah tercapai tepat 100% pada tahunyaitu Kesesuaian pemanfataan ruang, Opini Laporan Keuangan, dan Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sedangkan target IKU pada akhir periode RPJMD tahun 2022 - 2026 yang telah tercapai melebihi ekspetasi, tercapai lebih dari 100% pada tahun 2022, yaitu : Angka Harapan Lama Sekolah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerjaserta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Terdapat enam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2022 yang dapat disandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional (Tabel 2.3.5), yaitu Umur Harapan Hidup; Angka Harapan Lama Sekolah; Tingkat Pengangguran Terbuka; Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio); dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Tabel 2.3.5 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 terhadap Capaian pada tingkat Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022		% Capaian terhadap Capaian Nasional
			Bantul	Nasional	
1	Umur Harapan Hidup	tahun	73,90	73,83	100,09%
2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15,48	13,10	118,17%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,97	5,86	132,25%
4	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,410	0,381	92,39%
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	167,27	134,16**	75,32%
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	66,14	76,26*	86,73%

*Sumber : website BPS diakses pada bulan Maret 2023; *)capaian pada tahun 2021; **)https://www.bnpb.go.id/*

Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 3 indikator memiliki tingkat capaian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada Tingkat Nasional (Tabel 2.3.5). Ketiga Indikator tersebut adalah Umur Harapan Hidup dengan capaian 100,09%; Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 118,17%; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 132,25%, sedangkan Gini Rasio, Indeks Risiko Bencana, dan Indeks Pemberdayaan Gender memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian Nasional, masing-masing capaian Kabupaten Bantul terhadap capaian Nasional sebesar 92,39%, 75,32% dan 86,73%.

2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tabel 2.3.7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,0815	4,1315	3,7840	91,59	4,3315	87,36
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82	82,5	94,00	113,94	84,50	111,24
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,25	3,62	111,38	3,45	104,93
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,03	88,1	88,25	100,17	89,50	98,60
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,86	74,01	73,90	99,85	74,39	99,34
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,22	15,48	101,71	15,32	101,04
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	3	4	7	175,00	12	58,33
9	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	100	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Rasio Gini**	**Angka**	**0,441**	**0,360**	**0,410**	**86,11**	**0,310**	**67,74**
11	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**4,09**	**3,90**	**3,97**	**98,21**	**3,20**	**75,94**
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	80,00	83,33	104,16	100,00	83,33
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	n/a	75,13	73,84	98,28	79,08	93,37
14	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75	75,03	75,20	100,23	75,20	100,00
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,02	62,75	62,84	100,14	66,07	95,11
16	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**181,26**	**175,51**	**167,27**	**104,69**	**154,27**	**91,57**
17	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**Orang**	**72.101**	**72.296**	**73.689**	**98,07**	**70.668**	**95,73**
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	n/a	69,36	66,14	95,36	75,96	87,07
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	NINDYA	NINDYA	NINDYA	100,00	KLA	50

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2022; Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul Bappeda Kab. Bantul, 2023; data diolah

Secara umum, dari Tabel 2.3.7, berdasarkan kriteria pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2022 jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2021 – 2026, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) tahun 2022, terdapat 18 indikator dengan kriteria capaian "Sangat Tinggi" (indikator dengan capaian kinerja ≥90) dan 1 indikator dengan kriteria capaian "Tinggi" (indikator dengan capaian kinerja 76≤90)

Capaian IKU pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD 2021 - 2026 terdapat 1 indikator dengan kriteria capaian "Sangat Rendah" (≤ 50), 2 Indikator dengan capaian rendah (51≤65). 4 indikator dengan kriteria capaian "Tinggi", dan 12 indikator dengan capaian "Sangat Tinggi".

a. Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

Menciptakan Birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, dan akuntabel merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Perubahan mindset dan culture-set penyelengaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan bagian yang harus di tempuh oleh pemerintah darah sehingga hasil nyata bisa dirasakan oleh masyrakat

Pemerintahan yang berorientasi kinerja atau hasil mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang mendukung. Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (program follow result). Ide ini selaras dengan konsep performance-based budgeting atau biasa kita sebut dengan anggaran berbasis kinerja.

Konsep mengenai Good governance merupakan sinergi antara pemerintah

(masyarakat politik), masyarakat ekonomi dan civil society, yang di dalamnya terdapat beberapa indikator, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan visi strategis. Dari sini dapat dianalisa, bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu melibatkan 3 (tiga) pihak sebagai pelaku utama yang saling berperan dan mempengaruhi, yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika serta tuntutan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Hal tersebut ditempuh bukan hanya karena adanya tuntutan regulasi peraturan perundangan, tetapi juga sebagai bentuk respon dan kepedulian pemeritah daerah untuk selalu memperbaiki derajat kualitas pelayananannya. Oleh karena itu, semua program pembangunan pemerintah daerah selalu diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Sejalan dengan hal tersebut sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel merupakan pelaksanaan tujuan 1 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN”.

Tabel 2.3.8 Matriks Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,0815	4,1315	3,7840	91,59	4,3315	87,36
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82	82,5	94,00	113,94	84,50	111,24
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,25	3,62	111,38	3,45	104,93
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,03	88,1	88,25	100,17	89,50	98,60

Sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dari misi 1 “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik” di dukung oleh 5 indikator, antara lain :

1) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD.

EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama. EPPD dilakukan setiap tahun oleh Tim Nasional dan Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka penyusunan LPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan yang mencakup perubahan format dan substansi LPPD, serta EPPD yang memuat data dan informasi secara elektronik yang akan digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk memantau keberhasilan implementasi Otonomi Daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh pemerintah daerah melalui LPPD dan EPPD akan

menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah, serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

KABUPATEN BANTUL

Atas

Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dengan Skor **3,4463** dan Status Kinerja **Sangat Tinggi**

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018

Jakarta, 25 April 2020

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Drs. Akmal Malik, M.Si

Grafik 2.3.4 Piagam Penghargaaan Atas Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target nilai EPPD tahun 2022 dengan nilai 4,1315 (Tinggi) terealisasi dengan nilai 3,4463 (Sangat Tinggi) atau terealisasi 83,4152%. Nilai realisasi EPPD Tahun 2022 ini merupakan nilai EPPD Tahun 2019 berdasarkan LPPD Tahun 2018 yang secara resmi disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 25 April 2020. Meskipun EPPD tetap dilaksanakan secara rutin setiap tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan, namun Kementerian Dalam Negeri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mengumumkan nilai EPPD dan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara resmi karena masa transisi dari aturan lama ke aturan baru yaitu menggabungkan IKK Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 dan IKK Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sehingga hasil evaluasi kurang dapat menggambarkan kinerja pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Nilai EPPD yang tidak disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut meliputi EPPD Tahun 2020 berdasarkan LPPD Tahun 2019 dan EPPD Tahun 2021 berdasarkan LPPD

Tahun 2020. Nilai EPPD Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021 sampai dengan saat ini juga belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, maka penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran skor kinerja dan status kinerja EPPD yaitu EPPD Tahun 2019 menggunakan peraturan lama maka skor kinerja 3,4463 berstatus kinerja Sangat Tinggi, dan target EPPD Tahun 2022 menggunakan peraturan baru maka skor kinerja 4,1315 berstatus kinerja Tinggi. Perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

a) Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b) Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari proses penyusunan LPPD sampai dengan pelaksanaan EPPD yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai EPPD, yaitu:

Permasalahan :

Belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi

indikator penilaian belum maksimal

Solusi :

Mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga capaian IKK yang menjadi indikator penilaian dapat lebih maksimal karena didukung dalam perencanaan.

Upaya untuk meningkatkan nilai EPPD diantaranya meliputi:

a) Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sehingga Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian lebih diperhatikan dalam hal perencanaan dan penganggaran.
b) Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
c) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah
d) Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD
e) Melakukan koordinasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Indspektorat DIY) dan Kementerian Dalam Negeri.

2) Opini laporan keuangan

Opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat , yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan. LKPD merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten

Bantul tahun n-1. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), realisasi Predikat WTP, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) yaitu Predikat WTP atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2022 sama dengan tahun 2021.

Target capaian tahun 2026 akhir Renstra adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2022 ini telah mempertahankan kebiasaan dan kinerja atas pencapaian Laporan Keuangan WTP, sehingga dapat dipertahankan sampai target akhir Renstra tahun 2026

Gambar 2.3.1 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2021 dari BPK , Tanggal 21 April 2022

LKPD Kabupaten Bantul merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul. Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul dimulai dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD. Dalam fungsi sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu 1) Laporan Operasional (LO), 2) Neraca, 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 4) Laporan Arus

Kas (LAK), 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 6) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BPKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office). BKAD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Gambar 2.3.2 Penyerahan Penghargaan kategori Penghargaan WTP minimal 10 kali Berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Bantul

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2021 menggambarkan keberhasilan penyelenggraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini biasanya

diberikan oleh BPK pada bulan April n atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah n-1, atau dapat di gambarkan Opini WTP ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada bulan April tahun 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2021.

Perkembangan opini yang diterbitkan BPK sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut

Tabel 2.3.9 Perkembangangan Opini Pemeriksaan BPKatas Laporan Keuangan Tahun 2012 – Tahun 2022

Tahun atas Laporan Keuangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2022
Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber ; BPKPAD, KABUPATEN BANTUL 2023

Adapun terkait capaian predikat WTP tersebut apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.10 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota Se-DIY

Nama Pemda	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2022
Provinsi DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Seleman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Kulon Progo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber ; BPKPAD, KABUPATEN BANTUL 2023

Dari table tersebut diatas dapat digambarkan bahwa Kabupaten Bantul telah mempertahankan kebiasaan, budaya kinerja atas akuntabel laporan keuangan selama 10 tahun atas Laporan Keuangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Hal ini juga menunjukan Kabupaten Bantul sebagai salah satu dari 4 (empat) Kabupaten/kota yang memperoleh Predikat WTP atas laporan Keuangan Tahun 2012. Pencapaian Kabupaten Bantul diapresiasi oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia

dengan diberikan nya penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Pemeriantahan Kabupaten/Kota yang memenuhi kategori penghargaan WTP minimal 10 kali berturut-turut. Penghargaan ini diserahkan langusng oleh Mentri Keuangan, Sri Mulyani kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Musli dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.

Upaya yang telah dilakukan untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan 2 (dua) Sasaran Strategis BPKPAD yaitu:

a) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indikator sasaran yaitu Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaaan BPK atas LKPD tahun n-1; dan

b) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator sasaran yaitu Presentase PAD terhadap pendapatan daerah.

Hasil (outcome) dari kedua Sasaran Strategis BPKPAD tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2021. Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator Kinerja Utama tersebut, dengan melakukan langkah strategis, yaitu :

a) Tersusun dan dan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
b) Tersusun dan ditetapkannya tetapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
c) Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
d) Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja , kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
e) Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD Memulai pelatihan dan bimbingan atas penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahan;

Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian indikator Opini Laporan Keuangan permasalahan dan solusi dapat di jelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3.11 Tabel Permasalahan dan Solusi pada sasaran 1

Permasalahan	Solusi
Pelaksanaan Penatausahaan pada aplikasi SIPD belum optimal	Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainya (satu data)
Dokumen yang dipersayaratkan dalam proses rekonsiliasi BMD belum dapat terpenuhi secara cepat dan tepat karena koordinasi internal OPD antara Bendahara dengan Pengurus Barang belum terjalin secara optimal	Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagai persayaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu

Dalam permasalahan tersebut diatas kami kedepankan atas penggunaan SIPD dikarenakan semakin kuatnya gaung atas SIPD oleh kementrian dalam negeri, kemanpan RB, kementrian Keuangan, dan kementrian lain nya sebagai Aplikasi terintegrasi dan terpusat atas Perencanan, Penganggran, Pelaksanaan, serta Pelaporan atas Kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu adanya komitmen bersama Kabupaten Bantul dalam memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIPD tersebut dan tanpa mengurangi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan kata lain dalam pengembangan menggunakan SIPD secara utuh memerlukan satu sampai dua tahun kemudian, sehingga dalam menunggu kesiapan atas Aplikasi tersebut perlu adanya integrasi terhadap Aplikasi penunjang lain nya, baik dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah tetap mempertahankan kualitas kinerja serta dapat melakukan kinerja secara fleksibel dan tepat waktu

3) Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya

dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
b) Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
d) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang meliputi 8 area pencegahan :

a) Perencanaan dan Penganggaran APBD
b) Pengadaan Barang dan Jasa
c) Perizinan
d) APIP
e) Manajemen ASN
f) Optimalisasi Pajak Daerah
g) Manajemen Aset Daerah
h) Tata Kelola Dana Desa

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tersebut menggambarkan capaian aksi yang telah dilaksanakan pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing. Kemajuannya setiap sistem dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem tersebut. Capaian nilai MCP

Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 sebesar 93 % .

Target nilai MCP KPK Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 sebesar 82,5 dan realisasinya mencapai 93 atau tercapai 112,72%. Capaian ini sudah melebihi dari target dalam RKPD Tahun 2022. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Sedangkan capaian terhadap tarhet akhir tahun RPJMD 2026 sebesar 100.05%. Adapun perolehan capaian nilai MCP KPK dari masing-masing area adalah sebagai berikut :

a) Area Perencanaan dan Penganggaran APBD

Perencanaan dan penganggaran haruslah berbasis pada transparansi dan partisipasi masyarakat luas. Teknologi informasi yang ada memungkinkan proses ini bisa terjadi sehingga proses perencanaan kebutuhan masyarakat umum berupa program pembangunan harus dapat diakomodir, diawasi oleh masyarakat, serta proses penetapan yang terbuka. Implementasi e-planning dan e-budgeting dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi memungkinkan sistem mencegah intervensi dari pihak luar. Dengan demikian ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, maka proses penyusunannya sudah transparan serta yang terpenting mengakomodir kepentingan masyarakat.

Pada area perencanaan dan penganggaran APBD, dari semua sub indikator dalam area Perencanaan dan penganggaran APBD capaiannya sudah 100%. Artinya dari sisi ketaatan terhadap peraturan perundangan dan ketepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sudah sesuai dan tepat waktu.

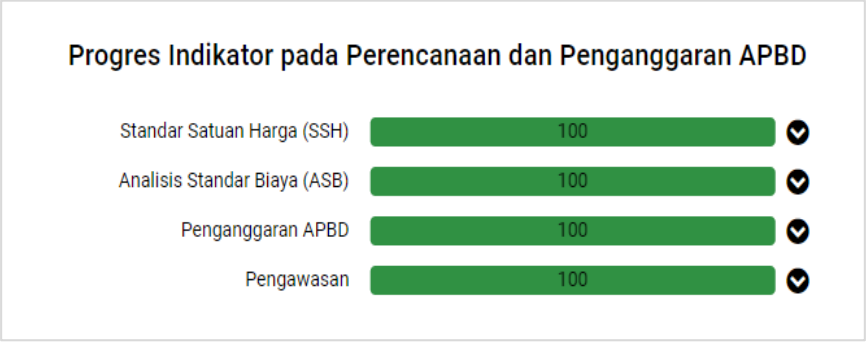

Permasalahan :

Terkait dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang sampai saat ini di Kabupaten Bantul masih menggunakan 2 aplikasi menjadikan proses

harus berjalan lebih lambat terutama dalam proses penganggaran

Solusi :

Selalu mendorong dan aktif berkoordinasi dengan Pusat (Kementrian Dalam Negeri) agar aplikasi SIPD yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD dapat segera terwujud integrasinya secara penuh antara perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan aset serta pengendalian dan pengawasan

b) Area Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan terkait erat dengan perencanaan. Bila area perencanaan sudah dikelola dengan transparan, maka ketika anggaran sudah tersedia resiko berikutnya adalah proses pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mendorong pemanfaatan e-procurement sebagai aplikasi resmi. Dari aspek proses teknis pengadaan memang sudah melibatkan teknologi dan relatif lebih transparan. Namun dari perspektif pencegahan korupsi, integritas SDM termasuk independensi serta kemampuan SDM dalam kelompok kerja untuk menolak intervensi masih perlu perbaikan agar efektif dari proses serta memperkecil peluang korupsi.

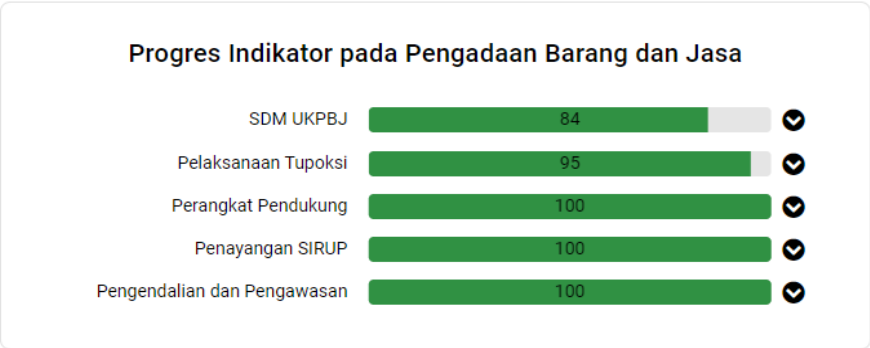

Dalam area pengadaan barang dan jasa sub indikator yang dinilai meliputi : ketersediaan Pokja UKPBJ permanen, SDM UKPBJ, fungsional PBJ, Reviu perencanaan PBJ, Vendor management sistem, evaluasi kegiatan PBJ,advokasi PBJ, kode etik PBJ, SOP PBJ, TPP khusus UKPBJ, penayangan SIRUP, Reviu HPS serta tindak lanjut reviu tata Kelola PBJ. Capaian pada area pengadaan barang dan jasa sebesar 96%. Sub indikator yang belum maksimal dalam pencapaiannya yaitu ketersediaan fungsional PBJ dan laporan kegiatan PBJ. Terkait ketersediaan fungsional PBJ di Kabupaten Bantul 9 personil, namun

sesuai anjab seharusnya 15 personil. Hal ini menjadikan beban pekerjaaan di Bagian LPBJ yang tinggi karena masih kekurangan fungsional PBJ sejumlah 6 personil.

Permasalahan :

Masih kurangnya personal fungsional PBJ sejumlah 6 (Perka LKPP 14 Tahun 2013). Hal ini mengakibatkan beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah personal yang tersedia di Bagian LPBJ

Solusi :

Untuk OPD yang memiliki beban kerja PBJ besar akan ditempatkan 1 personel PPBJ Pertama untuk mengelola PBJ di OPD nya. Sedangkan untuk OPD yang secara beban kerja PBJ dapat dilakukan regrouping, maka akan ditempatkan 1 personil PPBJ pertama untuk beberapa OPD.

c) Area Perizinan

Korupsi di proses pemberian izin dan rekomendasi dimulai dari minimnya transparansi proses itu sendiri. Permintaan izin atau rekomendasi oleh masyarakat bermula dari regulasi atau aturan yang mewajibkan masyarakat. Permohonan dari masyarakat adalah bentuk kepatuhan warga negara, oleh karena itu pemda wajib melayani kepatuhan masyarakat dengan menyajikan proses perizinan yang terbuka, mudah diakses dan murah.

Keterbukaan dan kepastian seperti ini tentu dapat mencegah terjadinya korupsi dan izin yang diberikan dapat dipastikan sesudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Di Kabupaten Bantul terkait capaian indikator pada area perizinan sebesar 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi regulasi, infrastruktur perizinan maupun pendelegasian kewenangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

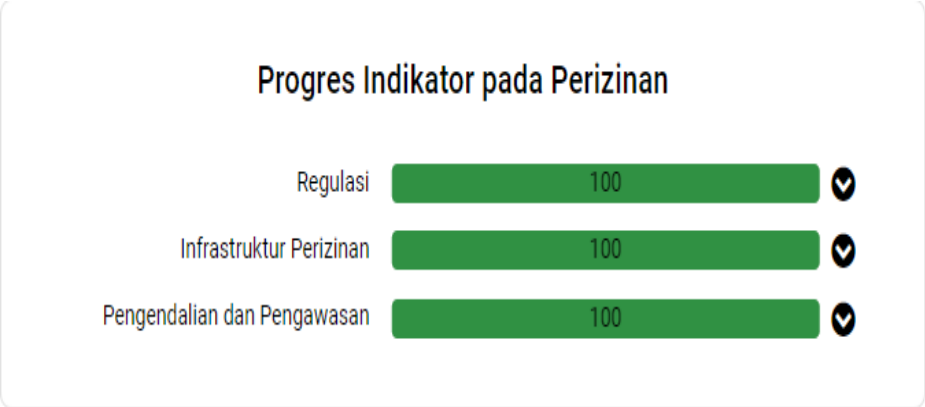

Permasalahan :

Pengelolaan proses perizinan dan pengelolaan pajak pendapatan belum dapat saling memberikan informasi yang dapat meningkatkan optimalisasi pajak daerah dan ketertiban proses perijinan.

Solusi :

Pengelolaan Bersama proses perizinan dan pengelolaan pajak daerah dengan melibatkan OPD terkait.

d) Area pengawasan APIP

Upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola tentu bergantung pada pengawasan yang berjalan di pemerintah daerah. Pengawasan bukan hanya pemeriksaan kepatuhan, namun mencakup identifikasi kelemahan dan upaya perbaikan tata kelola agar berjalan efektif.

Upaya penguatan Inspektorat merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola. Perbaikan peran Inspektorat mencakup kecukupan anggaran, jumlah SDM Inspektorat serta kecukupan kompetensi atau keahlian. Tentu saja independensi dari SDM Inpektorat menjadi pra-syarat dan sedang diupayakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

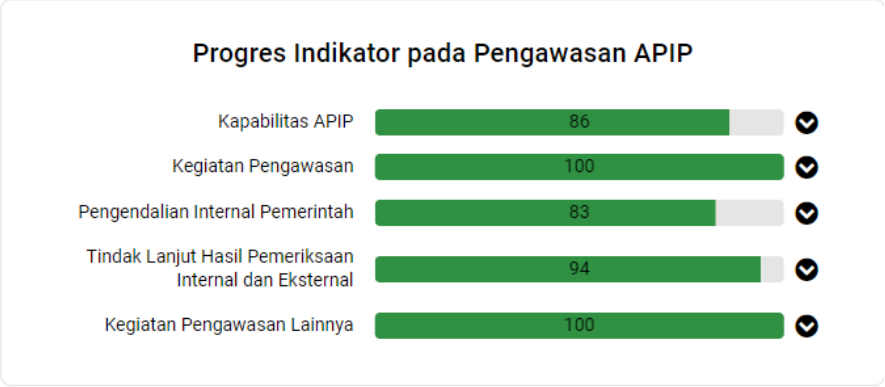

Upaya penguatan Inspektorat di daerah diukur dari kemajuan atau implementasi serangkaian program yang fokus pada upaya peningkatan efektifitas Inspektorat. Indikator yang ditetapkan merupakan rujukan bagi upaya perbaikan Inspektorat oleh kepala Daerah, sekaligus sebagai ukuran komitmen kepala daerah untuk mendayagunakan Inspektorat dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Capaian pada area pengawasan APIP di Kabupaten Bantul sebesar 92 persen.

Permasalahan :

Ketersediaan jumlah personal APIP di Inspektorat yang masih belum memenuhi sesuai kebutuhan

Solusi :

Mengusulkan permohonan tambahan auditor ke Pusat

e) Area Manajemen ASN

Pengelolaan Aparat Sipil Negara (ASN) sudah didukung dengan regulasi yang memadai. Ketika pengelolaan ASN sudah memenuhi kaidah yang ditetapkan maka penempatan seseorang yang bukan berdasarkan kompetensinya, dapat dicegah. Untuk itu, manajemen ASN menjadi salah satu indikator tata kelola daerah. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan serangkaian regulasi dan bermuara pada ‘merit system’ dimana kinerja pegawai lah yang menjadi ukuran dan segenap upaya pembinaan SDM bermuara pada peningkatan kinerja. Capaian beberapa indikator yang dipergunakan sebagai ukuran pencegahan korupsi melalui area

manajemen ASN di Kabupaten Bantul sebesar 85 persen .

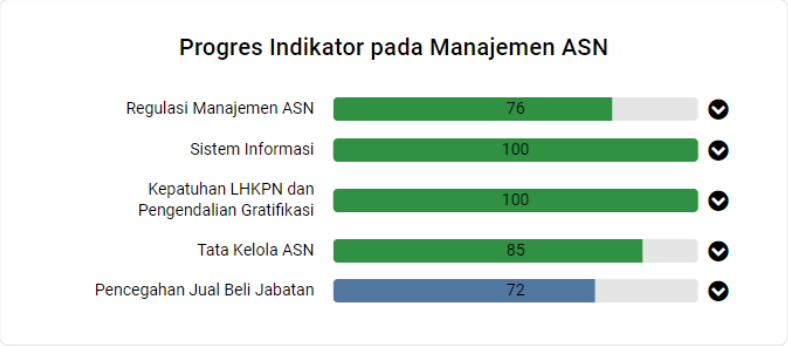

f) Area Optimalisasi Pajak

Salah satu bentuk kerugian pemerintah daerah adalah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tidak sesuai atau bahkan jauh di bawah potensinya. Korupsi dalam sektor pendapatan daerah ini terjadi karena pemungutan pajak atau retribusi dari masyarakat tidak dikelola dengan baik.

Pencegahan korupsi dalam bentuk perbaikan remunerasi pegawai serta pelayanan publik yang prima membutuhkan dana, untuk itu perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) dilakukan dengan memasang alat pencatat transaksi di hotel/restoran dan berkoordinasi pertukaran data dengan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, Pertamina, Dirjen Pajak, dan informasi lain termasuk laporan masyarakat. Pada tahap awal tentu saja pemerintah daerah harus memiliki data potensi penerimaan yang dikelola dan dimonitor secara berkelanjutan. Selanjutnya berdasar regulasi yang ada, pemberian sanksi kepada pengusaha atau pihak lain yang memiliki kewajiban untuk penyetoran penerimaan daerah dengan jumlah yang benar, perlu ditegakkan.

Dari sisi area optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bantul nilai pencegahannya mencapai 75 persen.

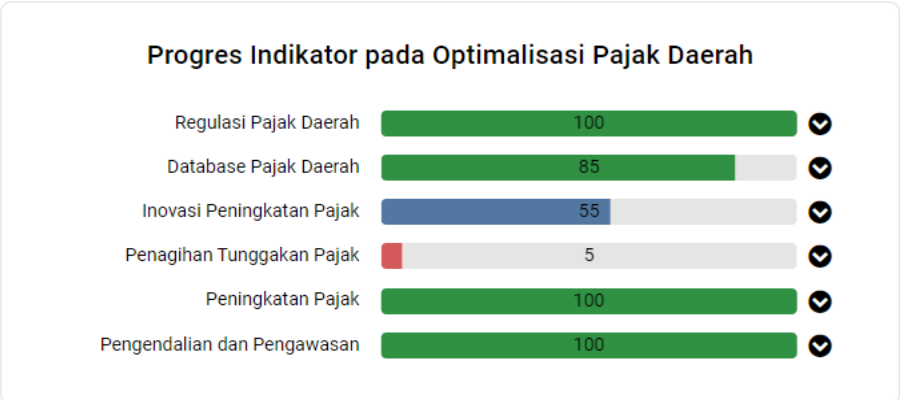

Permasalahan :

Sistem pengelolaan pajak daerah yang belum terhubung dengan sistem pada proses perizinan yang dapat menyajikan informasi-informasi yang sesuai yang kita butuhkan.

Solusi :

Mendorong agar integrasi ataupun mirroring aplikasi pengelolaan bersama terkait perizinan dan pajak antar BPKPAD dan DPMPTSP dapat segera terwujud

g) Area Pengelolaan BMD

Kerugian negara/daerah salah satunya dalam bentuk aset yang seharusnya dimiliki dan dikuasai pemerintah namun karena satu dan lain hal, justru dikuasai pihak lain. Untuk menghindari kerugian ini, idealnya pemerintah daerah menyelenggarakan administrasi pencatatan aset dengan baik. Dengan demikian seluruh aset pemerintah dapat diketahui nilainya dan tentu saja secara fisik dapat dibuktikan keberadaanya.

Sejauh ini, administrasi pencatatan aset daerah masih jauh dari ideal. Tidak ada mekanisme pencatatan dan ketegasan dalam menjalankan aturan mengakibatkan potensi kerugian daerah yang tanpa disadari bernilai sangat besar.

Pada aspek lainnya, kepemilikan aset dan administrasi juga perlu didukung dengan upaya legalisasi agar secara hukum aset pemerintah daerah dapat terlindungi. Aset berupa tanah dan bangunan tentu membutuhkan sertifikat

sebagai bukti kepemilikan. Dengan demikian salah satu upaya perbaikan pengelolaan aset daerah adalah sertifikasi aset.

Berikutnya adalah aset yang seharusnya milik pemerintah daerah namun masih dikuasai pihak ketiga. Fasilitas umum dan sosial yang menurut regualsi diserahkan oleh pengembang (developer) ke pemerintah daerah masih banyak yang belum terealisasikan. Sebagian karena pemda juga tidak memiliki administrasi yang rapi, sebagian lagi karena tidak ada upaya penegakan hukum. Ini salah satu indikator yang ditetapkan untuk perbaikan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah pada dasarnya adalah upaya untuk mencegah kerugian negara atau daerah dalam bentuk hilangnya hak dan penguasaan fisik atas aset milik daerah. Capaian nilai pencegahan korupsi pada area pengelolaan BMD Kabupaten Bantul Sebesar 90 persen.

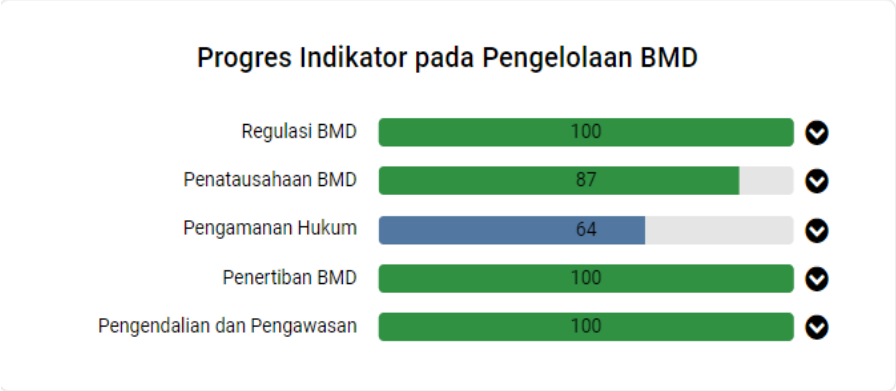

Permasalahan :

Masih banyaknya aset Pemda yang belum bersertifikat Keterlambatan sertifikasi aset selama ini dikarenakan kurang kelengkapan persyaratan sertifikasi aset

Solusi:

- Agar selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan BPN
- Mengadakan rakor dengan OPD yang tanahnya belum bersertifikat
- Pengajuan permohonan sertifikasi tanah oleh DPTR ke BPN agar tidak dilakukan pada akhir tahun, setidaknya pada bulan Mei – Juni agar BPN tidak kesulitan dalam proses selanjutnya
- Terkait PSU, harus mempunyai site plan setiap Perumahan. Hal ini agar dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana lahan

yang akan dibangun PSU, sehingga pada lokasi tersebut benar-benar diperuntukkan untuk PSU, tidak digunakan untuk kepentingan pengembang.

- Pensertifikatan PSU seharusnya dibiayai oleh pihak pengembang, pemda tinggal menerima sertifikatnya.

h) Area Tata Kelola Keuangan Desa

Pengelolaan Dana Desa, meskipun dilakukan oleh aparat desa, namun fungsi pengawasan tetap berada pada Inspektorat Daerah. Sementara itu, dengan jumlah dana yang sangat besar ditambah lagi dengan sumber pendanaan desa lainnya, maka peran pemerintah daerah dalam membangun sistem akuntabilitas pengelolaan dana dana menjadi sangat penting. Sistem akuntanbilitas yang ada saat ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa merupakan aplikasi yang tersedia secara gratis untuk setiap desa, dibangun bersama oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Implementasi dari sistem keuangan berbasis aplikasi inilah yang menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dari sisi area tata Kelola keuangan desa di Kabupaten Bantul untuk masing-masing sub indikator sudah mencapai 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi regulasi,publikasi,sistem keuangan desa,laporan konsolidasi serta pengawasan semua sudah sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu.

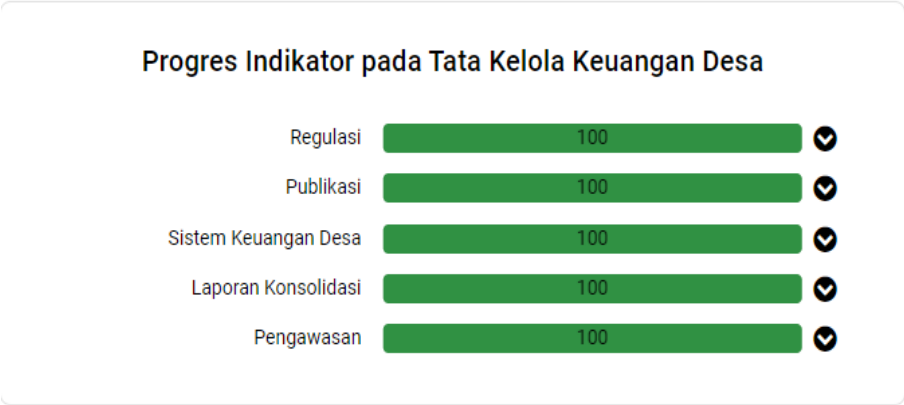

Permasalahan :

Jumlah nilai aset desa yang masih belum teridentifikasi secara penuh

Solusi:

Pendampingan dan monitoring oleh Inspektorat didalam penghitungan nilai asset desa

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Keberhasilan SPBE perlu didukung sumber daya manusia SPBE yang mencakup masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai pengguna SPBE. Penerapan SPBE juga sangat membutuhkan kepemimpinan digital untuk memastikan penerapannya.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya peningkatan implementasi SPBE dimana hal tersebut akan berdampak langsung terhadap indeks SPBE yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan implementasi SPBE dilakukan sesuai dengan 4 domain dalam SPBE yaitu Domain Kebijakan, Domain

Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan.

Sasaran untuk mewujudkan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai 3,62 (Sangat Baik) dari skala 5 dengan predikat sangat baik atau 111,38% dari target kinerja. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan yaitu, 0,38 dari indeks sebelumnya yaitu 3.24 (Baik) pada tahun 2019, dan di tahun 2018 indeks SPBE sebesar 1,84 (Cukup). Dengan capaian ini pula, telah mencapai 104,39% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2022, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti evaluasi. Evaluasi SPBE hanya wajib diikuti oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memiliki indeks SPBE kurang dari 2,6 (Baik), sehingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan indeks tahun 2021 yaitu 3,62 dengan predikat Sangat Baik.

Tabel 2.3.12 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks SPBE
2018	1,84 (cukup)
2019	3,24 (baik)
2020	3,24 (baik)
2021	3.62 (sangat baik)
2022	3.62 (sangat baik)

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE tahun 2022 dilakukan dengan melakukan koordinasi seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun

layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

Tabel 2.3.13 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kab. Bantul	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sleman	2,55	Cukup
3	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,49	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,22	Baik
5	Pemerintah Kota Yogyakarta	2,98	Baik

Evaluasi SPBE mulai tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi tersebut menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator (meningkat 12 indikator dari evaluasi tahun sebelumnya, dimana 23 Indikator diantaranya merupakan indikator baru).

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Indeks SPBE daerah lain di Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta pada tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul berada pada posisi teratas yaitu 3,62 (Sangat Baik), diikuti Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,22 (Baik), Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 2,98 (Baik), Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 2,55 (Cukup) dan di posisi terakhir Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,49 (Cukup).

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul tertinggi pada tingkat kabupaten/kota se Indonesia.

Implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul telah memenuhi

keseluruhan aspek yang menjadi ketentuan dalam evaluasi SPBE, dengan faktor pendukung sebagai berikut :

a) Pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki kebijakan SPBE yang lengkap serta telah disahkan, kebijakan tersebut dilakukan review dan evaluasi secara berkala.
b) Pada aspek aspek Perencanaan Strategis SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengelolaan inovasi proses bisnis sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
c) Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan melalui mekanisme rekomendasi teknis pada proses pembangunan aplikasi di seluruh perangkat daerah. Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh perangkat daerah yang mengampu urusan Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membangun Government Service Bus (GSB) sebagai media integrasi aplikasi yang digunakan seluruh perangkat daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah DI Yogyakarta
d) Kolaborasi antar perangkat daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul. Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk, disahkan dan seluruh anggota tim melaksanakan tugas masing-masing. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu komitmen pimpinan daerah dalam mengawal implementasi SPBE, salah satunya dibuktikan dengan penetapan indeks SPBE sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah
e) Penerapan manajemen SPBE dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku. Dalam hal pemenuhan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlokasi di wilayah Pemerintah Daerah DI Yogyakarta sebagai kota pelajar yang memiliki banyak perguruan tinggi maka relatif mudah untuk memperoleh SDM berkompeten yang potensial mendukung SPBE.
f) Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan melalui review dan evaluasi secara berkala terhadap aplikasi-aplikasi layanan yang digunakan, untuk mengetahui sejauh mana aplikasi-aplikasi tersebut berfungsi serta

kemungkinan untuk dikembangkan atau diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan

Keberhasilan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaanya, diantaranya :

a) Kemampuan anggaran yang relatif kecil karena hanya bersumber dari sektor pariwisata, retribusi dan pajak daerah, industri kreatif serta pertanian, mau tidak mau mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul mengimplementasikan Peta Rencana SPBE secara bertahap tiap tahunnya
b) Masih terdapat beberapa pedoman SPBE yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul harus terus melakukan perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat.
c) Masih terdapat ego sektoral dalam hal pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Guna menyelesaikan berbagai hambatan dalam implementasi SPBE, perlu ada solusi untuk mengatasinya. Solusi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar mewujudkan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, diantaranya :

a) Mengajak stakeholder secara aktif untuk menerapkan apa yang telah ditetapkan dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul 5 tahun kedepan.
b) Komunikasi aktif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh informasi terbaru apabila terdapat perubahan kebijakan yang harus ditindaklanjuti.
c) Sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, forum group discussion maupun pelatihan atas tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan SPBE, baik dari pusat maupun daerah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah terkait ketentuan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bantul.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan implementasi SPBE pada tahun-tahun yang akan datang diantaranya :

a) Tim Koordinasi SPBE melakukan koordinasi secara rutin guna melakukan review terhadap ketugasan anggota tim sekaligus meningkatkan kinerja implementasi SPBE di Kabupaten Bantul.
b) Menyusun dan menetapkan dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
c) Memaksimalkan keterpaduan anggaran dan belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bantul melalui mekanisme koordinasi antara Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan dan penganggaran dengan Perangkat Daerah yang mengampu urusan TIK.

5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Capaian kinerja Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 88,1, terealisasi sebesar 88,25 atau tercapai 100.17% dengan kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 88,03, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 0,25%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 89,5, capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 98.60% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten

Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 . N. P. Q \}/\{ d^2 (N-1) + \lambda^2. P . Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P = (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Untuk survey Kepuasan masyarakat di Kabupaten bantul dilaksanakan mandiri dengan jumlah responden sesuai dengan tabel Krejcie and Morgan dengan minimal jumlah responden per instansi sejumlah 400 responden.

Setiap unit kerja diwajibkan membuat kanal survei tersebut untuk memberi keleluasaan pengguna layanan menyampaikan pendapatnya tentang kualitas layanannya. Berikut Metode pengumpulan data survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Bantul beserta contoh kanal E-survei IKM yang bisa dipakai pengguna layanan menyampaikan pendapatnya tentang kualitas layanan yang diterimanya sebagai berikut :

a) QR Code

Contoh :

SCAN ME

Gambar 2.3.3 QR CODE layanan untuk E-survei IKM terintegrasi

b) Direct Link Survey, contoh :

- http://bit.ly/layanansrandakan
- http://bit.ly/layananpandak
- http://bit.ly/layananbantul
- http://bit.ly/layananjetis
- http://bit.ly/layananbanguntapan
- http://bit.ly/layanansewon

c) Website Resmi Unit Kerja, contoh :

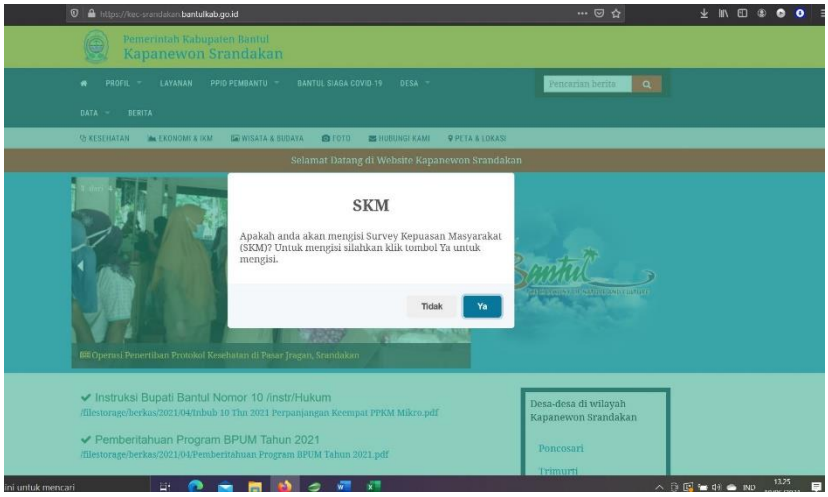

Gambar 2.3.4 Tangkapan Layar E-Survei IKM di official website

d) SIM IKM bersifat web based yaitu www.skm.bantulkab.go.id

Pengguna layanan juga dapat mengakses portal

http://www.skm.bantulkab.go.id untuk memberikan pendapatnya tentang layanan yang diterima. SIM berbasis web ini selain sebagai kanal untuk memberikan akses survei IKM juga sebagai media untuk megintegrasikan IKM unit kerja dan IKM level Kabupaten Bantul. Proses bisnis SIM SKM nya sebagai berikut :

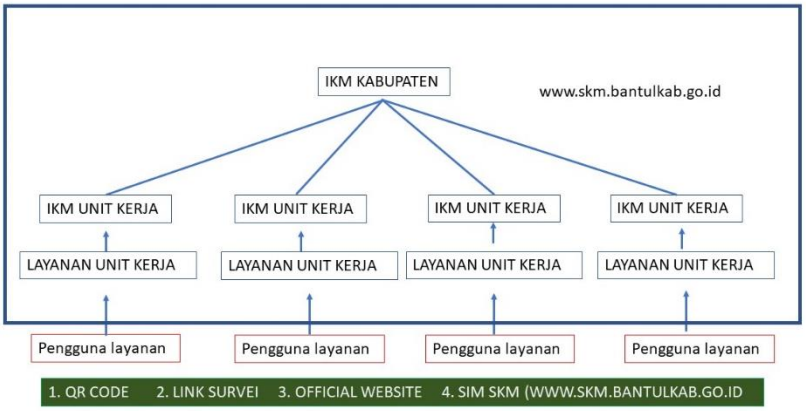

Gambar 2.3.5 Proses Bisnis Portal E-Survey IKM Terintegrasi

Sedangkan tampilan SIM IKM Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai portal tampilannya sebagai berikut :

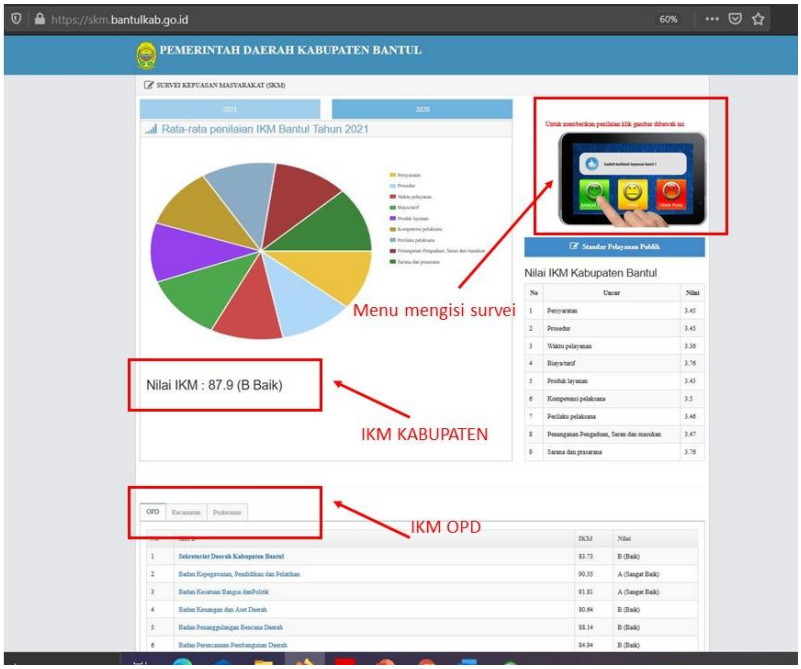

Gambar 2.3.6 Dash Board Portal www.skm.bantulkab.go.id

Untuk survei kepuasan masyarakat tahun 2022 dengan periode data 01

Januari 2022 – 31 Desember 2022 secara online realtime dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pendapat responden masing-masing layanan publik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat di laman www.skm.bantulkab.go.id. Survei keuasan Masyarakat Kabupaten Bantul periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022 diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Jumlah Responden

Tabel 2.3.14 Matriks Data Responden tanggal 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

No	OPD	Jumlah Responden
1	SEKRETARIAT DAERAH	1893
2	BKPSDM	2305
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	771
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	783
5	BPKPAD	831
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	763
7	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	681
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	841
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1044
10	Dinas Kesehatan	2928
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1592
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	668
13	DinasKUKMPP	755
14	Dinas Lingkungan Hidup	671
15	Dinas Pariwisata	609
16	Dinas PUPKP	1331
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	683
18	Dinas P3AP2KB	1176
19	DPMPTSP	2530
20	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	2138
21	Dinas Perhubungan	711
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	730
23	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	661
24	Dinas Sosial	686
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1337
26	Inspektorat	731
27	Kapanewon Bambanglipuro	702
28	Kapanewon Banguntapan	850
29	Kapanewon Bantul	668
30	Kapanewon Dlingo	690

No	OPD	Jumlah Responden
31	Kapanewon Imogiri	1362
32	Kapanewon Jetis	720
33	Kapanewon Kasihan	708
34	Kapanewon Kretek	776
35	Kapanewon Pajangan	710
36	Kapanewon Pandak	700
37	Kapanewon Piyungan	682
38	Kapanewon Pleret	1075
39	Kapanewon Pundong	764
40	Kapanewon Sanden	933
41	Kapanewon Sedayu	704
42	Kapanewon Sewon	1205
43	Kapanewon Srandakan	705
44	RSUD. Panembahan Senopati	2122
45	Satuan Polisi Pamong Praja	1092
46	Sekretariat DPRD Kab. Bantul	722
47	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	17
48	UPT Puskesmas Bambanglipuro	708
49	UPT Puskesmas Banguntapan I	732
50	UPT Puskesmas Banguntapan II	1152
51	UPT Puskesmas Banguntapan III	362
52	UPT Puskesmas Bantul I	927
53	UPT Puskesmas Bantul II	719
54	UPT Puskesmas Dlingo I	1092
55	UPT Puskesmas Dlingo II	273
56	UPT Puskesmas Imogiri I	605
57	UPT Puskesmas Imogiri II	663
58	UPT Puskesmas Jetis I	710
59	UPT Puskesmas Jetis II	899
60	UPT Puskesmas Kasihan I	692
61	UPT Puskesmas Kasihan II	330
62	UPT Puskesmas Kretek	645
63	UPT Puskesmas Pajangan	435
64	UPT Puskesmas Pandak I	2414
65	UPT Puskesmas Pandak II	1764
66	UPT Puskesmas Piyungan	1106
67	UPT Puskesmas Pleret	891
68	UPT Puskesmas Pundong	668
69	UPT Puskesmas Sanden	663
70	UPT Puskesmas Sedayu I	671
71	UPT Puskesmas Sedayu II	760

No	OPD	Jumlah Responden
72	UPT Puskesmas Sewon I	650
73	UPT Puskesmas Sewon II	570
74	UPT Puskesmas Srandakan	1640
75	UPTD Metrologi	158
	Total Responden	**70.655**

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten

Dari data jumlah responden yang kut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kabupaten Bantul perunsur sebagai berikut :

Tabel 2.3.15 Matriks Rekapitulasi IKM Kabupaten Bantul per Unsur periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022

No	Unsur	Nilai
1	Persyaratan	3,47
2	Prosedur	3,47
3	Waktu pelayanan	3,37
4	Biaya/tarif	3,76
5	Produk layanan	3,46
6	Kompetensi pelaksana	3,48
7	Perilaku pelaksana	3,52
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,46
9	Sarana dan prasarana	3,77
NILAI IKM KABUPATEN HASIL KONVERSI 8,25		

Dari data pada tabel Tabel 2.3.15 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul periode survei 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022 adalah 88,25 degan kategori BAIK (B).

Dari nilai indeks perunsur layanan pada tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Tiga Unsur layanan tertinggi
   a. Pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi pertama pada unsur Sarana dan Prasarana di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana sudah cukup memadai dengan standar pelayanan publik

b. Pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi kedua pada unsur biaya/tarif di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Karena layanan publik di Kabupaten Bantul sebagian besar gratis, tanpa dipungut biaya
c. Pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi ketiga pada unsur perilaku pelaksana di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Kab. Bantul untuk terus meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan-pelathan tentang hospitality mempunyai dampak yang baik. Kabupaten Bantul secara terus meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul.

2. Unsur layanan terendah
   a. Pengguna layanan secara umum memberikan nilai terendah pertama pada unsur waktu layanan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini kemungkinan disebabkan masih adanya prosedur yang berbelit ataupun penerapan standar pelayanan yang belum maksimal.
   b. Pengguna layanan secara umum memberikan nilai terendah kedua pada unsur Persyaratan Layanan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini kemungkinan disebabkan masih ada beberapa layanan yang terlalu banyak syarat dan berbelit, atau kemungkinan juga penerapan standar Pelayanan yang belum maksimal.
   c. Apresiasi terendah ketiga adalah Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan. Hal ini kemungkinan disebabkan masih belum optimalnya penanganan pengaduan dan juga kanal-kanal aduan yang ada belum tersosialisasi dengan baik pengguna layanan. Selain ada itu mungkin penanganan pengaduan yang terlalu lama, prosedur penanganan pengaduan belum dilaksanakan serta kapasitas pejabat pengelola pengaduan belum baik

Berdasarkan hasil reviu terhadap pelaksanaan survei SKM secara online

dan realtime ada beberapa kendala survei. Permasalahan-permasalahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi hasil nilai IKM. Beberapa permasalahan survey yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Pengendalian kualitas survei belum ada
- Dokumen Kuesioner tiap-tiap unit kerja pelaksana survey belum menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi atau disesuaikan dengan unit kerja masing - masing.
- Kuesioner tidak diisi secara lengkap .
- Untuk Survei Kepuasan Masyarakat Secara Online masih kurang sosialisasi ataupun publikasi, sehingga masyarakat pengguna layanan masing rendah partisipasinya,
- Masih kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung survey SKM secara Online.
- Belum adanya survei independen untuk melakukan survei terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Stategi yang akan yang dilakukan untuk perbaikan kedepan antara lain sebagai berikut :

- Pelatihan Hospitality
- Evaluasi Standar pelayanan
- Evaluasi Standar pelayanan
- Evaluasi penyelenggaraan pelayana publik
- Evaluasi Penerapan SOP

Dalam survei kepuasan masyarakat tahun 2022 yang dilaksanakan secara online melalui portal www.skm.bantulkab.go.id diperlukan suatu data pembanding. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul selain melakukan survei IKM secara online juga secara acak melakukan survei dengan metode langsung yaitu dengan menyebarkan kuesioner - kuesioner ke pengguna layanan. Survei dilaksanakan oleh tenaga dari mahasiswa UMY Yogyakarta yang sebelumnya telah dibekali dengan metode survei wawancara dan metode lainnya. Jumlah responden adalah 330 responden dari 11 unit kerja. Unit kerja yang di survei

secara langsung adalah : 1. Kapanewon Bantul; 2. Kapanewon Sewon; 3. Kapanewon Jetis; 4. Kapanewon Kasihan; 5. Puskesmas Bantul I; 6. Puskesmas Kasihan II; 7. Puskesmas Sewon I; 8. Puskesmas Jetis I; 9. Puskesmas Pajangan; 10. Puskesmas Srandakan; 11. Puskesmas Sanden

Gambar 2.3.7 Gambar Dokumentasi Kegiatan Survey secara langsung/ wawancara sebagai data pembanding periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022.

Dari hasil survei kemudian diolah menjadi IKM Kabupaten Bantul dengan hasil penghitungan/pengolahan data sebagai berikut :

Tabel 2.3.16 Matriks Rekapitulasi Data Pembanding IKM Kabupaten Bantul Per Unsur pada periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,38
U2	Prosedur	3,41
U3	Waktu pelayanan	3,20
U4	Biaya/tarif	3,76
U5	Produk layanan	3,39
U6	Kompetensi pelaksana	3,53
U7	Perilaku pelaksana	3,56
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,40
U9	Sarana dan prasarana	3,87
NILAI IKM KABUPATENBANTUL MELALUI SURVEY LANGSUNG/ WAWANCARA : 87,75		

b. Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya digunakan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Tabel 2.3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,86	74,01	73,90	99,85	74,39	99,34

Sasaran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi pada tahun 2022 masih banyak mengalami hambatan. Umur Harapan Hidup pada tahun 2022 tercapai 73,90 tahun masih berada di bawah target sebesar 74,01 tahun. Pada tahun 2022 umur harapan hidup penduduk Bantul mencapai 73,90 tahun atau 99.85% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaiannya sebesar 99,34%.

Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut.

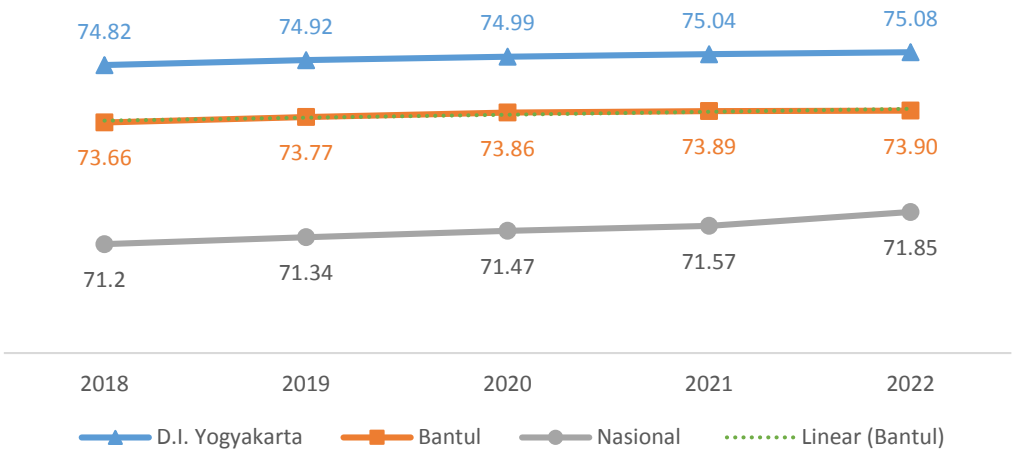

Grafik 2.3.5 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2018 - 2022*(Sumber : BPS 2023)*

Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Grafik 2.3.5). UHH pada tahun 2018 sebesar 74,82, tahun 2019 sebesar 74,92 tahun, tahun 2020 sebesar 74,99 tahun, tahun 2021 sebesar 75,04 tahun, dan tahun 2022 sebesar 75,08.

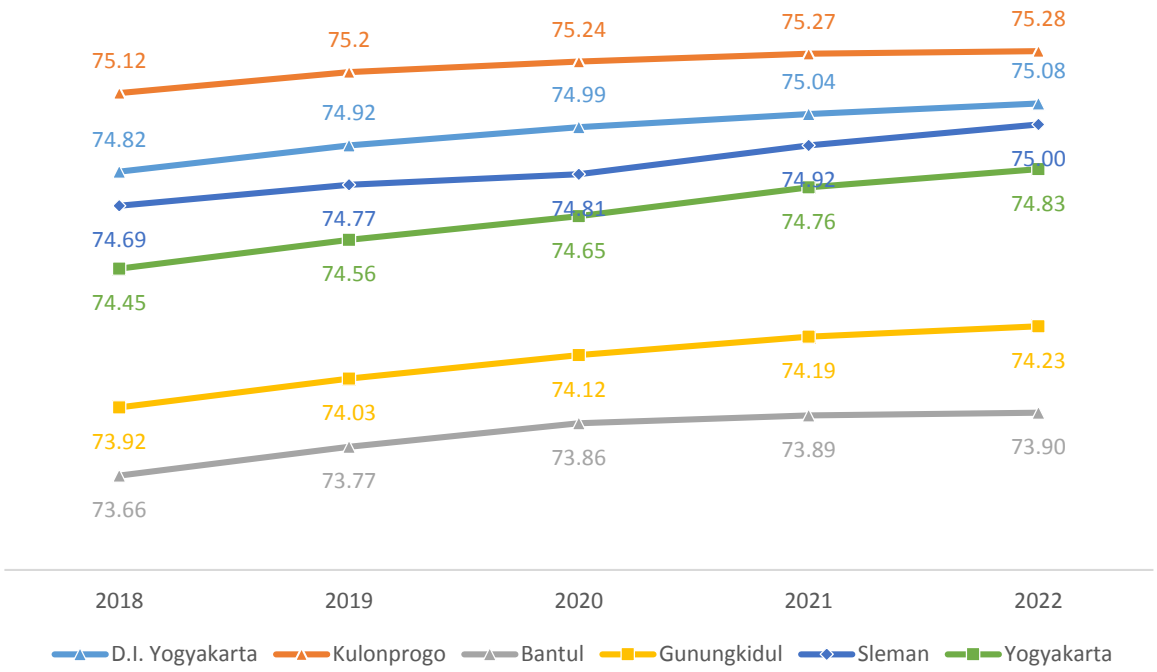

Grafik 2.3.6 Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2018 – 2022 *(Sumber : BPS D.I.Yogyakarta; 2023)*

Adapun UHH Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota di DIY dapat dilihat pada **Grafik 2.3.6**. Jika dibandingkan dengan UHH Kabupaten/ Kota lain dalam provinsi D.I.Yogyakarta ternyata dalam 5 tahun terakhir, UHH Kabupaten Bantul berada pada posisi terendah. UHH tertinggi tahun 2022 berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,27 tahun diikuti Kabupaten Sleman sebesar 75,08 tahun, Kota Yogyakarta sebesar 75,00 tahun dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 74,23 tahun. UHH penduduk Daerah D.I Yogyakarta tahun 2022 sebesar 75,08 tahun. Walaupun UHH Kabupaten Bantul terendah di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022, namun masih termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan UHH sebagian besar Kabupaten/Kota lain diluar wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta di Indonesia, bahkan UHH Nasional 2022 hanya sebesar 71,58 tahun.

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan,

dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul telah memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 57 unit pada 75 Desa. Puskesmas pembantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas pembantu ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengakss fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km.

Untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. seluruh Puskesmas melakukan kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). UKP yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan. pencegahan. penyembuhan penyakit. pengurangan penderitaan akibat penyakit. dan memulihkan kesehatan perseorangan. Berbagai kebijakan ditempuh dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut antara lain :

1. Penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP;
2. Penyelenggaraan sistem informasi secara terintegrasi;
3. Penerbitan dan perpanjangan ijin fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Pemberian ijin praktek tenaga kesehatan;
5. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
6. Pembinaan dan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
7. Pembinaan, pengawasan, dan penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tanggadan Nomor PIRT;
8. Pembinaan, pengawasan dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) an Depot Air Minum (DAM);
9. Peningkatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta

masyarakat dan lintas sektor;

10. Pelaksanaa pembinaan kesehatan dalam rangka preventif dan promotif;
11. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
12. Pengembangan Potensi Pelayanan Kesehatan.

Kebijakan-kebijakan yang dijabarkan dalam program-program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi yaitu meningkatnya kualitas pelayan kesehatan dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat. Untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan kesehatan di kabupaten Bantul dapat dilihat dalam indikator-indikator yaitu :

1. Angka Kematian Ibu;
2. Angka Kematin Bayi;
3. Case Fatality Rate karena Covid 19;
4. Insidensi Demam Berdarah Dengue;
5. Prevalensi Stunting;

Adapun pencapaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	374.05 per 100.000 KH	88.7 per 100.000 KH	146.88 per 100.000 KH	34.41
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,35 per 1.000 KH	7.7 per 1.000 KH	8.3 1.000 KH	92.21
3	Case Fatality Covid-19	2.75 %	2.75 %	1.08	160.73
4	Angka Kesakitan DBD/ Incidence Rate (IR) DBD	42.89 per 100.000 Penduduk	125 per 100.000 Penduduk	97.1 per 100.000 Penduduk	122.32
5	Prevalensi stunting	8.36%	9 %	6.42 %	128.67

Sumber : Dinas Kesehatan , 2023

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 146.88 per 100.000 kelahiran hidup artinya di Kabupaten Bantul terdapat 16 kasus kematian ibu dari total 10.893 kelahiran hidup. Hal ini menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 374.05 per 100.000 kelahiran hidup (44 kasus kematian ibu) terutama dikarenakan terpapar Covid-19 sebanyak 28 dari 44 kasus atau 64%. Realisasi capaian AKI pada tahun 2022

menunjukkan peningkatan.

Sedangkan untuk capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) terjadi penurunan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 8,3 per 1000 KH realisasi 6.3 tercapai 92.21% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 5.35 atau tercapai sebesar 133.12% maka capaian 2022 menurun sebesar 40.91%. Untuk capaian indikator Case Fatality Rate Covid-19 mengalami peningkatan dari target yag ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 2.75 % realisasi sebesar 1.08 % , tercapai 160.73% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 2.60%.

Case Fatality Rate (CFR) covid 1 di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penanggulangan Covid-19 antara lain:

1. Pelaksanaan Testing, Tracing dan Treatment untuk mengendalikan laju penularan di masyarakat;
2. Meningkatkan edukasi prokes dan pentingnya 3T di masyarakat
3. Melaksanakan vaksinasi covid di layanan mampu vaksin di Kabupaten Bantul;

Sejak awal tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul mulai melaksanakan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul diawali vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dilanjutkan kepada pelayan publik. Ditahun 2022 program tersebut tetap berjalan dengan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster). Berbagai Langkah strategis yang dilaksanakan untuk pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulan Covid-19 antara lain:

1. Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara terpusat di tempat-tempat umum seperti vaksinasi terhadap karyawan perusahaan yang belum booster di Kabupaten Bantul kerjasama dengan Dina tenaga kerja;
2. Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi booster untuk perkantoran (ASN dan Non ASN) pada instansi dan OPD di Kabupaten Bantul.
3. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis kalurahan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lintas sektor.

4. Menggencarkan kembali sosialisasi secara masif akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi semua lapisan masyarakat melalui media online/ digital (Kominfo) dan media lainnya.

Capaian indikator Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD mengalami penurunan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 125 per 100.000 penduduk realisasi 97.1 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 122.32% dan bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 42.86 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 157.11% maka capaian 2021 menurun sebesar 34.79%. Sedangkan untuk indikator Prevalensi stunting sebesar 6.42% dari target 9% atau sebesar 128.67%. Hal ini berarti bahwa capaian prevalensi stunting mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 9.69%.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 9%% terealisasi sebesar 6.42% tercapai 128.67% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 9.69%. Pada tahun 2022 jumlah kasus balita pendek dan sangat pendek sebesar 3001 balita. Terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3996 balita

Dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat. semua Puskesmas melaksanakan kegiatan inovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan pelayanan UKM di Puskesmas. Salah satu inovasi yang masuk TOP 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik adalah SEROJA (SEHAT EKONOMI MENINGKAT KARO JAMU). Inovasi tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, UMKM, lintas sektor, kader, perguruan tinggi dan lain-lain.

Selain kegiatan Inovasi tersebut. Dinas Kesehatan mempunyai Inovasi terkait dengan pelayanan yaitu PSC 119 Bantul yang merupakan upaya penanganan pertama kasus kegawatdaruratan di masyarakat dengan jaminan respon yang cepat dan tepat. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan masyarakat/korban gawat darurat terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Untuk terselenggaranya SPGDT maka dibentuk PSC (Public Safety Center). seperti yang sudah ada di kabupaten Bantul.

PSC 119 mengandalkan aplikasi sistem penanggulangan gawat darurat publik (SIGAP). Aplikasi ini terhubung ke puskesmas dan beberapa rumah sakit di Kabupaten Bantul. sehingga mampu memonitoring dan memberikan pelayanan dengan cepat. Adapun layanan di PSC 119 yang dapat diakses antara lain adalah 1) penanganan kegawat daruratan dengan menggunakan protokol; 2) kebutuhan informasi ruang di rumah sakit; 3) informasi fasilitas kesehatan terdekat; dan 4) Informasi ambulans.

Operator call center merupakan tenaga kesehatan sehingga dapat memandu penanganan awal kasus sebelum tim tenaga kesehatan datang. Dalam menanggulangi Kegawatdaruratan medis di Kabupaten Bantul diperlukan sistem komunikasi yang terintegrasi. terpadu dan cepat. yaitu melalui call center 119 yang terintegrasi secara nasional di National command center (NCC) Kementerian Kesehatan. Tahun 2020 dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan NCC dalam hal integrasi SPGDT call center untuk mendukung pelayanan di PSC 119. Dalam masa pandemi Covid-19. PSC 119 merupakan salah satu garda terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berikut hasil yang dicapai oleh PSC 119 selama tahun 2022 :

Umur	Kecelakaan Lalu Lintas		Home Emergency	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0 - 4	8	8	2	0
5 - 9	14	7	1	0
10 - 14	35	27	1	1
15 - 19	178	147	4	9
20 - 24	180	121	7	9
25 - 29	70	66	2	8
30 - 34	65	52	1	2
35 - 39	61	43	2	5
40 - 44	61	44	7	2
45 - 49	51	45	7	2
50 - 54	49	43	9	10
55 - 59	46	38	13	8
60 - 64	53	39	13	8
65 - 69	33	9	15	10

Umur	Kecelakaan Lalu Lintas		Home Emergency	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
70 - 74	28	3	16	5
75+	16	5	22	21
JUMLAH	**948**	**697**	**122**	**100**

Sumber : PSC 119, Kab. Bantul; 2023

Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 adalah diresmikannya RSUD Saras Adyatma yang berlokasi di kecamatan Bambanglipuro. Dengan adanya Rumah Sakit ini maka proses rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan akan lebih cepat.

Pendekatan lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). mencakup lima pilar. yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT). pengelolaan sampah rumah tangga. dan pengelolaan limbah rumah tangga. Untuk tahun 2020. Capaian kegiatan adalah desa yang telah mengimplementasikan 5 (lima) pilar STBM. Dari target 27 desa yang mendeklarasikan sebagai desa STBM mengalami kemajuan pesat yaitu sebanyak 58 desa. Penghargaan pencapaian desa STBM Berkelanjutan diberikan pada Lurah Desa Trimulyo sebagai Lurah terbaik serta Kader Kesehatan Desa Banguntapan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan berhasil mempertahankan penganugerahan STBM berkelanjutan pada tahun 2020.

Kegiatan berupa pembinaan lokasi tatanan. pembinaan kelompok kerja (Pokja) desa sehat dan rapat koordinasi antar OPD. Pembinaan dilakukan untuk mempersiapan lokasi tatanan menuju verfikasi di tahun 2022. Kegiatan pelaksanaan Kabupaten Sehat Bantul yang memadukan upaya pemerintah dan peran aktif masyarakat pada tiap lokasi tatanan yaitu:

1. Kawasan permukiman. sarana. dan prasarana umum;
2. Kawasan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. ketahanan pangan dan gizi;
3. Tatanan Pasar;

4. Tatanan Pendidikan;
5. Kehidupan social yang sehat dan penganangan bencana;
6. Transportasi dan tata tertib lalulintas jalan;
7. Perkantoran. perindustrian (IKM) dan UMKM;
8. Tatanan pariwisata;
9. Rumah ibadah;
10. Kota pintar.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada tahun 2020 Kabupaten Bantul mempertahankan penghargaan tertinggi yaitu Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk keempat kalinya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada tahun 2022 Kabupaten Bantul mempertahankan penghargaan tertinggi yaitu Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk keempat kalinya.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas. meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori. mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

Salah satu Program kegiatan pada tahun 2022 adalah Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan PHBS dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. institusi tempat kerja. institusi pendidikan. fasilitas pelayanan kesehatan. dan tempat-tempat umum.

c. Sasaran Terwujudnya Pemerataan dan Daya Saing Pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati yakni terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.

Sasaran Terwujudnya Pemerataan Dan Daya Saing Pendidikan ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2022-2026 dalam misi 2 “Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerataan Dan Daya Saing Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,22	15,48	101,71	15,32	101,04

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2023; Data Diolah

Gambar 2.3.8 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, 2022

Sasaran untuk mewujudkan pemerataan dan daya saing Pendidikandengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 15,22 terealisasi sebesar 15,48 atau 101,70 dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan

capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 101,04% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2026, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 15,48 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 15,48 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga Diploma III.

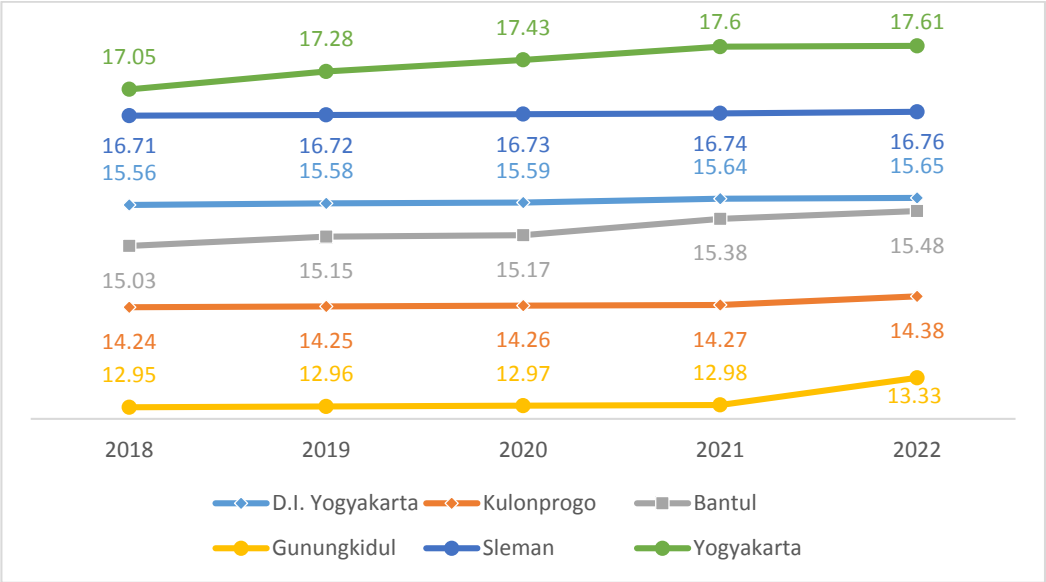

Grafik 2.3.7 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta dan 4 Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi Tahun 2018 – 2022

Kabupaten Bantul masih tetap berada pada posisi ketiga, apabila dibandingkan dengan angka kabupaten lain se DIY, angka HLS Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka Provinsi D.I Yogyakarta (15,65 tahun).

Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2022 meningkat 0,10 poin dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan antara lain melalui Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten

Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3.19 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,65	94	102,72	109,28
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,55	95	94,4	99,37
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89,16	98,5	93,73	95,16
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	10,67	14	15,44	110,29
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,62	3,42	4,92	143,86
6	Peningkatan prestasi olahraga	9	10	10	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul, 2023

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD adalah 94%, realisasi sebesar 102,72%, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya realisasi sebesar 95,65 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 102,72 atau tercapai sebesar 100% lebih, maka capaian tahun 2022 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD mengalami kenaikan dengan tahun 2021 sebesar 7,07 Tingkat Kelulusan SD/MI Pada tahun 2021 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar 100% . Realisasi

sebesar 100% diperoleh dari data Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 14.087 dengan jumlah peserta ujian nasional SD/MI sebanyak 14.087 sehingga terealisir sebesar 100%. kelulusan tahun 2021 menggunakan nilai rata-rata hasil belajar pada kelas 4, 5 dan 6 bukan dengan Ujian Nasional. Jika dibanding dengan tahun 2020 bahwa tingkat Kelulusan SD/MI terealisir 100%, sehingga capaian pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

2. Tingkat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 95% terealisir sebesar 94,40% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 99,37% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 94,40% diperoleh dari data Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar sebanyak 79.840 dengan Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 84.573 jiwa sehingga terealisir sebesar 94,40%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 94,55 %, maka capaian tahun 2022 mengalami penuruan sebesar 0,15%.
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 98,5% terealisir sebesar 93,73% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 95,16% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 93,73% diperoleh dari data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 41.603 dengan Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 44.836 jiwa sehingga terealisir sebesar 93,73%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 89,16 %, maka capaian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,57%.
4. Jumlah Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

   Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah 14%, realisasi sebesar 15,44%, tercapai lebih

dari 110,29% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) realisasi sebesar 10,67% sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 15,44% atau tercapai sebesar 100% lebih, maka capaian tahun 2022 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami kenaikan dengan tahun 2021 sebesar 4,77%

5. .Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

   Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah 3,42%, realisasi sebesar 4,92%, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) realisasi sebesar 4,62% sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 4,92% atau tercapai sebesar 143,86%, maka capaian tahun 2022 untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mengalami kenaikan dengan tahun 2021 sebesar 0,30%.

6. Angka. Peningkatan Prestasi Olahraga

   Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 untuk Peningkatan Prestasi Olahraga adalah 10, realisasi sebesar 10, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 10 diperoleh dari perolehan medali emas dari cabang olahraga oleh atlet Kabupaten Bantul di di even olahraga pada tahun 2022. Perolehan medali tersebut antara lain : Naswa (tenis lapangan), Atlet pelajar Bantul (kejurnas senior), Naura Jinan Syarifah (panjat tebing), Erwin Rosna Yayan Saputra 3 (tiga) medali (menembak dandim Cup, Tembak Reaksi AA IPSC Bima Shooting Club Championship Cirebon, Tembak Reaksi AA IPSC Pangdivif 2 Cup Kostrad Malang 2022), Naisya Bilqis (Sepatu Roda Piala ibu negara), PS. Protaba U-13 (kompetisi piala Suratin tk. Asprov PSSI DIY), Arif Dwi Pangestu 2 (dua) medali (Panahan Sea Games 2021). Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) realisasi sebesar 9 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 10 atau tercapai

sebesar 100%, maka capaian tahun 2022 untuk Peningkatan Prestasi Olahraga mengalami kenaikan dengan tahun 2021 sebesar 1.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022, disimpulkan bahwa 6 (enam) indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar lebih dari 100%.

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan pemerataan dan daya saing Pendidikan di Bantul salah satunya adalah perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 37 pojok baca (taman bacaan) Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkualitas.

Tabel 2.3.20 Tabel Jumlah dan Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Desa	75
3	Perpustakaan SD/MI	398
4	Perpustakaan SMP/MTs	118
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	101
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
	Jumlah	**871**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Sampai dengan tahun 2022 ada sebanyak 51 perpustakaan yang terakreditasi melalui jalur reguler

Permasalahan :

1. Biaya Operasional pendidikan masih belum tercapai
2. Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT
3. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM;

4. Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar masih diperlukan pemenuhan sarana-prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.
5. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal

Solusi :

1. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.
3. Kesejahteraan bagi GTT dan PTT diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
5. Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru kontrak oleh dewan sekolah.

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul.

d. Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

Kebudayaan memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya pembangunan. Dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai penguat identitas jati diri bangsa yang berorientasi pada masa depan. Kebudayaan merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah.

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan daerah, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya, dengan sasaran pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Untuk mengukur segala perubahan yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang akan dicapai, ditentukan suatu indikator. Desa Pamor Budaya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati pada RPJMD 2021-2026 dengan pengampu Dinas Kebudayaan dan didukung Dinas Pariwisata, DP3APPKB dan DKUKMPP Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	3	4	7	175	12	58,33

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan, 2023; Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2.3.21 Target Desa /Kalurahan Pamor Budaya pada RPJMD tahun 2022 sebesar 4 kalurahan dengan realisasi sebesar 7 Kalurahan atau sebanding 175% dari target. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Sangat Tinggi. Dibanding dengan capaian tahun 2021 sebesar 3 Kalurahan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 133,33%. Capain tersebut telah menyumbang 58,33 terhadap target akhir tahun RPJMD tahun 2026.

Sebagai suatu ikhtiar mewujudkan masyarakat Desa/Kalurahan yang berbudaya, maju dan mandiri, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengintegrasikan potensi Desa/Kalurahan, meliputi kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial dengan menetapkan suatu konsep Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do’a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya..

Desa/ Kalurahan Pamor Budaya adalah Kalurahan yang memiliki 4 (empat) predikat sekaligus sebagai Desa/ Kalurahan Budaya, Desa/ Kalurahan Wisata, Desa/ Kalurahan Prima, dan Desa/ Kalurahan Preneur yang akan dikembangkan menjadi Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/ kegiatan:

1. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dan/atau Desa/Kalurahan Budaya;
2. Desa/Kalurahan Wisata;
3. Rintisan Desa/Kalurahan Prima dan/atau Desa/Kalurahan Prima; dan
4. Rintisan Desa/Kalurahan Preneur dan/atau Kalurahan Preneur. Kriteria penilaian Kalurahan Pamor Budaya diatur dengan Petunjuk Teknis

Untuk menjadi Desa Pamor Budaya harus melalui verifikasi, tim verifikasi yang terdiri dari gabungan OPD di kabupaten Bantul yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DP3AP2KB, DKUKMPP dan Bappeda Bantul melakukan kunjungan dalam rangka verifikasi Kalurahan menjadi Desa Pamor Budaya di Kabupaten Bantul. Kegiatan verifikasi mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya hanya ada di Kabupaten Bantul, yang merupakan upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dalam percepatan program Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Predikat sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Preneur pada suatu desa sebagai syarat utama yang sinergikan.

Dinamika pembangunan Desa/Kalurahan memerlukan keterlibatan banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan dalam setiap aktivitasnya; melalui silang birokrasi (silang antar OPD Kabupaten dan silang OPD Kabupaten dengan DIY). Sinergitas tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyrakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika.

Pada tahun 2022 target Desa/Kalurahan Pamor Budaya adalah 4 Desa/Kalurahan, pada hasil verifikasi lapangan terpenuhi kriteria Desa/Kalurahan yang memiliki 4 predikat (desa Budaya, desa wisata, desa Prima dan Desa Preneur) sejumlah 7 Desa/Kalurahan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor Nomor: 592 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya tahun 2022, sebagai berikut:

1. Desa/Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro
2. Desa/Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak
3. Desa/Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon
4. Desa/Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri
5. Desa/Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan
6. Desa/Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
7. Desa/Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul

Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya secara simbolis telah dilaksanakan pada 19 Desember 2022 dengan pemberian:

1. Surat Keputusan/Sertivikat Pamor Budaya
2. Tombak berdapur "cekel dengan pamor "Wos Wutah"

Selanjutnya Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang belum berstatus Desa Mandiri Budaya pada saat ditetapkan, akan memperoleh dukungan anggaran pendampingan dari APBD Kabupaten Bantul dan Pengusulan/Rekomendasi Bupati kepada Gubernur DIY.

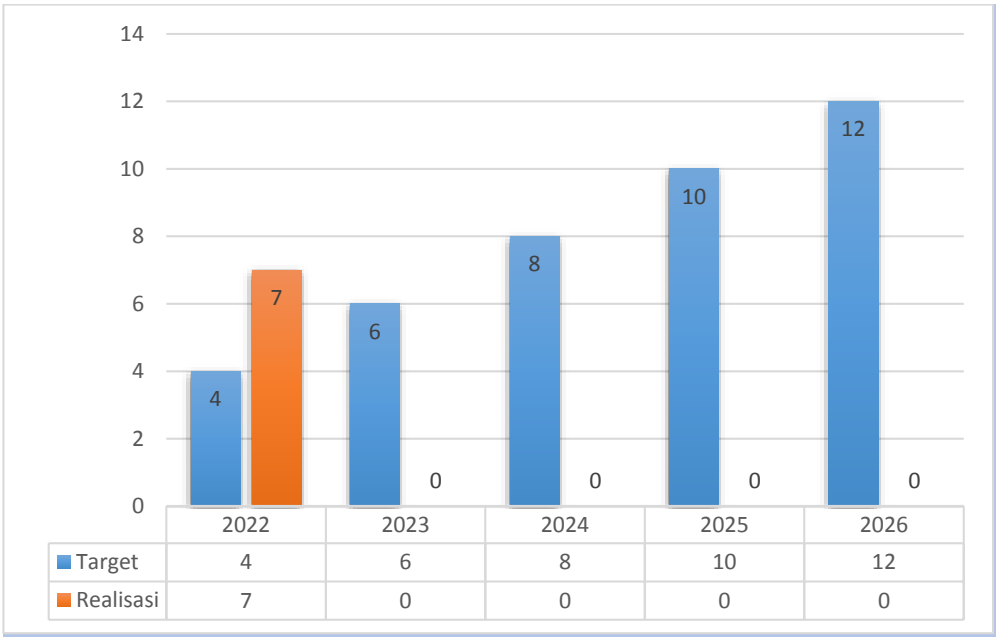

Grafik 2.3.8 Target Desa Pamor Budaya periode RPJMD 2021 – 2026 dan Realisasi pada Tahun 2022. (*Sumber Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, 2023*)

Gambar 2.3.9 Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Desa Pamor Budaya di Kalurahan Gilangharjo (*Sumber : Dinas Kebudayaan, 2023*)

Indikator kinerja utama atau IKU Desa Pamor Budaya adalah ukuran atau indikator kinerja Bupati Bantul dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah pada Urusan Kebudayaan Prioritas utama tersebut digunakan untuk mengetahui kinerja urusan kebudayaan yang telah dilakukan. Selain itu, indikator tersebut juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Sehingga tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya base diraih.

Dalam upaya pelaksanaan pencapaian target IKU Desa Pamor Budaya terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan Propinsi DIY, yaitu pada tahun 2021 menetapkan predikat Rintisan Desa Mandiri Budaya, dimana pada saat IKU Bupati Bantul Desa Pamor Budaya ditetapkan belum ada, di DIY hanya ada predikat Desa Mandiri Budaya;
2. Perubahan kebijakan Propinsi DIY tentang Desa/Kampung Wisata, sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020.
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi budaya, pariwisata, preneur dan prima sebagai syarat utama nominasi Desa Pamor Budaya;
4. Penetapan empat predikat (desa budaya, desa wisata, desa preneur dan

desa prima) tidak semuanya ada di ranah kabupaten,

5. Belum optimalnya Komitmen perangkat daerah pengampu Desa Pamor Budaya;
6. Masih rendahnya alokasi anggaran APBD untuk Pengelolaan Desa/Kalurahan Pamor Budaya

Menyikapi potensi permasalahan tersebut, diperlukan solusi dan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan Perubahan Peraturan Bupati Bantul tentang Desa Pamor Budaya;
2. Pendataan ulang/herregistrasi kelompok/desa/kampung wisata yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2020.
3. Mendorong desa/kalurahan untuk optimalisasi potensi budaya, wisata, preneur dan prima melalui sharing anggaran PA Desa, Dana Desa, ADD, maupun BKK (Danais dan APBD), dan sumber-sumber lain yang sah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Propinsi DIY pengampu predikat Desa Budaya, Desa Preneur dan Desa Prima.
5. Pembentukan Tim Koordinasi Urusan Kebudayaan di tingkat Kabupaten Bantul.
6. Pengusulan dan Penambahan anggaran yang realistis untuk Pengelolaan Desa Pamor Budaya kepada TAPD Kabupaten Bantul.

e. Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja berupaya mewujudkan sasaran strategis daerah ‘’Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis” dengan indikator kinerja utama Bupati Bantul “Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”. Untuk mewujudkan IKU Bupati Bantul tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan sasaran strategis perangkat daerah “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat” dengan indikator kinerja utama perangkat daerah “Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan”.

Tabel 2.3.22 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan, 2023; Data Diolah

Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat pada tahun 2022 tercapai sangat tinggi. Hal ini dilihat dari indikator Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan yang tercapai 100% dari target 100% atau nilai capaian sebesar 100%. Capaian ini menyumbangkan 100% dari target akhir RPJMD tahun 2026 yaitu persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan sebesar 100%.

Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan adalah persentase penanganan gangguan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan merupakan penanganan aduan yang ditindaklanjuti opleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah aduan pelanggaran perda/perkada yang masuk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat ketenteramnan masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, semakin tinggi tingkat penanganan aduan yang masuk, maka semakin tinggi tingkat ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

No	Indikator Kinerja Utama	2022				
		Jumlah Aduan yang Masuk	Jumlah Aduan yang Ditangani	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	165	165	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP, 2023

Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan sebesar 100% tercapai dari target. Dari total sebanyak 165 aduan yang masuk, penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 165 kali. Dengan realisasi sebesar 100% mendapatkan capaian sebesar 100%. Namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi untuk tercapainya sasaran strategis tersebut, diantaranya:

1. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya belum dapat diimplementasikan;
2. Terbatasnya SDM di Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai sertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang hanya sebanyak 2 (dua) orang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal; dan
4. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat kurang memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Gambar 2.3.10 Dokumentasi Kegiatan SatpolPP Kab. Bantul dalam mencapai Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis

Solusi yang dilakukan untuk lebih meningkatkan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat diantaranya :

1. Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
2. Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
3. Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri;
4. Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertibaan dan ketentraman umum;
5. Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat;
7. Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga;

8. Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum;
9. Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat;
10. Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
11. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
12. Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian indikator adalah :

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda;
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder;
3. Kajian Peraturan Daerah yang berkatian dengan Ketertiban Umum;
4. Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri;
5. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga K3 dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3;
6. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah; dan
7. Menambah fasilitas Linmas dengan pengadaan seragam Linmas dan Kartu Anggota Linmas.

f. Sasaran Terwujudnya Pemerataan Pendapatan

Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Pembangunan pada sektor-sektor tersebut mendorong tersedianya kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan memeratakan distribusi pendapatan antar anggota masyarakat. Sehingga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasayarat tercapainya pembangunan manusia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori atau proses penetasan ke bawah (trickle down effect).

Dalam bidang ekonomi, pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan yang bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sehingga akan mendongkrak daya beli untuk dapat memenuhi

Tabel 2.3.23 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	**Rasio Gini**	**Angka**	**0,441**	**0,360**	**0,410**	**86,11**	**0,310**	**67,74**
2.	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**4,09**	**3,90**	**3,97**	**98,21**	**3,20**	**75,94**
3.	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	80,00	83,33	104,16	100,00	83,33

1) Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang relatif sama. Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Semakin tinggi rasio koefisien gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat.

Target Rasio Gini tahun 2022 direntang angka 0,360 dengan realisasi sebesar 0,410 atau sebanding 86,11 % dari target. Dibanding dengan capaian tahun 2021 sebesar 0,441 tahun 2022 mengalami kenaikan. Sedangkan capaian terhadap target akhir tahun RPJMD tahun 2026 sebesar 67,74% dibandingkan target sebesar 0,310.

Menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia klasifikasi Indeks Gini adalah sebagai berikut:

- Indeks Gini terletak di antara 0,50-0,70 menandakan kesenjangan tinggi.
- Indeks Gini terletak di antara 0,36-0,49 menunjukan kesenjangan sedang.

- Indeks Gini terletak di antara 0,20-0,35 menunjukan kesenjangan rendah (merata).

Indeks Gini di Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022 berkisar 0,418-0,448 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Bantul termasuk kategori sedang.

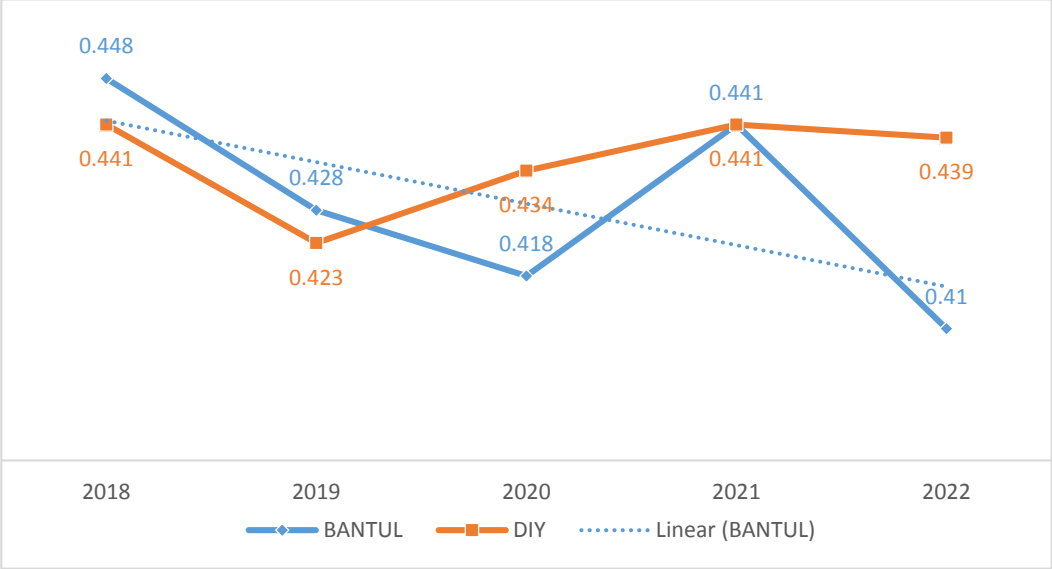

Grafik 2.3.9 Grafik Indeks Gini Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakartapada periode 5 tahun terakhir dari tahun 2018 – 2022.(*Sumber : BPS Kab. Bantul, 2023)*

Indeks Gini Kabupaten Bantul dari tahun 2018 sampai 2022 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan akan tetapi kembali naik di tahun 2021 menjadi 0,441. Kenaikan ini terjadi akibat adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan kontraksi ekonomi. Efek berganda dari terjadinya kontraksi ekonomi adalah banyak sektor yang mengalami kelumpuhan, dan menyebabkan adanya pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Pada tahun 2022, berdasarkan hasil rilis BPS di Bulan febuari 2022 Indeks Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,41. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul yang menurun dari 14,04 persen di tahun 2021 menjadi 12,27 di tahun 2022. Penurunan Indeks Gini merupakan salah satu indikator mulai menggeliatnya ekonomi pasca pandemi covid-19.

Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke

bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat golongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten Bantul dilakukan dengan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah, percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur, serta program bantuan sosial bagi masyarakat miskin sangat penting untuk mempersempit ketimpangan pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengurangi ketimpangan dengan menggalakkan program penanggulangan kemiskinan antara lain:

a) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok;
b) Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dan kemudahan untuk mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro;
c) Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
d) Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
e) Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 3,90% terealisasi sebesar 3,97% atau tercapai 98,21.% dengan kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 4,06%, sedangkan target capaian tahun 2026 (akhir RPJMD) sebesar 3,2%.

Untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul, Tingkat Pengangguran terbuka merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap

pencapaian pemerataan pendapatan, Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi juga oleh pemerataan laju faktor pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan di wilayah, karena akan membawa dampak terhadap serapan tenaga kerja setempat.

Namun pertumbuhan tersebut, harus disikapi dengan menyiapkan angkatan kerja yang mempunyai kesesuaiaan kompetensi atau link and match dunia usaha serta dunia industry, sehingga ketersediaan angkatan kerja di setiap daerah dapat terserap secara merata. Serapan tenaga kerja yang merata akibat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan berdasarkan potensi kewilayahan tersebut, merupakan bagian dari strategi dalam pemerataan pendapatan disetiap daerah, untuk mewujudkan perekonomian yang berkualitas.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka akan menurun, seiring dengan meningkatnya serapan tenaga kerja, yang akan berdampak terhadap terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Pengangguran terbagi menjadi dua jenis yaitu pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah pengangguran (disguised employment). Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 2.3.24 Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi D.I.Y, dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I.Y Tahun 2021 - 2022

No.	Tingkat Wilayah	Persentase Capaian TPT		Selisih
		2021	2022	
1	Nasional	6.49%	5.86%	0.63%
2	Provinsi	4.56%	4.06%	0.50%
3	Sleman	5.17%	4.78%	0.39%
4	Bantul	4.04%	3.97%	0.07%
5	Kulon Progo	3.69%	2.80%	0.89%

No.	Tingkat Wilayah	Persentase Capaian TPT		Selisih
		2021	2022	
6	Gunung Kidul	2.20%	2.08%	0.12%
7	Kota Yogyakarta	9.13%	7.18%	1.95%

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2023

Dari Tabel 2.3.24 dapat diketahui bahwa angka persentase capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan angka persentase capaian Tingkat Nasional, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi D.I.Y dan Kabupaten Sleman, akan tetapi lebih tinggi daripada Kabupaten Kulonprogo dan GunungKidul. Sedangkan selisih capaian penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul paling rendah dibandingan kabupaten/kota, propinsi maupun nasional, dengan jumlah 0.07%.

Meskipun relatif kecil persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, hal ini masih relevan terhadap capaian Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul,

Capaian jumlah tenaga kerja yang terserap di Kabupaten dengan target 7.500 mencapai realisasi 14.230, meningkat 190 %, hal ini relevan dengan data penurunan angka pengangguran (invert) dari tahun 2021 capaian sebesar 4.04 dan capaian tahun 2022 sebesar 3.97, tren positip meskipun relative kecil (dimungkinkan momentum survey BPS tidak bersamaan pelaksanaan padat karya) namun mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap capaian data tingkat kemiskinan yang ditahun 2021 sebesar 14.04 dan realisasi capaian di tahun 2022 sebesar 12.27 atau angka kemiskinan menurun 1.77 poin.

No	Kegiatan	Paket	Pekerja perpaket	Jumlah Pekerja
1	Padat Karya Infrastruktur			
	- APBD	158	26	4.108
	- BKK	116	52	6.032
2	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			3.681
3	Pelatihan Subsidi Program			61

4	Pelatihan berbasis kompetensi BLK	
	- APBN	83
	- APBD	265
	Jumlah	**14.230**

Sumber : Dinas Nakertrans, Kabupaten Bantul, 2023

Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur dan pelatihan dititikberatkan pada obyek sasaran masyarakat miskin, penganggur dan atau setengah penganggur. Peserta pelatihan yang telah selesai dalam kepelatihannya, dilakukan monitoring sampai dengan memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2022 adalah:

a. Pelatihan Tenaga Kerja berbasis kompetensi;
b. Pelayanan informasi lowongan kerja dan AK1;
c. Penempatan tenagakerja local, antar daerah dan luar negeri;
d. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
e. Padat karya Infrastruktur;
f. Monitoring dan pengawasan kepatuhan perusahaan terkait ketenagakerjaan;
g. Mediaasi perselisihan tenaga kerja dengan majikan/perusahaan;
h. Perlindungan pekerja migran Indonesia yang bermasalah;
i. Penyelenggaraan Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian kapasitas tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industry, sehingga memerlukan sinergitas semua stakeholders dalam pelaksanaan pelatihan sampai dengan kesesuaian jabatan pekerjaan atau berwirausaha;
b. Keakuratan sasaran peserta karena validitas data masyarakat miskin, pengangguran dan atau setengah penganggur, serta disabilitas sebagai obyek sasaran kegiatan padat karya infrastruktur dan pelatihan;
c. Menjaga stabilitas dunia usaha sebagai upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif;

d. Rendahnya kuota transmigrasi dibanding antusiasme calon transmigran.

Adapun beberapa inovasi sebagai solusi yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan jumlah serapan tenaga kerja pada tahun 2022 adalah :

a. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan menerima penambahan jumlah paket padat karya infrastruktur, yang di tahun 2021 sejumlah 169 paket menjadi 274 paket di tahun 2022 meningkat 105;
b. Meningkatkan sosialisasi dan layanan ketenagakerjaan kemasyarakat dengan metode jemput bola (Pak Piling);
c. Membuka layanan ketenagakerjaan disabilitas (Unit Layanan Disabilitas), telah bekerjasama dengan SIGAB dan Alfa Mart dalam fasilitasi rekrutmen tenagakerja;
d. Memprakarsahi transformasi UPTD BLK menjadi UPTP BPVP;
e. Memprakarsahi pembentukan Skill Development Centre (SDC).

Berdasarkan permasalahan, tema, prioritas RKPD 2023 dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul dalam Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastruktur dan SDM berkualitas, serta penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka Disnakertrans menilai bahwa Program yang telah dilaksanakan masih sangat relevan untuk ditingkatkan intensitasnya, sebagai bentuk strategi ditahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja/SDM,yang diharapkan dapat mengungguli daya saing tenaga kerja dari daerah lain, dapat memenuhi kebutuhan pembangunan potensi daerah dan memenuhi kebutuhan link and match dunia industry, investasi meningkat yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
b. Mengupayakan dalam pelayanan terhadap kebutuhan info lowongan tenaga kerja serta kesesuaian jabatan yang diperlukan oleh suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan jenis pelatihan yang diperlukan, serta pelaksanaan kegiatan perluasan kerja dengan padat karya infrastruktur, sehingga dihasilkan multi efek selain terserapnya tenaga kerja, juga mendukung peningkatan potensi daerah dengan pembangunan infrastruktur.

c. Menjaga stabilitas dunia usaha, melalui kegiatan mediasi, sosialisasi ketenagakerjaan pengawasan perusahaan, sehingga iklim investasi tetap kondusif.
d. Turut serta dalam pemerataan pembanguanan dan pengurangan kepadatan penduduk sebagai dukungan terhadap program pemerintah pusat.

.

3) Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif

Indikator sasaran Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 83,33% dari target 80% atau tercapai sebesar 104,16 dengan kriteria Sangat Tinggi. Indikator ini merupkan indikator baru yang baru diukur di tahun 2022. Target akhir tahun RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, capaian Jaringan Kabupaten Kreatif pada tahun 2022 telah mencapai sebesar 83,33 % dibanding denagn target akhir RPJMD.

Industri secara umum atau secara luas dapat diartikan segala bentuk kegiatan ekonomi, terutama berkaitan erat dengan produksi atau menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah, dan barang tentu menghasilkan keuntungan dari proses tersebut. Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapat perhatian besar pemerintah. Besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini karena semakin meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, serta besarnya potensi sektor ini dalam memberikan nilai tambah, lapangan kerja, lapangan usaha maupun keterkaitan antar sektor dan pengentasan kemiskinan masyarakat, mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengatasi ketimpangan wilayah. Di samping itu, pelaku-pelaku usaha di bidang industri menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Peningkatan kontribusi industri dalam perekonomian Indonesia diharapkan mampu mewujudkan pembangunan inklusif bagi perekonomian Indonesia.

Kabupaten Bantul dikenal kaya dengan beragam potensinya, mulai dari sektor industri, sektor pertanian dan pariwisata, yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sesuai dengan kebijakan nasional dan potensi daerah, Kabupaten Bantul berupaya untuk lebih memperkuat peran ketiga sektor tersebut

dengan mengarahkan kebijakan ekonomi pada pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini selaras dengan keragaman produk ekonomi kreatif Bantul khususnya kriya yang mampu menembus pasar lokal dan internasional dan Bantul telah ditetapkan sebagai kabupaten kreatif kriya terkuat di Indonesia oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional (Bekraf) Tahun 2017.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kabupaten Bantul berupaya untuk lebih mendorong dan memperkuat posisi daerah dalam skala nasional dengan mencanangkan Bantul menjadi bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia (Unesco Creatif Cities Network-UCCN) pada tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO yang terdiri dari 18 Indikator, yang selanjutnya menjadi Target Kinerja Utama Daerah yakni : Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif.

Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif menunjukkan seberapa besar Kabupaten Bantul dapat memenuhi ketentuan dan kriteria 18 Indikator dari UCCN. Perkembangan tahun 2022 menunjukkan Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Bantul sebesar 83,33 %, dalam arti terdapat 15 Indikator yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Bantul dari 18 Indikator UCCN, yaitu :

1. Peran dan dasar-dasar bidang kreatif dalam sejarah kota.
2. Pentingnya ekonomi dan dinamika sektor budaya.
3. Pameran, konferensi, konvensi, dan peristiwa nasional dan atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh kota selama lima tahun terakhir.
4. Festival, konvensi, dan acara skala besar lainnya yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir.
5. Mekanisme,kursus, dan program untuk mempromosikan pendidikan kreativitas dan seni bagi kaum muda di bidang kreatif.
6. Belajar seumur hidup, pendidikan tinggi, sekolah kejuruan, sekolah musik dan drama, residensi dan pembentukan pendidikan tinggi lainnya yang mengkhususkan diri di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
7. Pusat penelitian dan program di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
8. Ruang dan pusat kreasi yang diakui, berproduksi, dan penyebaran kegiatan barang dan jasa di bidang kreatif yang menjadi perhatian, di tingkat

professional.

9. Fasilitas utama dan ruang-ruang budaya yang didedikasikan untuk berlatih, promosi, dan sosialisasi di bidang kreatif yang menjadi perhatian dan ditujukan untuk masyarakat umum dan atau pemirsa tertentu (Pemuda, kelompok rentan, dan lain-lain.)
10. Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir untuk mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan budaya, khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian, terutama yang ditujukan kelompok sosial yang rentan atau tidak beruntung.
11. Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir di bidang kreatif yang bersangkutan yang telah membantu dan atau memperkuat hubungan kerja sama antara kota, sektor swasta.
12. Peran profesional utama dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang aktif di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
13. Kebijakan dan langkah-langkah utama dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan status pencipta dan mendukung karya kreatif khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
14. Kebijakan dan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mendukung pendirian dan pengembangan industri budaya lokal yang dinamis di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
15. Fasilitas utama dan ketersediaan infrastruktur dan acara, seperti pameran, konferensi, dan konvensi, yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan bidang kreatif yang dicakup oleh jaringan daripada bidang kreatif utama yang menjadi perhatian oleh aplikasi.

Secara umum hasil pemenuhan kriteria menunjukkan Kabupaten Bantul memiliki peluang untuk menjadi kota CRAFT and FOLK ART (versi UCCN). Kabupaten Bantul memiliki berbagai potensi seperti kriya recycle dan upcycle yang merupakan produk kriya berkelanjutan dan terkait dengan isu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Saat ini, produk recycle dan upcycle memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Selain itu Kabupaten Bantul juga memiliki kriya tradisi sebagai produk seni masyarakat misalnya wayang kulit di sentra

Wukirsari dan Bangunjiwo. Wayang kulit merupakan produk budaya yang memiliki fungsi sebagai pembentuk karakter bangsa dan produknya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Selain dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, difokuskan pada penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur hexahelix, yaitu: Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas Kreatif, Pemerintah, Media, dan Lembaga Keuangan. Sinergi antara pemangku kepentingan ini diharapkan dapat membentuk jejaring kerja kolaboratif berdampak baik dari hulu hingga hilirisasi produk dan giat aktivitas program ekonomi kreatif. Jejaring kerja kolaboratif berdampak dalam ekosistem ekonomi kreatif meliputi segala aktivitas dimulai dari proses kreasi produk, proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga proses konservasi. Secara terintegrasi, baik kolaborasi pemangku kepentingan maupun alur proses kreatif membutuhkan ruang hidup yang menjadi pusat kreativitas.

Harapannya pada tahun 2023 ini Kabupaten Bantul bisa masuk ke jejaring kota kreatif dunia (UCCN), sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Kabupaten Bantul ditingkat global yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan upaya pencapaian jejaring Kota Kreatif UCCN dimaksud yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi , komunikasi serta keterpaduan kerja antar stakeholder (Hexahelix) dalam implementasi program/kegiatan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu sasaran dari penilaian UCCN.
2. Keterbatasan Sumber Daya yang Kompetitif dalam penguatan ekonomi kreatif Kabupaten Bantul khususnya dalam pengembangan pasar dan skala ekonomi ke dunia internasional
3. Strategi promosi dan komunikasi pengembangan ekonomi kreatif ke dunia internasional belum memadai.

Solusi dan Pendukung

1. Terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial

yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Terbentuknya Bantul Kreatif Forum
3. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk pendanaan.
4. Kebijakan Pengembangan Ekraf sudah diwadahi dengan Peraturan Bupati Bantul No 193 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
5. Tersusunnya Peta Jalan dan Blue Print Pengembangan Ekraf Bantul
6. Program super prioritas jangka pendek 2022- 2024

g. Sasaran Terpenuhinya Kualitas Sarana/ Prasarana Publik

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, Presiden Jokowi telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Tabel 2.3.25 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	Indeks	n/a	75,13	73,84	98,28	79,08	93,37
2.	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75	75,03	75,20	100,23	75,20	100,00

Di Kabupaten Bantul, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat

berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)

Pembangunan insfrastruktur harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk melakukan pengukuran atas kualitas infrastruktur, dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Infrastruktur. Terpenuhinya Kualitas Sarana dan Prasarana Publik yang diukur melalui IKU Indeks Kualitas Infrastruktur menunjukkan angka yang baik, di mana pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 100,18% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 75,13% realisasi tahun 2022 menunjukkan bahwa IKI baru tercapai 73,84%. Pencapaian ini menyumbangkan sebesar 93,37% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2026.

Penentuan IKI didasarkan pada perhitungan kualitas infrastruktur sesuai 6 (enam) IKU OPD dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, yaitu : tingkat kemantapan jalan; rasio bangunan gedung laik fungsi; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Penduduk berakses air minum layak, Penduduk berakses sanitasi yang layak, dan Penanganan Kawasan kumuh. Dari 6 (enam) IKU OPD tersebut didapatkan data kualitas infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 2.3.26 Data Kualitas Infrastruktur Tahun 2021

No	IKU OPD	Target	Realisasi	Capaian
a.	Tingkat kemantapan jalan	78,43	78,93	100,64
b.	Rasio bangunan gedung laik fungsi	0,40	1,70	425,00
c.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,37	80,46	100,11
d.	Penduduk berakses air minum layak	83,56	83,56	100,00
e.	Penduduk berakses sanitasi yang layak	87,86	87,86	100,00
f.	Penanganan Kawasan kumuh	10,59	44,72	422,29

Sumber : Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kualitas 5 (lima) kategori infrastruktur Kabupaten Bantul yang meliputi tingkat kemantapan jalan; rasio

bangunan gedung laik fungsi; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Penduduk berakses air minum layak, dan Penduduk berakses sanitasi yang layak serta penanganan kawasan kumuh memiliki kualitas sangat baik dengan capaian masing-masing sebesar 100,64%, 425%, 100,11%, 100% dan 100%, serta 422,29%.. Capaian kualitas infrastruktur secara lengkap sebagai berikut :

a. Tingkat kemantapan jalan

Hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan menunjukkan tingkat kemantapan jalan sebesar 78,93%. Data kemantaban jalan ini terdiri dari kemantapan jalan kabupaten dan jalan desa. Total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km, jalan dengan kondisi mantap sepanjang 473,57km atau 75,785%. Sedangkan jalan desa sepanjang 468,69km merupakan jalan dengan kondisi mantap dari panjang total jalan desa sebanyak 568,04km atau 82,51%.

Gambar 2.3.11 Dokumentasi Peresmian Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Belik dan Peningkatan Ruas Jalan Jejeran – Sudimoro di Kapanewon Pleret oleh Bupati Bantul

Mutu yang baik pada hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan merupakan hasil dari kegiatan baik rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan kabupaten dan jalan desa. Pada tahun 2022, telah berhasil ditangani jalan dan jembatan

sesuai tabel Tabel 2.3.27 dibawah:

Tabel 2.3.27 Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Peningkatan/rehabilitasi jalan kabupaten	66 ruas
2	Peningkatan/rehabilitasi jembatan pada jalan kabupaten	5 unit
3	Pemeliharaan jalan kabupaten	23 ruas
4	Peningkatan/rehabilitasi jalan desa	72 ruas
5	Peningkatan/rehabilitasi jembatan pada jalan desa	2 unit
5	Pemeliharaan jalan desa	4 ruas

Sumber : Dinas PUPKP; 2023

b. Rasio bangunan gedung laik fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, laik fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Suatu gedung dinyatakan laik fungsi jika telah diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah. Penerbitan SLF dilakukan untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Kualitas infrastruktur bangunan gedung dapat ditilik dari rasio bangunan gedung laik fungsi yang ada di daerah. Penerbitan SLF Kabupaten Bantul pada sampai dengan Tahun 2022 ini adalah sebanyak 247 dokumen. Dibandingkan dengan jumlah bangunan gedung yang ada di kabupaten Bantul sebesar 14.948 unit, didapatkan rasio gedung laik fungsi sebesar 1,7%.

Kualitas infrastuktur bangunan Gedung pada Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi penerbitan SLF dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembangunan/rehabilitasi Gedung pemerintah dalam rangka mewujudkan Gedung laik fungsi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu pembangunan Gedung daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Bantul yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Bantul.

Gambar 2.3.12 Peresmian Rumah Dinas Wakil Bupati Bantul oleh Bupati Bantul

c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebanyak 100 (seratus) Daerah Irigasi yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul, dengan total luas 8.634 Ha.

Kualitas infrastruktur berupa jaringan irigasi dapat dilihat dari rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Dari total seluas 8.634 Ha DI kewenangan Kabupaten Bantul, DI seluas 6.946,82 Ha dapat dilayani oleh jaringan irigasi atau sekitar 80,46%. Data penanganan jaringan irigasi pada DI kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tercantum pada Tabel 2.3.28 di bawah

Tabel 2.3.28 Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	URAIAN PENANGANAN DI	LUAS (HA)
1	Peningkatan/ Rehabilitasi	984,14
2	Operasional	3.847,27
3	Pemeliharaan	2.115,41
TOTAL		**6.946,82**

Sumber : Dinas PUPKP; 2023

Peningkatan kualitas infrastuktur jaringan irigasi di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi permukaan. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan peningkatan/rehabilitasi Daerah Irigasi sesuai Tabel …. Juga dilaksanakan OP jaringan irigasi permukaan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dan UPTD Pengamatan Pengairan Winongo pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3.29 Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI
1	Daerah Irigasi Kadisono	Pajangan
2	Daerah Irigasi Klegen	Pundong
3	Daerah Irigasi Mejing	Bambanglipuro
4	Daerah Irigasi Dung Gepeng	Dlingo
5	Daerah Irigasi Maladan	Dlingo
6	Daerah Irigasi Nawungan	Imogiri
7	Daerah Irigasi Seropan	Dlingo
8	Daerah Irigasi Tangkil	Dlingo
9	Daerah Irigasi Gayam	Sewon
10	Daerah Irigasi Gupit	Banguntapan
11	Daerah Irigasi Karangploso Kanan Pleret	Pleret
12	Daerah Irigasi Tuk Ngembong	Banguntapan
13	Daerah Irigasi Wiyoro	Banguntapan
14	Daerah Irigasi Bayem	Kasihan
15	Daerah Irigasi Karangjati	Sedayu
16	Daerah Irigasi Widodo	Pajangan
17	Daerah Irigasi Karangasem	Pundong

Sumber : Dinas PUPKP; 2023

DI Tuk Ngembong

DI Gayam

DI Karang Ploso

DI. Wiyoro

Gambar 2.3.13 Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022

d. Penduduk berakses air minum layak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana salah satu layanannya berupa Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan pemenuhan SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul 2021 – 2026.

Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan air minum. Hal ini dlakukan dengan melaksanakan peningkatan/perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Data peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tercantum pada Tabel 2.3.30 berikut :

Tabel 2.3.30 Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	KATEGORI	URAIAN	KAPANEWON	JUMLAH UNIT (SR)
1	Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM Bangunjiwo	Kasihan	70
		SPAM Seloharjo	Pundong	100
		SPAM Selopamioro	Imogiri	100
		SPAM Srigading	Kretek	51
		SPAM Srimartani	Piyungan	181
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SPAM Potorono	Banguntapan	200
		SPAM Sriharjo	Imogiri	247
		SPAM Timbulharjo	Sewon	160
		SPAM Tirtosari	Kretek	275
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	HAMP Baturetno	Banguntapan	58
		HAMP Donotirto	Kretek	60
		HAMP Murtigading	Sanden	53
		HAMP Srimulyo	Piyungan	101
		HAMP Sumberagung	Jetis	55
		HAMP Triharjo	Pandak	54
		HAMP Wirokerten	Banguntapan	51
		SPAM Caturharjo	Pandak	47
		SPAM Sendangsari	Pajangan	68

Sumber : Dinas PUPKP; 2023

Peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

e. Penduduk berakses sanitasi yang layak

Seperti halnya dengan penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi yang layak juga merupakan salah satu amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana layanan yang kedua adalah berupa Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter

penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini dlakukan dengan melaksanakan peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota. Data peningkatan/perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2022 tercantum pada tabel

Tabel 2.3.31 Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	KATEGORI	URAIAN	KAPANEWON	JUMLAH UNIT (SR)
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	SPALDS Patalan	Jetis	51
		SPALDS Terong	Dlingo	60
		HALS Jatimulyo	Dlingo	18
		HALS Potorono	Banguntapan	16
		HALS Sendangsari	Pajangan	16
		HALS Wijirejo	Pandak	16
2	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman	SPALD-T Permukiman Pleret	Pleret	57
		SPALD-T Permukiman Segoroyoso	Pleret	51
		SPALD-T Permukiman Seloharjo	Pundong	59
		SPALD-T Permukiman Tirtosari	Kretek	57
		SPALD-T Permukiman Wonokromo	Pleret	57
		SPALD-T Permukiman Wukirsari	Imogiri	53
		SPALD-T Permukiman Ngestiharjo	Kasihan	35
3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	SPALD Terpusat Skala Kota di Bangunharjo	Sewon	135
		SPALD Terpusat Skala Kota di Panggungharjo	Sewon	75
		SPALD Terpusat Skala Kota di Tamanan	Banguntapan	69

Sumber : Dinas PUPKP; 2023

Peningkatan akses penduduk terhadap penyediaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/perluasan SPALD SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota. Saat ini, layanan pengelolaan air limbah domestic terpusat skala kota di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui 2 unit SPALD yaitu SPALD Terpusat Sewon milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kapanewon Sewon dan SPALD Terpusat Bambanglipuro yang berada di Kapanewon Bambanglipuro. SPALD Terpusat Bambanglipuro dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 - 2022, yang saat ini masih berstatus pinjam pakai

f. Penanganan Kawasan kumuh

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 Kapanewon dan 31 Kalurahan. Sinergitas penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Salah satu upaya mengurangi dan mengatasi kawasan permukaaan kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) melalui anggaran APBN. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 4 Rusunawa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan (Pringgolayan) dan Rusunawa Tamanan.

Sedangkan untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang selama ini mendapat anggaran dari pemerintah pusat/daerah. Pada tahun 2022, rumah tidak layak huni dapat tertangani 513 unit dengan rincian 35 unit dengan sumber dana BSPS Kementerian PUPR, 200 unit dari Pemda DIY, 132 unit

pembangunan baru RTLH dari dana DAK bidang Perumahan dan Pemukiman Rakyat serta 146 unit perbaikan rumah tidak layak huni dari APBD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Gambar 2.3.14 Salah satu rusunawa di Kabupaten Bantul

Permasalahan :

1. Akses jalan yang belum sepenuhnya mantap
2. Rasio Bangunan Gedung Pemerintah laik fungsi yang masih rendah
3. Belum optimalnya akses air minum yang layak
4. Belum optimalnya akses sanitasi layak
5. Belum semua lahan / daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik
6. Belum optimalnya penanganan banjir/genangan
7. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat
8. Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu
9. Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu

10. Belum optimalnya pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana
11. Belum optimalnya sinergi kebijakan rumah layak huni.

Solusi :

1. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/rutin jalan dan jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan
2. Melakukan sosialisasi pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bangunan gedung
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana air bersih dan meningkatkan akses penduduk terhadap layanan air minum layak
4. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak
5. Penyusunan masterplan drainase
6. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan kecukupan air irigasi
7. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi
8. Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu
9. Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu
10. Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.
11. Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni.

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain :

1. Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten (PJU, trotoar, marka, drainase jalan).

2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (SPALD, MCK), pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R, bank sampah), dan peningkatan jalan lingkungan. Ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori dan ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik) akan ditingkatkan.
3. Meningkatkan ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

2) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ BPN nomor 21 Tahun 2021 diamanatkan untuk melakukan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan RTR, pemberian Insentif dan Disinsentif, pengenaan sanksi dan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang. Disamping itu dalam mewujudkan Tertib Tata Ruang diperlukan pengawasan penataan ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang.

Rencana pola ruang yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Bantul adalah pola ruang yang didominasi oleh kawasan ruang pertanian, permukiman, hutan dan perairan. Dasar penetapan pola ruang yang utama yaitu wilayah perencanaan adalah wilayah yang berkarakteristik kabupaten, sehingga dominasi pola ruang yang ada (eksisting) adalah kawasan pertanian, walaupun di wilayah Kabupaten Bantul sendiri kawasan pertaniannya sudah mulai berkurang atau beralih fungsi ke kawasan permukiman guna untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Selain itu, wilayah perencanaan merupakan wilayah kabupaten yang bercirikan kawasan pertanian dan kawasan permukiman perdesaan (dominasi), permukiman perkotaan (minoritas).

Indikator persentase kesuaian pemanfaatan ruang yang tercapai 75,03% dari target 75% atau nilai capaian sebesar 100,23%. Capain tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 75%. Capaian ini menyumbangkan 100% dari target akhir RPJMD tahun 2026 yaitu sebesar 75%.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya terhadap penggunaan lahan eksisting, dapat ditentukan "kategori" kesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kriteria 'sesuai' pada kawasan lindung seluas 6139.70 Ha atau 84.85%, pada kawasan budidaya seluas 31040.26 Ha atau 73.54 sehingga luas total sebesar 37179.96 Ha atau 75,20 % dari luas Kabupaten Bantul; selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.3.32 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Terwujud	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	**1653.78**	-	270.09	1923.87
	Kawasan Cagar Budaya	**225.71**	-	64.85	290.56
	Kawasan Resapan Air	**2388.10**	-	47.60	2435.70
	Sempadan Pantai	**253.75**	-	83.41	337.16
	Sempadan Sungai	**1618.36**	-	630.43	2248.79
	Jumlah Lindung (Ha)	6139.70	-	1096.38	**7236.08**
	% terhadap Kawasan Lindung	**84.85**		**15.15**	**100.00**
	% terhadap Kabupaten Bantul	**12.42**		**2.22**	**14.64**
BUDIDAYA	Kawasan Peruntukan Industri	895.98	**611.81**	304.93	1812.72
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	701.36	-	-	701.36
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	8096.93	**1930.02**	79.97	10106.92
	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	848.07	**230.64**	311.92	1390.63
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	8677.77	**3570.63**		12248.40
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	7326.11	**871.08**	2725.52	10922.71
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	4494.04	**366.97**	163.40	5024.41
	Jumlah Budidaya (Ha)	**31040.26**	**7581.15**	**3585.74**	**42207.15**
	% terhadap Kawasan Budidaya	73.54	17.96	8.50	100.00

	% terhadap Kabupaten Bantul	62.78	15.33	7.25	86,38
TOTAL (Ha)		37179.96	7581.15	4682.12	49443.23
% terhadap Kabupaten Bantul		75.20	15.33	9.47	100.00

Sumber : Dinas PTR; 2023

Berdasarkan nilai atau persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul masuk dalam kriteria "sesuai" dapat ditentukan "kategori" kesesuaian pemanfaatan ruang Sangat Tinggi, diartikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rujukan rencana tata ruang (termasuk indikasi program).

Tabel 2.3.33 Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Bangunan Industri	88.09
2	Hutan	2914.29
3	Kebun Campuran	7130.31
4	Pasir Pantai	321.41
5	Permukiman	21396.71
6	Sawah Irigasi	13721.10
7	Sawah Tadah Hujan	639.16
8	Sungai	337.38
9	Tambak	59.71
10	Tegalan/Ladang	2835.08
	Jumlah	**49443.23**

Sumber : Dinas PTR; 2023

Berdasarkan table diatas, permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan paling tinggi yaitu 21396.71 ha diikuti sawah irigasi seluas 13.721.10 ha dan kebun campuran seluas 7130.31 ha. Selain itu penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bantul seperti bangunan indistri dan tambak juga terdeliniasi dengan menggunakan citra resolusi tinggi dengan persentase luasan yang rendah.

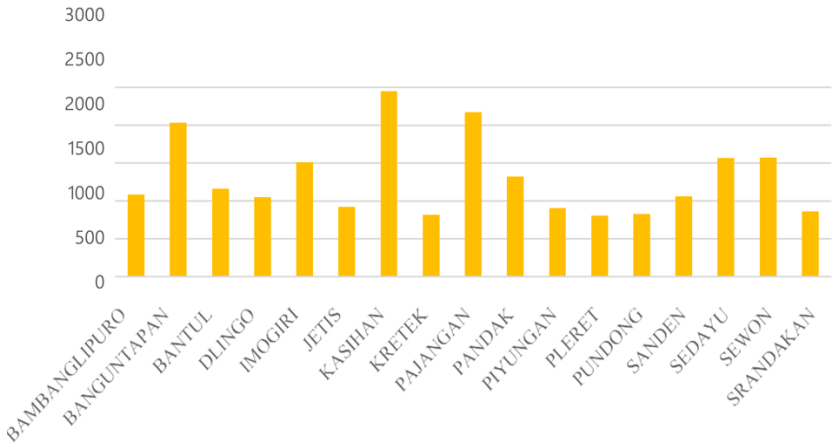

Grafik 2.3.10 Distribusi Penggunaan Lahan Permukimani Kabupaten Bantul Tahun 2022 (*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023*)

Dominasi penggunaan lahan permukiman berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yakni di Kawasan Permukiman terutama berada di Kapanewon Kasihan. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang bertambah secara terus menerus menyebabkan aglomerasi permukiman di Kawasan Penyangga Perkotaan seperti di Kapenewon Sedayu, Pajangan, dan Pandak dan Sedayu. Hal tersebut juga didukung dengan kelerengan pada wilayah tersebut yang datar hingga landai sehingga banyak tumbuh permukiman baru.

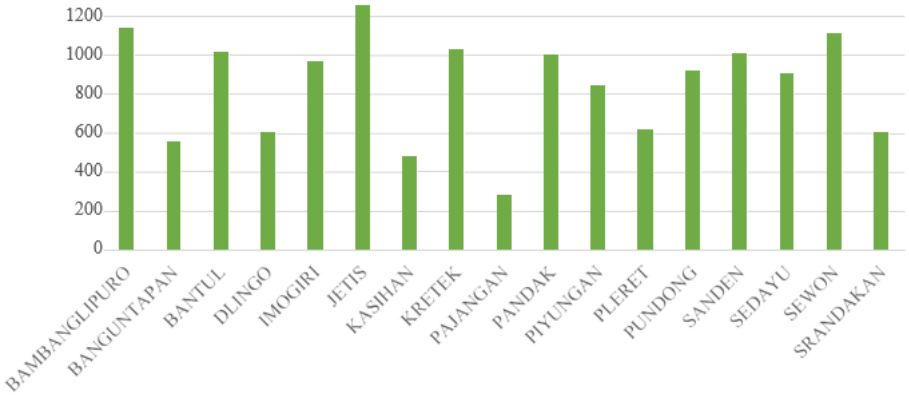

Grafik 2.3.11 Distribusi Penggunaaan Lahan Sawah Irigasi di Kabupaten Bantul

Penggunaan lahan sawah irigasi menempati dominasi kedua setelah permukiman dengan luas sekitar 14361.564 Ha. Sebaran penggunaan lahan ini merata kearah selatan mengikuti kelerengan landai dan bentuklahan dataran alluvial, hal tersebut mendorong yang baik sehingga sesuai Kawasan pertanian. Kapanewon Jetis, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Srandakan, Kretek dan

Pundong memiliki sebaran lahan pertanian lebih luas dibandingkan dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang telah lebih banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

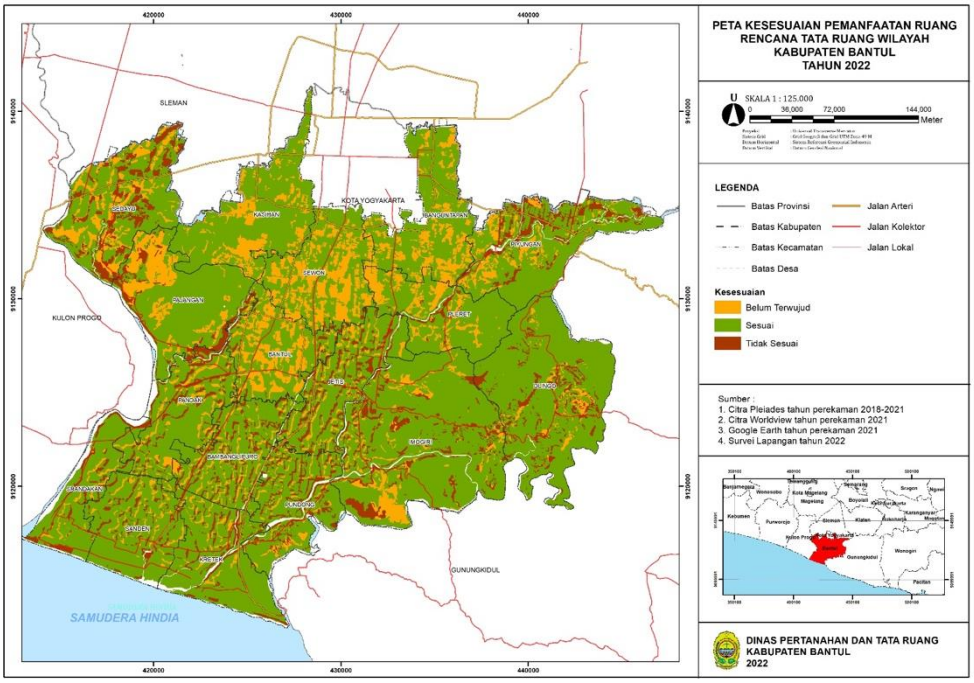

Grafik 2.3.12 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022

Metode penilaian kesesuaian pola ruang keseluruhan dari kawasn lindung dan kawasan budidaya ini dijadikan hasil acuan perwujudan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang. Berdasarkan tabel kesesuaian pemanfaatan ruang yang dianilisi dengan pendekatan penggunaan lahan menunjukan nilai kesesuaian 75,20%. Hal tersebut telah mencapai target yang telah di patok yakni 75,1%. Walaupun secara keseluruhan tercapai , perlu dilakukan peninjauan kembali, penertiban pemanfaatan ruang ataupun sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat ataupun stakeholder terkait. Latar belakang dari masukan tersebut karena nilai kesesuaian pola ruang keseluruhan <85% sehingga menurut Peraturan Menteri Agraria/BPN Tahun Nomor 21 Tahun 2021 nilai kesesuaian tersebut masih belum banyak terwujud dari yang telah direncanakan.

Nilai capaian kesesuaian struktur ruang berdasarkan indikasi program RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebesar 85.59%, artinya pelaksanaan pemanfaatan

ruang sudah sesuai dengan rencana struktur ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Nilai capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada rencana kawasan lindung yakni seluas 6139,69 Ha atau 84,85% telah sesuai dan seluas 1096,39Ha atau 15,15% memiliki pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.

Nilai capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada rencana kawasan budidaya yakni seluas 31.040,26 Ha atau 73,54% telah sesuai dan seluas 7581,14 Ha atau 17,09% rencana tata ruang pada kawasan budidaya belum terwujud serta seluas 3585,75 Ha atau 8,50% memiliki pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Nilai capaian kesesuaian pemanfaatan ruang keseluruhan pada rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yakni seluas 37.179,95 Ha atau 75,20% Ha telah sesuai dan seluas 7581,14 Ha atau 17,09% rencana tata ruang pada kawasan budidaya belum terwujud serta seluas 4682,14 Ha atau 9,47% memiliki pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

Kapanewon dengan kesesuaian tertinggi berada di Kapanewon Imogiri dengan luas kesesuaian 5175,30 Ha dan kesesuaian terendah berada di Kapanewon Srandakan seluas 1323,93 Ha. ingkat kesesuaian pola ruang (gabungan lindung dan budidaya) Kabupaten Bantul tahun 2022 dengan kriteria ‘sesuai’ sebesar 75,20% berdasarkan klasifikasi perwujudan ruang masih dalam kategori belum terwujud artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTR.

Permasalahan :

1. Upaya perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, dimana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha
2. Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan Budidaya dan lindung
3. Terdapat pemanfaatan ruang dengan kriteria ‘belum terwujud” yakni pada kawasan budidaya

Solusi :

1. Untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan melalui rencana tata ruang yang lebih detail

(RDTRK) dengan kajian eksisting dan aturan zonasi,

2. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melengkapi aturan serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara intensif dan berkelanjutan.
3. Pembuatan sistem informasi pengawasan (surveillance) dan monitoring evaluasi penggunaan lahan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai dan sempadan pantai .
5. Penyusunan aturan penggunaan lahan dan pembangunan pada kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
6. Penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Diperlukan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan sehingga perwujudan ruang nantinya dapat sesuai dengan rencana pola ruang.
8. Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap dapat terlaksana perwujudan rencana struktur dan pola ruang; atau dilakukan revisi RTRW Kabupaten Bantul melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.
9. Penetapan lokasi PLP2B sebagai upaya ketahanan pangan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering, LP2B dan LCP2B dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Detail Tata Ruang sehingga terdapat harmonisasi dalam perwujudan dan pengendalian ruang.
10. Penyusunan aturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan permukiman baik di perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya dan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Strategi untuk pencapaian indikator kedepan antara lain :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam peningkatan keterwujudan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bantul.
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan melibatkan beberapa pemangku wilayah dan terdapat jadwal tinjauan lapangan untuk melakukan pengendalian perzinan yang berlaku, menggunakan aplikasi teknologi kamera (drone) yang terhubungkan dengan data base map, sehingga lebih valid dan meminimalisir human error, untuk areal yang relatif tidak luas dan pemnafaatan citra satelit untuk mengcover seluruh kabupaten Bantul.

h. Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan pelaksanaan Misi 4, yaitu “Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL) dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung peroses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah

Tabel 2.3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,88	62,75	62,84	100,14	66,07	95,11

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup,2023)

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2022 sebesar 62,84 (Kategori Sedang) melebihi dari target sebesar 62,75 atau tercapai 100,14% dengan kriteria Sangat Tinggi. Dan capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 66,88.

Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 95,11% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Yang dimaksud Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

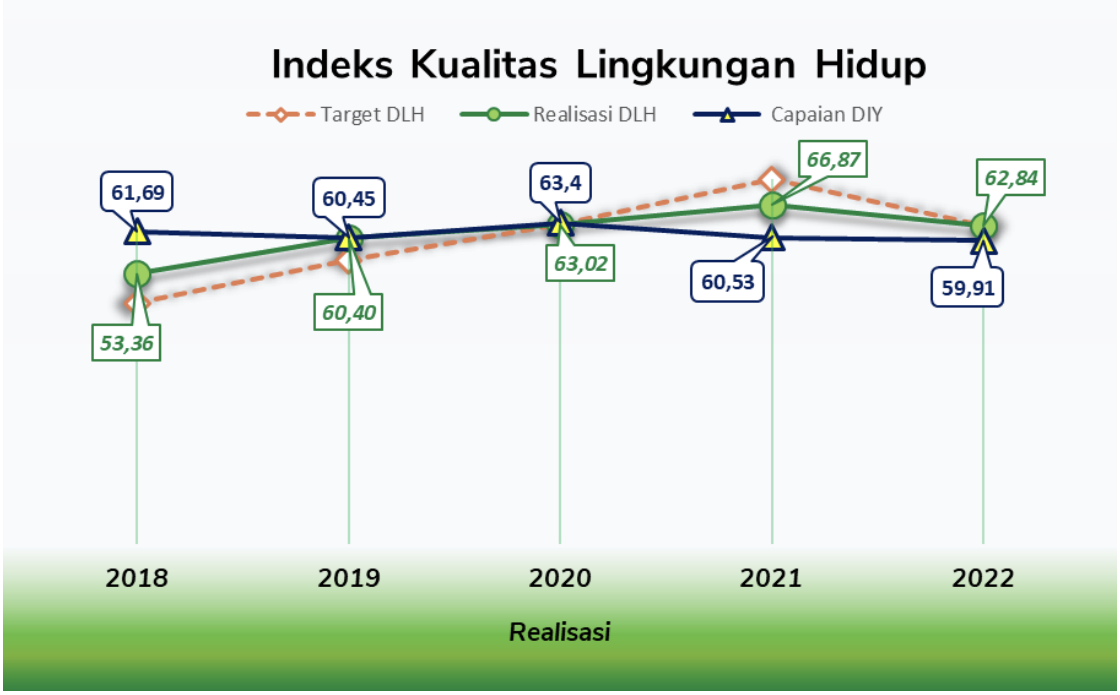

Grafik 2.3.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup,2023*)

Dalam melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai IKLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mendapatkan data primer IKA dan IKU,

sementara untuk IKTL dilakukan penghitungan menggunakan data sekunder.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Memberikan gambaran instrumen/indikator keberhasilan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan dari pengukuran parameter kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau). Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO3-N), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, capaian IKA mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut adalah hasil capaian IKA dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten dan Provinsi :

Tabel 2.3.35 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2019 - 2022

Indikator	**Indeks Kualitas Air**			
Tahun	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Target Kabupaten	45,00	50,00	56,00	40
Target Provinsi	36,49	38,60	40,80	42.50
Realisasi Kab. Bantul	39,63	51,80	56,00	36.67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup,2023

Dari Tabel 2.3.35 diatas dapat dijelaskan bahwa target IKA Kabupaten Bantul diharapkan terus bertambah sehingga kualitas air dapat terjaga. Namun pada kenyatannya pada tahun 2022 realisasi terhadap target tidak dapat terpenuhi karena pada saat dilakukan sampling pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah maupun limbah domestik ke sungai masih cukup tinggi. Secara visual pada saat pemantauan terlihat warna air keruh.

Sumber pencemaran bakteri coliform bersumber dari buangan limbah rumah tangga, buangan septictank, cemaran kotoran hewan ternak dan pupuk. Diperlukan keterlibatan antar OPD dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya target IKA. Pengawasan terhadap limbah domestic yang masuk ke badan sungai, perijinan dari pelaku usaha memberikan pengaruh besar terhadap IKA dengan pemenuhan baku mutu air limbah pada dokumen lingkungan tersebut. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga diatur dalam dokumen perijinan sehingga kualitas air limbah yang dibuang ke badan air telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan dari pengukuran parameter kualitas udara ambien yang berada di Kabupaten Bantul. Dalam pemantauan IKU terdapat pemantauan yang dilakukan bersama-sama dengan KLHK maupun yang dilakukan secara mandiri. Titik sampling pemantauan kualitas udara dilakukan di beberapa sektor antara lain Transportasi, Pemukiman, Perkantoran dan Kawasan Industri. Parameter utama yang diperiksa adalah NO2 dan SO2. Adapun data titik lokasi pemantauan udara disajikan dalam Tabel 2.3.36 berikut :

Tabel 2.3.36 Titik lokasi pemantauan udara untuk penghitungan IKU (Indeks Kualitas Udara)

No	Sektor	Lokasi
1	Transportasi	Pertigaan Jodog, Jl. Srandakan, Bantul
2	Pemukiman	Perumahan Sewon Residense
3	Perkantoran	Komplek Pemda II Manding, Bantul
4	Industri	Kawasan Industri Piyungan / PT. Samitex Sewon

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2023

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, capaian IKU mengalami fluktuasi. Berikut adalah hasil capaian IKU dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten dan Provinsi :

Tabel 2.3.37 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2019 - 2022

Indikator	Indeks Kualitas Udara			
Tahun	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Target Kabupaten	87,73	80,00	90,00	87
Target Provinsi	87,73	88,40	89,07	89.74
Realisasi	85,25	85,18	83,27	86.34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai IKU di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 akan tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2022 yang berarti meningkatnya kualitas udara di Bantul. Sedangkan jika dilihat dari target Kabupaten dan Propinsi masih sedikit di bawah target.

Indeks Kualitas Udara sebesar 86.34 termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.Luas Tutupan Lahan (LTL) pada tahun 2019 - 2022 dihitung dari penjumlahan :

1. Hutan Lindung
2. Hutan Rakyat
3. Ruang Terbuka Hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati. Rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Pada tahun 2022 terdapat komponen luas tutupan lahan baru sesuai dengan PermenPU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan. Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, capaian IKTL fluktuatif. Berikut adalah hasil capaian IKTL dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten :

Tabel 2.3.38 Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2019 - 2022

Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			
Tahun	2019	2020	2021	2022
Target Kabupaten	58,18	52,93	61,20	57
Target Provinsi	58,18	60,86	63,05	66.2
Realisasi	58,20	54,82	55,21	57,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, 2020 dan 2022 realisasi nilai IKTL terhadap target RPJMD Kabupaten dapat tercapai sementara pada tahun 2021 target tidak tercapai. Tidak tercapainya target IKTL pada tahun 2021 dikarenakan terjadinya stagnasi data yang akan dimasukkan sementara target IKTL pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi oleh :

1. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen).
3. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau.
4. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pada tahun 2022 realisasi IKTL terhadap target RPJMD Kabupaten melampaui target tetapi terhadap target Nasional masih dibawahnya. Upaya-upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon

dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan pembangunan RTH.

Gambar 2.3.15 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2022

Permasalahan :

1. Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul;
2. Kondisi darurat sampah TPAS Piyungan sehingga mendorong timbulnya banyak lokasi pembuangan sampah ilegal yang akan memperburuk kualitas air sungai;
3. Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai);
5. Cakupan ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan minimal 20% belum terpenuhi.

Solusi :

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsur pemerintahan, Institusi Polri dan TNI melalui Babinsa dan Babinkamtibnas, Swasta dan Akademisi dan Masyarakat;
2. Sosialisasi secara masif tentang pentingnya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, penguatan kelembagaan pengelola sampah, pembangunan serta sarana dan prasarana;

3. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu;
4. Peningkatan fungsi pengawasan bagi industri terkait dengan pengelolaan limbah;
5. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik;
6. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul;
7. Peningkatan gerakan dan budaya konservasi lingkungan hidup.

i. Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana

Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana menundukung misi ke 4 yaitu "Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana". Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing -masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Nilai IRBI yang dikeluarkan, menggambarkan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, sehingga dapatmenjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat

Tabel 2.3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	181,26	175,51	167,27*	104,69	154,27	91,57

*Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2023, *) Angka Sementara dari aplikasi INARSIK*

Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2022 tercapai 167,27% dari target 175,51% atau nilai capaian 104,70%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 91,57% dari target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 154,27%.

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan instrumen dalam mengukur risiko bencana di suatu wilayah. Indeks Risiko Bencana (IRB) dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indeks Risiko Bencana (IRB) dinilai berdasarkan 3 komponen yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut :

Dimana Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1). Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2). Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3). Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4). Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5). Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6). Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7). Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul tahun 2015-2022 dapat dilihat pada Grafik 2.3.14 berikut:

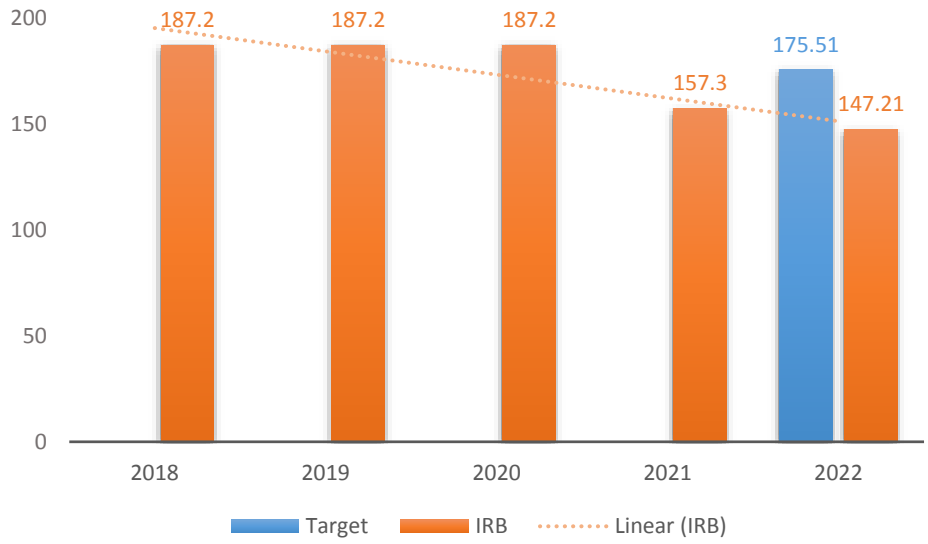

Grafik 2.3.14 Grafik Perkembangan dan Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2023*)

Selama periode 5 tahun, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten termasuk dalam wilayah Kategori Risiko Tinggi. Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun

2022 sebesar 147,21 atau mencapai 116,12%. Keberhasilan ini tidak lepas dari integrasi strategi pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media serta fokus program dan kegiatan dalam peningkatan Kapasitas Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Tabel 2.3.40 Permasalahan, Solusi dan Strategi dalam pencapaian Sasaran Daerah Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tahun 2022

No	Permasalahan	Solusi	Strategi
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	- Penguatan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam Peraturan Kepala Daerah - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana - Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	- Perkuatan sistem pemulihan pasca bencana yang meliputi pemulihan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan sumberdaya alam Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2023

j. Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari amanah tersebut sudah tertuang pada dokumen

RPJMD Kabupaten Bantul, khususnya kesejahteraan tertuang pada Misi kelima " Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel"

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing-masing PPKS merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 08 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS

Tabel 2.3.41 Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	77.844	72.296	73.689	98,07	70.668	95,73

*Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2023, *) Angka Sementara dari aplikasi INARSIK*

Indikator Kinerja Utama Daerah Jumlah Pemerlu Pelayana Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sejumlah 77844 PPKS dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 semester 2 adalah sejumlah 956513 Jiwa, hal ini berarti terdapat persentase 8,14% Jumlah PPKS di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2021. Sedangkan Pada Tahun 2022 Jumlah PPKS di Kabupaten Bantul sejumlah 73689 dengan penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 (data sementara semester 1 2022) adalah semjumlah 964.245 sehingga terdapat persentase sebesar 7,64% jumlah PPKS dibandingkan dengan jumlah Penduduk tahun 2022. Realisasi IKU Jumlah PPKS dari Tahun 2021 ke 2022

mengalalami penurunan 0,44% yang artinya jumlah PPKS tahun 2022 lebih sedikit dari pada tahun 2021. Realisasi tahun 2022 ini telah menyumbang 95,73% dari target akhir RPJMD tahun 2026 dengan target sebesar 70.668 PPKS.

Tabel 2.3.42 Jumlah Pemerlu Pelayana Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 - 2022

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.	34	31	21
2	Anak Terlantar	Seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	1475	1277	574
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.	121	74	6
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	5	6	2
5	Anak dengan Kedisabilitasa n (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	353	352	539
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.	114	2	113

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun		
			2020	2021	2022
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.	114	74	120
8	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	7684	7208	5363
9	Penyandang Cacat/disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	6535	6264	7983
10	Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	24	35	9
11	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	12	32	26
12	Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbaggai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	25	21	19
13	Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	66	133	94
14	Korban Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	47	105	41

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun		
			2020	2021	2022
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kuaalitas hidup yang optimal.	103	77	125
17	Korban Penyalahguna an NAPZA	Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.	21	71	60
18	Korban Trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.	231	113	232
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.	30	49	52
21	Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.	405	495	222
22	Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.		214	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok seharihari.	2865	2714	2667
24	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhandasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	50.609	57299	54539

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun		
			2020	2021	2022
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	1228	1198	882
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.			0
Jumlah			**72101**	**77844**	**73689**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bantul, 2023

Pada Tabel 2.3.42 diatas dapat dilihat rincian per jenis PPKS pada Tahun 2022 terbanyak adalah pada Jenis PPKS Fakir Miskin sebanyak 54539, pada kasus pendataan PPKS dengan jenis Fakir Miskin tersebut belum didapatkan dari data by name by address data fakir miskin sendiri. Hal ini dikarenakan mulai Tahun 2021 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang semula memiliki peringkat dan pengkatergorian desil atas tingkat kesejahteraan sudah tidak lagi terakses. Sehingga Fakir Miskin yang dahulu dapat diambil dari DTKS pada desil 1 tidak dapat lagi dilihat jumlahnya. Pencantuman Jenis Fakir Miskin seperti pada tabel diatas diambul dari KPM penerima Program PKH, hal ini dikarenakan KPM Penerima Program PKH diambil dari tingkat kesejahteraan yang paling rendah, walaupun pada saat ini sudah tidak relevan dikarenakan beberapa KPM PKH telah mengalami peningkatan kesejahteraan namun dikarenakan masih adanya komponen maka masih dapat menerima program tersebut sampai KPM PKH Graduasi.

Dari seluruh Jenis PPKS diatas terdapat jenis PPKS yang masuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial yaitu :

Tabel 2.3.43 Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022

No	Jenis PPKS	Tahun 2022
1	Anak dan Balita Terlantar	595
2	Lanjut Usia Terlantar	5363
3	Penyandang Cacat/disabilitas	8522
4	Gelandangan dan Pengemis	45
	Jumlah	**14525**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2023

Dari empat Indikator Standar Pelayanan Minimal diatsa, nampak Jenis PPKS paling banyak adalah Penyandang Disabilitas yaitu sebanyak 8522 jiwa. Hal ini membuat beberapa kebijakan harus memperhatikan kebutuhan Jenis PPKS Disabitas hal ini sesuai dengan Misi Kelima Bupati Bantul.

Tabel 2.3.44 Rekapitulasi Data Penduduk Miskin Ekstrim per Kapanewon pada Tahun 2022 di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Miskin Ekstrim
1.	Bambanglipuro	969
2.	Banguntapan	1.068
3.	Bantul	2.083
4.	Dlingo	1581
5.	Imogiri	2.566
6.	Jetis	827
7.	Kasihan	2.437
8.	Kretek	953
9.	Pajangan	895
10.	Pandak	1.488
11.	Piyungan	777
12.	Pleret	1.199
13.	Pundong	1.547
14.	Sanden	1.113
15.	Sedayu	1..415
16.	Sewon	1912
17.	Srandakan	1.764
TOTAL		**24.594**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bantul, 2023

Permasalahan yang ada pada penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

1. Pendataan dan Perencanaan

   Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verivikasi dan cleaning data.

2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

   Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu

dengan yang lain, sehingga kebutuhan buffer stokt maupun pelayanan kedaruaratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

3. Kemiskinan

   PPKS adlaah sebaian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaiman individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara by name by adderss, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

4. Sinergitas Penanganan PPKS

   Masih banyak stakeholder dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Solusi dan strategi yang dilaksankan untuk masalah penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

1. Update Pendataan

   Update pendataan dilakukan setiap semester dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan

2. Jaring Pengaman Sosial

   Dalam rangka mengakomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bangtuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring Pengaman Sosial yang telah disah kan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

3. Indikator Kesejahteraan Sosial

   Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobot kesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan magentas kemiskinan.

4. Sinergitas Penanganan PPKS

   Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemisinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan di tingkan semua stake holder agar penanganan dan pemberdayaan kesejahteran menyasar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing.

   Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS

k. Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

Sasaran terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak merupakan bagian dari misi ke 5 yaitu “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel. Perlindungan hak perempuan dan anak perlu diberikan melalui perhatian nyata, konsisten dan sistematik, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peran para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk juga menjadi bagian utama dari indikat`or Sustainable Development Goals (SDGs) dimana semua negara telah bersepakat untuk menanganinya. Di Indonesia, penanganan kekerasan menjadi satu dari tiga prioritas utama pembangunan pemberdayaan perempuan Program Three Ends, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus memberikan upaya yang terbaik bagi perempuan dan anak dalam memastikan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.3.45 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,27	69,36	66,14*	95,36	75,96	87,07
2.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	NINDYA	NINDYA	100,00	KLA	50	NINDYA

*Sumber : Dinas PPPA P2KB, 2023, *)Angka Sementara*

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Variabel Indeks Pembangunan Gender terdiri dari angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan. Dari nilai IPG di Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Grafik 2.3.15) menujukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 95,36. Angka ini menunjukkan pembanguan untuk kesetaraan gender di Kabupaten Bantul semakin seimbang dan merata. Pembangunan Gender mampu memperkecil gap kesejahteraan perempuan dan laki-laki. Kesenjangan Gender di Bantul dalam pambangunan semakin tereliminir.

Capaian Indek Pemberdayaan Gander Kabupaten Kabupaten/kota dan capaian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018 sampai tahun 2022. mengalami fluktuatif. Kabupaten banten Bantul pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sedangkan di tahun 2021 mengalamai kenikan hingga pada tahun 2022.

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarkhi yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki. Sementara itu, peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik/rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi

ranah yang ditujukan untuk laki-laki.

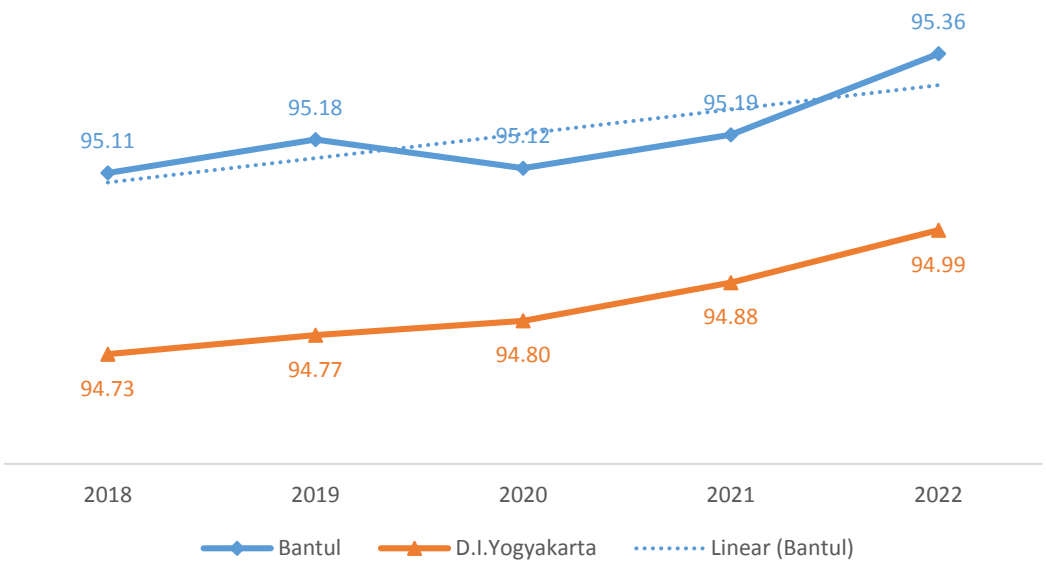

Grafik 2.3.15 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2018 – 2022 (*Sumber : BPS, 2023-https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html)*

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measures (GEMs) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

IDG Kabupaten Bantul (Grafik 2.3.16) berada di angka 65,29 di tahun 2019, 64,78 di tahun 2020, angka 65,27 di tahun 2021 sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 66,14 atau sebesar 95% dibandingkan target tahun 2022 sebesar 69,36. Capaian ini menyumbang sebesar 87,07 jika dibandingkan dengan capaian akhir

tahun RPJMD sebesar 75, 96. Capain ini masih berupa asumsi sebab belum ada rilis dari BPS di tahun 2022. Indeks Pemberdayaan Gender ini masih sangat jauh dari harapan. Keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknisi perempuan masih rendah. Lambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh peran perempuan di dunia politik yang masih membutuhkan perjuangan lebih. Pemberdayaan Gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya adalah berpolitik. Politik menjadi ruang beraktualisasi dan menyampaikan aspirasi terutama untuk kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik diharapkan kebijakan akan lebih responsif gender. Dikabupaten Bantul dari 3 (tiga) bidang yaitu ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Angka yang masih tinggi ketimpangannya di bidang politik.

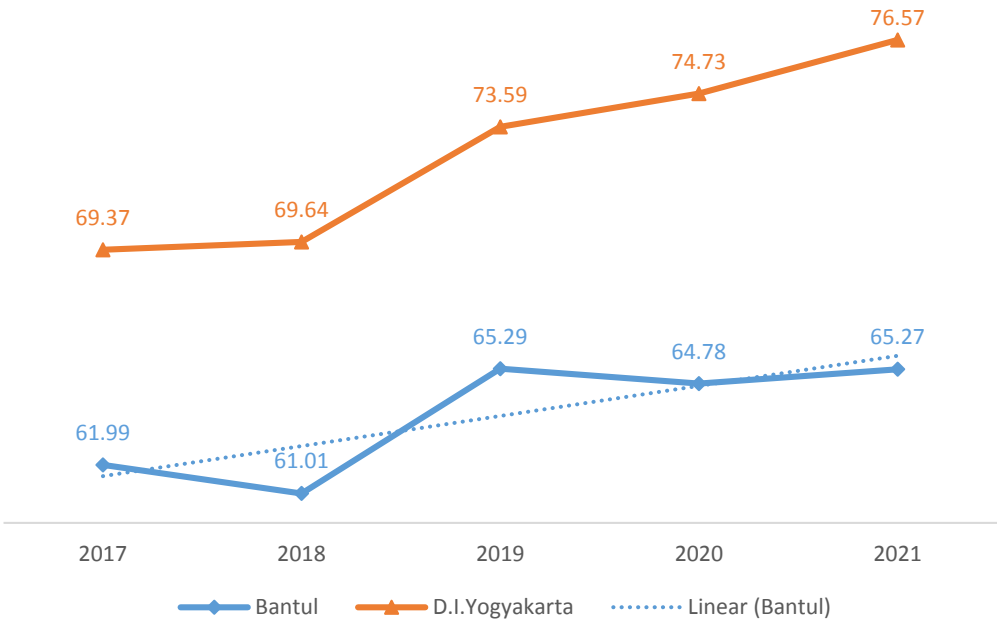

Grafik 2.3.16 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2017 – 2021 (*Sumber : BPS Yogyakarta, 2023-)*

Permasalahan :

- Budaya partiakhi yang masih kental dimasyarakat.
- Zipper System tidak efektif dalam system pemilu dengan mendasarkan pada suara terbanyak

- Kebijakan afirmasi dalam pengisian parlemen yang masih bersifat setengah hati
- Penyelenggaraan pemilu yang relative belum berpespektif gender
- Belum kuatnya sinergias perempuan yang berperan dalam politik dengan organisasi masyarakat
- Program pemberdayaan belum sepenuhnya menjangkau ke semua kelompok ekonomi produktif perempuan

Solusi dan strategi :

- Mendorong dan memberikan kesempatan kepada perempuan dan juga difabel untuk berpatisipasi dalam aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
- Meneguhkan niat dan tekat untuk menjadi perempuan berintegritas dan mendapatkan dukunagn darri keluarga dan lingkungan.
- Meningkatkan dan memperkuat kapasitas, aksesbilitas, partisipasi dan respon perempuan di partai politik
- Meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan melalui berbagai macam pelatihan dan kesempatan usaha.
- Memfasilitasi dan mengembangkan kelompok-kelompok ekonomi produktif melalui pelatihan, pendampingan, memperluas akses jaringan, dan kemudahan usaha.

2) Kategori Kabupaten Layak Anak

Capaian indikator Kategori Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 dari target kategori nindya terealisasi nindya tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan kategori madya, maka capaian 2022 menunjukan peningkatan. Jika di bandingkan dengan target akhir tahun RPJMD tahun 2026 masih ada 2 jenjang yang harus di capai yaitu utama dan Kabupaten Layak Anak(KLA). Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan kategori Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan.
2. Hal sipil dan Kebebasan.

3. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
4. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
5. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
6. Hak Perlindungan khusus
7. Kelana/Dekela

Adapun target dan capaian KLA Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.46 Target dan Capaian KLA Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022		Target Akhir RPJMD
			Target	Capaian	
1	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Madya	Nidya	Nindya	KLA
Nilai KLA		**619,77**	**730**	**715**	**950**

Sumber : Dinas PPPA P2KB, 2023

Kondisi capaian kinerja KLA pada tahun 2022 tercapai dengan kategori "Nidya" dengan nilai 715 atau 97,94% dari target nilai yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 730 atau masih terdapat selisih kurang sebesar 15 point. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta, capaian KLA Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut

Tabel 2.3.47 Target dan Capaian Kategori KLA Kabupaten/ Kota se D.I.Yogyakarta Tahun 2021/ 2022

No.	Kabupaten/Kota	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Yogyakarta	Utama	Utama
2	Sleman	Nindya	Utama
3	Bantul	Madya	Nindya
4	Kulon Progo	Madya	Madya
5	Gunung Kidul	Madya	Madya

Sumer : Dinas PPPbA P2KB, 2023

Capaian kategori KLA Nindya tersebut, tentunya merupakan hasil akumulasi keseluruhan 26 (dua puluh enam) sub indikator KLA yang tersebar dalam 7

indikator. Adapun rincian nilai KLA Kabupaten Bantul per sub indikator pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	PARAMETER/KLUSTER	NILAI TERTINGGI KEMENTERIAN	NILAI BANTUL	NILAI KURANG
A.	Kelembagaan	150	124,5	25,5
	Peraturan/Kebijakan KLA	85	83	2
	Penguatan Kelembagaan KLA	33	25,5	7,5
	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, & Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	32	16	16
B.	Hak Sipil dan Kebebasan	115	70,75	44,25
	Anak yang diregistrasi & mendapat Kutipan Akta	25	25	0
	Informasi Layak Anak (ILA)	40	19,75	20,25
	Partisipasi Anak	50	26	24
C	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	170	133	37
	pernikahan usia Anak	50	28	22
	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	53	38	15
	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	10	10	0
	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	22	22	0
	Ketersediaan Infrastruktur (sarana & prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik	35	35	0
D.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	108,50	41,5
	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	16	11,5	4,5
	Status Gizi Balita	22	17	5
	Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun	34,50	25,50	9

NO	PARAMETER/KLUSTER	NILAI TERTINGGI KEMENTERIAN	NILAI BANTUL	NILAI KURANG
	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	17,5	12,5	5
	Sehat (akses air minum dan sanitasi layak)	25	23,5	1,5
	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) & Larangan Iklan, Promosi & Sponsor (IPS) Rokok	35	18,5	16,5
E.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya	110	73	37
	Wajib Belajar 12 tahun	20	13	7
	Satua Pendidikan Ramah Anak (SRA)	58,5	44,5	14
	Fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak	31,5	15,5	16
6	Perlindungan Khusus	205	131,75	73,25
	Pencegahan dalam Perlindungan Khusus	83	51	32
	Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan & Eksploitasi	17	11	6
	Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) & Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	22	13	9
	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS	17	11	6
	bagi Anak Korban Bencana & Konflik	18	17,25	0,75
	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas & Terisolasi	23	15,50	7,5
	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	7	2	5

NO	PARAMETER/KLUSTER	NILAI TERTINGGI KEMENTERIAN	NILAI BANTUL	NILAI KURANG
	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	11	9	2
	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme & Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	7	2	5
7	Kelana/Delana	100	73,50	26,50
	Kecamatan Layak Anak (Kelana)	21	17,60	3,40
	Desa Layak Anak (Delana)	79	55,90	23,10
	Jumlah Nilai KLA	**1.000**	**715,00**	**285**

Sumber : Dinas PPPA P2KB, 2023

Dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, diharapkan komitmen semua pihak yang terlibat dan harus berkontribusi dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bantul semakin kuat, dimulai dari perencanaan, penetapan, serta pelaksanaan seluruh program pembangunan yang berorientasi pengarusatamaan hak anak (PUHA) dan perlindungan anak.

Pelaksanaan pengarusatamaan hak anak (PUHA) dan perlindungan anak yang dilakukan oleh semua stake holder terkait penyelenggaraan KLA. Berikut adalah capaian indikator KLA pada tahun 2022:

1. Kelembagaan
   a. Ada tidaknya :1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media.

      Jumlah Peraturan dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Anak

No	Kabupaten/ Kota	Regulasi Terkait KLA	Regulasi Terkait Perlindungan Anak	RAD KLA	Profil Anak	Gugus Tugas
1	Bantul	33	12	1	1	1

b. Jumlah Lembaga dan Jumlah Anggaran Kegiatan Perlindungan Anak

No	Kabupaten	2022	
		Jumlah Lembaga	Jumlah Anggaran
1	Bantul	5	Rp. 779.179.745,-

c. Jumlah Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul yang memiliki satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak sebanyak 17 di tingkat Kapanewon dan 75 di tingkat kelurahan

d. Jumlah Organisasi Peduli Anak

Pada tahun 2022 jumlah organisasi peduli anak di Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan Dinas P3APPKB ada sebanyak 6 Organisasi

2. Hak Sipil Dan Kebebasan

Partisipasi anak merupakan salah satu indikator pencapaian Kabupaten Layak Anak. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya wadah bagi anak untuk menyampaikan pendapat mereka. Untuk mencapai pemenuhan hak ini, dibentuk Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak. Pada tahun 2022, di Kabupaten Bantul terdapat 1 Forum Anak Tingkat Kabupaten, 17 Forum Anak di Tingkat Kapanewon, dan 75 Forum Anak di Tingkat Kalurahan

No	Kabupaten	Jumlah Kapanewon	Forum anak Kecamatan	Jumlah Desa	Forum anak desa
1	Bantul	17	17	75	75

3. Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

a. Kasus Perkawinan Anak

Data Tahun 2021 untuk Kabupaten Bantul ada sebanyak 70 kasus pengajuan dispensasi kawin yang dilayani oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul (Data bulan Juni – Desember 2021). Sementara pada tahun 2022 ada sebanyak 140 kasus pengajuan dispensasi kawin yang dilayani.

b. Jumlah Lembaga Konsultasi dan Jumlah Klien

Dinas P3APPKB membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Projotamansari dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi keluarga dalam memenuhi hak-hak anak sehingga dapat mencegah kekerasan pada anak. Pada tahun 2022 ini, PUSPAGA Projotamansari sudah melayani 4 keluarga.

4. Hak Perlindungan Khusus

a. Jumlah PATBM

Jumlah PATBM di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ada sebanyak 6 PATBM yakni Terdiri dari Kalurahan Mulyodadi, Sumbermulyo, Triwidadi, Wukirsari, Gilangharjo, Wijirejo. Di Tahun 2022 ini, bidang P2HA telah mengadakan Pelatihan PATBM untuk 21 Kalurahan.

b. Korban Kekerasan Terhadap Anak yang terlayani di Lembaga Layanan yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)

Di Kabupaten Bantul tahun 2021 terdapat jumlah kekerasan sebanyak 126 kasus anak, dengan prosentase 0,052%. Pada tahun 2022, kasus kekerasan pada anak mengalami penurunan. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 71 kasus dengan prosentase 0,03%.

No	Kabupaten	2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bantul	46	80	126	27	44	71

Pada tahun 2021 jumlah kekerasan seksual sebanyak 62 kasus, jumlah kekerasan psikis sebanyak 39 kasus dan jumlah kekerasan fisik sebanyak 17 kasus. Sementara pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak ada sebanyak 20 kasus, jumlah kekerasan fisik sebanyak 14 kasus, dan jumlah kekerasan psikis sebanyak 26 kasus

No	Jenis Kekerasan	2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Seksual	11	51	62	0	20	20
2	Fisik	11	6	17	8	6	14
3	Psikis	21	18	39	15	11	26

c. Jumlah Anak Korban Trafficking dan Eksploitasi

No	Kabupaten	2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bantul	0	0	0	1	0	1

Pada tahun 2022, ini terdapat satu kasus anak yang menjadi korban eksploitasi

d. Jumlah Anak Terlantar dan Perlakuan Salah

No	Kabupaten	2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bantul	3	4	7	3	7	10

Jumlah anak terlantar pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.

Secara keseluruhan jumlah kasus perlindungan khusus pada anak pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun pada tahun 2022 jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi dan jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya

Permasalahan :

1. Kurangnya keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
2. Kurangnya infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak
3. Masih terbatasnya kesempatan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam kegiatan dalam kegiatan kemasyarkatan
4. Masih maraknya Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan

seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual yang terjadi pada anak.

5. Masih tingginya angka pernikahan dini atau perkawinan anak.

Solusi :

1. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
2. Memperbanyak jumlah Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan ramah terhadap penyandang disabilitas
3. Meningkatkan bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas
4. Meningkatkan system layanan dan perlindungan pada anak baik dari sisi sarana, Kesehatan, psikologi, dan bantuan hukum.
5. Memberikan edukasi dan sosialissi aturan perkawinan.
6. Membentuk komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul.
7. Memaksimalkan Fungsi Gugus Tugas KLA secara penuh (lintas sektor) dengan meningkatkan sistem pendataan yang selalu terbarui terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak di masing-masing OPD Gugus Tugas KLA.
8. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang ramah anak dimulai dari tingkat Desa/Kalurahan seperti pojok baca, ruang bermain ramah anak, rumah ibadah ramah anak, rute aman dan selamat menuju sekolah, kawasan tanpa rokok, serta ruang laktasi di tempat kerja dan tempat umum lainnya.

2.3.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Kabupaten Bantul telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif dimana penentuan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran strategis. Jumlah keseluruhan program kegiatan di tahun 2022 yang mendukung capaian sasaran strategis sebanyak 155 program, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3.48 Rincian jumlah program per

indikator kinerja utama sasaran strategis tersaji pada Tabel 2.3.49.

Tabel 2.3.48 Jumlah Program per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul yang didukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Opini Laporan Keuangan Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	31
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	6
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama sekolah	8
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	2
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	8
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini Tingkat Pengangguran Terbuka Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	47
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur Kesesuaian pemanfataan ruang	22
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	4
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	6
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kategori Kabupaten Layak Anak	10
	Jumlah		**155**

Sumber : RPJMD Kab. Bantul 2021 – 2026, Bappeda

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokasi. Selain itu, kunci penting keberhasilan didalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang luas sehingga program yang demikian beragam dan ekstensif dapat berjalan selaras dan

berinteraksi secara seimbang. Jika hal ini dapat berjalan, maka visi misi yang telah ditetapkan dalam koridor kepentingan rakyat dapat tercapai. Keberagaman program di tahun 2022 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai upaya mewujudkan visi misi tersaji pada Tabel 2.3.49.

Tabel 2.3.49 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN DAERAH	IKU	Program
1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1 Nilai Evaluasi Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		3 Program Perekonomian Pembangunan
		4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
		5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
		6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		7 Program Pengelolaan Arsip
		8 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		9 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		10 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		11 Program Kepegawaian Daerah
		12 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	2 Opini Laporan Keuangan	1 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

SASARAN DAERAH	IKU		Program	
			3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
	3	Nilai Rata- Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	Program Aplikasi Informatika
			2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
			3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
			5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			6	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			2	Program Pelayanan Penanaman Modal
			3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			4	Program Pencatatan Sipil
			5	Program Pendaftaran Penduduk

SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				10	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
				11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	6	Usia Harapan Hidup	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
				6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	7	Angka Harapan Lama Sekolah	1	Program Pembinaan Perpustakaan
				2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				3	Program Pengelolaan Pendidikan
				4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	8	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	9	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
				2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				6	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				7	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				8	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	10	Rasio Gini	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				2	Program Pemasaran Pariwisata
				3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
				4	Program Penanganan Kerawanan Pangan
				5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
				6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				7	Program Pengawasan Keamanan Pangan
				8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
				9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				11	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				12	Program Pengembangan Ekspor
				13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				14	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

SASARAN DAERAH	IKU	Program	
		15	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		18	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		19	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		21	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		24	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		26	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
		27	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
		28	Program Penyuluhan Pertanian
		29	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

SASARAN DAERAH	IKU		Program	
			30	Program Perizinan Usaha Pertanian
			31	Program Promosi Penanaman Modal
			32	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
			33	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			2	Program Hubungan Industrial
			3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			6	Program Penataan Desa
			7	Program Penempatan Tenaga Kerja
			8	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
			10	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
			11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				4	Program Pengembangan Umkm
				5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	13	Indeks kualitas infrastruktur	1	Program Kawasan Permukiman
				2	Program Penataan Bangunan Gedung
				3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
				5	Program Pengelolaan Danpengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				8	Program Pengembangan Permukiman
				9	Program Pengembangan Perumahan
				10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

SASARAN DAERAH	IKU		Program	
			11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			13	Program Penyelenggaraan Jalan
			14	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
			15	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
			16	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			17	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	14	Kesesuaian pemanfataan ruang	1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
			2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
			4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
			5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			6	Program Penatagunaan Tanah
			7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

SASARAN DAERAH		IKU		Program	
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
				3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
				8	Program Pengelolaan Persampahan
				9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	16	Indeks Risiko Bencana	1	Program Penanggulangan Bencana
				2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Program Rehabilitasi Sosial
				2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				5	Program Pemberdayaan Sosial
				6	Program Penanganan Bencana
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
				3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
				4	Program Perlindungan Perempuan
		19	Kategori Kabupaten Layak Anak	1	Program Perlindungan Khusus Anak
				2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				3	Program Pengendalian Penduduk
				4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

SASARAN DAERAH	IKU	Program
		5 Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB)
		6 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Ssumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021 -2026

2.3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.229.822.923.773,00 dan belanja sebesar Rp. 2.453.501.989.507,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 223.679.065.734,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2022 untuk pendapatan sebesar Rp. 2.234.584.500.583,54 realisasi belanja Rp. 224.6481.649.585,13 terdapat surplus pembiayaan Rp. 3.849.949.000,33 Sehingga terdapat Silpa Rp. 215.631.865.732,74,

Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabu[aten Bantul tahun 2022 (sebelum dialkukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel 2.3.50 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Bertambah/(berkurang)	
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	**Pendapatan**	**2.229.822.923.773,00**	**2.234.584.500.583,54**	**4.761.576.810,54**	**100,21**
	Pendapatan Asli Daerah	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80	19.718.414.976,80	103,79
	Pendapatan Transfer	1.702.968.915.377,00	1.686.044.795.991,00	(16.924.119.386,00)	99,01
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000,00	7.967.281.219,74	1.967.281.219,74	132,79
	Surplus / (Defisit)	**(223.679.065.734,00)**	**(11.897.149.001,59)**	**211.781.916.732,41**	**5,32**
B	**Belanja**	**2.453.501.989.507,00**	**2.246.481.649.585,13**	**-207.020.339.921,87**	**91,56**
	Belanja Operasi	1.833.255.482.255,00	1.695.584.348.318,32	(137.671.133.936,68)	92,49
	Belanja Modal	273.235.158.029,00	221.698.419.757,81	(51.536.738.271,19)	81,14
	Belanja Tidak Terduga	36.672.164.883,00	19.683.697.169,00	(16.988.467.714,00)	53,67
	Belanja Transfer	310.339.184.340,00	309.515.184.340,00	(824.000.000,00)	99,73

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Bertambah/(berkurang)	
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
C	**Pembiayaan Daerah**				
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	266.179.065.734,00	259.029.014.734,33	(7.150.050.999,67)	97,31
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	42.500.000.000,00	31.500.000.000,00	(11.000.000.000,00)	74,12
	Pembiayaan Netto	223.679.065.734,00	227.529.014.734,33	3.849.949.000,33	101,72
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	**0,00**	**215.631.865.732,74**	**215.631.865.732,74**	**0,00**

*Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022; data Unaudited BPK RI; *) Pagu Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati. Bantul No.116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022*

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.453.501.989.507,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja.

Alokasi anggaran belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.51 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)	(%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	560.819.252.552	22,86%
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	348.988.767.103	14,22%
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	425.566.077.855	17,35%
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	20.914.446.752	0,85%
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	23.700.158.493	0,97%
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	133.467.572.417	5,44%
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	194.867.476.053	7,94%
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	11.496.376.527	0,47%

9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	9.266.597.954	0,38%
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	19.279.084.730	0,79%
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	15.214.011.144	0,62%
	Jumlah	**1.763.579.821.580**	**71,88%**
	Program/kegiatan pendukung	**689.922.167.927**	**28,12%**
	Total Belanja	**2.453.501.989.507**	**100%**

Sumber : BPKPAD, 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 1.763.579.821.580 atau sebesar 71,88% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 689.922.167.927 atau sebesar 28,12% dari total belanja. Dalam anggaran untuk program/kegiatan pendukung ini terdapat pula anggaran gaji dan tunjangan pegawai.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, yaitu sebesar 22,86 dari total belanja disusul sasaran strategis Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan sebesar 17,35% dan sasaran Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, yaitu sebesar 14,22% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Terwujudnya penurunan risiko bencana sebesar 0,07% dari total anggaran belanja.

Penyerapan belanja pada tahun 2022 sebesar 91,56%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,19%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,52%..

Tabel 2.3.52 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,1315	3,784	91,59	560.819.252.552	521.829.579.991	93,05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100			
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82,5	94	113,94			
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	3,62	111,38			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,1	88,25	100,17			
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	74,01	73,9	99,85	348.988.767.103	330.047.080.635	94,57
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,22	15,48	101,71	425.566.077.855	386.100.174.779	90,73
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembang an budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	4	7	175	20.914.446.752	20.096.903.668	96,09
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100	100	100	23.700.158.493	22.808.316.080	96,24
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	0,360	0,410	86,11	133.467.572.417	107.825.101.925	80,79
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90	3,97	98,21			
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	80,00	83,33	104,16			
7	Terpenuhiny a kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	75,13	73,84	100.18	194.867.476.053	166.755.513.296	85,57
		Kesesuaian pemanfataan ruang	75,13	73,84	98,28			
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,75	62,84	100,14	11.496.376.527	11.154.961.308	97,03
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	175,51	167,27	104,69	9.266.597.954	8.978.054.379	96,89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72.296	73,689	98,07	19.279.084.730	18.863.243.710	97,84
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,36	66,14*	95,36	15.214.011.144	13.723.642.630	90,20
		Kategori Kabupaten Layak Anak	NINDYA	NINDYA	100			
Jumlah						**1.763.579.821.580**	**1.608.182.572.400**	**91,19**
Belanja Pendukung						**689.922.167.927**	**638.299.077.185**	**92,52**
Total Belanja						**2.453.501.989.507**	**2.246.481.649.585**	**91,56**

*Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022; data Unaudited BPK RI; *) Pagu Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati. Bantul No.116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022*

Sisa belanja pada tahun 2022 sebesar 8,44%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Dari sisa belanja tersebut tidak semua adalah efisiensi anggaran karena ada bebrapa kegiatan yang tidak terlaksana antara lain :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Jetis bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 752.500.000,- gagal lelang dikarenakan pada tanggal 13 juli 2022, hasil pengadaan disanggah selanjutnya dilakukan penghentian proses pengadaan di BPBJ karena proses pengadaan melebihi batas akhir waktu entry kontrak di Omspan.
2. Belanja Mebel Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Jetis bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 206.500.000, pengadaan langsung tidak dilaksanakan karena pekerjaan kontruksi Ruang Kelas di hentikan proses pengadaannya.
3. Rehabilitasi Ruang Laboratorium IT SMP N 2 Kasihan bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 220.200.000,- gagal lelang dikarenakan hanya ada 1 penyedia yang memasukan penawaran.
4. Belanja Mebel Rehabilitasi Ruang Laboratorium IT SMP N 2 Kasihan bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 34.800.000,- pengadaan langsung tidak dilaksanakan karena pekerjaan kontruksi ruang Laboratorium di hentikan proses pengadaannya.
5. Pembangunan Sarpras Destinasi Wisata (Pembangunan Agrowisata Bukit

Dermo) bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar 14.353.975.470 gagal dilaksanakan karena proses lelang melebihi batas waktu entri kontrak dalam aplikasi OMSPAN.

Efisiensi anggran diperoleh dari sisa anggran sebesar Rp. 155.397.249.180,- di kurangi anggaran kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak tercapai outputnya sebesar Rp. 15.567.975.470,-. Sehingga Efisiensi tahun 2022 sebesar 139.829.273.710,- atau 7,80%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,93%, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan pada sasaran Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik sebesar 14,43% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan pada sasaran Terwujudnya Perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebesar 2,16%.

Tabel 2.3.53 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)		Sisa Anggaran	Efisensi Anggaran	
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rp	Rp.	%
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	560.819.252.552	521.829.579.991	38.989.672.562	38.989.672.562	6,95
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	348.988.767.103	330.047.080.635	18.941.686.468	18.941.686.468	5,43
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	425.566.077.855	386.100.174.779	39.465.903.076	38.251.903.076	8,99
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	20.914.446.752	20.096.903.668	817.543.084	817.543.084	3,91
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	23.700.158.493	22.808.316.080	891.842.413	891.842.413	3,76
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	133.467.572.417	107.825.101.925	25.642.470.492	11.288.495.022	8,46
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	194.867.476.053	166.755.513.296	28.111.962.757	28.111.962.757	14,43
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	11.496.376.527	11.154.961.308	341.415.219	341.415.219	2,97
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	9.266.597.954	8.978.054.379	288.543.575	288.543.575	3,11

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)		Sisa Anggaran	Efisensi Anggaran	
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rp	Rp.	%
10	Terwujudnya Perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	19.279.084.730	18.863.243.710	415.841.020	415.841.020	2,16
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	15.214.011.144	13.723.642.630	1.490.368.514	1.490.368.514	9,80
Jumlah		**1.763.579.821.580**	**1.608.182.572.400**	**155.397.249.180**	**139.829.273.710**	**7,93**
Program pendukung		**18.752.132.115**	**689.922.167.927**	**51.623.090.742**	**51.623.090.742**	**7,48**
Total Belanja		**2.453.501.989.507**	**2.246.481.649.585**	**207.020.339.922**	**191.452.364.452**	**7,80**

*Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022; data Unaudited BPK RI; *) Pagu Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati. Bantul No.116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022*

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Pusat dapat memberikan Tugas Pembantuan (medebewind) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 900/ 00571/ TAPEM tanggal 30 Januari 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, Tugas Pembantuan pada tahun 2022 tidak dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Telp. (0274) 367509, 367424
Faks. (0274) 368078 Kode Pos 55711 Website http://www.setda.bantulkab.go.id
E-mail : setda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 900 / 00571 / TAPEM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS BUDIRAHARJA, SKM., M.Kes.
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NIP : 196808251991031010

Menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 30 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SETDA

AGUS BUDIRAHARJA, SKM., M.Kes.
NIP. 196808251991031010

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4.1.1**.

Tabel 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1	Buku gambar
		2	Alat mewarnai
		3	Penyediaan biaya personil Peserta Didik
		4	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV
		5	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
2	Pendidikan Dasar	1	Buku teks pelajaran
		2	Perlengkapan belajar
		3	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV
		4	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat
		5	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan
		6	Penyediaan biaya personil peserta didik
		7	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
		8	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C
3	Pendidikan Kesetaraan	1	Modul belajar
		2	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
		3	Penyediaan biaya personil peserta didik
		4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
		5	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
	6 Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat
	7 Perlengkapan belajar
	8 PKBM Terakreditasi minimal C

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target pencapaian SPM bidang urusan pendidikan tahun 2022 ditentukan berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; serta Education Management Information System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Penentuan target tahun 2022 ini berdasarkan jumlah peserta didik hasil unduhan DAPODIK dan EMIS pada semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 pada Triwulan IV tahun 2021. Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan tahun 2022 ditunjukkan pada **Tabel 4.1.2**

Tabel 4.1.2. Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1.	**Pendidikan Anak Usia Dini**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	24.933
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Buku gambar	24.933
	2 . Alat mewarnai	24.933
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	368
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	495
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.842
2 .	**Pendidikan Dasar**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	110.859
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Buku teks pelajaran	110.859
	2 . Perlengkapan belajar	110.859
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	458
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	1.465
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	4.886
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	77.813
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8.165
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	507
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	2.021
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Modul belajar	2.021
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	130
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	271
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	345
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	40
	7 . Perlengkapan belajar	2.021
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	16

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pendidikan Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 4.1.3**

Tabel 4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00%**
1 .	**Pendidikan Anak Usia Dini**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	24.933	24.933	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Buku gambar	24.933	24.933	0	100,00%
	2 . Alat mewarnai	24.933	24.933	0	100,00%
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	368	368	0	100,00%
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	495	495	0	100,00%
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.842	1.842	0	100,00%
2 .	**Pendidikan Dasar**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	110.859	110.859	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Buku teks pelajaran	110.859	110.859	0	100,00%
	2 . Perlengkapan belajar	110.859	110.859	0	100,00%
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala	458	458	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	1.465	1.465	0	100,00%
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	4.886	4.886	0	100,00%
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	77.813	77.813	0	100,00%
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8.165	8.165	0	100,00%
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	507	507	0	100,00%
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	2.021	2.021	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Modul belajar	2.021	2.021	0	100,00%
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	130	130	0	100,00%
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	271	271	0	100,00%
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	345	345	0	100,00%
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17	17	0	100,00%
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	40	40	0	100,00%
	7 . Perlengkapan belajar	2.021	2.021	0	100,00%
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	16	16	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

Tabel 4.1.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan pendidikan pada jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di tahun 2022 dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id, indeks pencapaian SPM bidang urusan pendidikan tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Perbandingan antara realisasi dan target pencapaian jenis pelayanan SPM Bidang Urusan Pendidikan dapat dilihat n pada **Grafik 4.1.1**.

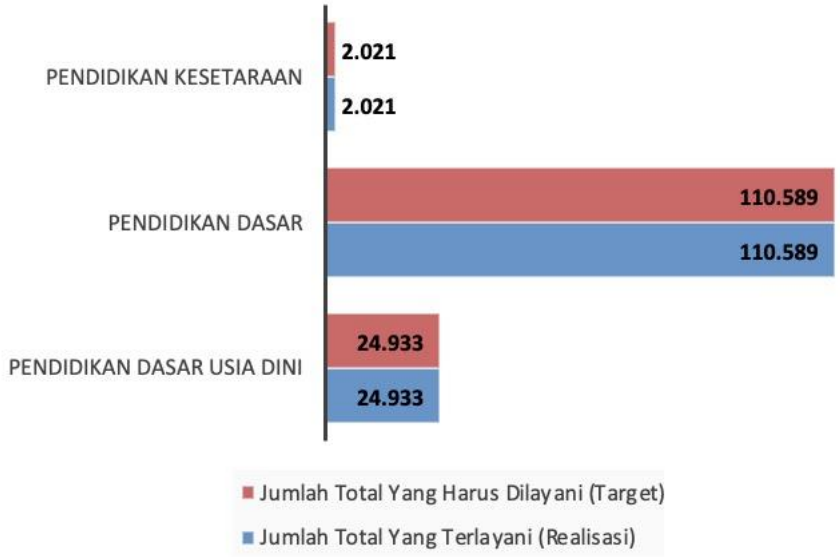

Grafik 4.1.1 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

4.1.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 2.407.676.513.809,00 dengan nilai belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp

2.365.176.513.809,00. Pendanaan atau alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 berdasarkan pagu setelah perubahan ditunjukkan pada **Tabel 4.1.4**.

Tabel 4.1.4 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. BANTUL	2.365.176.513.809			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	742.023.957.633	31,37%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	375.157.321.999		15,86%	50,56%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	272.758.530.202			
A. APBN		**0**			
B. DAK		**272.758.530.202**			
C. LAINNYA		**0**			

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan Tabel 4.1.5

Tabel 4.1.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Aktivitas	Sub Aktivitas	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.124.590.000	21.493.332.900	89,09 %
2	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	17.794.950.000	16.948.500.000	95,24 %
3	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	137.971.770.999	135.082.103.521	97,91 %
4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	26.469.000.000	22.788.400.000	86,09 %
5	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	4.089.725.000	4.032.411.000	98,60 %
6		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan		PROGRAM PENDIDIK DAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas	Perhitungan dan Pemetaan	152.857.184.000	144.401.967.960	94,47 %

No	Aktivitas	Sub Aktivitas	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			
7		Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.050.528.000	1.043.846.125	99,36 %
8		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.697.828.000	4.038.766.558	85,97 %
9		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan	6.101.746.000	4.245.612.914	69,58 %

No	Aktivitas	Sub Aktivitas	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
						Alat Praktik dan Peraga Siswa			
						TOTAL	**375.157.321.999**	**354.074.940.978**	**94,38 %**

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.1.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan ditunjukkan dalam **Tabel 4.1.6** sebagai berikut :

Tabel 4.1.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021

Bidang	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2	S3
ASN												
Kepala Dinas	1				1						1	
Sekretaris Dinas	1				1							1
Sekretariat	49	1	25	20	3		3	33	2	10	1	
Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal	8		5	3				3		5		
Bidang Sekolah Dasar	11		1	9	1			3	1	6	1	

Bidang	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2	S3
Bidang Sekolah Menengah Pertama	9		2	6	1			3		4	2	
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11		3	6	2			3	1	5	1	1
Kelompok Jabatan Fungsional	3443		35	1963	1445			44	52	3079	268	
NON ASN												
Sekretariat	20							12	1	7		
Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal	5							2		3		
Bidang Sekolah Dasar	3									3		
Bidang Sekolah Menengah Pertama	2							1		1		
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1									1		
Total	**3.564**	**1**	**71**	**2.007**	**1.454**	**0**	**3**	**104**	**57**	**3.124**	**274**	**2**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2023), diolah

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat mengakses data warga Kabupaten Bantul yang bersekolah di satuan pendidikan yang berlokasi di luar wilayah administratif Kabupaten Bantul sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki data yang lengkap tentang warga Kabupaten Bantul yang telah terlayani pendidikannya melalui satuan

pendidikan yang berlokasi di luar wilayah Kabupaten Bantul.

- Format tahapan penerapan SPM belum dapat terisi dengan lengkap karena sumber data untuk pengisian format tahapan tidak dapat diperoleh di tingkat kabupaten melainkan bersumber dari platform Rapor Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data yang dapat diakses oleh kabupaten dalam platform Rapor Pendidikan berupa data jadi bukan data mentah yang dapat diolah kabupaten sesuai format tahapan penerapan.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan belum dapat dihitung dengan tepat karena keterbatasan pengumpulan data..

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembiayaan pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan sehingga SPM di daerah dipenuhi melalui program-program pendanaan khusus dari pemerintah pusat yaitu DAK Fisik, DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan, serta BOS. Kendalanya bahwa program dana alokasi khusus dari pemerintah pusat tersebut memiliki petunjuk teknis atau petunjuk operasional terkait peruntukan penggunaannya dan beberapa ketentuan penggunaan dana tersebut belum tegas diarahkan untuk prioritas pemenuhan SPM.

4) Pelaksanaan:

- Jumlah target dan realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan dalam satu tahun anggaran dapat berubah karena melewati perubahan tahun pelajaran dan setiap tahun pelajaran baru terjadi kontraksi jumlah peserta didik.

- Target sesuai batasan umur menemui kendala karena penerapan batasan usia masuk sekolah masih lemah, contohnya anak belum usia masuk sekolah dasar tetapi sudah dapat berpartisipasi di Sekolah Dasar, dan anak

usia lebih dari 15 (lima belas) tahun masih berpartisipasi di Sekolah Menengah Pertama..

b. Solusi

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Information Management System (Emis)..
- Peserta didik yang mengikuti pendidikan di wilayah administratif kabupaten/kota lain dihitung telah memperoleh layanan SPM.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Information Management System (Emis)..
- Koordinasi dengan Tim SPM Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Penggunaan DAK Fisik, DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan, serta BOS sesuai petunjuk teknis dan diupayakan terdapat alokasi untuk pemenuhan pelayanan dasar

4) Pelaksanaan

- Penentuan target tahun 2022 berdasarkan jumlah peserta didik hasil unduhan DAPODIK dan EMIS pada semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 pada Triwulan IV tahun 2021..

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan dilaksanakan di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada pada **Tabel 4.2.1.**

Tabel 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)
		2	Tablet tambah darah
		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin
		4	Kartu ibu/rekam medis ibu
		5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		6	Dokter/dokter spesialis kebidanan
		7	Bidan
		8	Perawat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	Formulir Partograf
		2	Kartu ibu (rekam medis)
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan
		5	Bidan
		6	Perawat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Vaksin Hepatitis B0
		2	Vitamin K1 injeksi
		3	Salep/tetes mata antibiotik
		4	Formulir bayi baru lahir
		5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)
		6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		7	Dokter/dokter spesialis Anak
		8	Bidan
		9	Perawat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)
		3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)
		4	Vitamin A Biru
		5	Vitamin A Merah
		6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella

	Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar
		7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella
		8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)
		9	Peralatan Anafilaktik
		10	Bidan
		11	Dokter
		12	Perawat
		13	Ahli Gizi
		14	Guru PAUD
		15	Kader Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1	Buku raport kesehatanku
		2	Buku pemantauan kesehatan
		3	Kuesioner skrining kesehatan
		4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
		5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah
		6	Dokter/Dokter gigi
		7	Bidan
		8	Perawat
		9	Ahli Gizi
		10	Tenaga Kesehatan Masyarakat
		11	Guru
		12	Kader Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes
		3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		4	Dokter
		5	Bidan
		6	Perawat
		7	Ahli Gizi
		8	Tenaga Kesehatan Masyarakat
		9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol
		2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
		3	Buku kesehatan lansia
		4	Dokter
		5	Bidan
		6	Perawat
		7	Ahli Gizi
		8	Tenaga Kesehatan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
		9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		2	Tensimeter
		3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		4	Dokter
		5	Bidan
		6	Perawat
		7	Tenaga Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet
		2	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		4	Dokter
		5	Bidan
		6	Perawat
		7	Ahli Gizi
		8	Tenaga Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
		2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi
		3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan
		4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)
		2	Reagen Zn TB
		3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
		4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering
		5	Catridge tes cepat molekuler
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)
		8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru
		9	Perawat
		10	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
		11	Penata Rontgen
		12	Tenaga kesehatan masyarakat
		13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang	1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)
		2	Tes cepat HIV (RDT) pertama
		3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar
Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK
	5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
	6	Perawat
	7	Bidan
	8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)
	9	Tenaga kesehatan masyarakat
	10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Penentuan target sasaran layanan pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan pada awal tahun dilakukan melalui proyeksi dengan rumus sesuai ketentuan peraturan teknis. Rumus perhitungan proyeksi sebagaimana disebutkan pada **Tabel 4.2.2**.

Tabel 4.2.2 Rumus perhitungan proyeksi target sasaran per jenis layanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar	Proyeksi Penentuan Target Sasaran
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	$1{,}05\ x\ \Sigma\ bayi\ baru\ lahir\ th\ (n-1)$
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	$1{,}05\ x\ \Sigma\ bayi\ baru\ lahir\ th\ (n-1)$
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\Sigma\ bayi\ baru\ lahir\ th\ (n-1)$
Pelayanan kesehatan balita	$\Sigma\ bayi\ balita\ th\ (n-1)$
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	$\Sigma\ siswa\ kelas\ 1\ (setingkat\ SD)$ dan kelas 7 (setingkat SMP)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	$\Sigma\ usia\ produktif\ menurut\ pendataan\ Program\ Indonesia\ Sehat\ Pendekatan\ Keluarga\ (PISPK)$ th (n-1)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	$\Sigma\ usia\ lanjut\ menurut\ pendataan\ Program\ Indonesia\ Sehat\ Pendekatan\ Keluarga\ (PISPK)$ th (n-1)

Jenis Pelayanan Dasar	Proyeksi Penentuan Target Sasaran
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Σ *penderita hipertensi menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK)* th (n-1)
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Σ *penderita DM menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK)* th (n-1)
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Σ *ODGJ berat lanjut menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK)* th (n-1)
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	$54\%\ x\ (\Sigma\ penduduk\ x\ 71\%)\ x\ 10$
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	75% ibu hamil, pasien TB, pasien IMS dan populasi kunci

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023)

Target sasaran layanan pada awal tahun berdasarkan hasil proyeksi pada **Tabel 4.2.2** dan mutu layanan dapat dilihat pada **Tabel 4.2.3**.

Tabel 4.2.3 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 Berdasarkan Hasil Proyeksi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	14.556
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14.556
	2 . Tablet tambah darah	14.556
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	14.556
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	14.556
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.556

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	27
	7 . Bidan	27
	8 . Perawat	27
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	14.556
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Formulir Partograf	14.556
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	14.556
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.556
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	27
	5 . Bidan	27
	6 . Perawat	27
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	15.958
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Vaksin Hepatitis B0	15.958
	2 . Vitamin K1 injeksi	15.958
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	15.958
	4 . Formulir bayi baru lahir	15.958
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	15.958
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	15.958
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	27
	8 . Bidan	27
	9 . Perawat	27
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	56.954
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	56.954

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	56.954
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	56.954
	4 . Vitamin A Biru	56.954
	5 . Vitamin A Merah	56.954
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	56.954
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	56.954
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	56.954
	9 . Peralatan Anafilaktik	56.954
	10 . Bidan	27
	11 . Dokter	27
	12 . Perawat	27
	13 . Ahli Gizi	27
	14 . Guru PAUD	27
	15 . Kader Kesehatan	75
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	121.590
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Buku raport kesehatanku	121.590
	2 . Buku pemantauan kesehatan	121.590
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	121.590
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	27
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	75
	6 . Dokter/Dokter gigi	27
	7 . Bidan	27
	8 . Perawat	27
	9 . Ahli Gizi	27
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27
	11 . Guru	27
	12 . Kader Kesehatan	27
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	583.791
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	27
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27
	4 . Dokter	27
	5 . Bidan	27
	6 . Perawat	27
	7 . Ahli Gizi	27
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	27
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	135.226
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	135.226
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	135.226
	3 . Buku kesehatan lansia	135.226
	4 . Dokter	27
	5 . Bidan	27
	6 . Perawat	27
	7 . Ahli Gizi	27
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	27
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	69.050

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27
	2 . Tensimeter	27
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27
	4 . Dokter	27
	5 . Bidan	27
	6 . Perawat	27
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	23.441
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	23.441
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27
	4 . Dokter	27
	5 . Bidan	27
	6 . Perawat	27
	7 . Ahli Gizi	27
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	2.301
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	27
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	27

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	27
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	27
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	11.797
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	27
	2 . Reagen Zn TB	11.797
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	27
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	11.797
	5 . Catridge tes cepat molekuler	11.797
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	27
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	27
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	27
	9 . Perawat	27
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	27
	11 . Penata Rontgen	27
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	27
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	27
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	16.008
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	27
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	16.008
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	16.008
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	27
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27
	6 . Perawat	27
	7 . Bidan	27
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	27
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	27
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan I TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan Kabupaten Bantul pada tahun 2022 berdasarkan target sasaran riil sebagaimana sebelumnya disebutkan pada Tabel 4.2.4, ditunjukkan pada pada **Tabel 4.2.4**. sebagai berikut :

Tabel 4.2.4 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			78,67%
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**				**97,21%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77,21%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	10.894	10.514	380	96,512%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10.894	10.894	0	100,00%
	2 . Tablet tambah darah	10.894	10.894	0	100,00%
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	10.894	10.894	0	100,00%
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	10.894	10.894	0	100,00%
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.894	10.894	0	100,00%
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	27	27	0	100,00%
	7 . Bidan	27	27	0	100,00%
	8 . Perawat	27	27	0	100,00%
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**				**99.93%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79,93%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	10.894	10.885	9	99,917%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Formulir Partograf	10.894	10.894	0	100,00%
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	10.894	10.894	0	100,00%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.894	10.894	0	100,00%
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	27	27	0	100,00%
	5 . Bidan	27	27	0	100,00%
	6 . Perawat	27	27	0	100,00%
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**				**86,41%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66,41%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	10.829	8.990	1.839	83.018%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Vaksin Hepatitis B0	10.829	10.829	0	100,00%
	2 . Vitamin K1 injeksi	10.829	10.829	0	100,00%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	10.829	10.829	0	100,00%
	4 . Formulir bayi baru lahir	10.829	10.829	0	100,00%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10.829	10.829	0	100,00%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.829	10.829	0	100,00%
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	27	27	0	100,00%
	8 . Bidan	27	27	0	100,00%
	9 . Perawat	27	27	0	100,00%
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**				**89,66%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69,66%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	57.211	49.818	7.393	87,078%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	57.211	57.211	0	100,00%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	57.211	57.211	0	100,00%
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	57.211	57.211	0	100,00%
	4 . Vitamin A Biru	57.211	57.211	0	100,00%
	5 . Vitamin A Merah	57.211	57.211	0	100,00%
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	57.211	57.211	0	100,00%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	57.211	57.211	0	100,00%
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	57.211	57.211	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9 . Peralatan Anafilaktik	57.211	57.211	0	100,00%
	10 . Bidan	27	27	0	100,00%
	11 . Dokter	27	27	0	100,00%
	12 . Perawat	27	27	0	100,00%
	13 . Ahli Gizi	27	27	0	100,00%
	14 . Guru PAUD	27	27	0	100,00%
	15 . Kader Kesehatan	75	75	0	100,00%
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**				**95,57%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77,16%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	122.027	117.696	4.331	96,451%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18,41%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	92,06%
	1 . Buku raport kesehatanku	122.027	5.770	116.257	4,73%
	2 . Buku pemantauan kesehatan	122.027	122.027	0	100,00%
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	122.027	122.027	0	100,00%
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	27	27	0	100,00%
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	75	75	0	100,00%
	6 . Dokter/Dokter gigi	27	27	0	100,00%
	7 . Bidan	27	27	0	100,00%
	8 . Perawat	27	27	0	100,00%
	9 . Ahli Gizi	27	27	0	100,00%
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100,00%
	11 . Guru	27	27	0	100,00%
	12 . Kader Kesehatan	27	27	0	100,00%
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**				**55,23%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	35,23%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	533.295	234.862	298.433	44,04%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27	27	0	100,00%
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	27	27	0	100,00%
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27	27	0	100,00%
	4 . Dokter	27	27	0	100,00%
	5 . Bidan	27	27	0	100,00%
	6 . Perawat	27	27	0	100,00%
	7 . Ahli Gizi	27	27	0	100,00%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100,00%
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	27	27	0	100,00%
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				**62,39%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	42,82%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	144.640	77.422	67.218	53,527%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,57%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	97,83%
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	144.640	135.226	9.414	93,49%
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	144.640	135.226	9.405	93,50%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Buku kesehatan lansia	144.631	135.226	9.405	93,50%
	4 . Dokter	27	27	0	100,00%
	5 . Bidan	27	27	0	100,00%
	6 . Perawat	27	27	0	100,00%
	7 . Ahli Gizi	27	27	0	100,00%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100,00%
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	27	27	0	100,00%
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**				**29,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	9,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	39.053	4.393	34.660	11,249%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27	27	0	100,00%
	2 . Tensimeter	27	27	0	100,00%
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27	27	0	100,00%
	4 . Dokter	27	27	0	100,00%
	5 . Bidan	27	27	0	100,00%
	6 . Perawat	27	27	0	100,00%
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100,00%
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**				**42,44%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	24,18%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	15.727	4.754	10.973	30,228%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18,26%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	91,28%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	15.727	4.754	10.973	30,23%
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27	27	0	100,00%
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27	27	0	100,00%
	4 . Dokter	27	27	0	100,00%
	5 . Bidan	27	27	0	100,00%
	6 . Perawat	27	27	0	100,00%
	7 . Ahli Gizi	27	27	0	100,00%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100,00%
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**				**87.36%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	67.36%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	2.784	2.344	440	84,195%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	27	27	0	100,00%
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	27	27	0	100,00%
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	27	27	0	100,00%
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27	27	0	100,00%
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	27	27	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**				**98.81%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.81%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	10.399	10.244	155	98,509%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	27	27	0	100,00%
	2 . Reagen Zn TB	11,797	11,797	0	100,00%
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	27	27	0	100,00%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	11.797	11.797	0	100,00%
	5 . Catridge tes cepat molekuler	11.797	11.797	0	100,00%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	27	27	0	100,00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	27	27	0	100,00%
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	27	27	0	100,00%
	9 . Perawat	27	27	0	100,00%
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	27	27	0	100,00%
	11 . Penata Rontgen	27	27	0	100,00%
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	27	27	0	100,00%
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	27	27	0	100,00%
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**				**100,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	18.008	18.008	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	27	27	0	100,00%
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	18.008	18.008	0	100,00%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18.008	18.008	0	100,00%
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	27	27	0	100,00%
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27	27	0	100,00%
	6 . Perawat	27	27	0	100,00%
	7 . Bidan	27	27	0	100,00%
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	27	27	0	100,00%
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	27	27	0	100,00%
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	27	27	0	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023) dan Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Tabel 4.2.4 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan pada jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di tahun 2022 belum dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi

pelaporan SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id, indeks pencapaian SPM bidang urusan kesehatan tahun 2022 sebesar 78,67% dengan kategori Tuntas Pratama. Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian jenis pelayanan SPM Bidang Urusan Kesehatan dapat pada **Grafik 4.2.1**:

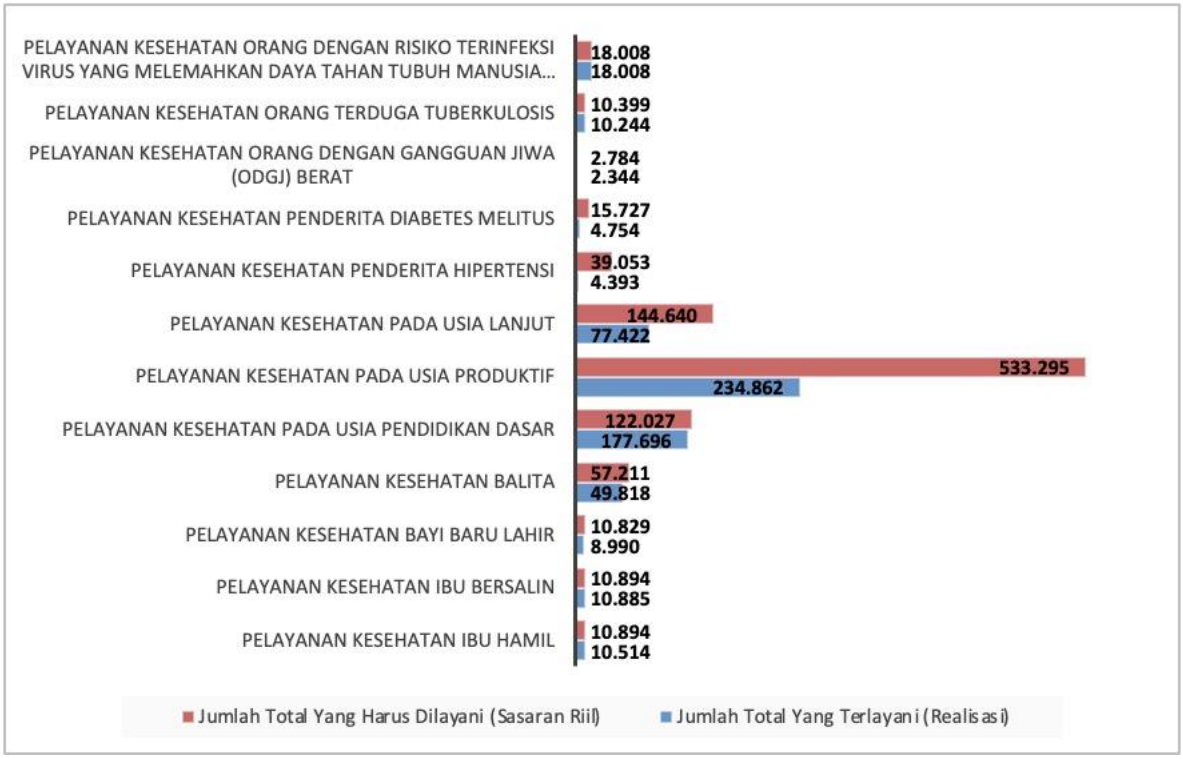

Grafik 4.2.1Perbandingan Realisasi Sasaran dan Sasaran Riil Indikator Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023) dan Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan kesehatan seoptimal mungkin. Sasaran riil setiap jenis layanan SPM terlayani, namun tidak secara menyeluruh sesuai ketentuan standar teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sehingga tidak semua dapat dicatatkan sebagai capaian SPM. **Tabel 4.2.4** dan **Grafik 4.2.1** menunjukkan bahwa realisasi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bantul pada jenis dan mutu layanan belum seluruhnya mencapai 100% dihitung dari persentase sasaran yang terlayani dan jumlah barang yang tersedia, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 96,512% karena terdapat 380 ibu hamil yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan ibu hamil tidak menyadari jika dirinya hamil, dan ibu hamil merasa tidak ada keluhan sehingga datang ke fasilitas kesehatan tidak sejak trimester awal kehamilan

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 99,917% karena terdapat 9 ibu bersalin yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan persalinan tidak dilakukan di fasilitas Kesehatan meskipun tetap dibantu oleh tenaga kesehatan.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 83,018% karena terdapat 1.839 bayi baru lahir yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan KN1 yang tidak terpenuhi terutama dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang tidak tercapai.

d. Pelayanan kesehatan balita.

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 87,078% karena terdapat 7.393 balita yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan banyak balita yang tidak ditimbang sebanyak 8 kali selama setahun dan masih banyak balita yang tidak dinilai tumbuh kembangnya sebanyak dua kali dalam setahun

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 96,451% karena terdapat 4.331 anak usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan sebagian besar skrining (pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar) dilakukan melalui aplikasi mobscreen penjarkes. Aplikasi online ini memerlukan kerjasama dari wali murid dan guru sehingga tergantung pada keaktifan wali murid dan guru. Kendala yang

dialami yaitu terdapat wali murid yang belum bisa menggunakan aplikasi ini atau tidak dapat terkoneksi jaringan internet maupun tidak memiliki perangkat/gawai yang mendukung aplikasi, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dalam melakukan input hasil pemeriksaan kesehatan.

Mutu minimal layanan dasar pada jenis layanan kesehatan pada usia pendidikan dasar untuk jumlah mutu barang buku raport kesehatanku tersedia sesuai standar sejumlah 5.770 buku dari target 122.027 buku, atau tersedia sebesar 4,73%. Sejumlah 116.257 buku belum tersedia karena keterbatasan anggaran dan buku raport kesehatanku sudah diakomodir dalam aplikasi mobscreen penjarkes.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 44,04% karena terdapat 298,433 warga negara usia produktif yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan skrining tidak maksimal (masih diberlakukannya PPKM pada tahun 2022 sehingga skrining dilakukan jika telah mendapat izin pelaksanaan pertemuan), pelayanan kesehatan pada usia produktif di dalam gedung juga tidak maksimal karena jumlah kunjungan ke puskesmas menurun, serta pencatatan dan pelaporan belum maksimal karena keterbatasan jumlah SDM dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) skrining.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 53,527% karena terdapat 67,218 warga negara usia lanjut yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan lansia tidak aktif ke posyandu atau ke puskesmas karena lansia masih aktif bekerja.

Dikarenakan keterbatasan anggaran, mutu minimal layanan dasar pada jenis layanan kesehatan pada usia lanjut untuk jumlah mutu barang tertentu tidak dapat tersedia 100%, yaitu pada mutu barang:

- Selama Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol, tersedia sesuai standar

sejumlah 135.226 buah dari target 144.640 buah, atau tersedia sebesar 93,49% (sejumlah 9.414 buah belum tersedia).

- *Instrumen Geriatric Depression Scale* (GDS), *Intrumen Abbreviated Mental Test* (AMT) dan *Instrumen Activity Daily Living* (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G), tersedia sesuai standar sejumlah 135.226 buah dari target 144.631 buah, atau tersedia sebesar 93,50% (sejumlah 9.405 buah belum tersedia).
- Buku kesehatan lansia tersedia sesuai standar sejumlah 135.226 buah dari target 144.631 buah, atau tersedia sebesar 93,50% (sejumlah 9.405 buah belum tersedia).

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 11,249% karena terdapat 34.660 warga negara penderita hipertensi yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan kepatuhan kontrol pasien penderita hipertensi di puskesmas masih rendah, serta kerja sama dengan jejaring fasyankes di luar puskesmas/swasta belum maksimal, sehingga pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi yang mengakses fasyankes di luar puskesmas/swasta belum terdata dengan optimal.

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 30,228% karena terdapat 10.973 warga negara penderita diabetes melitus yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pasien diabetes melitus untuk kembali kontrol ke puskesmas, serta kerja sama dengan jejaring fasyankes di luar puskesmas/swasta belum maksimal, sehingga pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi yang mengakses fasyankes di luar puskesmas/swasta belum terdata dengan optimal.

Mutu minimal layanan dasar pada jenis layanan kesehatan penderita diabetes melitus untuk jumlah mutu barang Glukometer, Strip Tes Gula Darah,

Kapas Alkohol, Lancet tersedia sesuai standar sejumlah 4.754 buah dari target 15.727 buah, atau tersedia sebesar 30,23%. Sejumlah 10.973 buah belum tersedia karena keterbatasan anggaran

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 84,195% karena terdapat 440 orang dengan gangguan jiwa berat yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah akibat stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa, serta kurangnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan jiwa.

k. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Persen jumlah total yang terlayani sesuai standar sebesar 98,509% karena terdapat 155 orang terduga tuberculosis yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, disebabkan orang terduga tuberculosis yang sudah terjaring oleh layanan tidak kembali mengumpulkan dahak, hal ini menyebabkan terduga tidak mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai kriteria standar pelayanan minimal.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 2.407.676.513.809,00 dengan nilai belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.365.176.513.809,00. Pendanaan atau alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan pagu setelah perubahan ditunjukkan pada **Tabel 4.2.5**.

Tabel 4.2.5 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. BANTUL	2,365,176,513,809			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	468.908.401.354	19,83%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	12.933.252.700		0,55%	2,76%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	11.674.763.168			
A. APBN		**0**			
B. DAK		**11.674.763.168**			
C. LAINNYA		**0**			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan pada pada **Tabel 4.2.6**.

Tabel 4.2.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022Sasaran/Penerima Layanan Per Jenis Layanan Kesehatan yang Dilaksanakan Oleh Puskesmas)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	458.428.400	436.834.150	95,29%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
	KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota					
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	748.202.500	196.554.500	26,27%
3.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	76.051.000	72.301.000	95,07%
4.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	388.332.500	366.090.500	94,27%
5.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	238.822.500	181.685.000	76,08%
6.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	209.108.500	199.468.700	95,39%
7.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	336.922.000	331.248.250	98,32%
8.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	77.862.500	75.412.500	96,85%
9.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	55.760.000	46.910.000	84,13%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
10.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	89.237.500	84.925.000	95,17%
11.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	130.250.000	120.650.000	92,63%
12.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	113.000.000	111.000.000	98,23%
13.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1.767.170.432	1.639.314.724	92,76%
14.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	3.264.887.264	2.941.984.095	90,11%
15.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	3.655.049.988	3.652.008.217	99,92%
16.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1.324.167.616	1.296.089.739	97,88%
				TOTAL	**12.933.252.700**	**11.752.476.375**	**90,87%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.2.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan ditunjukkan dalam Tabel 4.2.7.

Tabel 4.2.7 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bidang	Jumlah	Golongan					Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	VII	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2 & Profesi setara S2	S3
ASN													
Kepala Dinas	1				1							1	
Sekretaris Dinas	1				1							1	
Sekretariat	24		7	15	2				8	8	5	3	
Bidang Kesehatan Masyarakat	17		1	13	3				2	4	8	3	
Bidang Penanggulangan Penyakit	20		1	16	3				3	5	7	5	
Bidang Pelayanan Kesehatan	11			8	3					6	2	3	
Bidang Sumber Daya Kesehatan	21		3	15	3				3	9	2	6	1
UPTD Jamkesda	5			3	2					2	1	2	
UPTD Labkesda	10			7	2	1				5	4	1	
Puskesmas dan RSUD Saras Adyatma	1,060	2	300	668	89	1	1	8	54	704	87	206	
NON ASN													
Sekretariat	10								1	1	8		
Bidang Kesehatan Masyarakat	2									1	1		

Bidang	Jumlah	Golongan					Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	VII	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2 & Profesi setara S2	S3
Bidang Penanggulangan Penyakit	5										5		
Bidang Pelayanan Kesehatan	3									2	1		
Bidang Sumber Daya Kesehatan	8								3	2	3		
UPTD Jamkesda	7								2	2	2	1	
UPTD Labkesda	5								2	1	2		
Puskesmas dan RSUD Saras Adyatma	337						4	11	105	122	73	22	
Total	**1,547**	**2**	**312**	**745**	**109**	**2**	**1**	**8**	**70**	**743**	**116**	**231**	**1**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023), diolah

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data

- Pengumpulan data masih menggunakan sumber data dan instrumen data yang bervariasi (belum ada standardisasi):
- Digital *Goverment Service* (DGS) yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) di puskesmas se-Kabupaten Bantul belum mampu mewadahi semua elemen yang diperlukan dalam laporan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Puskesmas:
  - untuk pelayanan kesehatan ibu hamil menggunakan aplikasi sipia yang datanya telah terintegrasi dengan seluruh fasyankes di DIY, sehingga dapat dipantau standar pelayanan yang diperoleh ibu hamil. Namun ketaatan pengisian data fasyankes swasta masih rendah sehingga masih diperlukan pemantauan wilayah setempat oleh bidan pembina kelurahan;
  - untuk ibu bersalin, bayi dan balita, data diperoleh dari hasil pemantauan wilayah setempat oleh puskesmas yang telah diinput

dalam web kesga DIY;

- data pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar diperoleh data mobscreen;
- data pelayanan usia produktif, diabetes melitus, hipertensi, ODGJ diambil dari Digital Goverment Service (DGS).

- Data sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan menggunakan data proyeksi Kabupaten, sehingga ditemui kesulitan untuk memerinci data proyeksi tersebut menjadi data per kalurahan/desa sesuai lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
- Terdapat deviasi yang tinggi terhadap data berdasarkan NIK dan data berdasarkan domisili.
- Kendala *bridging* data NIK karena pembatasan akses data kependudukan oleh pemerintah.

2) Penghitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan belum dapat dilakukan secara tepat karena kesulitan mendapatkan data kebutuhan per layanan.
- Belum terdapat petunjuk teknis yang jelas tentang kebutuhan sumber daya manusia bidang kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan SPM.

3) Perencanaan dan penganggaran

- Perencanaan anggaran belum berdasarkan pada perhitungan pembiayaan (cost) per sasaran SPM.
- Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan mutu minimal layanan dasar pada jenis layanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia lanjut, hipertensi, dan diabetes melitus sehingga penyediaan barang untuk pemenuhan mutu minimal layanan dasar belum mencukupi target.
- Terdapat pemetaan sub kegiatan baru dan diakomodir dalam SIPD pada bulan Oktober sehingga terdapat anggaran yang seharusnya masuk ke

dalam nomenklatur subkegiatan SPM menjadi dilaksanakan pada Subkegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

4) Pelaksanaan

- Terjadi perubahan target sasaran karena target sasaran di awal tahun 2022 merupakan angka proyeksi yang selanjutnya diubah dan ditetapkan menurut sasaran riil pada tahun 2022 yang dilayani oleh fasilitas kesehatan berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang dilaksanakan oleh Puskesmas, data Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK), dan data Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM).
- Sasaran riil terlayani oleh fasyankes, namun tidak semua terlayani secara menyeluruh sesuai standar teknis Permenkes No. 4 Tahun 2019, sehingga tidak semua dapat dicatat sebagai capaian SPM. Contoh. ibu hamil terlayani di puskesmas tetapi ibu hamil melewatkan pemeriksaan pada trimester awal kehamilan karena tidak terdapat keluhan atau tidak mengetahui dirinya hamil, sehingga ibu hamil meskipun telah terlayani kebutuhan dasarnya di puskesmas tetapi tidak dapat dihitung sebagai capaian SPM karena melewatkan pemeriksaan trimester awal kehamilan.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber data dan instrumen data yang ada, terutama dengan adanya kesulitan untuk bridging dengan data kependudukan.

2) Penghitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan pelayanan SPM dilakukan dengan mengkalikan capaian dengan unit cost per layanan yang dilakukan oleh masing-masing puskesmas.

3) Perencanaan dan penganggaran

- Koordinasi dengan pemerintah kalurahan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembelian BMHP dan reagen pemeriksaan.

4) Pelaksanaan

- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- Koordinasi dan konsultasi kepada Tim Penerapan SPM Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada **Tabel 4.3.1**.

Tabel 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

	Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)
		2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)
		3	Jaringan perpipaan
		4	Jaringan bukan perpipaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik
		2	Kualitas pelayanan air limbah domestik
		3	Sub-Sistem pengolahan setempat
		4	Sub-sistem pengangkutan
		5	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)
		6	Pengolahan lumpur tinja (IPAL)

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.3.2

Tabel 4.3.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	336.646
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	60
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100
	3 . Jaringan perpipaan	54.397
	4 . Jaringan bukan perpipaan	216.263
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	336.646
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	15.840
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	100
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	318.072
	4 . Sub-sistem pengangkutan	1
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	1

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul pada tahun 2022 ditunjukkan padaTabel 4.4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			98,80%
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**				**97,60%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	336.646	336.646	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17,60%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	88,00%
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	60	42	18	70,00%
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	82	18	82,00%
	3 . Jaringan perpipaan	54.397	54.397	0	100,00%
	4 . Jaringan bukan perpipaan	216.263	216.263	0	100,00%
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	336.646	336.646	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	15.840	15.840	0	100,00%
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	100	0	100,00%
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	318.072	318.072	0	100,00%
	4 . Sub-sistem pengangkutan	1	1	0	100,00%
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	0	100,00%
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	1	1	0	100,00%

Sumber: Laporan Triwulan IV pada https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

Tabel 4.4.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum pada jenis pelayanan dasar di tahun 2022 dapat direalisasikan 100% dan terdapat 2 (dua) mutu pelayanan dasar pada jenis layanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari yang belum dapat tersedia 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id, indeks pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum tahun 2022 sebesar 98.80% dengan kategori Tuntas Utama. Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian jenis pelayanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat Grafik 4.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

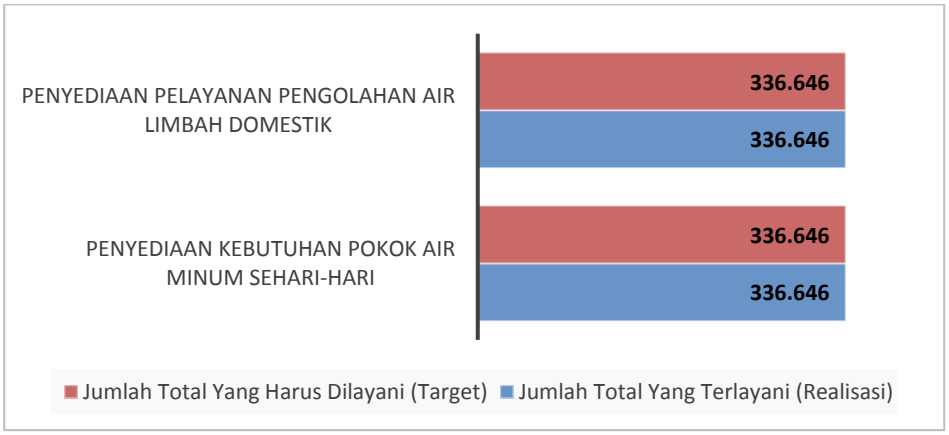

Grafik 4.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022
Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum seoptimal mungkin. Target setiap jenis layanan SPM terlayani, namun terdapat 2 (dua) mutu mutu pelayanan dasar pada jenis layanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari yang belum dapat tersedia 100%. Hal ini dikarenakan faktor sebagai berikut:

1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)

   Mutu minimal tersedia sesuai standar sejumlah 48 liter/orang/hari dari target 60 liter/orang/hari, atau tersedia sebesar 70.00%. Sejumlah 18 liter/orang/hari belum tersedia karena pemenuhan kebutuhan pokok rata-rata baru mencapai 42 liter/orang/hari. Masih terdapat selisih dengan standar kebutuhan minimal yang akan terus diupayakan untuk dapat dipenuhi

2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)

   Mutu minimal kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) sebesar 82% tersedia sesuai standar dari target 100%. Sejumlah 18% belum tersedia karena kualitas air belum sepenuhnya tercapai sesuai standar.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 2.407.676.513.809,00 dengan nilai belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.365.176.513.809,00. Pendanaan atau alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 berdasarkan pagu setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.3.3

Tabel 4.3.3 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. BANTUL	2.365.176.513.809			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	176.659.918.045	7,47%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	18.459.527.676		0,78%	10,45%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	13.100.173.000			
	A. APBN	500.000.000			
	B. DAK	12.600.173.000			

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
	C. LAINYA	0			

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023. diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.3.4 berikut.

Tabel 4.3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	536.797.032	417.421.882	77,76%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	136.300.000	119.515.000	87,69%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	10.800.000	10.800.000	100,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		2.587.450.000	2.562.431.500	99,03%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	4.425.800.000	4.007.874.000	90,56%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		445.566.000	417.276.000	93,65%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
	AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		1.194.800.000	1.190.000.000	99,60%
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	558.972.032	295.479.882	52,86%
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	109.450.000	105.790.500	96,66%
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	2.199.300.000	1.965.977.000	89,39%
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	1.460.600.000	1.460.600.000	100,00%
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		144.467.500	142.345.000	98,53%
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	557.982.000	557.982.000	100,00%
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		634.618.112	608.391.310	95,87%
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	3.456.625.000	3.377.581.000	97,71%
				TOTAL	**18.459.527.676**	**17.239.465.074**	**93,39%**

Sumber: Laporan Triwulan IV pada https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.3.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai Dinas PUPKP yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam Tabel 4.3.5

Tabel 4.3.5 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bidang	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2	S3
ASN												
Kepala Dinas	1				1						1	
Sekretaris Dinas	1				1						1	
Sekretariat	23	3	13	7	0	3	3	15			2	
Bidang Bina Marga	14	1	4	7	2	1	1	7	1	2	2	
Bidang Cipta Karya	10			8	2			2		4	4	
Bidang Sumber Daya Air	10		3	6	1			4		4	2	
Bidang Bina Konstruksi	12		3	8	1			7		4	1	
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	6	1	2	3		1		4		1		
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	6		5		1		2	3			1	
Arsiparis/JFT	1		1						1			
NON ASN												
Sekretariat	14							9	1	4		
Bidang Bina Marga	4							4				
Bidang Cipta Karya	14							6	1	7		
Bidang Sumber Daya Air	12							7		5		
Bidang Bina Konstruksi	3							2		1		
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	17							17				

Bidang	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2	S3
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	20							18	2			
Total	**168**	**5**	**31**	**39**	**9**	**5**	**6**	**105**	**6**	**32**	**14**	**0**

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023), diolah

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data

- Kegiatan pengumpulan data sesuai dengan format Permendagri No. 59 Tahun 2021 belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

2) Penghitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan belum dapat dilaksanakan secara memadai dikarenakan kegiatan pengumpulan data belum optimal.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Penganggaran belum dapat dipenuhi sesuai perencanaan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

4) Pelaksanaan

- Realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik/tender tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan karena pemilihan penyedia barang/jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai periodesasi waktu yang direncanakan sehingga menghambat rencana pemenuhan akses air minum dan air limbah.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data.

2) Penghitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM didasarkan atas pengumpulan data dasar.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Mengoptimalkan sinergitas pemangku kepentingan pada semua level mulai dari kalurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, pusat maupun pihak swasta dalam pelaksanaan pemenuhan penyediaan pelayanan air minum dan pengolahan air limbah domestik.

4) Pelaksanaan

- Melakukan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan pemangku kepentingan terkait supaya proses pemilihan penyedia dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah direncanakan.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel **4.4.1**.

Tabel 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
		2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
		3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana
		4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
		2	Subsidi uang sewa
		3	Penyediaan rumah layak huni

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat Kabupaten Bantul tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 4.4.2.

Tabel 4.4.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1 .	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	3
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	0
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0
	2. Subsidi uang sewa	0
	3. Penyediaan rumah layak huni	0

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.4.3

Tabel 4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1 .	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				**20,00%**
		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	3	0	3	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				100,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0%
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3	0	3	0%
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	0%
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0%
	2. Subsidi uang sewa	0	0	0	0%
	3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0%

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

Tabel 4.4.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat pada jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di tahun 2022 dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id, indeks pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian jenis pelayanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada **Grafik 4.4.1**.

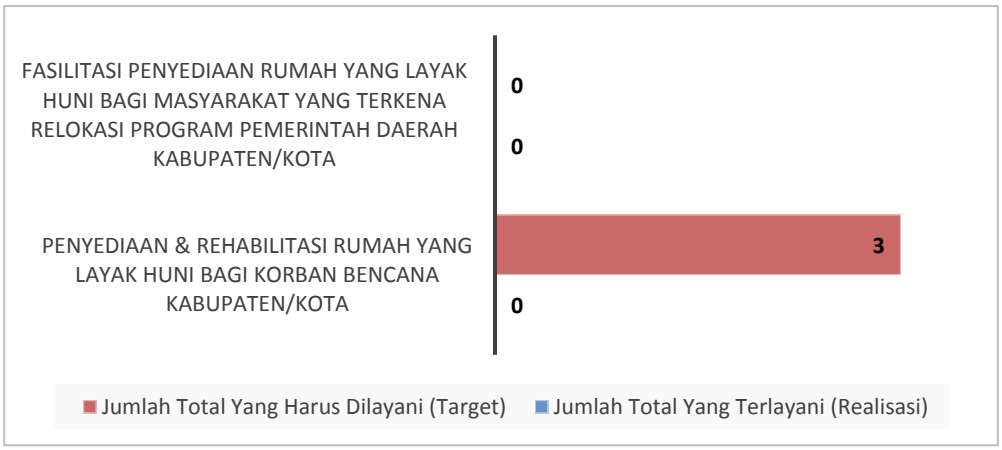

Grafik 4.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Pada tahun 2022 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, namun Pemerintah Kabupaten Bantul tetap mengalokasikan anggaran bagi jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. Karena tidak terjadi bencana yang mengakibatkan rehabilitasi rumah korban, capaian dihitung 100%. Pada tahun 2022 juga tidak terdapat program Pemerintah Kabupaten Bantul yang mengakibatkan relokasi rumah warga masyarakat, sehingga capaian dihitung 100%.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 2.407.676.513.809,00 dengan nilai belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.365.176.513.809,00. Pendanaan atau alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 berdasarkan pagu setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.4.4

Tabel 4.4.4 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Tahun Anggaran 2022

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. BANTUL	2.365.176.513.809			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	176.659.918.045	7,47%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	328.300.000		0,01%	0,19%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	0			
	A. APBN	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINYA	0			

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.4.5**.**

Tabel 4.4.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	108.900.000	93.906.000	86,23%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	108.900.000	94.017.000	86,33%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	110.500.000	0	0,00%
				TOTAL	**328.300.000**	**187.923.000**	**57,24%**

Sumber: Laporan Triwulan IV pada https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

Pada sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dari pagu Rp 110.500.000,00 tidak terdapat realisasi dan alokasi anggaran kembali ke Kas Daerah karena pada tahun 2022 tidak terdapat kejadian bencana yang mengakibatkan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

4.4.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai Dinas PUPKP yang terlibat

dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat ditunjukkan dalam Tabel 4.4.6.

Tabel 4.4.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bidang	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2	S3
ASN												
Bidang Perumahan dan Permukiman	7		2	4	1			2		3	2	
UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permukiman	3		1	2				1		2		
NON ASN												
Bidang Perumahan dan Permukiman	3							3				
UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permukiman	51							42		9		
Total	**64**	**0**	**3**	**6**	**1**	**0**	**0**	**48**	**0**	**14**	**2**	**0**

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023), diolah

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data

- Pengumpulan data sesuai format Permendagri No. 59 Tahun 2021 belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan kesulitan untuk mengakses data kependudukan (NIK) karena adanya pembatasan akses dari Pusat.

2) Penghitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan terutama pada jenis layanan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sulit untuk dilakukan karena bencana sifatnya tidak terduga.
- Penghitungan kebutuhan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana

bisa dilaksanakan jika terjadi bencana, sehingga target layanan dapat ditentukan dan dapat ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

3) Pelaksanaan

- Penganggaran belum dapat dipenuhi sesuai perencanaan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

4) Pelaporan

- Pelaksanaan SPM belum optimal karena terkendala kewenangan yang baru berpindah dari BPBD ke Dinas PUPKP.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Segera melakukan pendataan apabila terjadi bencana.
- Pengumpulan data dilakukan melalui sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota dan sub kegiatan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan.

2) Penghitungan kebutuhan

- Mengalokasikan anggaran bagi jenis layanan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Segera melakukan perhitungan kebutuhan apabila terjadi bencana.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan yang terkait bidang kebencanaan untuk ketersediaan anggaran penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang sewaktu-waktu kebencanaan bisa terjadi.

4) Pelaksanaan

- Koordinasi intensif dengan BPBD.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas 3 (tiga) sub urusan yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4.5.1**.

Tabel 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar Per Sub Urusan dan Mutu Pelayanan Dasar Per Sub Urusan Pada SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM TRANTIBUM			
Jenis Pelayanan Dasar		**Mutu Pelayanan Dasar**	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil
		2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan
		3	Standar operasional prosedur Satpol PP
		4	Standar sarana prasarana Satpol PP
		5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat
		6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
SPM KEBENCANAAN			
Jenis Pelayanan Dasar		**Mutu Pelayanan Dasar**	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana
		2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana

		3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana
		4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana
		5	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	1	Sarana prasarana penanggulangan bencana
		2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
		2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana
		3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana
		4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas
		5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana
SPM DAMKAR			
Jenis Pelayanan Dasar		**Mutu Pelayanan Dasar**	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi
		2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
		3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
		4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia
Sumber: Laporan Triwulan IV pada https://spm.bangda.kemendagri.go.id/			

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2022 ditunjukkan pada **Tabel 4.5.2**.

Tabel 4.5.2 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

SPM TRANTIBUM		
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	600
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	36
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	11
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2.550
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0
SPM KEBENCANAAN		
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	8.500
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	8.500

	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	11
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	65
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	30
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**	
		Ya Terjadi Bencana
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	1.852
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1.852
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1.852

SPM DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	285
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan

	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	126
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	20
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2023) dan BPBP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 4.5.3**.

Tabel 4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

	TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS				**98,33%**
SPM TRANTIBUM					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			95,00%
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				**95,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	600	600	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75,00%
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan	0	0	0	0%

	kerugian pelayanan pengobatan				
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	36	36	0	100,00%
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	11	11	0	100,00%
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2,550	2,550	0	100,00%
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	0	0%

SPM KEBENCANAAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	8.500	8.500	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100,00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	0	100,00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	8.500	8.500	0	100,00%

	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	11	11	0	100,00%
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1	1	0	100,00%
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	100	100	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	65	65	0	100,00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	30	30	0	100,00%
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				**100.00%**
			Ya Terjadi Bencana		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	1.852	1.852	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%

	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100,00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1.852	1.852	0	100,00%
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	0	100,00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100,00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1.852	1.852	0	100,00%

SPM DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	285	285	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	126	126	0	100,00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	100,00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	20	20	0	100,00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan	100	100	0	100,00%

	penyelamatan/Sumber Daya Manusia

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2023) dan BPBP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

Tabel 4.5.2 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada jenis pelayanan dasar di tahun 2022 dapat direalisasikan 100% dan terdapat 3 (tiga) mutu pelayanan dasar pada sub urusan trantibum yang belum tersedia. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id, indeks total pencapaian SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 sebesar 98.33% dengan rincian capaian Sub Urusan Trantibum sebesar 95% (kategori Tuntas Utama), Sub Urusan Kebencanaan sebesar 100% (kategori Tuntas Paripurna), dan Sub Urusan Damkar sebesar 100% (kategori Tuntas Paripurna). Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian jenis pelayanan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada **Grafik 4.5.1**.

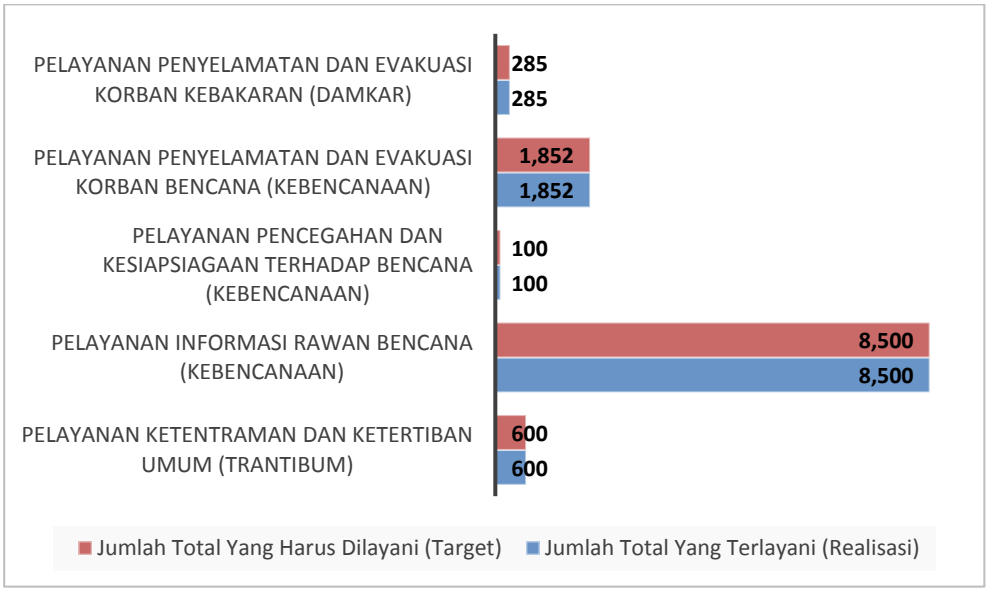

Grafik 4.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2023) dan BPBP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat seoptimal mungkin. Target setiap jenis layanan SPM terlayani, namun terdapat 3 (tiga) mutu pelayanan dasar pada Sub Urusan Trantibum yang belum tersedia. Hal ini dikarenakan faktor sebagai berikut:

a. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil

   Tidak terdapat dampak kerugian materiil karena pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dan bersifat humanis professional.

b. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan

   Tidak terdapat dampak kerugian karena pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dan bersifat humanis professional.

c. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

   Belum disusun standar pelayanan apabila terjadi dampak/gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 2.407.676.513.809,00 dengan nilai belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.365.176.513.809,00. Pendanaan atau alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan pagu setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.5.4

Tabel 4.5.4 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Tahun Anggaran 2022

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. BANTUL	2.365.176.513.809			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	26.620.793.992	1,13%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6.622.269.459		0,28%	24,88%
	A. TRANTIBUM	3.104.826.789			
	B. KEBENCANAAN	2.943.512.670			
	C. DAMKAR	573.930.000			
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	561.550.000			
	A. APBN	**0**			
	B. DAK	**0**			
	C. LAINYA	**561.550.000**			

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2023) dan BPBP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.5.5

Tabel 4.5.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.159.279.480	1.153.880.113	99,53%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	357.501.800	351.544.396	98,33%
3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	340.304.250	319.588.346	93,91%
4	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	414.547.000	406.830.350	98,14%
5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	962.500	935.000	97,14%
6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	35.407.000	35.407.000	100,00 %
7	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	222.130.000	216.500.000	97,47%
8	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	574.694.759	570.947.988	99,35%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
9	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	828.565.000	802.768.000	96,89%
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	447.995.000	381.378.000	85,13%
11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	776.330.000	736.148.000	94,82%
12	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	125.677.000	115.121.000	91,60%
13	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		10.235.000	8.600.000	84,03%
14	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	29.992.000	27.387.500	91,32%
15	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	100.650.000	99.773.000	99,13%
16	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	120.925.000	105.692.500	87,40%
17	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	28.350.000	21.285.000	75,08%
18	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	69.400.000	69.400.000	100,00 %
19	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	123.439.170	111.897.685	90,65%
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	15.000.000	5.619.910	37,47%
21	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	179.504.500	170.394.500	94,92%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10.000.000	10.000.000	100,00 %
23	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	48.180.000	48.180.000	100,00 %
24	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	17.500.000	17.500.000	100,00 %
25	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	15.000.000	14.325.000	95,50%
26	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	228.250.000	224.055.050	98,16%
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	80.000.000	78.471.869	98,09%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
28	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	5.000.000	5.000.000	100,00 %
29	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	25.000.000	23.575.000	94,30%
30	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	10.000.000	10.000.000	100,00 %
31	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		110.000.000	110.000.000	100,00 %
32	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	5.000,000	4.910.000	98,20%
33	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	5.000.000	4.805.000	96,10%
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	15.000.000	14.825.000	98,83%
35	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		87.450.000	83.103.000	95,03%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga		561.550.000	554.666.750	98,77%
				TOTAL	**7.183.819.459**	**6.914.514.957**	**96,25%**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2023) dan BPBP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.5.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat pada tahun 2022 melalui 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Satpol PP merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan BPBD merupakan perangkat daaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan pada Tabel 4.5.6 dan Tabel 4.5.7.

Tabel 4.5.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum Pada Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bidang	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sede	SMP/ Sede	SMA/	Di plo ma	S1	S2	S3
ASN												
Sekretariat	9	1	3	3	2	1	1	1	1	4	1	
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	9			9						9		
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	19		7	10	2			11	4	2	2	
Bidang Perlindungan Masyarakat	6			6				1		4	1	
NON ASN												
Sekretariat	10						1	5		3	1	
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5							4		1		
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	67							62	1	4		
Bidang Perlindungan Masyarakat	4							2		2		
Total	**129**	**1**	**10**	**28**	**4**	**1**	**2**	**86**	**6**	**29**	**5**	**0**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2023), diolah

Tabel 4.5.7 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan dan Pemadam Kebakaran Pada BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2022

	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sede rajat	SMP/ Sede rajat	SMA/ Sede rajat	Di plo ma	S1	S2	S3
ASN												
Kepala Pelaksana	1				1						1	
Sekretariat	10		3	6	1		1	4	1	2	2	
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	9		1	5	3		1	1	1	2	4	
Bidang Kedaruratan,	7	1	2	2	2	1	1	2		1	2	

	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2	S3
Logistik, dan Peralatan												
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5			4	1					3	2	
NON ASN												
Sekretariat	15							9		6		
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	6							1	1	4		
Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan	35							19	3	13		
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	98						2	81	2	13		
Total	**186**	**1**	**6**	**17**	**8**	**1**	**5**	**117**	**8**	**44**	**11**	**0**

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2023), diolah

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data

- Pengumpulan data sesuai format Permendagri No. 59 Tahun 2021 masih terkendala pada data kependudukan karena adanya pembatasan akses data kependudukan oleh Pusat.
- Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidentil yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara.

2) Penghitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan berbasis data belum dapat dilakukan karena pengumpulan data belum berjalan.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Penganggaran belum dapat dipenuhi sesuai perencanaan dikarenakan

keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

4) Pelaksanaan

- Sinergi lintas sektor belum optimal.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Segera mungkin melakukan pendataan apabila terjadi bencana.
- Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat.

2) Penghitungan kebutuhan

- Sinkronisasi antara perhitungan kebutuhan SPM dengan perencanaan dan anggaran.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Mengoptimalkan peran swasta atau pemangku kepentingan yang terkait untuk pemenuhan penerapan SPM di Kabupaten Bantul.

4) Pelaksanaan

- Koordinasi Tim Penerapan SPM secara berkala.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4.6.1**.

Tabel 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti
		3	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru
		4	Penyediaan permakanan
		5	Penyediaan sandang
		6	Penyediaan alat bantu
		7	Penyediaan perbekalan kesehatan
		8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
		9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar
		10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
		11	Akses ke layanan pendidikan
		12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		14	Layanan rujukan
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan
2		1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan permakanan

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	3	Penyediaan sandang
		4	Penyediaan alat bantu
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar
		8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
		9	Akses ke layanan pendidikan
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		12	Layanan rujukan
		13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang
		5	Penyediaan alat bantu
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar
		9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
		10	Akses ke layanan pendidikan
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		13	Layanan rujukan
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang
		5	Penyediaan alat bantu
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar
		9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak
		10	Akses ke layanan pendidikan
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		13	Layanan rujukan
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot	1	Penyediaan permakanan
		2	Penyediaan sandang
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan
		5	Pelayanan dukungan Psikososial

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 4.6.2 sebagai berikut**.**

Tabel 4.6.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	8.522
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Layanan data dan pengaduan	5.991
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	21
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	4 . Penyediaan permakanan	1.266
	5 . Penyediaan sandang	234
	6 . Penyediaan alat bantu	121
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	234
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1.266
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	312
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	38
	11 . Akses ke layanan pendidikan	6.851
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	8
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	13
	14 . Layanan rujukan	6.087
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	595
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Layanan data dan pengaduan	449
	2 . Penyediaan permakanan	285
	3 . Penyediaan sandang	265
	4 . Penyediaan alat bantu	2
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	265
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	595
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	68
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	14
	9 . Akses ke layanan pendidikan	396
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	26
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	22
	12 . Layanan rujukan	396
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	5.363
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Layanan data dan pengaduan	4.007
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	4

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	3 . Penyediaan permakanan	2.569
	4 . Penyediaan sandang	1.999
	5 . Penyediaan alat bantu	16
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1.999
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2.569
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	354
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10
	10 . Akses ke layanan pendidikan	4.764
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6
	13 . Layanan rujukan	4.244
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	45
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Layanan data dan pengaduan	44
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	4
	3 . Penyediaan permakanan	34
	4 . Penyediaan sandang	33
	5 . Penyediaan alat bantu	1
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	33
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	34
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	5
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta	1

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
	Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	
	10 . Akses ke layanan pendidikan	40
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	7
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	45
	13 . Layanan rujukan	40
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	750
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Penyediaan permakanan	750
	2 . Penyediaan sandang	89
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	64
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	64

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.6.3

Tabel 4.6.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	8.522	8.522	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	5.991	5.991	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	21	21	0	100,00%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100,00%
	4 . Penyediaan permakanan	1.266	1.266	0	100,00%
	5 . Penyediaan sandang	234	234	0	100,00%
	6 . Penyediaan alat bantu	121	121	0	100,00%
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	234	234	0	100,00%
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1.266	1.266	0	100,00%
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	312	312	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	38	38	0	100,00%
	11 . Akses ke layanan pendidikan	6.851	6.851	0	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	8	8	0	100,00%
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	13	13	0	100,00%
	14 . Layanan rujukan	6.087	6.087	0	100,00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100,00%
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	595	595	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	449	449	0	100,00%
	2 . Penyediaan permakanan	285	285	0	100,00%
	3 . Penyediaan sandang	265	265	0	100,00%
	4 . Penyediaan alat bantu	2	2	0	100,00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	265	265	0	100,00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	595	595	0	100,00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	68	68	0	100,00%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk,	14	14	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
	9 . Akses ke layanan pendidikan	396	396	0	100,00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	26	26	0	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	22	22	0	100,00%
	12 . Layanan rujukan	396	396	0	100,00%
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100,00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100,00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100,00%
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	5.363	5.363	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	4.007	4.007	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan	4	4	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti				
	3 . Penyediaan permakanan	2.569	2.569	0	100,00%
	4 . Penyediaan sandang	1.999	1.999	0	100,00%
	5 . Penyediaan alat bantu	16	16	0	100,00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1.999	1.999	0	100,00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2.569	2.569	0	100,00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	354	354	0	100,00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100,00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan	4.764	4.764	0	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	0	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	6	0	100,00%
	13 . Layanan rujukan	4.244	4.244	0	100,00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100,00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100,00%
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	45	45	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU				20,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	44	44	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	4	4	0	100,00%
	3 . Penyediaan permakanan	34	34	0	100,00%
	4 . Penyediaan sandang	33	33	0	100,00%
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100,00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	33	33	0	100,00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	34	34	0	100,00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	5	5	0	100,00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100,00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan	40	40	0	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	7	7	0	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	45	45	0	100,00%
	13 . Layanan rujukan	40	40	0	100,00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100,00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan	1	1	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru				
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				**100,00%**
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	750	750	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Penyediaan permakanan	750	750	0	100,00%
	2 . Penyediaan sandang	89	89	0	100,00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	0	100,00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	64	64	0	100,00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	64	64	0	100,00%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

Tabel 4.6.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan sosial pada jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di tahun 2022 dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id, indeks pencapaian SPM bidang urusan sosial tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian jenis pelayanan SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada **Grafik 4.6.1**.

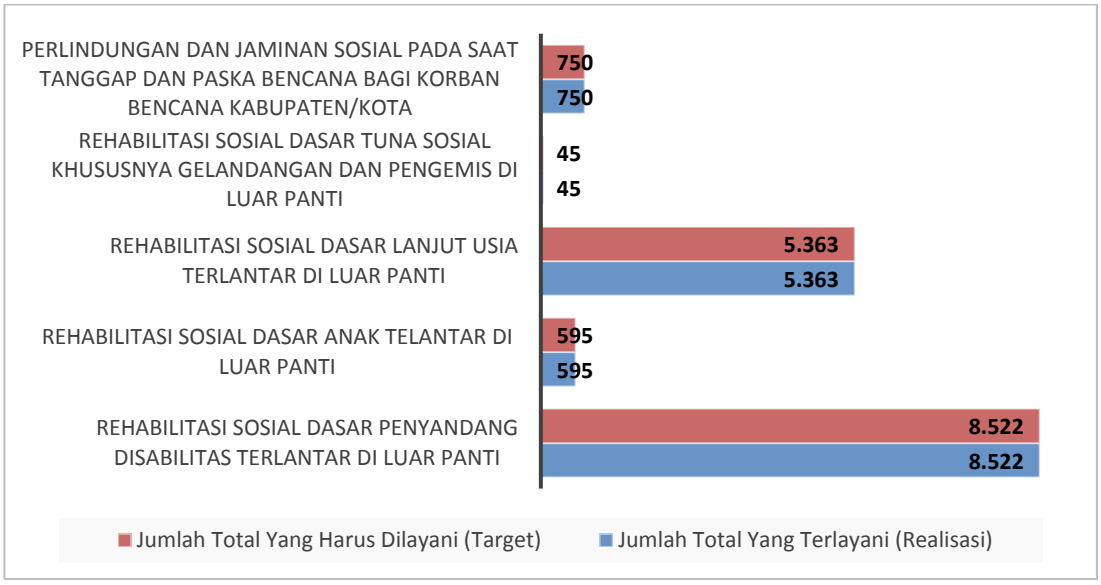

Grafik 4.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023,diolah

4.6.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 2.407.676.513.809,00 dengan nilai belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.365.176.513.809,00. Pendanaan atau alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 berdasarkan pagu setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.6.4.

Tabel 4.6.4 Perbandingan Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 Dengan Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Belanja APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. BANTUL	2.365.176.513.809			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	25.127.367.621	1,06%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	15.231.013.648		0,64%	60,62%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	0			
	A. APBN	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINYA	0			

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.6.5

Tabel 4.6.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan	Orang	6.663.755.037	6.648.412.838	99,77%
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Penyediaan sandang	Orang	153.000.000	152.816.000	99,88%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan alat bantu	Orang	14.125.000	14.125.000	100,00%
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	21.575.000	21.575.000	100,00%
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	594.415.080	589.432.340	99,16%
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	2.000.000	2.000.000	100,00%
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	78.633.048	76.681.944	97,52%
8	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	78.633.048	76.681.944	97,52%
9	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	63.350.000	63.150.000	99,68%
10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	502.507.120	464.365.960	92,41%
11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	129.272.032	129.097.696	99,87%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
12	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	9.750.000	9.750.000	100,00%
13	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	Orang	285.991.500	266.501.500	93,19%
14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan sandang	Orang	12.275.000	12.235.000	99,67%
15	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	5.075.000	5.000.000	98,52%
16	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5.550.000	5.475.000	98,65%
17	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	15.500.000	15.500.000	100,00%
18	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		31.769.500	31.769.500	100,00%
19	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		248.658.550	248.658.550	100,00%
20	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		225.800.000	225.798.500	100,00%
21	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		342.296.209	342.195.948	99,97%
22	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahtraan keluarga (LK3)		13.050.000	13.047.900	99,98%
23	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan		113.370.000	110.545.000	97,51%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan (Rp)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kampung Siaga Bencana				
24	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		229.745.595	225.434.230	98,12%
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		207.828.250	207.800.750	99,99%
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		753.437.596	750.916.196	99,67%
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		581.828.128	578.418.878	99,41%
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		3.847.822.955	3.830.122.532	99,54%
				TOTAL	**15.231.013.648**	**15.117.508.206**	**99,25%**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023

4.6.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai Dinas Sosial yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial ditunjukkan dalam Tabel 4.6.6 berikut.

Tabel 4.6.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bidang	Jumlah	Golongan				Tingkat Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	S1	S2	S3
ASN												
Kepala Dinas	1				1						1	
Sekretaris Dinas	1				1						1	
Sekretariat	1			1						1		
Bidang Rehabilitasi Sosial	8			6	1				3	4	1	
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	8			7	1				2	3	3	
Bidang Pemberdayaan Sosial	3			2	1					3		
NON ASN												
Sekretariat	1									1		
Bidang Rehabilitasi Sosial	30							18	4	8		
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	20									20		
Bidang Pemberdayaan Sosial	3							1		2		
Total	**76**	**0**	**0**	**17**	**5**	**0**	**0**	**19**	**9**	**42**	**6**	**0**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023), diolah

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan SPM bidang urusan sosial. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu kendala terlaksananya penerapan SPM bidang urusan sosial secara optimal. Dalam rangka menekan kendala yang ada dan mengoptimalkan capaian penerapan SPM bidang urusan sosial, dilakukan kerjasama dengan mitra dan relawan sosial yang merupakan bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu diantaranya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat), Program Keluarga Harapan (PKH), Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), dan mitra-mitra lainnya. Mitra PSKS yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 ditunjukkan pada

Tabel 4.6.7.

Tabel 4.6.7 Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022

Mitra PSKS Tahun 2022	Jumlah
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17 orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	117 orang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	17 orang
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	208 orang
Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	17 lembaga
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	631 orang
Karang Taruna	93 lembaga
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	62 lembaga
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	78 lembaga
Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	19 orang
Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial	4 orang
Pekerja Sosial Shelter	2 orang
Tim Reaksi Cepat (TRC) penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	12 orang
Anggota Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	16 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023)

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data

- Pemutakhiran data di kabupaten dilakukan setiap satu semester, dan dalam pemutakhiran data ini dapat terjadi perubahan data, seperti warga yang meninggal, pindah dan lain-lain.
- Aplikasi SIAP KESOS yang dibangun oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul sebagai salah satu upaya perbaikan dalam sistem pendataan belum berfungsi optimal pada tahun 2021.
- Data kedaruratan/data sosial (data PPKS/PMKS) bersifat dinamis sementara diamanatkan untuk menentukan target/sasaran di awal tahun.

2) Penghitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan PMKS sejauh ini dilakukan dengan melihat tren

PMKS dan ketersediaan buffer stock karena data PMKS merupakan data berjalan serta cepat mengalami perubahan terkait dengan kepindahan, cacat, dan kematian.

- Terdapat kendala pada penghitungan kebutuhan komponen biaya alat bantu, sementara alat bantu tertentu merupakan alat bantu yang spesifik disesuaikan dengan kebutuhan penerima alat bantu.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Menemui kesulitan dalam menentukan perencanaan target karena data PPKS/PMKS bersifat dinamis.
- Penganggaran belum dapat dipenuhi sesuai perencanaan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

4) Pelaksanaan

- Target sasaran mengalami perubahan pada akhir tahun anggaran karena kebutuhan di lapangan yang sifatnya dinamis.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat kabupaten, lembaga, sampai dengan kalurahan.
- Menunjuk petugas admin data pada mitra kerja.

2) Penghitungan kebutuhan

- Melakukan penghitungan kebutuhan ulang disesuaikan dengan *database* yang telah dimutakhirkan.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Mengoptimalkan peran swasta atau pemangku kepentingan yang terkait untuk pemenuhan penerapan SPM di Kabupaten Bantul.

4) Pelaksanaan

- Menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dan data yang telah dimutakhirkan.

4.7. Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

4.7.1. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pendidikan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2022 ditunjukkan dalam **Tabel 4.7.1**.

Tabel 4.7.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peserta didik
2.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidik dan tenaga kependidikan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta didik
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidik dan tenaga kependidikan
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Peserta didik
6.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

4.7.2. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Kesehatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan kesehatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 ditunjukkan dalam **Tabel 4.7.2**.

Tabel 4.7.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan pelayanan	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kesehatan Ibu Bersalin	
3.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
4.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
5.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
6.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
7.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
8.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
9.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang
10.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
11.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
12.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
13.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
14.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit
15.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	Paket
16.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

4.7.3. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 ditunjukkan dalam **Tabel 4.7.3**.

Tabel 4.7.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/peningkatan/per luasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

4.7.4. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 ditunjukkan dalam **Tabel 4.7.4**.

Tabel 4.7.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

4.7.5. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 ditunjukkan dalam **Tabel 4.7.5**.

Tabel 4.7.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus
3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
4	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
7	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
8	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
9	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang
11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
12	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
13	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	
14	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang
15	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
16	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
17	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
18	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
19	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen
21	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
23	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
24	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
25	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
26	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
28	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
29	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
30	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
31	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	
32	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
33	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan
35	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2023) dan BPBD Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

4.7.6. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Sosial

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 ditunjukkan dalam **Tabel 4.7.6**.

Tabel 4.7.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan	Orang
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan sandang	Orang
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan alat bantu	Orang
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
8	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
9	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
12	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
13	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	Orang
14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan sandang	Orang
15	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
16	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
17	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahtraan keluarga (LK3)	
23	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
24	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2023) dalam Laporan Triwulan IV TA 2022, https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diunduh 29 Januari 2023, diolah

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan perwujudan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah dan pemenuhan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah disusun berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/ 9136/ OTDA tanggal 19 Desember 2022, serta Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Sebagai penutup, LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun-tahun selanjutnya supaya pencapaian kinerja menjadi lebih optimal sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan dapat menjadi sebuah hasil yang bermanfaat, diberikan catatan dan rekomendasi yang membangun, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

LAMPIRAN